LAPORAN KINERJA

Tahun 2024



BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024.



Yudi Noviandi, M.Sc. Tech., Apt
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas kami dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas sesuai dengan DIPA tahun 2024, yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Selama lima tahun terakhir periode kinerja 2020-2024, kami telah menerapkan pola kinerja efektif dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis terkini. Perubahan pada peta strategis, penambahan indikator kinerja, serta penyesuaian terhadap isu strategis yang berkembang merupakan upaya adaptasi kami dalam menghadapi dinamika regulasi dan tantangan di lapangan.

Dengan penuh kebanggaan dan antusiasme, kami menyajikan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran DIPA tahun 2024. Kami telah menyelesaikan berbagai program dan kegiatan untuk memberikan kinerja terbaik, yang tercermin dalam pencapaian **11 sasaran kegiatan dan 34 Indikator Kinerja**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh telah berhasil memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan sebesar 107,22 dengan **kategori Istimewa** dimana realisasi anggaran sebesar Rp 27,099,746,842 atau 99,49 persen dari alokasi DIPA Tahun 2024 dengan tingkat efisiensi anggaran (TE) sebesar 0,08.

Balai Besar POM di Banda Aceh mencatat beberapa pencapaian membanggakan di tahun 2024. Diantaranya adalah sebagai Unit Penyelenggara **Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima** dari Badan POM pada November 2024 dan memperoleh pencapaian **Nilai AKIP 2024** sebesar 81,48 dengan **predikat A** yang meningkat dari tahun 2023 yang bernilai 79,48. Kami juga berhasil membina **MIN 36 Aceh Besar mendapatkan Predikat Juara ke-2 Penghargaan PJAS tahun 2024.**

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi mendukung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh untuk melaksanakan tugas penting dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar di pasar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat dengan **strategi pencegahan, pengawasan, dan penindakan** yang diperkuat dengan internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi melalui slogan **KolaborAksi Siap WBBM**.

Kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat menjadi referensi yang dapat diandalkan bagi organisasi dalam merencanakan langkah-langkah untuk peningkatan kinerja organisasi dan meningkatkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memberikan informasi kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan berkah, kesempurnaan, dan kemudahan dalam setiap usaha kita dengan semangat sinergi dan transformasi untuk selalu mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Badan POM mewujudkan Indonesia emas 2045.

Banda Aceh, 21 Februari 2025
Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Banda Aceh,



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja tahun 2024 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (Balai Besar POM di Banda Aceh) telah disusun dan merupakan perwujudan akuntabilitas Balai Besar POM di Banda Aceh. Laporan ini memberikan uraian dan penjelasan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi dan penjelasan yang memadai atas capaian Sasaran Kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada tanggal 22 Desember 2023 telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang memuat 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IK) untuk mencapai 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan. Ketiga level perspektif yang dicapai sesuai dengan Renstra 2020-2024 menunjukkan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) sebesar 107,22 dengan predikat Istimewa.

Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh periode 2020-2024 ditetapkan berdasarkan Keputusan dari Kepala Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (UPT) nomor HK.02.02.91.911.06.20.683 pada 2 Juni tahun 2020. Selama lima tahun periode Renstra, UPT menerapkan pola kinerja efektif dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pencapaian target kinerja yang telah disusun berdasarkan Renstra terkini. Perencanaan yang dilakukan sudah mengacu pada Renstra terkini dan Pimpinan telah melakukan dialog kinerja kepada fungsi-fungsi di UPT sehingga kinerja organisasi dapat diukur dan dinilai dengan baik secara akuntabel.

Terdapat perubahan pada peta strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 sehingga perlu melakukan beberapa perubahan Renstra. Dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi BPOM terkait perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menetapkan sebelas sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja di tahun 2020.

Kinerja yang digambarkan dalam peta strategi mengalami perubahan yaitu berupa penambahan indikator yang semula terdapat 11 sasaran kegiatan dengan 28 indikator menjadi 11 sasaran kegiatan dengan 30 indikator di tahun 2021 dan telah ditetapkan dalam Keputusan kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor HK.02.01.1A.1A5.12.21.433 tanggal 23 Desember 2021.

Terdapat penambahan atau perubahan Renstra berupa penambahan indikator kinerja persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di tahun 2021 dan persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di tahun 2022. Perubahan nomenklatur indikator "Pasar aman dari Bahan Berbahaya" menjadi "Pasar Pangan Aman berbasis komunitas" di tahun 2022 merupakan kebijakan Pusat yang dilakukan karena adanya perubahan isu strategis yang dihadapi oleh pasar dimana awalnya hanya isu terkait Bahan Berbahaya menjadi isu cemaran mikrobiologi yang perlu penanganan dan pengawasan lebih intensif.

Indikator kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banda Aceh dihilangkan pada tahun 2022 dikarenakan secara umum sudah tercakup dalam indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sehingga jumlah indikator kinerja di tahun 2022 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) indikator.

Pada tahun ketiga Renstra, dilakukan reviu Renstra sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh nomor HK.02.01.1A.1A5.12.23.281 Tahun 2023 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. Berdasarkan reviu target yang dilakukan oleh Unit Pengampu dan Biro Perencanaan BPOM, terdapat 5 (lima) penambahan indikator kinerja sehingga menjadi berjumlah 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja.

Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat berhasil dicapai dengan sangat baik dengan capaian 102,22 persen. Beberapa Risiko sudah dikelola sepanjang periode 2020 hingga 2024. Adanya peristiwa risiko berupa produk yang tidak memenuhi syarat akibat rendahnya pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di Aceh dikendalikan dengan meningkatkan pendampingan CPPOB pada produsen dan aktif melakukan operasi hukum atau penindakan terhadap produsen yang menggunakan bahan berbahaya dalam Pangan.

Tabel 1. Capaian Sasaran Kegiatan 1 tahun 2024

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat			**102,22**
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9	95,69	100,83
Persentase Makanan yang memenuhi Syarat	89,2	94,07	105,46

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,3	93,04	98,66
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,7	89,15	99,39
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90	96,10	106,78

Selain itu, kerusakan insidentil pada instrumen pengujian yang intensitas penggunaannya tinggi seperti HPLC, ICP, GCMS, Water Purification akibat Pemeliharaan peralatan laboratorium yang dilakukan tidak secara rutin sesuai jam penggunaan alat berhasil dikurangi dengan melakukan Perencanaan penambahan anggaran untuk perawatan alat dan dukungan dari Pusat melalui pengusulan penambahan anggaran perawatan alat kepada Sestama Badan POM.

SASARAN KEGIATAN 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Kegiatan 2 ini mencakup dua kegiatan penting yang berkaitan erat dengan perspektif publik terhadap kinerja Badan POM. UPT memiliki tiga fungsi utama yang erat kaitannya dengan proses bisnis UPT dalam melakukan persetujuan izin edar dan pengawasan produk yang beredar yaitu Inspeksi, Sertifikasi, dan Layanan Publik. Di akhir periode renstra, kinerja sasaran kegiatan ini berhasil menorehkan capaian yang sangat baik yaitu 106,60 persen. Indeks Pelayanan Publik (IPP) mendapat skor 4,9 yag melampaui target 4,45 di tahun akhir Renstra. IPP yang membaik ini didukung oleh capaian yang sangat baik pada tujuh indikator kinerja fungsi inspeksi dan sertifikasi.

Tabel 2. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2024

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik			**109,10**
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,3	82,91	119,64
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	71,7	82,28	114,76

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	85,5	90,16	105,45
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4,45	4,90	110,11
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100,00	100,00
Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi Makanan Minuman serta program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten /Kota	95	97,71	102,85

SASARAN KEGIATAN 3 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dilakukan dengan berbasis komunitas yang didukung oleh pemanfaatan teknologi media sosial dan informasi yang optimal.

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan **100,33**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	94,9	96,15	101,32
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	88	88,00	100,00
Jumlah desa pangan aman	32	32,00	100,00
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	24	24,00	100,00

Keberhasilan dalam capaian nilai Indeks Efektifitas KIE dikarenakan tema yang diangkat merupakan hal yang sangat ingin diketahui masyarakat serta keragaman materi yang disampaikan mampu menarik minat dari masyarakat. Dengan adanya konten yang dibuat sangat membantu dalam meningkatkan follower dan engagement media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh. Balai Besar POM di Banda Aceh terus senantiasa bekerja demi mewujudkan keamanan Obat dan Makanan di seluruh lapisan masyarakat melalui informasi yang diberikan dari berbagai media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh.

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan

Sebanyak 1334 sampel Obat dan 560 sampel Pangan telah berhasil di periksa dan diuji di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh sesuai dengan standar. Komunikasi yang baik antara tim penguji dengan tim inspeksi di Balai Besar POM di Banda Aceh maupun balai regional lain terkait sampling dan kemampuan uji laboratorium sehingga dapat dipastikan sampel yang masuk ke Balai Besar POM di Banda Aceh dapat diuji. Rekomendasi dalam Laporan Kinerja tahun 2023 Pemanfaatan sistem logistik yang interoperable antar UPT Regional, APRESIASI, ditindaklanjuti dengan implementasi secara optimal dan telah mampu meningkatkan performa pengujian sehingga isu keterbatasan penyediaan reagensia telah dapat diatasi yang memberikan dampak kinerja Pengujian yang optimal sehingga Sampel Obat dan Makanan selesai diperiksa dan diuji 100% di Tahun 2024 tanpa adanya peristiwa *carry over* Sampel

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 4 Tahun 2024

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan			**120,00**
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	120,00
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	120,00

Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Pada triwulan 3, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mendapatkan informasi kasus dari Direktorat Intelijen Badan POM yang langsung ditindaklanjuti dengan penindakan tanpa perlu didahului investigasi. Tindak lanjutnya berupa dua perkara tindak pidana yang terdiri dari tindak pidana produk Psikotropika dan Obat-obat Tertentu (Tramadol).

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 5 Tahun 2024

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan			**121,95**
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	82	100,00	121,95

Lini masa penemuan perkara baru yang singkat ini membuat kegiatan penindakan menjadi lebih cepat sehingga komponen penyelesaian perkara di triwulan 3 dan 4 dapat direalisasikan lebih cepat. Selain itu, penyidik juga melakukan penahanan tersangka dengan koordinasi penyidik POLDA Aceh di akhir triwulan 3 yang secara langsung berpengaruh kepada penyelesaian perkara yang intensif di akhir tahun 2024. Dukungan pimpinan terhadap hal diatas memberikan dampak signifikan peningkatan capaian kinerja dengan capaian 121,95 persen jauh melebihi target 82 persen di tahun 2024.

Kegiatan dukungan informasi dari Intelijen Badan POM ketika ada produk Obat dan Makanan yang akan masuk ke wilayah Aceh akan berkelanjutan di tahun 2025 dan akan diimbangi dengan penyesuaian target kinerja lebih akurat dan akomodatif terhadap perubahan proses bisnis keluaran indikator yang terbukti sangat dinamis di tahun 2024.

SASARAN KEGIATAN 6 MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh merealisasikan belanja sebesar Rp1.135.444.000,- (satu milyar serratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sebagai dukungan langsung penguatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan di tahun 2024. Dukungan anggaran ini efektif menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemenuhan standar GLP sebesar 87,75 persen yang sedikit diatas target 82% di tahun ini.

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 6 Tahun 2024

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan			**100,43**
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	87	87,75	100,86
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	3	3	100,00

Salah satu risiko utama yang berhasil diidentifikasi yaitu sering terjadinya gangguan server atau jaringan eror. Risiko ini berhasil dikendalikan secara baik dengan penambahan kapasitas jaringan dan memperbaharui sarana/prasarana IT. Sebagai tambahan, tim IT juga aktif melakukan pengawasan penggunaan perangkat lunak terkait keaslian dan umur pakai dan selalu mengedukasi pegawai

untuk melakukan pelaporan berbasis aplikasi dengan memperhatikan ketepatan waktu pelaporan.

Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan

Indeks Kesadaran Masyarakat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh tahun 2023 adalah 82,61. Nilai indeks ini memang tidak terpaut jauh dari target tahun 2024 sebesar 84, namun memerlukan strategi yang tepat dan berkesinambungan selama setahun penuh agar masyarakat terpapar secara luas dan baik terkait persepsi yang benar tentang keamanan Mutu Obat dan Makanan.

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan 7 Tahun 2024

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan			**100,54**
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Indeks kesadaran mesyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	84	84,45	100,54

Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh berhasil diperoleh dengan nilai indeks 84,45 sedikit di atas target tahun 2024. Keberhasilan ini ditunjang oleh pengendalian risiko kegagalan pencapaian target melalui pemilihan dan pengelolaan informasi kinerja secara luas dengan ragam media dan meningkatkan jumlah tayangan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh telah menayangkan 1267 layanan informasi melalui kanal media sosial tersebut dengan topik antara lain Pangan Aman tanggungjawab bersama, Kosmetik Aman, Obat Tradisional Aman, Suplemen Kesehatan Aman, Cek KLIK, Klarifikasi BPOM tentang berbagai kasus Obat dan Makanan, Penggunaan Obat secara Rasional, BPOM Bergerak Menindak, Perangi Penyalahgunaan Obat, Kolaborasi pengawasan Obat dan Makanan, dll. Selain itu Balai Besar POM di Banda Aceh juga selalu menayangkan infografis dan video informasi pada kegiatan kegiatan yang melibatkan masyarakat atau lintas sektor.

Sasaran Kegiatan 8 Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini telah dicapai sangat baik dengan nilai capaian 102,92 persen. Keberhasilan ini didukung oleh upaya yang berkesinambungan mempertahankan persepsi baik dari pihak eksternal dengan menjalankan *core business* pengawasan dan layanan kepada stakeholder secara profesional dan menerapkan standar layanan sepanjang tahun 2024. Dukungan kegiatan KIE yang efektif (efektifitas KIE 96,15 persen) juga terbukti mampu mempertahankan persepsi yang baik pada masyarakat akan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat berhasil dicapai melampaui target.

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 8 Tahun 2024

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan			**102,92**
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,2	99,49	103,42
Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,6	80,37	104,92
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	98,25	98,65	100,41

Raihan indeks Kepuasan Pelaku Usaha tahun 2024 telah melampaui target dan sejalan dengan dukungan dari Sasaran Kegiatan Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan yang memiliki lingkup kegiatan pemberian bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha produksi dan distribusi produk Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang Optimal

Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh meningkat 2 poin bila dibandingkan perolehan tahun 2023, namun belum mampu mencapai target. Nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mengalami penurunan 1,6 poin dan berkontribusi kegagalan pencapaian target nilai AKIP di tahun ini. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum menyajikan Evaluasi atas Pelaksanaan Program/Kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan dan rencana tindak lanjutnya.

Tabel 9. Capaian Sasaran Kegiatan 9 Tahun 2024

Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal			**99,65**
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	88,64	87,49	98,70
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82,4	81,48	98,88
Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,08	95,35	101,35

Selain Nilai AKIP, Indeks RB juga tidak mencapai target di tahun ini. Komponen pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik turun tajam 2,42 poin yang berkontribusi terhadap kegagalan pencapaian target indeks RB tahun ini. Kegagalan ini telah diidentifikasi bahwa inovasi pada kelompok kerja Pelayan Publik dijalankan tanpa ada nilai kebaruan dan hanya menjalankan inovasi/kegiatan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya. Telah disepakati bahwa akan menindaklanjuti rekomendasi pembaruan melalui peningkatan lingkup keluaran inovasi yang lebih berdampak pada masyarakat di tahun 2025.

Realisasi anggaran dukungan Sasaran Kegiatan 9 mencapai 99,84 persen di tahun ini. Meskipun tidak mencapai target Sasaran Kegiatan, sumber daya anggaran yang dibelanjakan masih efisien dengan tingkat efisiensi TE 1,00.

Sasaran Kegiatan 10 Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal

Pola penilaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) mengalami perubahan di tahun 2024. Hal ini berdampak pada perubahan nilai indeks IP ASN menurun.

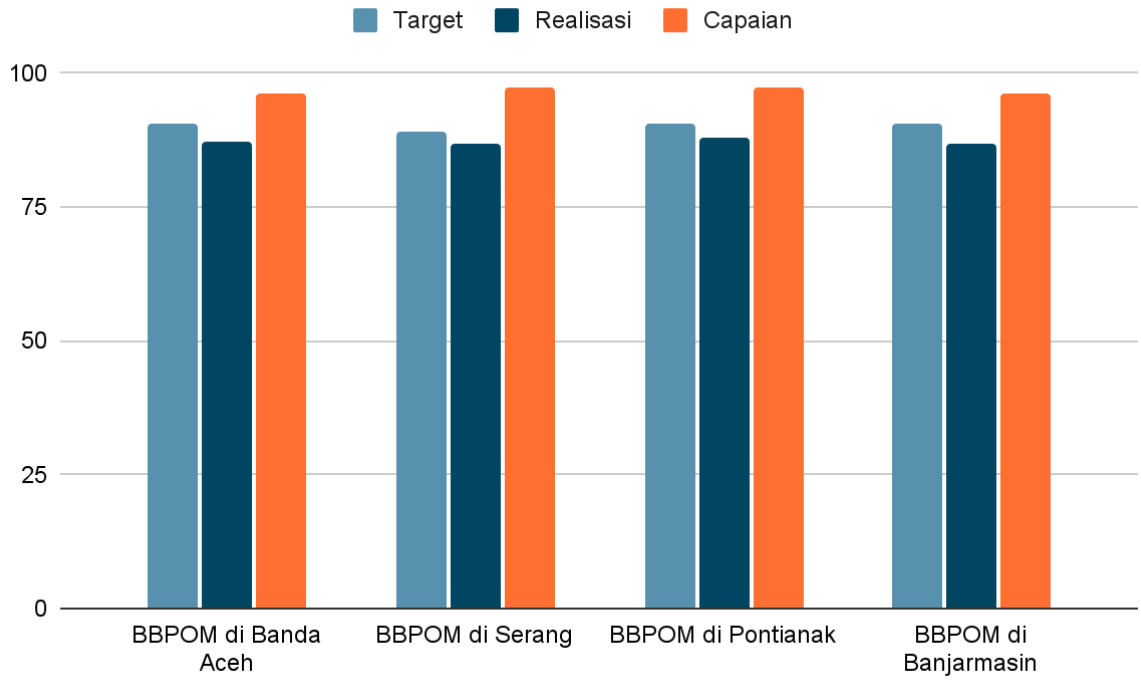
Tabel 10. Capaian Sasaran Kegiatan 10 Tahun 2024

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal			**96,27**
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	90,52	87,14	96,27

Penilaian komponen Kompetensi dipengaruhi oleh Hasil penilaian kinerja dimana nilai kinerja sangat baik memberikan nilai penuh dan berkurang sesuai kategori penilaiannya. Penilaian kinerja berpengaruh langsung terhadap nilai komponen

kompetensi sehingga pada komponen ini hampir semua pegawai mengalami penurunan nilai sebanyak 5 poin dan berdampak pada Indeks IP ASN.

Tren menurun ini juga dialami oleh UPT lain dalam satu klaster yaitu Untuk mengatasi kegagalan di tahun kinerja 2025, telah dilakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut melakukan pengusulan penyesuaian target tahunan pada tahun 2025 mengacu pada pembobotan komponen penilaian sesuai dengan standar terkini. Dengan realisasi anggaran yang tercapai 99,90 persen, maka pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan 10 dinilai tidak efisien.



Grafik 1 . *Capaian Sasaran Kegiatan 10 di Klaster 4 Tahun 2024*

UPT lain dalam satu klaster juga tidak mampu mencapai target dimana dari empat UPT dalam klaster 4 tidak ada satupun yang memenuhi target. Untuk mencegah kegagalan di tahun kinerja 2025, telah dilakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut melakukan pengusulan penyesuaian target tahunan pada tahun 2025 mengacu pada pembobotan komponen penilaian sesuai dengan standar terkini. Mengacu kepada informasi terkini dari data kinerja Simetris bahwa Sasaran Kegiatan 10 tidak dimasukkan dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) dikarenakan semua satker Badan POM tidak ada satupun yang berhasil mencapai target kinerja tahun 2024

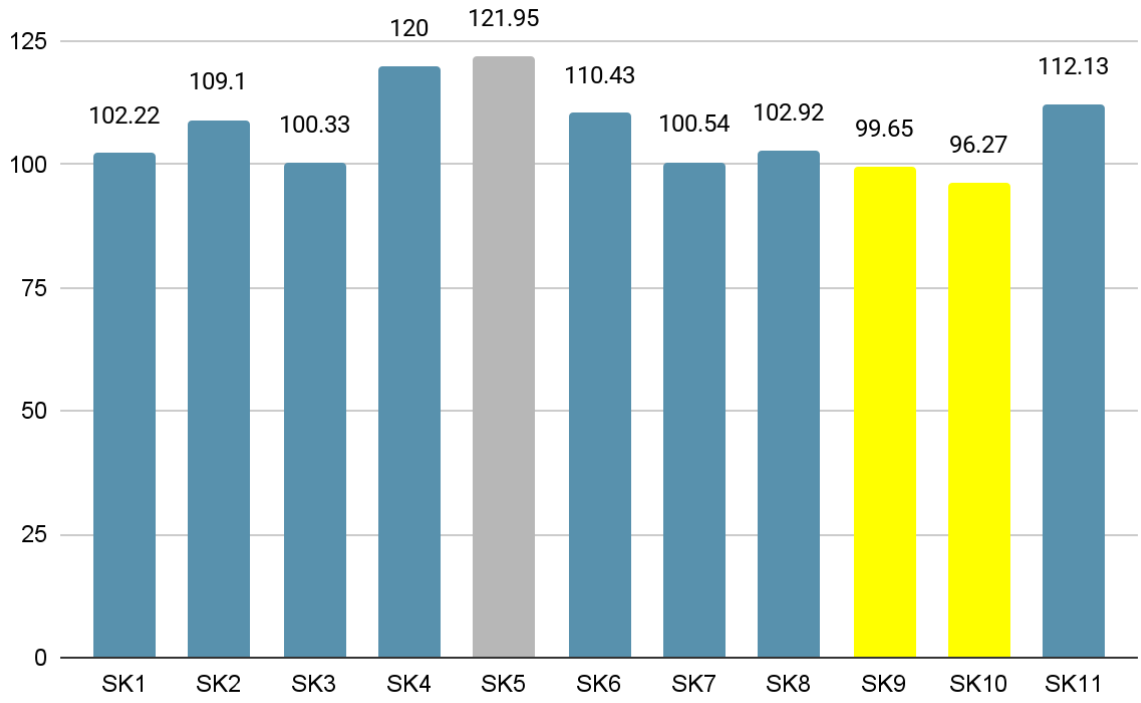
SASARAN KEGIATAN 11 TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH SECARA AKUNTABEL

Sasaran Kegiatan ini mampu dicapai dengan sangat baik. Namun menjadi catatan pada indikator kinerja persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri yang melampaui target melebihi dari 120%. Pemilihan paket pengadaan belanja PDN sangat tinggi dan melebihi target perencanaan belanja PDN yang diumukan di RUP. Indikator ini muncul di tahun 2024 dan memiliki potensi terhadap kesalahan dalam Kelola kinerja.

Tabel 11. Capaian Sasaran Kegiatan 11 Tahun 2024

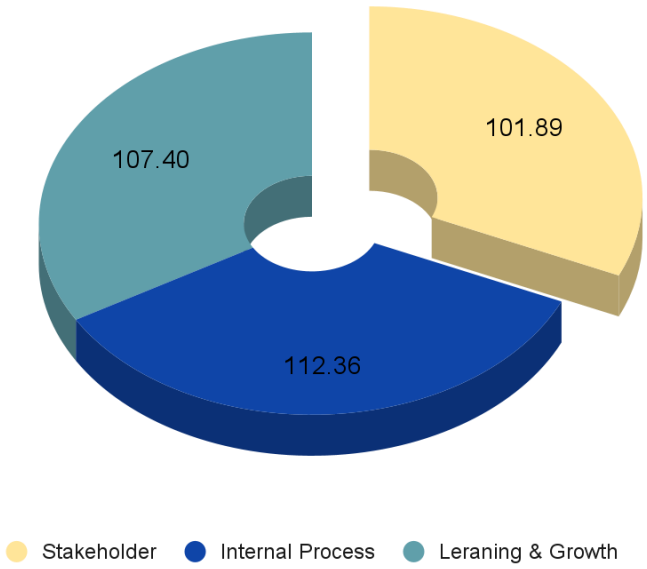
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel			**113,27**
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**%Capaian**
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	89,87	95,36	106,11
Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa	83,33	100,00	120,00
Nilai pengelolaan BMN di Balai Besar POM di Banda Aceh	89	91,14	102,40
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam negeri	60	74,73	124,55

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) memperoleh capaian yang sangat baik. Meningkat jauh dibandingkan capaian tahun 2023 dengan perolehan capaian 97,64 persen. Informasi kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa rendahnya capaian di tahun 2023 disebabkan oleh Deviasi halaman III DIPA yang besar dan nilai EKA yang rendah. Berbagai upaya perbaikan dilakukan di tahun 2024 dan hasilnya tidak terjadi lagi deviasi halaman III yang besar dan EKA yang membaik. Dampaknya nilai NKA tahun 2024 dapat meningkat tinggi.



Grafik 2.Profil Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2024

NILAI PERSPEKTIF



Grafik. 3Nilai Perspektif Tahun 2024

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh berhasil mengimplementasikan tata kelola kinerja dengan sangat baik dengan keberhasilan mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 107,22. Meskipun Nilai Perspektif Stakeholder memiliki capaian terendah, namun masih tetap dipertahankan dengan kategori yang sangat baik. Perspektif Internal Process memiliki capaian tertinggi dengan menyumbang 35,2 persen Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan di tahun 2024.

EFISIENSI ANGGARAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mengalokasikan Anggaran DIPA tahun 2024 sebesar Rp27,238,605,000 yang telah dibelanjakan dengan **realisasi anggaran 99,49 persen** sebesar Rp27,099,746,842 dengan perolehan **Nilai Pencapaian Sasaran 107,22** kategori **Istimewa**. Ini menunjukkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh telah **efisien** melakukan Pengelolaan Kinerja dengan **tingkat efisiensi TE sebesar 0,08**.

Keberhasilan di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah cerminan komitmen yang tinggi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh untuk memenuhi target Sasaran Kegiatan secara efektif dan efisien untuk menjalankan Visi dan Misi Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja.

HIGHLIGHT KINERJA

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2024 guna mendukung perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan.

Triwulan I



Koordinasi bersama BNN merupakan salah satu wujud tugas Satgas Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) disamping aktif dalam menyusun serta melaksanakan P4GN secara mandiri, perlu juga dilakukan **edukasi kepada masyarakat umum** sehingga dalam pertemuan ini disepakati langkah yang akan dilakukan secara sinergi dalam mengawal P4GN di Provinsi Aceh.



BPOM Aceh berupaya meningkatkan nilai ekonomi berupa **pemastian kualitas pangan yang beredar** di tengah masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan pendampingan dalam pengolahan makanan. Intervensi ini diprioritaskan kepada keluarga berisiko stunting, remaja putri dan calon pengantin dalam meningkatkan persepsi dan pemahaman terkait pangan aman dan bergizi.



Pertisaka POM merupakan suatu wadah pendidikan bagi anggota pramuka satuan karya Pengawas Obat dan Makanan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dengan semangat persatuan dan persaudaraan agar terciptanya kader-kader POM yang mampu **menjadi pelopor Keamanan Pangan** di wilayahnya masing-masing.



Bank Indonesia bersama Bank Aceh dan Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk **mendorong pertumbuhan sarana warkop dan UMKM binaan BPOM Aceh** dengan menjadikan prioritas utama dalam penggunaan serta pengurusan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).



BPOM X DINKES ACEH, TINGKATKAN KOMPETENSI PETUGAS PENGAWASAN SARYANFAR

Materi Bimtek terkait Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di saryanfar termasuk Pengawasan Peredaran Obat.



PASTIKAN KEAMANAN DAN MUTU PRODUK, BPOM ACEH LAKUKAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN SARANA KOSMETIK SE ACEH

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa dari total 22 (dua puluh dua) sarana kosmetik yang diperiksa, 15 (lima belas) sarana memenuhi ketentuan (MK), sementara 7 (tujuh) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK), dimana (satu) klinik dan 3 (tiga) reseller/toko menjual produk kosmetik tanpa izin edar dan 3 (tiga) reseller/toko lainnya menjual kosmetik mengandung Bahan Berbahaya.



BPOM ACEH BERSAMA SAKA POM GANDENG LINTAS SEKTOR, AWASI SARANA DISTRIBUSI PANGAN DAN TAKJIL

Sampling takjil yang dilakukan berupa jajanan Ramadhan seperti mie goreng, tahu goreng, minuman berwarna, dan lain lain yang selanjutnya diuji melalui pengujian cepat terhadap parameter bahan berbahaya boraks, formalin, metanil yellow dan rhodamin B.



TINJAU DAN KAJI ULANG MANAJEMEN, DEMI TINGKATKAN PENGAWASAN DAN LINDUNGI MASYARAKAT

Tinjauan dan kaji ulang manajemen bertujuan **untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap obat dan makanan** demi melindungi masyarakat hingga pelosok negeri. Dalam pelaksanaan akan ditingkatkan kolaborasi bersama lintas sektor demi mewujudkan dan memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di pasaran.



BPOM ACEH KUNJUNGI PULAU TERLUAR ACEH, BANTU TEKAN STUNTING LEWAT PRO PN

Untuk mencegah dan menurunkan angka stunting dilakukan **intervensi keamanan pangan**. Kegiatan untuk menekan stunting sangat diperlukan kerja sama dan sinergitas yang solid antar instansi pemerintah.



BPOM ACEH LANJUTKAN ADVOKASI, TURUNKAN STUNTING DI PULAU TERLUAR ACEH

Pemerintah daerah diharapkan memiliki komitmen yang baik terhadap keamanan pangan dalam rangka **melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko** terhadap kesehatan.



POM ACEH AWASI SARANA DISTRIBUSI PANGAN DAN TAKJIL, PASTIKAN PANGAN AMAN PUASA NYAMAN

Pengawasan melibatkan SAKA POM untuk melakukan **sampling, pengujian, dan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)** terkait obat dan makanan kepada masyarakat dan pedagang.

Triwulan II



INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN SELAMA RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1445 H

Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh indonesia **melakukan konferensi pers mengenai hasil pengawasan pangan selama Ramadhan 1445 H** secara serentak melalui daring ataupun luring di Jakarta tanggal 01 April 2024. BPOM Aceh berhasil mengamankan 478 bungkus Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang mengandung Boraks di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Barat.



DUKUNG PON XXI SUMUT - ACEH 2024, BPOM TINGKATKAN KEAMANAN PANGAN WARKOP SE ACEH

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa dari total 10 warkop di daerah merduati dan lampaseh, 4 warung kopi menjual produk teh hijau Thailand yang tanpa izin edar (TIE) dan 1 warkop menjual kerupuk tempe yang **dicurigai mengandung bahan berbahaya Boraks.**



BPOM ACEH MUSNAHKAN BORAKS DAN PRODUK ILEGAL

Produk yang dimusnahkan diantaranya Bahan Tambahan Pangan (BTP) mengandung bahan berbahaya yaitu boraks sebanyak 1346 bungkus, kerupuk tempe mengandung boraks (1 karung) dan produk pangan TIE berupa teh hijau Thailand (72 bungkus). Obat Tradisional TIE (43 jenis) dan Kosmetik Ilegal TIE (89 jenis).


PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

PIAGAM PENGHARGAAN

Dengan Bangga Diberikan Kepada:

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN ACEH

ATAS PARTISIPASINYA MENJADI BAPAK ASUH ANAK STUNTING (BAAS) DI KOTA BANDA ACEH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

BANDA ACEH, JULI 2024
PJ. WALIKOTA BANDA ACEH

AMIRUDDIN, SE, MSI

Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh penghargaan atas **partisipasi menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS)** dari PJ Walikota Banda Aceh


KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DJPb

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: PA-047/KPN.0101/2024

DIBERIKAN KEPADA:

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH - 432790

Sebagai Satker Mitra Kerja KPPN Banda Aceh Dengan Capaian IKPA:

"SANGAT BAIK"

Dengan Nilai 98,43 - Kategori Bobot 100%, Triwulan II Tahun 2024

Banda Aceh, 12 Juli 2024

Kepala KPPN Banda Aceh

Iman Haidir

HANDAL

KPPN BANDA ACEH

Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh penghargaan **sebagai Satker Mitra Kerja KPPN dengan Capaian IKPA "Sangat Baik" Triwulan II** dari Kementerian Keuangan



SINERGI BNNP BERSAMA BPOM ACEH, CEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI ACEH

Kepala BNNP Aceh mengajak seluruh lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya penanganan Narkotika melalui rencana aksi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, serta memberikan implementasi nyata untuk menjadikan Aceh Bersih Narkoba (Bersinar) dan **diharapkan BPOM Aceh kedepannya dapat menguji kandungan ganja pada Kuliner Aceh (Mie, kopi, dodol dan Kuah beulangong).**



CIPTAKAN SDM BERKUALITAS, BPOM ACEH LAKUKAN BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN SEKOLAH



KENDALIKAN PEREDARAN PANGAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA, BPOM ACEH GELAR BIMTEK FASILITATOR PPABK



BPOM ACEH LAKUKAN BIMTEK KADER DESA, PERCEPAT PENURUNA ANGKA STUNTING DI ACEH



PERERAT SINERGITAS, BPOM DAN POLDA ACEH BERSAMA AWASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL



TINGKATKAN KEAMANAN PANGAN LEWAT PELATIHAN KADER DESA

Kegiatan yang diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) orang peserta dari kader keamanan pangan desa gampong blang bertujuan **untuk memastikan bahwa desa melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan dan mengetahui tindak lanjut dari rencana program** keamanan pangan yang disusun oleh desa serta tindak lanjut terhadap bahan berbahaya ataupun produk mengandung bahan berbahaya yang masih ditemukan di lingkungan desa oleh kader maupun dinas terkait



CEGAH PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA DI MASYARAKAT

Kegiatan yang telah berlangsung selama 3 (tiga) hari ini dilakukan terhadap 8 (delapan) sarana dan merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan intensifikasi pengawasan pangan selama Bulan Ramadhan. Selain penempelan poster, juga **diberikan pembinaan teknis oleh petugas kepada pemilik sarana untuk tidak lagi menyalurkan Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya mengandung boraks** dengan selalu mengecek keaslian produk BTP dan pangan dengan cara memeriksa Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluwarsa (Cek KLIK).



Kegiatan dilaksanakan di 2 (dua) lokasi posyandu di Banda Aceh. Selama kegiatan, disampaikan informasi dan edukasi **terkait lima kunci keamanan pangan, bahan berbahaya yang ditambahkan pada pangan, dan fortifikasi pangan.** Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian paket makanan berupa telur dan garam beryodium serta kunjungan langsung ke rumah.













Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti (tahap II) perkara Tindak Pidana Kesehatan berupa kosmetik illegal. **Kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan kesehatan.** Tersangka diduga melanggar Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 miliar.



Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 36 Kabupaten Aceh Besar berhasil meraih prestasi sebagai juara 2 dalam lomba sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman tahun 2024 tingkat Sekolah Dasar (SD)/MI Regional Barat yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). **Keberhasilan MIN 36 juga merupakan keberhasilan BPOM Aceh dalam melaksanakan intervensi keamanan PJAS aman** di sekolah.

Triwulan III



Badan pengawas obat dan makanan (BPOM) bersama Dinas Kesehatan Simeulue melaksanakan **Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan (FKP)** pada tanggal 02 Juli 2024 dengan partisipasi 72 pelaku usaha Industri Rumah Tangga (IRTP) Kabupaten Simeulue.



Balai Besar POM di Banda Aceh bersama Polda Aceh dan Polres melakukan operasi tangkap tangan di Bireun pada 11 Juli 2024. Ditemukan barang bukti **berupa 196 tablet Alprazolam 1 miligram yang termasuk kategori psikotropika golongan IV.**



PPNS Balai Besar POM di Banda Aceh menyerahkan tersangka dengan **barang bukti 294 pcs kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) ke Kejaksaan Negeri Bireun pada 18 Juli 2024.** Tersangka diduga melanggar Pasal 60 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pelanggaran ini diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).











Balai Besar POM di Banda Aceh mengadakan pelatihan ISO/IEC 17025;2017 pada tanggal 25 Juli 2024 yang diikuti oleh 24 pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan ISO/IEC 17025;2017 di laboratorium **dalam memastikan standar mutu yang tinggi dalam memberikan keamanan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.**



Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPOM Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan (OTOKSK) diadakan pada tanggal 30 Juli 2024 yang diikuti oleh 37 peserta (hybrid). Kegiatan ini bertujuan **memberikan dasar hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam pengawasan fasilitas distribusi yang selama ini masih mengacu pada regulasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).**











Koordinasi ini dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) dengan Pemda Kabupaten Pidie tanggal 14 Agustus 2024. Rencana aksi dari hasil pembentukan TKPPOM ini akan **mencakup kegiatan pengawasan obat dan makanan di daerah**, yang hasilnya harus dilaporkan setiap semester.



KOLABORASI STRATEGIS: BPOM BERSAMA KEIND ACEH PERKUAT FONDASI UMKM MENUJU PASAR GLOBAL

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menerima kunjungan audiensi dari Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Aceh pada tanggal 16 Agustus 2024. Pertemuan ini bertujuan untuk **menjalin kerja sama dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aceh, khususnya dalam hal perizinan, pemasaran, dan memastikan keberlanjutan produktivitas produk UMKM** setelah pendampingan.



BPOM ACEH LEWAT SAKA POM: KOLABORASI AMANKAN PANGAN



BPOM ACEH SERIUS TERAPKAN SMAP DAN GREEN ENERGY



BPOM ACEH TEGASKAN KOMITMEN ANTI KORUPSI



DUKUNG PENGEMBANGAN KARIER, BPOM ACEH BERSAMA BIRO SDM BPOM GELAR INTERNALISASI MANAJEMEN TALENTA ASN



BIMTEK DAN FASILITASI USAHA DESA: BPOM AJAK MASYARAKAT ANTISIPASI DARURAT PANGAN DAN CEGAH STUNTING

Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas Desa dan Fasilitasi Usaha Pangan Desa diadakan pada tanggal 28 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, yang bertujuan **untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang keamanan pangan di desa-desa.**



INSPEKSI DAPUR: BPOM ACEH KAWAL MUTU MAKANAN ATLET PON

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan inspeksi dapur (Kitchen Inspection) pada dua sarana penyedia makanan bagi atlet PON tanggal 27 Agustus 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan BPOM Aceh dalam **memastikan keamanan pangan siap saji selama pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON)** XXI Aceh-Sumatera Utara.



PEMKAB ACEH BESAR DAN BPOM ACEH BERSINERGI UNTUK PANGAN AMAN DI PASAR TRADISIONAL

Sosialisasi keamanan pangan segar dihadiri oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Besar dan perwakilan dari Balai Besar POM di Banda Aceh. Sosialisasi ini **meliputi keamanan pangan, identifikasi bahan berbahaya pada pangan, cara pembuatan pangan industri rumah tangga yang baik, serta lima kunci keamanan pangan** di sarana peredaran.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh bersama Tim Koordinasi dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) Pidie dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pidie melaksanakan intervensi Keamanan Pangan dalam rangka mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh - Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk **memastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual di warung kopi memenuhi standar keamanan dan mutu.**











Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banda Aceh bekerja sama dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Banda Aceh melalui Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM), terus memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam rangka mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara. Kegiatan ini **memastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual memenuhi standar keamanan dan mutu.**



Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunitas Desa dan Fasilitasi Usaha Pangan Desa digelar di Taman Pendidikan Alquran, Desa Lauke, Kabupaten Simeulue pada tanggal 25 September 2024 dan diikuti oleh 70 peserta (Kader Keamanan Pangan dan berbagai komunitas desa). Tujuan utama dari Bimtek adalah **meningkatkan pemahaman komunitas desa, terutama para pelaku usaha pangan,** mengenai pentingnya keamanan pangan.



MONITORING KADER : BPOM ACEH PASTIKAN JAJANAN SEKOLAH SIMEULUE AMAN DIKONSUMSI

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh kembali melaksanakan kegiatan Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di 4 (empat) sekolah di Kabupaten Simeulue tanggal 25 September 2024. Kegiatan ini bertujuan menilai sejauh mana sekolah-sekolah tersebut **berkomitmen untuk terus menerapkan standar** keamanan pangan.

Triwulan IV



JAMIN KEAMANAN PANGAN: BPOM ACEH MUSNAHKAN 328 BUNGKUS BORAKS

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan kegiatan pemusnahan produk pangan yang mengandung bahan berbahaya berupa boraks, di halaman kantor BPOM Aceh pada 04 Oktober 2024. **Produk yang dimusnahkan meliputi 328 bungkus Bahan Tambahan Pangan (BTP) mengandung boraks, 1 karung kerupuk tempe mengandung boraks, dan 1 loyang adonan kerupuk tempe** yang juga mengandung boraks.



AKSI SANGER UREUENG ACEH: PASTIKAN WARUNG KOPI AMAN!

Kegiatan tersebut melibatkan penyebaran informasi, pengawasan produk, serta pengujian sederhana di 10 warung kopi dan pusat kuliner di Aceh Utara. Para anggota SAKA POM Aceh Utara yang didampingi oleh tim BPOM Aceh, **melakukan pengawasan langsung terhadap produk yang dijual, pengujian keamanan pangan, serta memberikan edukasi** kepada para pemilik warung kopi terkait pentingnya keamanan pangan dan produk yang mereka tawarkan.



SINERGI PROGRAM DESA DAN PMT LOKAL: SOLUSI PERMASALAHAN GIZI DAN STUNTING DI ACEH

Kabupaten Aceh Selatan menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota yang mendapatkan intervensi dari BPOM Aceh pada tahun 2024. Acara yang digelar oleh Badan POM dan Kementerian Kesehatan secara daring ini berlangsung pada tanggal 14 Oktober 2024 dan merupakan **upaya kolaboratif dalam mengatasi permasalahan gizi, khususnya stunting, di Indonesia.** Program ini difokuskan pada dua desa, yaitu Desa Batee Tunggai dan Desa Buket Gadeng. Peluncuran tersebut diikuti dengan diskusi mengenai optimalisasi sinergi program di Aceh guna memastikan efektivitasnya.



TINGKATKAN KEMANDIRIAN DESA: BPOM ACEH GENCARKAN BIMTEK DAN FASILITASI USAHA PANGAN DI KOTA SUBULUSSALAM



BIMTEK DAN FASILITASI DESA: BPOM ACEH DORONG PRODUK PANGAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA



EDUKASI PASAR PANGAN AMAN: BPOM ACEH DAN LOKA POM ACEH SELATAN KUNJUNGI TANAH BATUAH, SINGKIL



KOLABORASI BPOM ACEH, YAPKA DAN RRI: MENGEDUKASI MASYARAKAT TENTANG BAHAYA PRODUK TANPA IZIN EDAR



CEGAH PANGAN BERISIKO, BPOM GENCARKAN SERTIFIKASI PJAS AMAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) bersama Loka Aceh Selatan melaksanakan sertifikasi Sekolah dengan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam, pada tanggal 01 November 2024. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari ini bertujuan **untuk memverifikasi pemenuhan kriteria PJAS Aman serta memastikan komitmen sekolah dalam melaksanakan program keamanan pangan** melalui rencana aksi dan pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di sekolah.



BPOM ACEH IKUT AMBIL PERAN: BIMBING UMKM LOKAL JAGA KEAMANAN PANGAN

Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 05 November 20224 ini bertujuan memberikan **pembekalan kepada para pengelola dan pemilik IRTP agar mampu menghasilkan produk pangan yang aman, sehat, bermutu, dan higienis.** Selain mendukung kualitas pangan, Bimtek PKP diharapkan mampu mendorong peningkatan nilai ekonomi produk lokal, sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.



TANGKAL BAHAYA AMR: BPOM ACEH DAN RRI GELAR DIALOG INTERAKTIF

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Banda Aceh menggelar dialog interaktif bertajuk "Antimicrobial Resistances yang Perlu Diketahui Masyarakat" pada Senin, 18 November 2024. Acara ini disiarkan langsung melalui Program 4 RRI Banda Aceh dan kanal YouTube rri_bandaaceh mulai pukul 15.00 hingga 16.00 WIB dalam rangka memeriahkan World Antimicrobial Resistance (AMR) Awareness Week 2024.

Sebanyak 223 tenaga kesehatan (nakes) dari berbagai profesi, termasuk dokter yang tergabung dalam IDI, apoteker, bidan, perawat, serta profesi lainnya, mengikuti webinar bertema "AMR Tantangan Global: Solusi Lokal – Peran Kritis Tenaga Kesehatan di Aceh" pada Rabu, 20 November 2024. Webinar ini diharapkan dapat **meningkatkan pemahaman dan mendorong aksi nyata tenaga kesehatan Aceh dalam melawan AMR.** BPOM Aceh optimis bahwa kolaborasi lintas profesi yang terbangun melalui kegiatan ini mampu membawa solusi lokal untuk menghadapi tantangan global AMR.



KOLABORASI LINTAS PROFESI : 223 NAKES ACEH BERSATU LAWAN RESISTENSI ANTIMIKROBA



INTENSIFIKASI NATARU: BPOM TEMUKAN 8 DISTRIBUTOR YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menggelar intensifikasi pengawasan pangan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 pada kamis, 05 Desember 2024. Pengawasan ini dilakukan secara bertahap, **untuk memastikan produk pangan yang beredar dipasaran aman, bermutu, dan memenuhi ketentuan.** Kegiatan pengawasan difokuskan pada sarana distribusi dan retail pangan di enam wilayah, yakni Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Sebanyak total 53 sarana distribusi yang diperikasa yakni, 29 gudang distributor dan 24 sarana retail.

Kegiatan CFD dimulai dengan senam bersama, diikuti oleh talkshow bertema **"Kenali Kosmetik Berbahaya"**. Selain talkshow, berbagai kegiatan menarik turut memeriahkan acara, seperti Pojok Konsultasi dan Registrasi Produk yang memberikan edukasi langsung kepada pelaku usaha terkait pendaftaran produk, serta Sampling dan Pengujian terhadap berbagai jenis makanan. Kegiatan lain yang tak kalah menarik adalah Pemberdayaan UMKM Kelompok Rentan (Tuna Rungu) sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, serta Kuis Interaktif seputar obat dan makanan.



SEMARAK HARI IBU: BPOM ACEH AJAK MASYARAKAT JADI KONSUMEN PINTAR



BPOM ACEH RAIH ARC AWARDS 2024

Balai Besar POM di Banda Aceh menerima penghargaan dari Atsiri Research Center (ARC) Pusat Unggulan Iptek (PUI) Perguruan Tinggi Nilam Aceh Universitas Syiah Kuala (USK). Anugerah ini merupakan **bentuk apresiasi atas kontribusi instansi dalam pengembangan industri nilam** di Aceh.



INTENSIFIKASI NATARU: BPOM TEMUKAN 8 DISTRIBUTOR YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN



INTENSIFIKASI NATARU: BPOM ACEH MASIH TEMUKAN PRODUK TIE DAN KEDALUWARSA



INOVASI TANPA BATAS! BPOM TAWARKAN SOLUSI LEWAT PERCEPATAN HILIRISASI RISET PRODUK BERKUALITAS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif iii

HIGHLIGHT KINERJA xvi

DAFTAR ISI xxix

DAFTAR TABEL xxxi

DAFTAR GRAFIK xxxviii

DAFTAR GAMBAR xliii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum Organisasi 2

1.3. Struktur Organisasi 4

1.4. Analisis Lingkungan Strategis Internal 10

BAB II 16

PERENCANAAN KINERJA 16

2.1. Rencana Strategis 16

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 21

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 24

BAB III 29

AKUNTABILITAS KINERJA 29

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 29

3.2 Evaluasi Tahun ke-3 dan Tahun ke-5 254

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 261

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 266

BAB IV 276

PENUTUP 276

4.1 Kesimpulan 276

4.2 Saran 277

LAMPIRAN 278

DAFTAR TABEL

Table 1.Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi 15

Table 2.Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh..... 19

Table 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2024 21

Table 4.Kategori Pencapaian Strategis 26

Table 5. Nilai Predikat Sasaran Kegiatan 30

Table 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat..... 34

Table 7.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024..... 35

Table 8. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja 38

Table 9Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target RENSTRA 2020-2024..... 41

Table 10.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*..... 43

Table 11.*Target dan Realisasi Persentase Obat Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan* 45

Table 12.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024* 47

Table 13*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*..... 49

Table 14.*Perbandingan target dan realisasi tahun 2024ZI* 50

Table 15.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024* 52

Table 16.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*..... 54

Table 17.*Target dan Realisasi Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat* 56

Table 18*Target dan Realisasi Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat terhadap Renstra* 57

Table 19.*Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja* ... 58

Table 20.*Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024*..... 60

Table 21.*Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 dengan tahun 2024* 62

Table 22.*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan* 65

Table 23.*Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*..... 67

Table 24.*Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan* 68

Table 25.*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*..... 71

Table 26.*Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu* .. 73

Table 27.*Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 dengan target renstra 2024* 75

Table 28.*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*..... 78

Table 29.*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan* 81

Table 30.*Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dengan target Renstra 2024* 83

Table 31.*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan* 86

Table 32.*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan* 88

Table 33.*Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target renstra 2024*..... 89

Table 34*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan* 93

Table 35.*Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan* 95

Table 36.*Perbandingan Realisasi Indeks pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target renstra 2024*..... 98

Table 37.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pelayanan publik* 101

Table 38.*Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik* 103

Table 39*Perbandingan realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024 dengan target renstra 2024* 106

Table 40.*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik* 109

Table 41. *Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan* 111

Table 42.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024* 112

Table 43.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*..... 113

Table 44.*Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan* 116

Table 45.*Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE* 116

Table 46.*Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Renstra Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*..... 117

Table 47.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE* 120

Table 48.*Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.* 122

Table 49.*Bobot Progres Tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah* 123

Table 50.*Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target renstra 2024* 124

Table 51.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh* 129

Table 52.*Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh* 130

Table 53.*Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman* 131

Table 54.*Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target renstra 2024* 132

Table 55.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh* 136

Table 56.*Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh* 137

Table 57.*Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman* 138

Table 58.*Target dan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target renstra 2024* 139

Table 59.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh* 142

Table 60.*Target dan Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar* 144

Table 61.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja* 147

Table 62.*Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar* 149

Table 63.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target RENSTRA 2020-2024* 151

Table 64.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja* 152

Table 65.*Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2024* 154

Table 66.*Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2024 dengan Target Renstra 2024*. 156

Table 67.*Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*.. 157

Table 68.*Indeks Pemenuhan Laboratorium Obat dan Makanan sesuai standar GLP* . 160

Table 69.*Tabel Parameter Penilaian GLP* 160

Table 70.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024* 161

Table 71.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja* 163

Table 72.*Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal* 165

Table 73.*Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target Renstra 2021-2024* 167

Table 74.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal*..... 168

Table 75.*Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu Tahun 2024* 171

.Table 76*Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024 dengan target renstra 2024* 173

Table 77.*Indeks Kesadaran Masyarakat*..... 174

Table 78.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024* . 175

Table 79*. Target dan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan* 178

Table 80.*Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan. Target renstra 2024*..... 180

Table 81.*Efisiensi anggaran pada indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan* 182

Table 82.*Hasil Survei Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) Tahun 2024* 183

Table 83.*Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2024* 185

Table 84.*Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan Target renstra 2024* 187

Table 85.*Efisiensi anggaran pada indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan*..... 188

Table 86.*Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik* 191

Table 87.*Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2024 dengan target renstra 2024*..... 193

Table 88.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM* 197

Table 89.*Target dan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh* 199

Table 90.*Komponen Penilaian RB* 200

Table 91.*Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024*..... 201

Table 92.*Efisiensi anggaran pada Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh* 205

Table 93.*Target dan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh* 207

Table 94.*Kategori Penilaian SAKIP* 208

Table 95.*Bobot Penilaian SAKIP* 209

Table 96.*Hasil Evaluasi SAKIP* 209

Table 97.*Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024*..... 209

Table 98.*Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target Renstra 2024* 210

Table 99.*Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai AKIP*..... 213

Table 100*. Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023* 215

Table 101*. Nilai Pengelolaan Kearsipan* 219

Table 102.*Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target Renstra 2024* 220

Table 103.*Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai AKIP*..... 221

Table 104.*Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh*..... 223

Table 105.*Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target Renstra 2024* 224

Table 106.*Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh* 227

Table 107.*Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh* 229

Table 108.*Realisasi NKA Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024* 231

Table 109.*Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh*..... 234

Table 110. *Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Banda Aceh* 239

Table 111.*Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target Renstra 2024* 241

Table 112.*Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Banda Aceh* 243

Table 113.*Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara* 245

Table 114.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024* 247

Table 115.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja* 248

Table 116.*Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri* 250

Table 117.*Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target Renstra 2021-2024* 251

Table 118.*Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri* 252

Table 119.Tindak lanjut rekomendasi 266

Table 120.Realisasi Kinerja dan Anggaran 293

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 . *Capaian Sasaran Kegiatan 10 di Klaster 4 Tahun 2024*.....xii

Grafik 2.Profil Capaian Sasaran Kegiatan Tahun 2024.....xiv

Grafik. 3Nilai Perspektif Tahun 2024 xiv

Grafik 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya 35

Grafik 5. Perbandingan realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Balai lain yang setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional 36

Grafik 7 *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.* 46

Grafik 8.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional* 48

Grafik 9. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya* 52

Grafik 10*. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional*..... 53

Grafik 11 *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya* 56

Grafik 12*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target BPOM* 57

Grafik 13*. Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 hingga tahun 2024* 62

Grafik 14*Perbandingan realisasi persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan balai lain yang sejenis dengan target nasional* 63

Grafik 15*. Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.* 68

Grafik 16*. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 dengan balai setara dan target Nasional*..... 69

Grafik 17. *Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 hingga 2024*..... 75

Grafik 18. *Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional* 76

Grafik 19. *Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2024*. . 82

Grafik 20. *Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dengan balai setara dan target nasional* 83

Grafik 21. *Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga 2024*..... 89

Grafik 22. *Perbandingan realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional* 90

Grafik 23. *Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 hingga tahun 2024* 97

Grafik 24. *Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional* 99

Grafik 25 *Perbandingan realisasi dan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.* 105

Grafik 26. *Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik dan target nasional dengan realisasi kinerja Balai Lain.* 107

Grafik 27. *Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya* 112

Grafik 28. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional*..... 113

Grafik 29. *Perbandingan Realisasi dan capaian Tingkat efektifitas KIE tahun 2020 hingga tahun 2024* 117

Grafik 30. *Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional* 118

Grafik 31. *Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 hingga tahun 2024 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*..... 124

Grafik 32 . *Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional* 125

Grafik 33. *Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 hingga tahun 2024 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh* . 132

Grafik 34. *Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional* 133

Grafik 35. *Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas Tahun 2020 hingga tahun 2024 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*..... 139

Grafik 36.*Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional*..... 140

Grafik 37. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya*..... 151

Grafik 38. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional*..... 151

Grafik 39.. Realisasi dan Capaian tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya 155

Grafik 40.Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Balai Setara dan Target Nasional..... 156

Grafik 41. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional..... 162

Grafik 42. *Realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.*..... 167

Grafik 43. *realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain.* 167

Grafik 44. *Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu Tahun 2024* 172

Grafik 45. *Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024 dengan Balai setara dan Capaian Nasional* 173

Grafik 46*. Perbandingan realisasi dan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 sampai tahun 2024* 180

Grafik 47*. Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional* 181

Grafik 48.*Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2020 hingga 2024* 186

Grafik 49.*Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 dengan Balai setara dan Capaian Nasional*..... 187

Grafik 50*. Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2020 hingga 2024* 192

Grafik 51*Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarkat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2024 dengan Balai setara dan Capaian Nasional*..... 193

.Grafik 52*Perbandingan realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya* 201

Grafik 53*. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain* 202

Grafik 54*Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya* 210

Grafik 55*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain* 211

Grafik 56*Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya* 219

Grafik 57*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai* .. 220

Grafik 58.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasikinerja Balai lain* 231

Grafik 59*Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya* 241

Grafik 60*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai* .. 242

Grafik 61*. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 terhadap kinerja tahun sebelumnya* 247

Grafik 62*. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional* 248

Grafik 63*. Realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.* 251

Grafik 64*. realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain.* 252

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh 4

Gambar 2. Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh 10

Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 11

Gambar 4. Gambar Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh..... 12

Gambar 5. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh 13

Gambar 6. Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh 17

Gambar 7. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh 18

Gambar 8. *Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran* 233

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Pengendalian terhadap aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang product *life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Siklus ini dimulai dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi, pembinaan), pengawasan post market, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh adalah:

a. Pemantauan dan Pengawasan: Pemantauan dan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Aceh dengan luas wilayah dan jangkauan yang jauh bisa menjadi tugas yang rumit bila tidak didukung dengan komitmen yang kuat dari lintas sektor terkait di Kab/Kota.
b. Peredaran Obat dan Makanan Ilegal secara *online*: Maraknya peredaran Obat dan Makanan yang diperjual belikan secara *online* melalui media sosial dan banyak diminati oleh golongan muda, menjadi tantangan serius yang memerlukan

konsistensi dalam pengawasannya melalui peningkatan *siber patrol* dan informasi dari masyarakat.

c. Kepatuhan pelaku usaha: Memastikan produk yang dihasilkan dan pendistribusian yang dilakukan oleh pelaku usaha berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku guna melindungi masyarakat dari produk obat, dan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan atau tidak memenuhi standar.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk mencapai tujuan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh ini, sangat dibutuhkan adanya kerjasama dan komitmen yang kuat antara BPOM, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal Obat dan Makanan aman di Provinsi Aceh.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698-23926, Fax. (0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh sebagai berikut:

a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM.
b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM.
c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

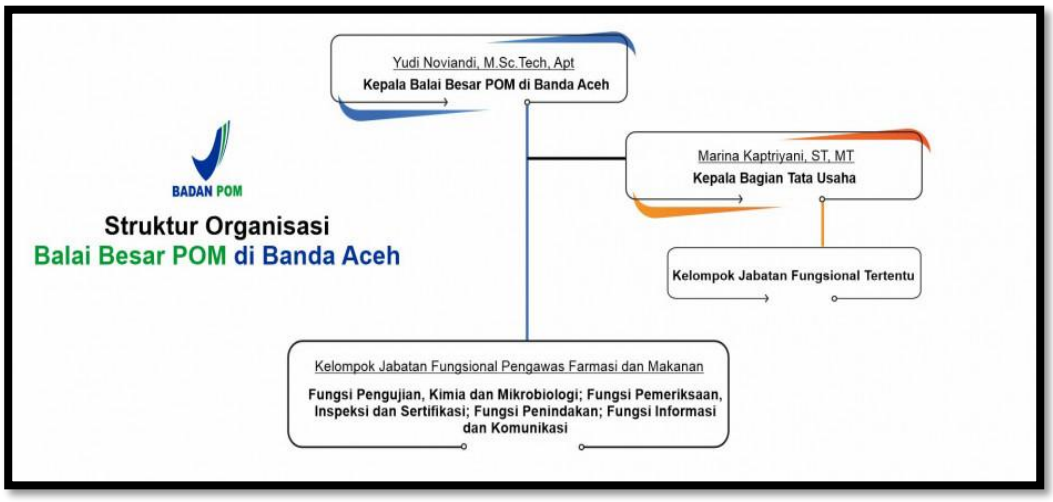
UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.
f. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
g. Pelaksanaan pengujian Obat dan Maknan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing.
h. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
i. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
j. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obatdan Makanan.
k. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
l. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada peran Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Lembaga Pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1.Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 17 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Banda Aceh yang mengawal pencapaian 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 Fungsi serta kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

a. Fungsi Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi:
    - Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
    - Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
    - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.

b. Fungsi Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri dari:
  - Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
  - Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. Fungsi Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. Fungsi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:
   - Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
   - Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
   - Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
   - Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
   - Pelaksanan urusan kepegawaian.
   - Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
   - Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
   - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
     - Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
     - Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi, komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan full spectrum

mulai dari premarket hingga post market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu:

1. Strategi Pencegahan: melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
2. Strategi pengawasan: melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan: difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh antara lain:

1. **Percepatan penanganan Stunting**

   Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible. BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan,

serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun, aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara online namun motto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. Kemudahan dalam melakukan pengecekan terhadap produk saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile, yang dapat diakses secara online Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan patroli siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

3. Reformasi Birokrasi (WBK)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2023. Upaya untuk dapat mempertahankan predikat WBK dilakukan dengan tetap konsisten melaksanakan kegiatan dan anggaran secara akuntabel dan berorientasi pelayanan prima.

4. Regionalisasi Laboratorium Pengujian

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengujian laboratorium,

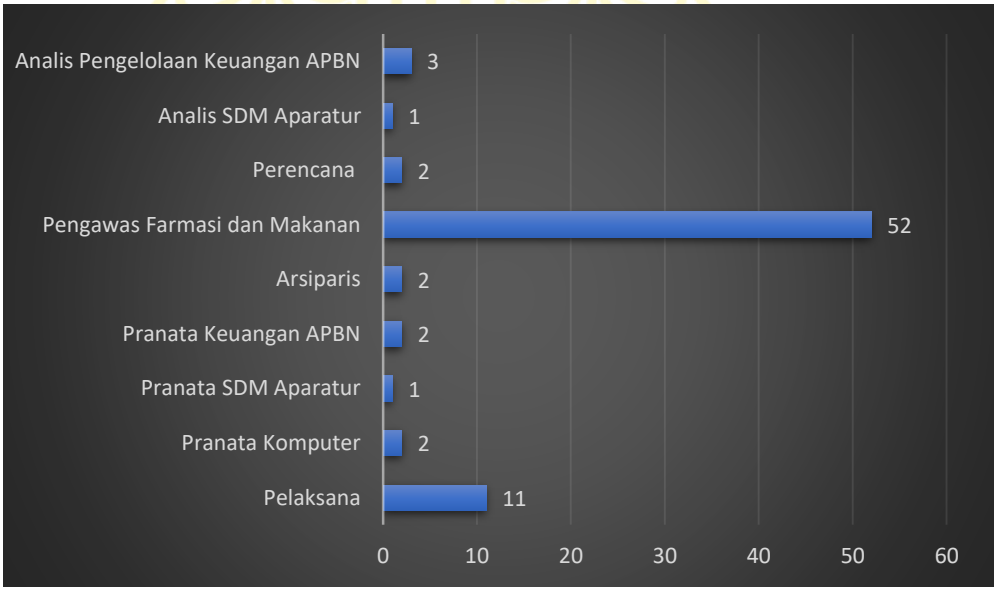
telah diterapkan sistem regionalisasi laboratorium, konsep regionalisasi laboratorium ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 199 Tahun 2023 tentang Tim Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konsep dasar dari regionalisasi laboratorium adalah pengelompokan laboratorium berdasarkan region dan spesialisasi pengujian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Model ini tetap mengutamakan validitas dan kecepatan dalam hal pelaksanaan pengujian yang tentunya akan mempercepat tindak lanjut yang perlu dilakukan.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis Internal

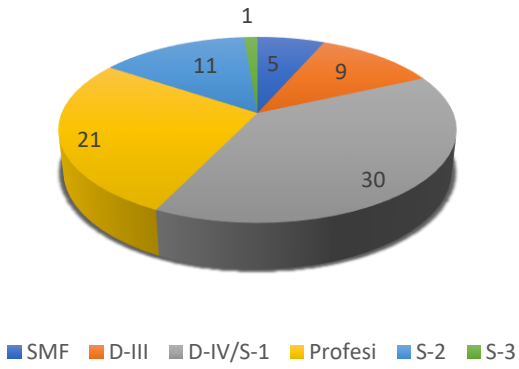
1.4.1 Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh per 31 Desember 2023 adalah 86 orang yang terdiri atas 77 PNS dan 9 PPPK. Sebanyak 61 orang menduduki jabatan fungsional farmasi dan makanan (PFM), 12 orang jabatan fungsional tertentu lainnya dan 11 orang pelaksana, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 9 orang, tenaga outsourching 16 orang, sehingga total pegawai berjumlah 111 orang.



Gambar 2. Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh



Gambar 3. Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Proyeksi kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh mulai tahun 2020-2024 berturut turut sebesar 49, 51, 53, 54 dan 56 orang, dengan prediksi SDM yang tersedia hingga 2024 adalah 127 orang. Standar kebutuhan SDM berdasarkan ABK terdapat kenaikan rata-rata sebesar 3 orang setiap tahunnya dengan adanya beberapa pegawai yang pensiun/pindah.

b. Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m2 dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m2, listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen modern seperti PCR, AAS, Kromatrografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatrografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi yaitu: ISO 9001:2015, dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya.



Gambar 4. Gambar Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh

c. Keunggulan Balai Besar POM di Banda Aceh

- Laboratorium Rujukan Pengujian DNA Babi.
- Laboratorium Unggulan untuk pengujian Ganja.
- Mempunyai tenaga ahli yang bertugas sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui e-registration.
- Memiliki 3 unit mobil laboratorium keliling yang menjangkau seluruh wilayah kab/kota di Provinsi Aceh.
- Memiliki 1 unit mobil Penindakan, yang dapat difungsikan untuk melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara).
- Memiliki 1 unit mobil Insenerator, yang aman dan ramah lingkungan, digunakan untuk melakukan pemusnahan barang temuan dan barang bukti.

d. Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.432790/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 sebesar Rp 29.029.899.000,- (Dua puluh sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Pada tanggal 31 Januari 2024 dilakukan revisi DIPA Pusat untuk pencadangan anggaran, besaran anggaran yang di saving oleh Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp1.160.172.000 (Satu milyar seratus enam puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) melalui mekanisme *Automatic adjustment*, selanjutnya pada 12 Februari 2024 dilakukan revisi Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal III DIPA.

Selama tahun 2024, telah dilakukan revisi penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA sebanyak 10 (sepuluh) kali dan 35 (tiga puluh lima) kali revisi POK. Realisasi anggaran tahun 2024 (sebesar 44,62 persen.

1.4.2 Eksternal

a. Kondisi geografis dan Demografis



Gambar 5. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara 010 58’ 37,2”-060 04’ 33,6” LU dan 940 57’ 57,6”-980 17’ 13,2” BT. dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah: Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia. Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan perkembangan organisasi, untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km².

Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 12 Kabupaten dan 4 Kota (16 Kab/Kota). Dari 16 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 2 Kabupaten merupakan daerah kepulauan, yaitu Kota Sabang dan Kabupaten Simeulue. Sedangkan untuk LOKA Aceh Selatan dengan cakupan pengawasan 3 (tiga) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk LOKA Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 4 (empat) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana pada BAB VIII ketentuan peralihan Pasal 29 Poin C disebutkan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan sebelum peraturan Badan ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan program dan kegiatan tersebut berakhir. Maka terhitung 1 Januari 2024 pelaksanaan program dan kegiatan telah mengacu pada ketentuan dalam PerBPOM tersebut dengan cakupan wilayah pengawasan dari 3 (tiga) UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh (yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

- **Balai Besar POM di Banda Aceh**

  Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 9 Kabupaten dan 4 Kota (13 Kab/Kota). Dari 13 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, 1 (satu) Kota merupakan daerah kepulauan yaitu Kota Sabang.

- **Loka POM Aceh Selatan**

  Cakupan pengawasan Loka Aceh Selatan adalah 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue (merupakan pulau terluar).

- **Loka POM Aceh Tengah**

  Untuk Loka Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 5 (lima) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Nagan Raya.

b. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 1.Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	27	Sarana
2.	Apotek	411	Sarana
3.	Toko Obat	474	Sarana
4.	Klinik	239	Sarana
5.	Rumah Sakit	62	Sarana
6.	Puskesmas	306	Sarana
7.	GFK	17	Sarana
8.	Distribusi Makanan	2289	Sarana
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	901	Sarana
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	320	Sarana
TOTAL SARANA DISTRIBUSI		**5046**	**Sarana**
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	0	Sarana
3.	UMOT	18	Sarana
4.	UKOT	11	Sarana
5	Industri Kosmetik	7	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	83	Sarana
7.	PIRT	1469	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		**1588**	**Sarana**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai salah satu unit pelaksana teknis di wilayah Provinsi Aceh. Tahun 2024 merupakan akhir evaluasi Renstra 2020-2024, sehingga pada tahun ini juga dilakukan penyusunan evaluasi akhir pada bab III laporan kinerja.

Penyusunan sasaran dan indikator kinerja pada rencana strategis dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat latar belakang dan perubahan lingkungan yang dinamis yang diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi Badan POM 2020-2024 yaitu:

VISI

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usahaObat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.**
4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan public yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Gambar 6. Visi dan Misi Balai Besar POM di Banda Aceh

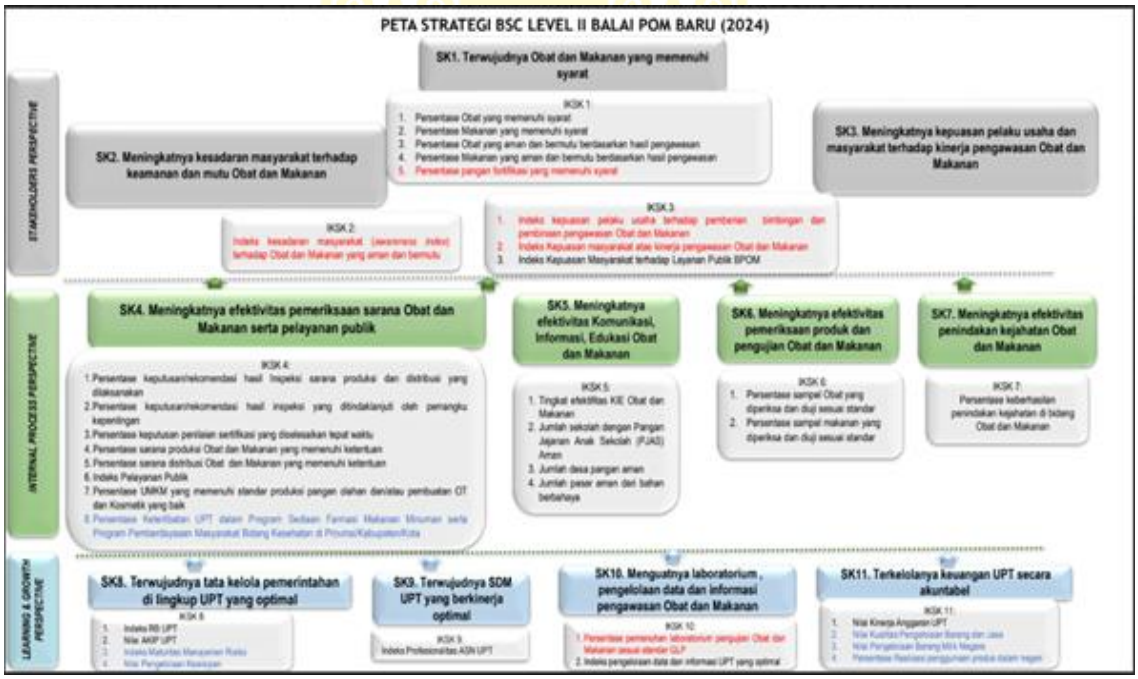
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan

akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Terdapat perubahan pada peta strategi Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024, perubahan berupa penambahan 2 (dua) indikator kinerja baru yaitu Keterlibatan UPT dalam Program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota dan indikator kinerja Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, terdapat perubahan 3 (tiga) indikator kinerja yang tahun sebelumnya direktif berubah menjadi Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Banda Aceh yang meliputi indikator Nilai pengelolaan kearsipan, Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa dan Nilai pengelolaan Barang Milik Negara.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Banda Aceh berdasarkan Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 7. Peta Strategi Level 2 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh

2.2 Rencana Kerja Tahun 2024

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2024 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2024. RKT Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024.

Table 2.Rencana Kinerja Tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,2
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,3
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,7
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,3
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,7
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,5
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100

		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88
		Jumlah desa pangan aman	32
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	24
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82
6.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
7.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
8.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,2
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76,6
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	98,25
9.	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88,64
		Nilai AKIP UPT	82,4
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,08
10.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,52
11.		Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,87

	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah anggaran awal Rp. 29.029.899.000,- (Dua puluh sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang seharusnya dapat terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Banda Aceh. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,2
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,3

		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,7
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,3
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,7
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,5
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,9
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88
		Jumlah desa pangan aman	32
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	24
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82

6.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84
8.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,2
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76,6
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	98,25
9.	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88,64
		Nilai AKIP UPT	82,4
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,08
10.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90,52
11.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89,87
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	01 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	765,214,700
		02 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	89.2	566,755,700
		03 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	94.3	625,127,600
		04 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	89.7	442,902,300
		05 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	46,366,000
2	02 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	01 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	190,710,000
		02 Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	69.3	116,160,000
		03 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	321,042,000
		04 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	71.7	239,645,000
		05 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	85.5	772,566,000
		06 Indeks Pelayanan Publik									4.45	4.45	4.45	4.45	53,051,750
		07 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	7	15	30	40	45	50	60	70	80	85	90	100	84,364,000
		08 Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota		10	20	30	40	50	65	70	75	80	85	95	79,710,000
3	03 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9	182,875,000
		02 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah PJAS Aman		10	25	30	40	55	65	72.5	80	85	95	85	727,376,000
		03 Jumlah desa pangan aman		10	20	25	40	45	60	67.5	80	85	95	32	1,349,859,000

		04 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		10	20	25	47.5	55	65	65	65	95	100	24	525,600,000
4	04 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	37	40	50	60	72	80	90	95	100	93,522,000
		02 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	34	45	55	65	75	90	95	99	100	84,713,500
5	05 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	01 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5	10	27	30	40	55	65	70	75	75	80	82	616,691,000
6	06 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	55.37	55.37	55.76	55.76	55.76	56.23	56.23	56.23	56.64	56.64	56.64	57	2,137,664,000
		02 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	205,500,000
7	07 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												54	75,921,050
8	08 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												96.2	41,620,000
		02 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												76.6	35,462,100
		03 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												98.25	135,442,100
9	09 Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 Indeks RB UPT												88.64	176,490,000
		03 Nilai AKIP UPT												82.4	80,356,000
		05 Nilai Pengelolaan Kearsipan												94.06	6,430,000
10	10 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 Indeks Profesionalitas ASN UPT												90.52	106,422,000
11.	11 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 Nilai Kinerja Anggaran UPT		40	55									89.67	17,752,632,000
		02 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa												83.33	6,150,000
		03 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara												89	6,970,000
		04 Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri												80	167,500,000
Total															**29,029,899,000**

Banda Aceh, 06 Mei 2024

Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt

Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Table 4.Kategori Pencapaian Strategis

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Kategori capaian indikator kinerja tabel di atas digunakan untuk penilaian pada point a BAB III dan tabel capaian kinerja di bawah untuk digunakan pada penilaian point b di BAB III.

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	△
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS\ 2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS\ 3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS\ 4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS\ 5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Menunjuk 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai Besar POM di Banda Aceh yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.

1. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh.
2. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada aplikasi Sigarang secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI (Capaian Output), SMART DJA, monev Bappenas, RHPK, BOC dan Aplikasi e-performance.
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian
5. Reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan

pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dengan membuat format matriks tindak lanjutnya.

Pada bab ini juga memuat evaluasi akhir renstra beserta dengan tujuan ketercapaian sasaran strategis periode 2020-2024. Evaluasi akhir menjelaskan tentang ketercapaian kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir beserta dengan perkembangan kinerja dan kategorinya (trend analysis dan gap analysis).

Balai Besar POM di Banda Aceh di Tahun 2024 berhasil meraih Nilai Pencapaian Sasaran Strategis dengan capaian **107.22% dengan Predikat Istimewa.** Perspektif Internal process memiliki capaian tertinggi 112.36% disusul Perspektif Learning and Growth 107.40% dan Perspektif Stakeholder 101.89%.

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan tahun 2024 sebesar 107.22% menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2023 yang memiliki capaian 106.51. Peningkatan Capaian tahun 2024 sebanyak 0.71 poin didukung oleh peningkatan Sasaran Kegiatan 11 yang pada tahun 2023 tidak mencapai target. Sasaran 11 telah berhasil dicapai dengan nilai 112.13 jauh di atas capaian tahun 2023 sebesar 97.54. Sasaran Kegiatan 5 mendapatkan perolehan tertinggi 121.95 yang meningkat jauh dibandingkan perolehan tahun 2023 sebesar 107.49.

Table 5. Nilai Predikat Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahun 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 106,51 dengan Predikat Istimewa							
1. Nilai Perspektif Stakeholder 101,89 dengan kategori Sangat Baik							
2. ***Nilai Perspektif Internal Process 112,36 dengan kategori Sangat Baik***							
3. ***Nilai Perspektif Learning & Growth 107.40* dengan kategori Sangat Baik**							
SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh **102.22** dengan kategori **Sangat Baik**	IKSK1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.9	95.69	100.83	**Sangat Baik**
		IKSK2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.2	94.07	105.46	**Sangat Baik**
		IKSK3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.3	93.04	98.66	**Cukup**
		IKSK4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.7	89.15	99.39	**Cukup**
		IKSK5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	96.10	106.78	**Sangat Baik**
SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	**Baik**
		IKSK7	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.3	82.91	119.64	**Sangat Baik**
		IKSK8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120	120 Konversi	**Sangat Baik**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahun 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
		IKSK9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan	71.7	82.28	114.75	**Sangat Baik**
		IKSK 10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85.5	90.16	105.44	**Sangat Baik**
		IKSK 11	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.45	4.90	110.11	**Sangat Baik**
		IKSK 12	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100	**Baik**
		IKSK 13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	95.00	97.71	102.85	**Sangat Baik**
SK3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT **100.33 dengan** kategori **Sangat Baik**	IKSK 14	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.9	96.15	101.32	**Sangat Baik**
		IKSK 15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	88	100	**Baik**
		IKSK 16	Jumlah Desa pangan aman	32	32	100	**Baik**
		IKSK 17	Jumlah Pasar Aman dari Bahan	24	24	100	**Baik**
SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh **120** dengan kategori **Sangat Baik**	IKSK 18	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120 Konversi	120	**Sangat Baik**
		IKSK 19	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120 Konversi	120	**Sangat Baik**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahun 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
SK5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh **120** dengan kategori **Sangat Baik**	IKSK 20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82.00	100	121,95 Menjadi 120	**Sangat Baik**
SK6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan Data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan **110.43** dengan kategori **Sangat Baik**	IKSK 21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87.00	87.75	100.86	**Sangat Baik**
		IKSK 22	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3.6 Konversi	120.00	**Sangat Baik**
SK7	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT **100.54** dengan kategori **Sangat Baik**	IKSK 23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	84.00	84.45	100.54	**Sangat Baik**
SK8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan **102.92** dengan kategori **Sangat Baik**	IKSK 24	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan makanan	96.2	99.49	103.42	**Sangat Baik**
		IKSK 25	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76.6	80.37	104.92	**Sangat Baik**
		IKSK 26	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	98.25	98.65	100.41	**Sangat Baik**
SK9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal **99.65** dengan kategori **Cukup**	IKSK 27	Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	88.64	87.49	98.70	**Cukup**
		IKSK 28	Nilai AKIP UPT	82.4	81.48	98.88	**Cukup**
		IKSK 29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.08	95.35	101.35	**Sangat Baik**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target Tahun 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
SK10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSK30	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.52	87.14	96.27 exclude NPSS	**Cukup**
SK11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel 112.13 dengan kategori **Sangat Baik**	IKSK31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.87	95.36	106.10	**Sangat Baik**
		IKSK32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83.33	100.00	120.00	**Sangat Baik**
		IKSK33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89.00	91.14	102.40	**Sangat Baik**
		IKSK34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60.00	74.73	124.55 menjadi 120	**Sangat Baik**

Dari 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja, terdapat 24 (dua puluh empat) indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori Baik, dan 5 (lima) indikator kinerja yang berkategori Cukup. Kategori Sangat Baik dan Baik menunjukkan bahwa indikator kinerja telah mencapai target tahun 2024.

Pada tahun 2024, terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang mengalami konversi (realisasi menjadi 120) yang mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Keempat indikator kinerja tersebut adalah:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.
4. Indeks pengelolaan data dan informasi.

Untuk indikator indeks profesionalitas ASN dikeluarkan (exclude) dari penilaian NPSS karena pada indikator terdapat perubahan pedoman penilaian kualifikasi dan kompetensi pada tahun 2024.

Capaian kinerja yang melebihi 120 % dinormalisasi menjadi 120 % yang meliputi indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Sasaran Kegiatan 1
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan 1 dicapai dengan NSS 108,03 dengan kategori sangat baik. Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh empat IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan melampaui target. Namun berbeda halnya dengan capaian IKU 5 Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat yang terpaut sedikit di bawah target. Dalam kinerja IKU 5, dari 75 sampel Fortifikasi yang disampling dan diuji, 67 sampel MS (memenuhi syarat) dan 8 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sampel yang tidak memenuhi syarat adalah sampel garam curah (TMS Kadar KIO3).

Indikator Kinerja

1. **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat**

   a. Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2024

Table 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9	95,69	100,83	**Sangat Baik**

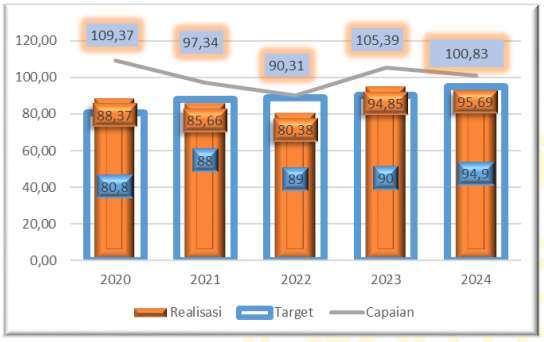
Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari rumus:

$$\%\ Obat\ MS\ = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ Obat\ MS}{Total\ Sampel\ Acak\ Obat\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ x\ 100\%$$

Obat yang dimaksud dalam IKU ini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kedaluwarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan penandaan. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat yang dimaksud adalah dari hasil pemeriksaan dan pengujian. Jumlah sampel acak yang masuk ke laboratorium sebanyak 975 sampel dengan target 943

sampel. Kesimpulan yang diperoleh dari sampel tersebut adalah 933 sampel MS (memenuhi syarat), dan 42 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Sampel TMS ini diperoleh dari hasil pemeriksaan label/penandaan dan pengujian. Persentase capaian target indikator sasaran 2024 sebesar 100.83% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya

Capaian kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat di tahun 2024 sebesar 100,83%. Walaupun tahun 2020 merupakan tahun dengan capaian kinerja paling tinggi yaitu 109.37%, namun realisasi sebenarnya cukup kecil karena targetnya rendah sehingga capaiannya besar. Tahun 2021 dan 2022 realisasi kinerja paling rendah, tahun 2021 realisasi kinerja hanya 85.66% dan pada tahun 2022 realisasi kinerja menurun menjadi 80.38%, sehingga capaian pada kedua tahun ini paling rendah selama periode 5 tahun. Realisasi kinerja tahun 2024 sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun target kinerja dinaikkan tetapi realisasi juga meningkat. Berhasilnya capaian ini dipengaruhi oleh keberhasilan pendampingan COPB, CPOTB, CPKB dan kegiatan CDOB di badan POM sehingga produk Obat yang beredar di Aceh lebih baik. Capaian ini juga didukung oleh laboratorium yang terakreditasi sehingga hasil pengujiannya lebih valid.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024

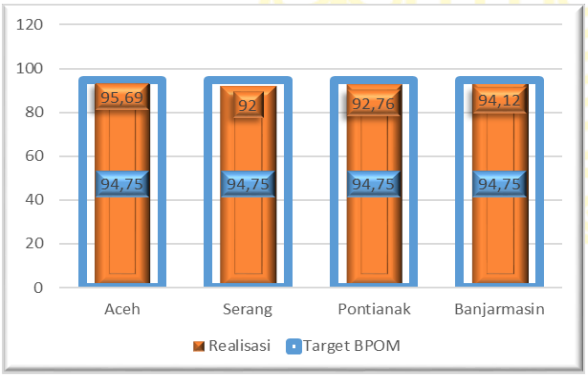
Table 7.Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.9	95.69	100.83 ▲	**Tercapai/ melampaui**

	Target PK 2024	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
	94.9	95.69	100.83 ▲	**Tercapai/ melampaui**

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat 2024 sebesar 95.69% sudah melampaui target Renstra 2024 yaitu 94.9%, capaian indikator ini adalah 100.83%. Capaian ini juga selaras dengan realisasi dan capaian PK dengan kategori Tercapai/melampaui. Berdasarkan Reviu Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh yang ditetapkan pada 20 Desember 2023, target indikator ini mengalami perubahan dari semula 91% menjadi 94.9%. Hal ini disebabkan realisasi tahun 2023 sudah mencapai 94.85%. Walaupun terjadi kenaikan target tetapi realisasi kinerja juga dapat dicapai dengan baik. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh perencanaan yang matang baik dari pemeriksaan dan pengujian sampel sehingga indikator ini dapat diselesaikan melebihi target yang direncanakan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Grafik 5. Perbandingan realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Balai lain yang setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dibandingkan dengan balai yang setara, menempati urutan paling tinggi yaitu 95,69%. Capaian yang paling rendah adalah Balai Besar POM di Serang dengan realisasi kinerja 92%. Dari keempat balai yang diperbandingkan, hanya Balai Besar POM di Banda Aceh yang telah memenuhi bahkan melampaui target nasional 94.75%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator persentase Obat yang memenuhi syarat sudah melampaui target 94.9%. Realisasi dan capaian sampel obat memenuhi target tetapi mengalami penurunan dari TW III. Realisasi sampel pada TW III sebanyak 95,78% dengan capaian 100,93%. Realisasi pada TW IV sebanyak 95,69% dengan capaian 100,83%. Penurunan terjadi sebanyak 0,1%. Walaupun begitu secara keseluruhan target kinerja 2024 sudah tercapai. Faktor tercapainya target kinerja disebabkan oleh hasil sampel yang diperiksa dan diuji umumnya memberikan hasil memenuhi syarat (MS).

- Jumlah sampel obat yang MS hingga TW IV sebanyak 309 dan sampel TMS sebanyak 2 sampel. Tidak ada peningkatan sampel TMS di TW IV. TMS ini disumbang dari hasil pemeriksaan berupa TMK label/penandaan sebanyak 1 sampel dan TMS pengujian dengan parameter pemerian sebanyak 1 sampel.
- Sampel obat tradisional yang MS hingga TW IV sebanyak 194 sampel dan TMS sebanyak 22 sampel. Ada peningkatan sampel TMS di TW IV yaitu 2 sampel TMK Label/penandaan dan 1 sampel TMS pengujian dengan parameter identifikasi bahan kimia obat (BKO) Vitamin C.
- Sampel kuasi hingga TW IV sebanyak 15 sampel MS dan tidak ada sampel yang TMS.
- Hasil pemeriksaan dan pengujian sampel suplemen kesehatan hingga TW IV yaitu sebanyak 53 sampel MS dan 5 sampel TMS. Ada peningkatan sampel TMS di TW IV sebanyak 3 sampel karena 1 sampel TMK Label/penandaan dan 2 sampel TMS mutu yaitu Kadar Asam Folat.
- Jumlah sampel kosmetik hingga TW IV yang MS adalah sebanyak 362 sampel dan sampel TMS sebanyak 13 sampel. Terjadi peningkatan sampel TMS di TW IV yaitu sebanyak 3 sampel TMK label/Penandaan.

Walaupun capaiannya di TW IV lebih rendah dibandingkan pada TW III, namun realisasi di TW IV sudah melebihi target yang ditetapkan dengan kata lain target tahun 2024 sudah melebihi target. Tercapainya target tahun 2024 ini disebabkan oleh: pemahaman pelaku usaha terhadap penandaan/label pada produk Obat meningkat karena gencarnya kegiatan KIE yang senantiasa diberikan kepada pelaku usaha terkait produksi dan distribusi produk Obat. Kegiatan ini diharapkan terus

dilakukan sehingga pelaku usaha dapat menjaga mutu produknya. Kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan CPOB, CPKB, CPOTB, CDOB dan CDOTB disebabkan Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan serta pengawasan post-market secara kontinu.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 8. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Obat yang memenuhi syarat	705.777.600	705.504.991	99.96	100.83	Efisien

Dari hasil tabel di atas penggunaan anggaran tahun 2024 efisien dimana capaian indikator kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena perencanaan sampling dan pengujian yang matang sehingga kendala-kendala yang ditemui dapat segera diatasi sehingga tidak mengganggu proses kinerja. Misalnya perencanaan jadwal sampling dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan dilakukan dengan baik. Pengadaan reagen dan suku cadang juga lebih efisien karena menggunakan perencanaan berdasarkan data realisasi anggaran di tahun sebelumnya dan ketiadaan reagen yang jumlahnya sedikit dapat berbagi dengan balai lainnya melalui aplikasi APRESIASI. Pengujian juga dapat dilakukan lebih terencana sehingga menghemat reagen dan komponen pendukung laboratorium lain. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tercapainya target pada indikator ini karena berbagai upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh antara lain:

1. Sosialisasi dan KIE terkait penandaan/label yang tetap dilakukan oleh personel terhadap produsen dan distributor baik pada produk obat, obat bahan alam,

kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik.

2. Melakukan sosialisasi dan pengawasan secara intensif terhadap penandaan/label produk yang beredar di Banda Aceh.
3. Tetap gencar melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk Obat yang TMK untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

Keberhasilan indikator kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat tidak lepas dari kompetensi para personel inspeksi dan pengujian. Peningkatan kompetensi dilakukan dengan mengikuti pelatihan baik internal maupun eksternal. Karena pada umumnya indikator ini dipengaruhi oleh hasil TMK label/penandaan dimana terdapat persepsi yang berbeda antara petugas pusat dan balai maka balai senantiasa mengatasi gap ini melalui pelatihan baik itu melalui pelatihan formal maupun *on the job training* untuk personel baru. Diharapkan dengan adanya pelatihan maka hasil pemeriksaan label/penandaan akan lebih valid.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja tahun 2024 digunakan sebagai dasar untuk melihat capaian indikator serta kendala yang dialami baik sampling maupun pengujian sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kegiatan lebih baik lagi. Lakin ini juga dapat digunakan untuk penyusunan kebijakan terkait peredaran Obat acak di Indonesia. Walaupun tahun 2025 indikator ini sudah tidak ada tetapi data hasil pemeriksaan dan pengujian dapat digunakan untuk indikator lain yang berkenaan dengan ini.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian tertuang dalam daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh. Risiko yang terkelola dengan baik dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 9.Target dan Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat

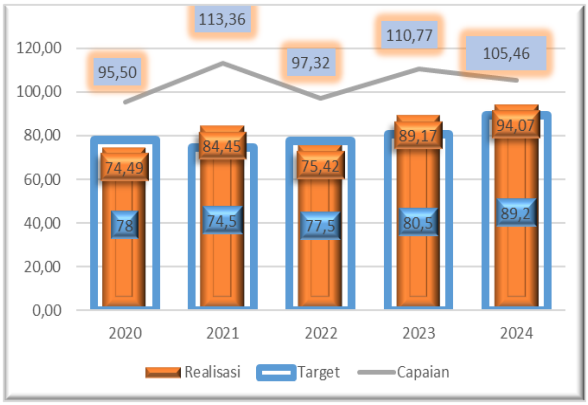
Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.2	94.07	105.46	**Sangat Baik**

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh menggunakan formula:

$$\textbf{\% Makanan MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ MS}{Sampel\ Acak\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ \textbf{x 100\%}$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan oleh BALAI BESAR POM di Banda Aceh. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kedaluwarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan label. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Dari 354 sampel acak makanan yang diperiksa oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, terdapat 333 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 21 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 telah melampaui target yaitu 105.46 % dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya



Grafik 6 Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya

Terjadi kenaikan signifikan realisasi Persentase Makanan yang memenuhi Syarat pada tahun 2024 (94.07%) dibandingkan tahun 2022 (75.42%). Realisasi Kinerja indikator ini mulai dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan kecuali di tahun 2022. Target kinerja juga meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Tahun 2020 target lebih tinggi dari 2021 karena capaian 2020 yang rendah maka tahun 2021 target disesuaikan berdasarkan realisasi di tahun 2020. Walaupun Capaian Kinerja 2024 bukan yang terbesar namun realisasi kinerjanya merupakan yang paling tinggi selama 5 tahun ini.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target RENSTRA 2020-2024

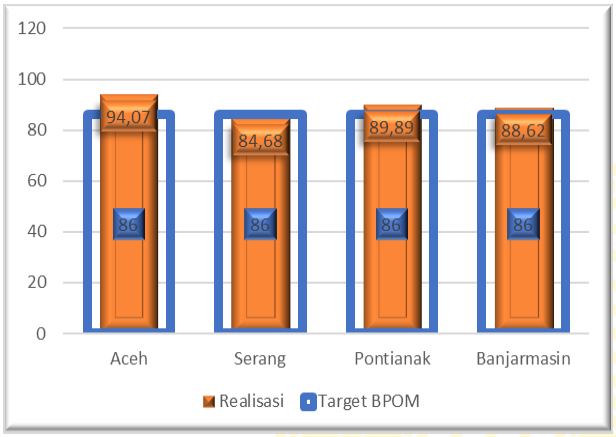
Table 9Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target RENSTRA 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.2	94.07	105.46	**Tercapai/melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	89.2	94.07	105.46	**Tercapai/melampaui**

Capaian kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat di tahun 2024 terhadap RENSTRA 2020-2024 sudah Tercapai/Melampaui. Capaian indikator kinerja ini terhadap target renstra dan PK sebesar 105.46%. Pada Desember 2023 terjadi perubahan target RENSTRA menjadi 89.2 % dari target semula 83.5%. Perubahan ini berdasarkan realisasi kinerja tahun 2023 yang sudah mencapai 89.17%. Walaupun terjadi kenaikan target tetapi realisasi kinerja indikator juga

mengalami kenaikan yaitu 94.07% sehingga capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat masih dalam kategori **Tercapai/Melampaui.** Hal ini disebabkan pelaku usaha berusaha menjaga mutu produknya dan perencanaan yang matang terkait pemeriksaan dan pengujian sampel makanan acak.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Gambar 11. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Realisasi kinerja Balai Besar POM Banda Aceh di tahun 2024 berada di angka 94.07% yang telah melampaui target nasional sebesar 86%. Realisasi kinerja yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebesar 94,07%, diikuti Balai Besar POM di Pontianak 89.89%, yang paling rendah adalah Balai Besar POM di Serang dengan realisasi 84.68% dan merupakan satu-satunya balai yang belum mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja indikator persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 105.46% dengan kriteria **Sangat Baik**. Walaupun masih terdapat beberapa sampel TMS tetapi realisasi masih melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan jumlah sampel yang MS mengalami peningkatan. Jumlah sampel TMS pada TW IV hanya 21 sampel, yaitu 11 sampel TMS Kimia (cemaran proses HMF dan enzim diastase pada produk madu, Asam Benzoat, dan Sakarin), 5 sampel TMS Mikrobiologi (ALT, Angka koliform, dan Pseudomonas aeruginosa) dan 5 sampel TMK

Penandaan. Untuk TMS Madu merupakan cemaran proses yang bisa ditimbulkan dari proses penyimpanan dan distribusi. Sedangkan TMS mikrobiologi terkait Higienitas dan Sanitasi. Walaupun begitu, secara keseluruhan target Persentase Makanan yang memenuhi syarat masih terpenuhi, dibuktikan jumlah sampel TMS pengujian dan TMK yang sedikit.

Peningkatan sampel yang MS disebabkan realisasi rencana aksi yang dilakukan secara berkala terhadap permasalahan yang terjadi sehingga pemenuhan target kinerja dapat terpenuhi. Pada indikator ini TMK label/penandaan sudah cukup menurun dibanding tahun sebelumnya, ini membuktikan bahwa KIE petugas kepada pelaku usaha memberikan hasil cukup baik. Untuk menekan TMS kimia perlu dilakukan lagi usaha yang lebih keras lagi untuk meningkatkan komitmen pelaku usaha tentang mutu produknya dengan melibatkan tim penindakan untuk menghasilkan efek jera.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 10.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	510.790.300	510.525.702	99.95	105.46	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran **efisien** di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi anggaran yang tinggi adalah perbaikan terhadap perencanaan reagen, perbaikan peralatan dan suku cadang. Dengan demikian anggaran tahun 2024 sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat karena penggunaan anggaran dapat dioptimalkan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang akan meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh antara lain:

1. Perencanaan sampling yang baik (tempat sampling dan jenis sampel yang dipilih acak).
2. Pengujian yang dilakukan sesuai role dan timeline. Hasil uji sampel yang Memenuhi Syarat memenuhi target untuk sampel acak, hal ini juga menunjukkan keamanan sampel beredar yang sudah disampling untuk dikonsumsi masyarakat.
3. Menjamin peningkatan kompetensi petugas dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait label/penandaan.
4. Melakukan pengawasan yang ketat di pasar dan tempat-tempat pendistribusian makanan.
5. Melakukan inovasi agar lebih menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dengan membuka layanan pengaduan yang mudah diketahui masyarakat dengan gencar mensosialisasikan media pengaduan tersebut agar lebih dikenal.
6. Menjamin kualitas pelayanan dan pengujian dengan mengikuti sistem mutu 17025:2015 dan QMS 9001:2017 dalam hal ini melakukan audit internal maupun eksternal sehingga hasil uji reliable dapat dipertahankan.
7. Peningkatan kegiatan penyidikan terkait temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan sehingga menimbulkan efek jera agar kesalahan yang sama tidak terulang di kemudian hari.
8. Melakukan KIE terkait makanan yang aman dan bermutu dan mengkader tenaga penyuluh dari komponen masyarakat tentang makanan.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh. Selain itu untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Di Lab. Pangan selain menguji sampel rutin acak dari Balai sendiri, Laboratorium Pangan Balai Besar POM di Banda Aceh juga menguji sampel Regional Medan yaitu Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Padang, Balai POM di Bengkulu, Balai POM di Batam, Balai POM di Payakumbuh, Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Aceh Selatan, Loka POM Tanjung Balai, Loka POM Toba Samosir, Loka POM Dharmasraya, Loka POM Rejang Lebong, dan Loka POM Tanjung Pinang.

Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang lebih memadai, terutama untuk pemeliharaan instrumen dan suku cadang instrumen. Karena Laboratorium Pangan Balai Besar POM di Banda Aceh ditunjuk untuk mengerjakan Parameter Uji cemaran Logam dan Cemaran Proses, maka diperlukan sarana Lemari asam yang memadai agar keselamatan kerja penguji terjamin. Lemari asam yang tersedia saat ini tidak memenuhi syarat disebabkan air flow tidak tercapai. Selain itu juga alat water purification yang telah rusak perlu diganti agar mempercepat dan memperlancar proses pengujian.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Resiko terkait Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat banyak terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 11.*Target dan Realisasi Persentase Obat Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan*

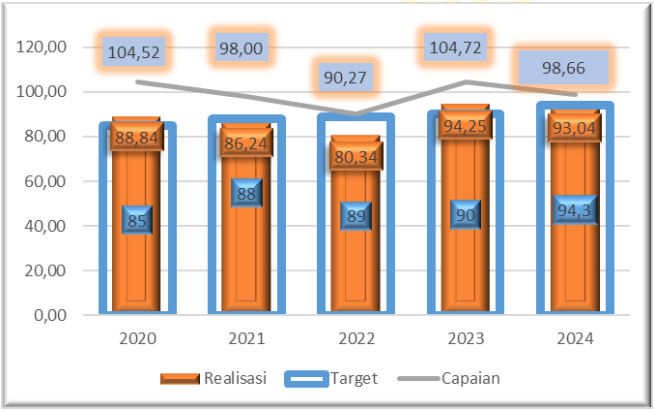
Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	94.3	93.04	98.66	**Cukup**

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\textbf{\% Obat MS} = \frac{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ MS}{Sampel\ Targeted\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}\ \textbf{x 100\%}$$

a). Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). b). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1). Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar). 2). Produk kedaluwarsa. 3). Produk rusak. 4). Tidak memenuhi ketentuan penandaan. 5). Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu diperoleh dari hasil hasil pemeriksaan dan pengujian. Dari 359 sampel targeted yang disampling dan masuk ke laboratorium terdapat 334 sampel MS (memenuhi syarat) dan 25 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dua sampel obat TMS yaitu 2 TMS kimia yaitu sediaan rokok dengan parameter uji kadar TAR dan Nikotin. Sampel Obat Tradisional yang TMS sebanyak 9 sampel, terdiri dari 1 TMS mutu yaitu BKO Sildenafil Sitrat dan 8 TMK label/penandaan. Suplemen Kesehatan 1 TMS mutu PK Vitamin C. Kuasi 1 TMK label/penandaan. TMS kosmetik sebanyak 1 sampel yaitu kadar metanol pada sediaan hair tonik. Realisasi indikator ini 93.04% menghasilkan capaian 98.66% dengan kriteria **Cukup**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 6 ***Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.***

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2020 yaitu 88.84% dengan capaian 104.52%. Realisasi ini kemudian menjadi dasar penetapan target di tahun 2021. Walaupun realisasi tidak memenuhi target hingga tahun 2022,

target tetap dinaikkan hingga tahun 2024. Tahun 2023 realisasi melampaui target yaitu 94.25% dari target yang ditetapkan sebesar 90.0%. Target kinerja tahun 2024 tidak tercapai dengan capaian kinerja hanya sebesar 98,66% dengan kriteria **Cukup.** Hal ini terjadi karena meningkatnya sampel targetted yang TMS. Pada Desember 2023 dilakukan reviu target RENSTRA terhadap indikator ini dari semula 91% menjadi 94.3%. Reviu target ini diubah berdasarkan hasil realisasi pada tahun 2023 yang sudah mencapai 94.25%. Namun ternyata perubahan target ini tidak bisa tercapai 2024 karena peningkatan jumlah sampel TMS, penyebab utamanya adalah sampel yang TMS karena faktor TK label/penandaan

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024

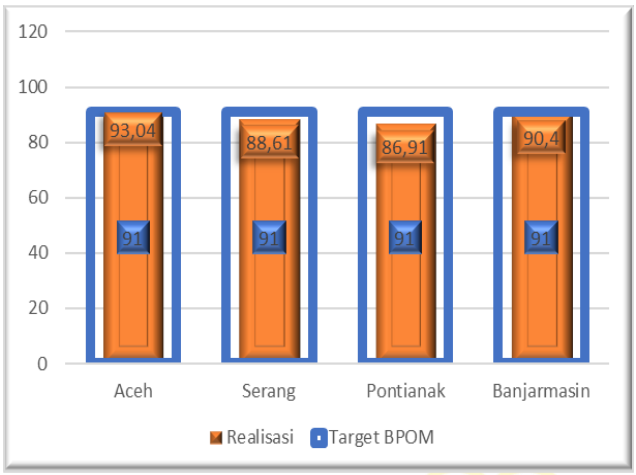
Table 12.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	94.3	93.04	98.66	**Akan Tercapai**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	94.3	93.04	98.66	**Akan Tercapai**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 terhadap target renstra tahun 2024 belum memenuhi target. Capaian indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 98.66% dengan kategori Akan Tercapai. Hal ini selaras dengan realisasi PK 2024 yang juga belum tercapai, realisasi kinerja hanya 93.04% dari target yang ditetapkan 94.3%. Hal ini disebabkan sampel TMS yang cukup banyak dimana penyumbang terbanyak adalah TMK label dan penandaan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Grafik 7.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional*

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024, Balai Besar POM di Banda Aceh merupakan balai dengan realisasi tertinggi di klasternya yaitu 93.04% diikuti oleh UPT Balai Besar POM di Banjarmasin (90.4%), Balai Besar POM Serang (88.61%) dan Balai Besar POM Pontianak (86.91%). Dari keempat balai tersebut hanya Balai Besar POM di Banda Aceh yang sudah melampaui target nasional 91%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi dan capaian tidak memenuhi target karena banyaknya sampel targetted yang TMS baik dari TMK Label/Penandaan maupun TMS Pengujian. Jumlah sampel obat yang TMS disumbang dari TMS nikotin dan TAR sebanyak 2 sampel. Sampel Obat Tradisional yang TMS sebanyak 9 sampel. Dari 9 sampel ini sebanyak 8 sampel TMK label/penandaan. Produk Kosmetik mengalami peningkatan jumlah sampel TMS yang disumbang oleh TMK Label/Penandaan sebanyak 2 sampel sehingga total sampel TMS hingga akhir tahun 2024 sebanyak 12 sampel. Totalnya yaitu 6 sampel kosmetik TMK label/penandaan, 3 sampel TMS pengujian parameter cemaran Logam Berat Hg dan Pb, Hidrokinon dan Asam Retinoat serta 1 TMS Hidrokinon. Kegagalan pencapaian target ini umumnya disebabkan oleh TMK label/penandaan. Namun sebenarnya dari hasil reviu di pusat terhadap TMK Label/Penandaan sebanyak 6 sampel kosmetik menjadi MK sehingga hanya 3 sampel kosmetik yang TMK penandaan/label. Namun data ini tidak bisa dikoreksi lagi karena hasil reviu dari pusat terhadap label/penandaan ini diberikan setelah akhir tahun dan data sudah masuk

ke dalam aplikasi SIMETRIS dan sudah dihitung dalam pencapaian kinerja. Hal ini menjadi poin penting dalam penyebab kegagalan indikator ini adalah perbedaan persepsi antara petugas balai dengan pusat terkait pemeriksaan label/penandaan. Untuk mengatasi gap ini sudah seharusnya dibuat panduan yang lebih jelas terkait label/penandaan sehingga penarikan kesimpulan menjadi lebih valid. Perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi personel terkait pemeriksaan label/penandaan.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 13*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	594.456.500	594.243.878	99.6	98.66	Tidak Efisien

Dari hasil tabel di atas penggunaan anggaran tahun 2024 tidak efisien dimana capaian indikator kinerja lebih rendah dari realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena TMK label/penandaan cukup tinggi serta kontribusi dari hasil pengujian. Penggunaan anggaran yang cukup tinggi berhubungan dengan pengujian ulang sampel TMS setelah HULS dilaksanakan. Pengulangan pengujian sampel membutuhkan sumber daya lebih baik reagen, suku cadang. dan sarana pengujian lainnya. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa anggaran tahun 2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegagalan pencapaian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh salah satunya disebabkan oleh perbedaan persepsi antara petugas balai dan pusat terkait penarikan kesimpulan label/penandaan. Untuk itu perlu dibuat rencana

peningkatan kompetensi personel terkait pemeriksaan label/penandaan kosmetik. Balai besar POM di Banda Aceh menganggap perlu diusulkan reviu kembali terhadap aturan label/penandaan kosmetik sehingga lebih mudah dipahami baik oleh personel yang berkaitan maupun oleh pelaku usaha.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Rekomendasi pada Lakin Interim telah ditindaklanjuti dan diselesaikan walaupun belum sepenuhnya meningkatkan kinerja tetapi lebih mudah untuk memonitoring dan mengevaluasi penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja. Laporan kinerja digunakan sebagai penetapan target di tahun berikutnya sehingga kinerja Balai menjadi lebih optimal. Laporan kinerja ini juga dapat digunakan untuk merencanakan strategi lain dalam pencapaian kinerja. Progres rencana aksi pada laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam monitoring realisasi indikator ini.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Informasi tentang pengelolaan risiko terkait pemeriksaan dan pengujian sampel dapat menekan faktor yang tidak diinginkan dalam pencapaian target indikator. Walaupun indikator ini belum tercapai tetapi informasi dalam daftar risiko memudahkan untuk menemukan masalah sebenarnya dan untuk mengatasi serta merencanakan tindak lanjut yang harus dilakukan.

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 14.*Perbandingan target dan realisasi tahun 2024ZI*

Indikator Kinerja	Target 2024(%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	89.7	89.15	99.39	**Cukup**

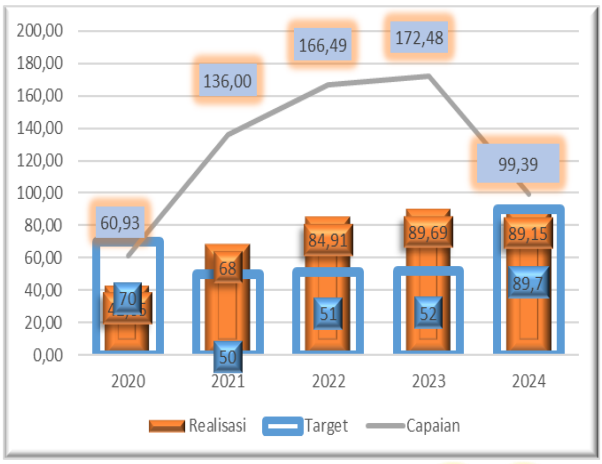
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan menggunakan rumus:

% Makanan MS = $\frac{Jumlah\ Sampel\ Targeted\ MS}{Sampel\ Targeted\ yang\ Diperiksa\ dan\ Diuji}$ **x 100%**

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan menurut UU No.18 tahun 2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi yang disampling Balai. Sampel yang disampling Loka menjadi kinerja Loka tersebut. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan **Cukup** karena banyaknya sampel targeted tidak memenuhi syarat, terutama parameter mikrobiologi. Dari 129 sampel targeted yang disampling, 115 sampel MS (memenuhi syarat) dan 14 sampel TMS (tidak memenuhi syarat).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 8. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya*

Capaian Kinerja dari tahun 2020-2023 mampu mempertahankan tren kenaikan terus menerus hingga tahun 2023. Pada tahun 2020 capaian sangat rendah (42.65%) sehingga dilakukan reviu target untuk tahun 2021 menjadi 50% dari semula 72%. Pada tahun 2021 capaian kinerja sebesar 136%. Tapi capaian ini tidak menjadi faktor koreksi terhadap target tahun selanjutnya, akibatnya hingga tahun 2023 capaian kinerja tidak dapat disimpulkan. Reviu target baru dilakukan untuk tahun 2024 karena capaian di tahun 2023 mencapai 172.48%. Perubahan target 2024 menjadi 89.7% berdasarkan realisasi tahun 2023 yaitu 89.69%. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan realisasi kinerja karena terdapat sampel kasus Lathio yang merupakan kasus nasional yang menyebabkan jumlah sampel TMS meningkat sehingga capaian pada indikator ini hanya pada angka 99,39 %.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024

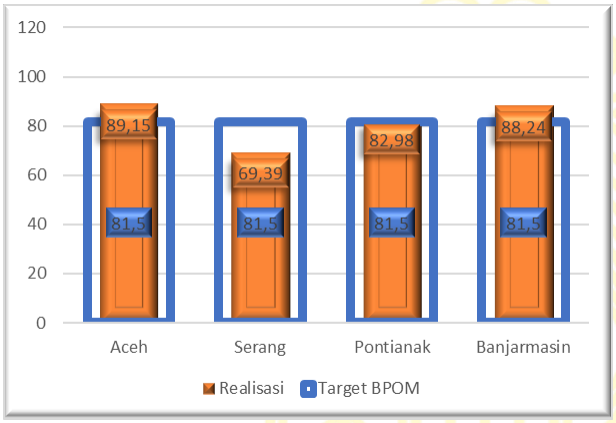
Table 15.***Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024***

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Makanan Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	89.7	89.15	99.39	**Akan Tercapai**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	89.7	89.15	99.39	**Akan Tercapai**

Pada Desember 2023 dilakukan reviu terhadap capaian kinerja, dari hasil tersebut diusulkan perubahan target untuk tahun 2024 dengan mempertimbangkan

realisasi tahun 2023. Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 89.69% dengan target 52% sehingga hasilnya tidak dapat disimpulkan. Berdasarkan hasil ini dilakukan reviu target RENSTRA dan PK menjadi 89.7%. Realisasi TW II dan III tahun 2024 sudah melampui target, pada TW IV terjadi kasus sampel Lathio secara nasional sehingga menurunkan realisasi kinerja. Akibat kasus tersebut, target kinerja tahun 2024 tidak terpenuhi, realisasi yang diperoleh hanya 99,39 %.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Grafik 9. ***Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional***

Jika dibandingkan tiga balai lain di klaster yang setara, realisasi tertinggi dicapai Balai Besar POM di Banda Aceh (89.15%) dibandingkan Balai Besar POM di Banjarmasin (88.24%), Balai Besar POM di Pontianak (82.98%) dan Balai POM di Serang (69.39%). Dibandingkan dengan tiga balai lainnya hanya Balai Besar POM di Serang yang belum mencapai target nasional 81.5%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan berada pada kategori **Cukup** karena banyaknya sampel targeted tidak memenuhi syarat, terutama parameter mikrobiologi. Dari 129 sampel targeted yang disampling, 115 sampel MS (memenuhi syarat) dan 14 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Sampel-sampel yang TMS yaitu 5 sampel minuman PJAS TMS E. coli, 3 sampel kasus Lathio TMS Ident. Bacillus cereus, 1 sampel UMKM TMS Siklamat, 1 sampel produk UMKM Manisan buah TMS ALT, dan 1 TMS Aspartam pada minuman PJAS.

Secara keseluruhan target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tidak mencapai target disebabkan adanya sampel kasus Lathio dan sampel MD UMKM dimana hasil uji sampel ini berupa TMS Mikrobiologi yang pada akhirnya menambah jumlah sampel targeted TMS pada tahun ini.

Dari hasil pengujian yang umumnya merupakan TMS Mikrobiologi maka dapat diamati perlunya dilakukan KIE terhadap produsen maupun penjual sampel PJAS terhadap Higienitas dan Sanitasi terkait hasil Uji TMS Mikrobiologi.

Untuk menurunkan TMS uji kimia dan TMK label/penandaan maka dipandang perlu untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Untuk produk UMKM yang masih TMS pada BTP agar tetap dilakukan pendampingan.
2. Untuk produsen yang masih dinilai TMK label maka perlu tetap dilakukan sosialisasi pelabelan agar produk mereka tidak lagi ditemukan TMK label.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 16.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	419.174.400	418.977.074	99.95	99.39	Tidak Efisien

Dari hasil tabel di atas penggunaan anggaran tahun 2024 belum efisien dimana capaian indikator kinerja lebih rendah dari realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena realisasi sampel targeted yang disampling dan diuji jauh lebih rendah dari targetnya. Hal ini dipicu oleh sampel TMS kasus Lathio, di mana diperlukan jumlah sampel yang lebih banyak karena ini merupakan kasus nasional dan penggunaan reagensia dan sarna pendukung lain yang lebih besar. Dari capaian indikator tersebut anggaran tahun 2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegagalan pencapaian target kinerja indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan disebabkan oleh meningkatnya jumlah sampel TMS di akhir tahun yaitu kasus Latio dan MD UMKM. Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh sudah menurun dari tahun sebelumnya karena terjadi perubahan target. Berbagai upaya telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh. Selain memperketat pengawasan terhadap sampel yang tidak memenuhi syarat seperti boraks, formalin dan pewarna yang dilarang, juga aktif melakukan KIE kepada pelaku usaha agar mereka mampu menghasilkan produk yang memenuhi ketentuan. Di samping itu, terkait dengan masih ditemukannya TMS Parameter Uji Mikrobiologi dalam jumlah yang cukup banyak, maka perlu dilakukan upaya KIE mengenai higiene dan sanitasi kepada pelaku usaha sehingga kedepannya produk makanan yang beredar lebih baik lagi hasil pengujiannya demi keamanan dan kesehatan masyarakat, terutama pada anak-anak usia sekolah.

h. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Mengingat dua tahun berturut-turut capaian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak dapat disimpulkan, maka tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh akan mengajukan perubahan target kinerja sesuai realisasi kinerja tahun 2024.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Rekomendasi pada Lakin telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sehingga realisasi kinerja dapat dengan mudah dimonitoring dan dievaluasi. Laporan kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar dalam evaluasi target kinerja berikutnya.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Dengan pengelolaan risiko yang tepat maka dapat dilakukan pencegahan agar faktor-faktor negatif yang mempengaruhi keberhasilan kinerja dapat dieliminasi sedini mungkin.

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

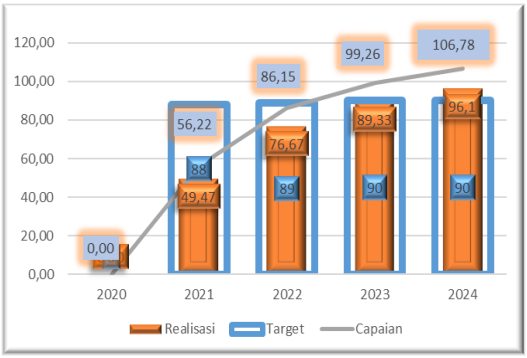
Table 17. *Target dan Realisasi Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	96.10	106.78	**Sangat Baik**

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Yang termasuk sampel fortifikasi adalah Tepung Terigu, Minyak Goreng sawit, dan Garam. Fortifikan pada tepung Terigu adalah logam Zn, logam Fe, Vitamin B1, Vitamin B2, dan Vitamin B9. Fortifikan pada Minyak Goreng sawit adalah Vitamin A. Dan fortifikan pada garam adalah KIO3.

Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 96.10% masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan capaian 106.78%. Dari 77 sampel yang disampling, 74 sampel MS (memenuhi syarat) dan 3 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Sampel yang tidak memenuhi syarat adalah sampel garam curah (TMS Kadar KIO3).

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 10 ***Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya***

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dijadikan indikator baru ada pada tahun 2021. Capaian realisasi dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 capaian realisasi tahun

2024 menunjukkan peningkatan yang cukup besar menjadi 99.26% dari 56.22% pada tahun 2021 dan 86.15% di tahun 2022. Walaupun realisasinya masih jauh dari target yang ditetapkan, target kinerja tahun 2022 dinaikkan dari target tahun sebelumnya. pada tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan realisasi paling tinggi di tahun 2024 sebesar 96.10% sehingga capaian menjadi 106.78%.

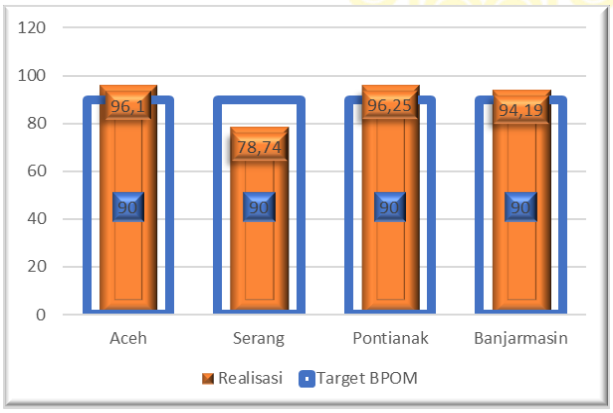
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024

Table 18*Target dan Realisasi Persentase Fortifikasi yang memenuhi syarat terhadap Renstra*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024(%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	96.10	106.78 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi Indikator kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 sudah melampaui target renstra sehingga masuk kategori **Tercapai/melampaui.** Walaupun sudah tercapai perlu tetap dilakukan pendampingan yang lebih intensif pada petani garam pada lokus yang telah ditunjuk mengenai teknis pemberian fortifikan KIO3 pada garam agar menjaga mutu produksi tetap konsisten bermutu.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Grafik 11*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target BPOM*

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh sudah melampaui target nasional dibandingkan dengan tiga balai lain yang setara. Realisasi kinerja Balai Besar POM di Pontianak merupakan yang tertinggi sebesar 96.25%, diikuti Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu sebesar 96.10%. Realisasi terbesar ketiga adalah realisasi kinerja

lalu diikuti oleh Banjarmasin yaitu 94.19%, dan yang paling kecil realisasinya adalah Balai Besar POM di Serang sebesar 78.74%. Dari semua balai hanya BBPOM di Serang yang belum mencapai target nasional 90%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab utama indikator kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat memenuhi ekspektasi adalah jumlah sampel TMS sudah berkurang dari tahun sebelumnya yaitu hanya 3 sampel pada produk fortifikasi Garam yaitu Kadar KIO3 yang dibawah standar. Walaupun banyak produk yang TMK label/penandaan tapi pada indikator ini tidak mempengaruhi hasil akhir kesimpulan pada sampel. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Produk yang menyebabkan TMS adalah produk garam. Kondisi ini sering ditemukan pada produk lokal/UMKM yang mana produk garamnya merupakan garam curah yang belum memenuhi standar SNI. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan kepada produsen garam terkait cara pengolahan garam yang baik agar mutu produk terjamin. Pada produk minyak goreng, parameter uji penetapan kadar asam lemak bebas sering kali TMS. Tingginya kadar asam lemak bebas ini disebabkan penyimpanan sampel yang tidak sesuai. Produk minyak goreng seharusnya didistribusikan dan disimpan dalam kondisi bebas dari panas dan cahaya matahari langsung. Untuk itu perlu juga dilakukan KIE kepada pelaku usaha distribusi tentang penyimpanan produk sampel fortifikasi sehingga fortifikan yang terkandung didalamnya masih dalam kondisi yang sesuai.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 19.*Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	46.368.000	46.223.204	99.69	106.78	**Efisien**

Dari hasil tabel di atas penggunaan anggaran tahun 2024 efisien dimana capaian indikator kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena pengoptimalisasi dan perencanaan pembelian alat, regen, suku cadang sudah direncanakan dengan lebih baik. Dengan demikian anggaran tahun 2024 sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh pelaku usaha. Pengawasan dan KIE yang intensif sudah dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya realisasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2022. Karena permasalahan modal juga termasuk kendala pada UMKM, Balai Besar POM di Banda Aceh juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yaitu dinas terkait. Pembinaan pada pedagang pasar juga sering dilakukan, hal ini karena di pasar banyak pedagang yang menempatkan barang dagangannya tanpa memperhatikan kondisi lingkungan yang sesuai yang menyebabkan kadar KIO3 menurun.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha terkait fortifikasi, menggandeng UMKM Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik instansi terkait agar bersama-sama mengatasi permasalahan UMKM termasuk instansi yang dapat memberikan masukan terkait modal kepada UMKM. Memetakan daerah dan pelanggaran yang umumnya terjadi di daerah tersebut sehingga dapat dibuat strategi pengatasan masalah bisa lebih efektif.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Dengan pengelolaan risiko yang tepat maka dapat dilakukan pencegahan agar faktor-faktor negatif yang mempengaruhi keberhasilan kinerja dapat dieliminasi sedini

mungkin. Informasi dalam daftar risiko BBPOM di Banda Aceh memuat tentang kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas.

Sasaran Kegiatan 2
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan 2 dicapai dengan NSS 109,34. Enam IKU berkinerja sangat baik namun IKU 16 Indeks Pelayanan Publik belum mencapai target dengan capaian kinerja 99.32.

Indikator Kinerja

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 20.*Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	**Baik**

Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus: (A+B+C+D) / 4

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} x\ 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} x\ 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilakasanakan oleh Pusat / UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} x\ 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} x\ 100\%$$

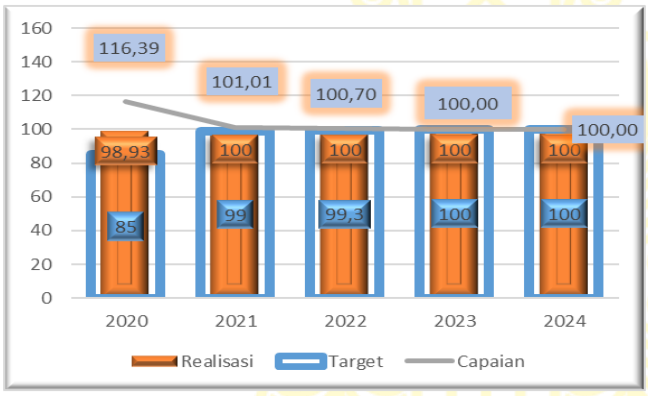
Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dimaksud pada indikator kinerja ini adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sarana produksi dan distribusi di bidang obat dan makanan. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal dan KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terdiri dari:

a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.
c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain.
d. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/Lembaga, organisasi

profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan).

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 397 keputusan/rekomendasi dari 397 keputusan/rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 12. ***Perbandingan Realisasi dan Capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2020 hingga tahun 2024***

Untuk tahun 2024, capaian sama dengan tahun 2023 yaitu 100%, namun terdapat penurunan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dibandingkan tahun 2022, 2021 dan tahun 2020 namun target tetap tercapai. Tahun 2023 dan 2024 target sudah maksimal pada 100% dan terealisasi seluruhnya sebesar 100%. Komitmen bersama dalam pelaksanaan sistem sangat mendukung hingga rekomendasi dapat dilaksanakan seluruhnya.

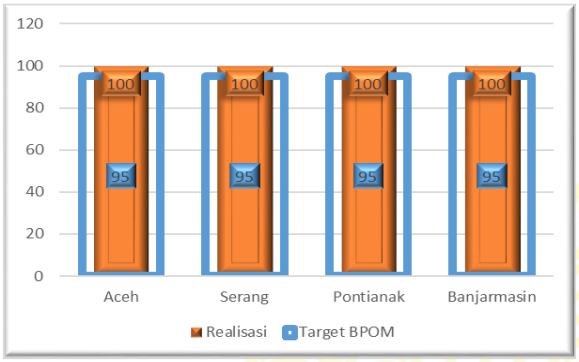
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 2024

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 telah mencapai target renstra untuk tahun 2024 dengan kategori tercapai. Untuk dapat mempertahankan capaian yang telah dicapai sangat diperlukan kerjasama dan komitmen bersama semua unit terkait.

Table 21.***Perbandingan Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 dengan tahun 2024***

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100 ▲	**Tercapai / Melampaui**

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional



Grafik 13***Perbandingan realisasi persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan balai lain yang sejenis dengan target nasional***

Berdasarkan gambar di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2024 sudah mencapai realisasi maksimal 100% oleh seluruh balai yang diperbandingkan. Keempat balai yang diperbandingkan juga telah mencapai target nasional sebesar 95%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil realisasi dan capaian keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Terdapat beberapa indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dihitung berdasarkan persentase antara lain:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tercapai 100% dimana seluruh rekomendasi sudah ditindaklanjuti berupa surat sanksi administratif sebanyak 256 rekomendasi dan telah diterima pelaku usaha.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil sebesar 100%, dimana seluruh keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat seperti surat pelaporan hasil pengawasan sarana dan produk sudah ditindaklanjuti seluruhnya sebanyak 70 hasil keputusan/rekomendasi.
3. Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 100% karena pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti seluruhnya sebanyak 7 laporan pengaduan diantaranya 1 rekomendasi terkait produk kosmetik dan 6 produk pangan.
4. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain tercapai 100% karena semua surat rekomendasi sebanyak 64 surat sudah ditindaklanjuti.

Indikator ini tercapai karena semakin baiknya kinerja dan respon Balai Besar POM di Banda Aceh menindaklanjuti serta menangani rekomendasi baik yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, Pusat, UPT lain maupun lintas sektor serta dalam respon cepat terkait isu-isu terkini pengawasan obat dan makanan. Koordinasi dan komunikasi yang semakin baik dengan pihak-pihak terkait serta pengelolaan administrasi rekomendasi internal Balai Besar POM di Banda Aceh telah dikelola dengan baik dengan adanya penetapan timeline penerbitan tindak lanjut sebagai bentuk percepatan tindak lanjut yaitu 7 hari kerja sejak diterbitkannya rekomendasi. Rekomendasi dari lintas sektor maupun pemangku kepentingan terkait obat dan makanan yang ditindak lanjuti segera merupakan respon aktif Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mengatasi dan mengelola isu-isu maupun permasalahan obat dan makanan yang terjadi khususnya permasalahan khusus di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Upaya selanjutnya untuk dapat terus mempertahankan dan meningkatkan capaian pada indikator ini adalah dengan selalu aktif melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi

yang dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan, koordinasi aktif dan melalui saluran komunikasi yang ada antara Balai Besar POM di Banda Aceh dengan pusat dan dengan UPT lain, dan melakukan koordinasi aktif dengan lintas sektor/pemangku kepentingan di Provinsi Aceh terkait isu dan permasalahan obat dan makanan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 22.*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	141.928.000	141.924.999	100	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator sesuai realisasi anggaran tahun 2024. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator persentase kinerja keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu:

1. Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 256 sarana, dan dalam rangka penanganan KLB dan Pengaduan Masyarakat sebanyak 7 yang dilaporkan ke Balai Besar POM di Banda Aceh.

2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Pusat terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), pemantauan produk *public warning*, *recall* dan produk terkait isu-isu yang beredar di masyarakat.
3. Koordinasi dan komunikasi aktif dengan Balai Besar POM di Medan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan terkait hasil pengawasan bahan tambahan pangan yang dilarang Boraks.
4. Koordinasi dan komunikasi aktif dengan lintas sektor terkait kelengkapan administrasi rekomendasi dari lintas sektor seperti surat penetapan KLB dan lainnya.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target, dan dipertahankan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi surat tindak lanjut yang diterima dan diterbitkan. Ketua tim terkait selalu melakukan monitoring dan mengingatkan petugas untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sarana, rekomendasi pusat, dari UPT lain maupun dari lintas sektor. Selain itu juga telah dilakukan komunikasi dengan pusat (Kedeputian I, II dan III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Banda Aceh yang memerlukan tindak lanjut dari pusat.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini menandakan bahwan risiko - risiko yang dapat menghambat pencapaian target telah dikelola dan dimitigasi dengan baik, yang mana faktor risiko utama yang bersifat operasional karena kelalaian petugas dan kurangnya monitoring dalam menindaklanjuti rekomendasi telah dilakukan tindakan pengendalian secara efektif.

7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 23.*Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,3	82,91	119,64	**Sangat Baik**

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari perhitungan:

% Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan = (A + B) /2

$$A = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ pelaku\ usaha}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ pelaku\ usaha} x\ 100\%$$

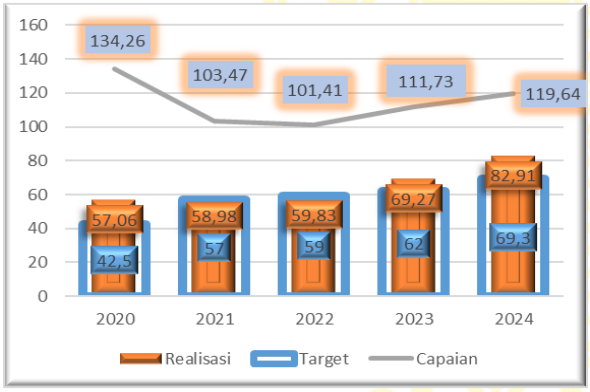
$$B = \frac{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ ditindaklanjuti\ oleh\ lintas\ sektor}{Jumlah\ rekomendasi\ yang\ diberikan\ kepada\ lintas\ sektor} x\ 100\%$$

Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kemetrina, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, saranan distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan

konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Pada tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 281 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, sebanyak 186 pelaku usaha dan instansi terkait yang memberikan respon tindak lanjut/feedback. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu sebesar 119,64% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 14. ***Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.***

Pada tahun 2024, capaian meningkat dibandingkan tahun 2021 sampai 2023, namun terdapat penurunan capaian dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2021 dilakukan penyesuaian target terhadap capaian tahun 2020 yang tidak dapat disimpulkan dan tahun selanjutnya dilakukan penyesuain target berdasarkan realisasi pada tahun sebelumnya. Pemenuhan capaian target ini dapat dicapai dan dipertahankan karena komitmen bersama, komunikasi dan sinergitas yang baik dengan pelaku usaha dan lintas sektor terkait yang mendukung pelaksanaan sistem yang terintegrasi sehingga terdapat peningkatan tindak lanjut oleh pelaku usaha.

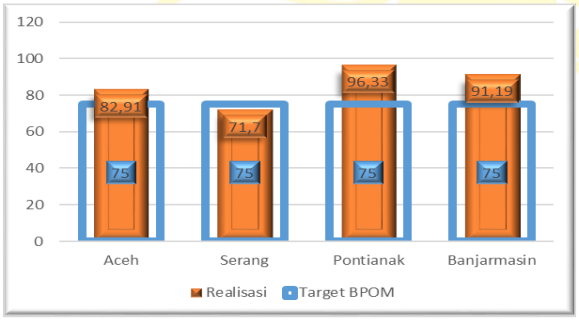
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 2024

Table 24.***Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan***

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,3	82,91	119,64	**Tercapai / Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	69,3	82,91	119,64	**Tercapai / Melampaui**

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 sudah mencapai target renstra tahun 2024 dengan kriteria tercapai / melampaui. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang mana target tersebut lebih tinggi dari target renstra tahun 2024. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan upaya yang lebih efektif dan berkesinambungan sehingga target tahun 2024 tercapai / melampaui dengan nilai capaian 119,64%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Grafik 15. ***Perbandingan Realisasi Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2024 dengan balai setara dan target Nasional***

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan untuk tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Pontianak, dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Serang. Dari 4 balai yang diperbandingkan, Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Banjarmasin sudah

mencapai target nasional, sedangkan Balai Besar POM di Serang masih berada di bawah target nasional yaitu 75%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 65,83%. Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha menurun dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 67,72%. Penurunan terjadi disebabkan masih ada pelaku usaha yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diberikan. Untuk dapat terus meningkatkan serta mempertahankan capaian terhadap indikator keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sesuai target yang ditetapkan, masih diperlukan beberapa upaya perbaikan dan langkah strategis secara berkesinambungan untuk meningkatkan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha khususnya pelaku usaha sarana produksi dan distribusi sarana pelayanan kefarmasian dengan melakukan pembinaan teknis kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA maupun melakukan Bimtek CAPA dan monev tindak lanjut rutin terhadap rekomendasi yang belum mendapat respon/tindak lanjut. Koordinasi dan komunikasi aktif terus dilakukan untuk percepatan respon tindak lanjut dari pelaku usaha dan secara aktif menanyakan melalui telepon maupun WhatsApp ke sarana / pelaku usaha terkait feedback (CAPA) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas Balai Besar POM di Banda Aceh.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh lintas sektor pada tahun 2024 terdapat 3 rekomendasi yang diterbitkan untuk lintas sektor terkait, yaitu untuk Dinas Kesehatan Aceh Jaya, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang terkait hasil pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian, serta Dinas Kesehatan Pidie Jaya terkait rekomendasi pembinaan pelaku usaha PIRT. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi

yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh lintas sektor memperoleh hasil 100,00%. Capaian ini diperoleh karena petugas Balai Besar POM di Banda Aceh yang aktif menanyakan melalui saluran komunikasi *WhatsApp* dan telepon ke Dinas Kesehatan terkait agar memberikan tindak lanjut secara administratif terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi maupun distribusi yang dikirimkan Balai Besar POM di Banda Aceh. Berdasarkan hasil tersebut capaian hasil rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pelaku usaha dan lintas sektor masih tetap memenuhi target yang ditetapkan. Upaya yang harus terus dilakukan yaitu mengadakan pertemuan secara rutin dengan pelaku usaha dan lintas sektor baik secara daring maupun luring sehingga pengawasan obat dan makanan dapat berjalan efektif.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 25.*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44.667.000	44.664.479	99.99	119.64	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku

kepentingan adalah:

- Tindak lanjut berupa CAPA langsung ditempat oleh sarana khususnya sarana distribusi obat tradisional/Obat Bahan Alam, kosmetik dan pangan sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan.
- Sosialisasi kepada pelaku usaha saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh agar memberikan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana walaupun belum maksimal dikarenakan masih terdapat pelaku usaha yang tidak mematuhi terkait pembuatan CAPA hasil pemeriksaan.
- Monitoring dan evaluasi Balai Besar POM di Banda Aceh terhadap rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha apakah sudah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan atau tidak sesuai timeline yang diberikan.
- Komunikasi aktif dan koordinasi yang berkesinambungan dengan lintas sektor untuk meningkatkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan terkait hasil pengawasan sarana maupun produk di kabupaten/kota terkait.

Rekomendasi pada tahun 2024 telah ditindaklanjuti seluruhnya sehingga target pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat tercapai dengan kategori “Sangat Baik”.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target, dan dipertahankan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi surat tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti pelaku usaha, memberikan bimbingan pembuatan CAPA yang baik kepada pelaku usaha. Selain itu koordinasi dan komunikasi aktif dengan lintas sektor juga dilakukan untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan secara administratif.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja indikator ini telah mencapai target dengan kategori sangat baik sebesar 119,64%, yang mana mencerminkan bahwa risiko - risiko yang ada pada indikator ini telah dikendalikan dengan efektif. Faktor risiko eksternal terkait kurangnya kepatuhan pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan telah dikendalikan dengan pemberikan sanksi yang lebih tegas, kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam menindaklanjuti CAPA dikendalikan dengan pemberian bimbingan pembuatan CAPA, serta peran petugas yang aktif dalam melakukan monitoring pelaku usaha dan lintas sektor yang belum menindaklanjuti rekomendasi telah dimitigasi dengan baik. Kemungkinan risiko ini akan muncul kedepannya tetaplah ada, walaupun demikian, berbagai strategi dan upaya pengendalian yang lebih efektif juga akan dilakukan agar risiko - risiko akibat kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan stake holder dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan dapat diminimalisir.

8. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 26.*Persentase keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120	120 (Dikonversi)	**Sangat Baik**

Realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah memenuhi target pada tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Baik. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

Indikator persentase Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

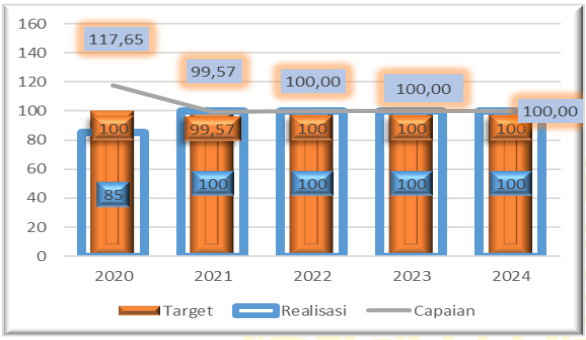
$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\textit{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\textit{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \text{x100\%}$$

Yang dimaksud **tepat waktu** adalah **tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian**.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dan lainnya. Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 diperoleh dari 328 sertifikat yang diterbitkan

dari semua permohonan yang diterima. Seluruh sampel pengujian pihak ketiga dan rekomendasi keputusan sertifikasi lainnya seluruhnya telah diselesaikan/dikeluarkan sesuai dengan ketentuan timeline masing-masing layanan. Persentase capaian sudah sesuai target yang ditetapkan yaitu 100% dan dikonversi menjadi 120 % dengan kategori **Sangat baik.**

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 16. ***Perbandingan realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 hingga 2024***

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 sudah mencapai target 100% sama seperti pada tahun 2022 dan 2023, dan meningkat dibandingkan tahun 2021, dikarenakan target tahun 2020 sebesar 85% dan capaian 100%. Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 target yang ditetapkan sudah maksimal 100% dan tercapai sesuai target. Hal ini dikarenakan adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari setiap unit terkait untuk mencapai penyelesaian sertifikasi sesuai dengan timeline yang ditetapkan sehingga realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 tetap dapat dipertahankan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 2024

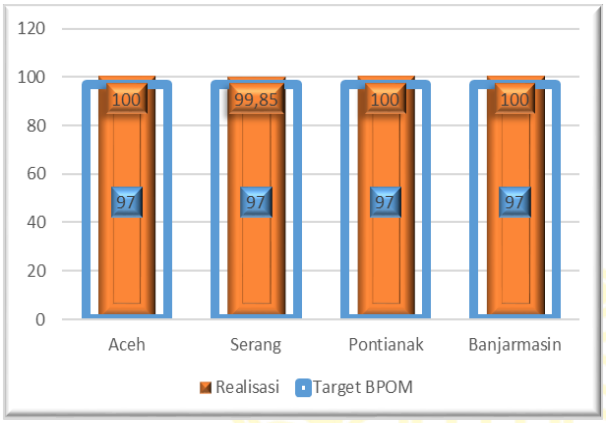
Table 27.*Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 dengan target renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120	120 ▲	**Tercapai**

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 sudah mencapai target renstra tahun 2024. Walaupun demikian

masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi agar capaian renstra sampai tahun 2024 tetap tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara, dengan target nasional



Grafik 17. ***Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dan target nasional***

Berdasarkan gambar disamping dapat disimpulkan bahwa persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 yang terendah adalah Balai Besar POM di Serang sebesar 99,85%, sedangkan Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Banjarmasin sudah mencapai realisasi 100%. Realisasi keempat balai yang diperbandingkan sudah mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu 94%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keputusan sertifikasi didominasi oleh layanan penerbitan sertifikat pengujian sampel pihak ketiga sebanyak 242 sertifikat (73,78%) dan sisanya 86 keputusan (26,22%) terdiri dari 55 Izin penerapan CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB dan CPPOB (16,76%), rekomendasi pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA 14 sarana (4,26%), rekomendasi pemenuhan aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 5 sarana (1,52%), rekomendasi pemenuhan aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) 3 sarana (0,91%), rekomendasi dalam rangka verifikasi IP CPPOB skala UMK 31 sarana (9,45%), rekomendasi hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan izin penerapan CPPOB untuk UMK 30 sarana (9,14%), dan rekomendasi hasil

pemeriksaan sertifikasi SMKPO 1 sarana (0,30%). Loka POM Aceh Tengah dan Loka POM Aceh Selatan tidak melakukan pengujian sampel pihak ketiga sehingga layanan pengujian sampel yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh tidak termasuk untuk wilayah kerja Loka Aceh Tengah dan Loka Aceh Selatan.

Penyelesaian 242 sertifikat sampel pengujian dapat dilakukan tepat waktu didukung dengan kompetensi dan komitmen personil laboratorium pengujian Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu dengan memangkas *timeline* pengujian hingga terbit sertifikat hasil uji sampel barang bukti tindak pidana narkotika dari 10 HK menjadi 2 HK saja. Sedangkan untuk pengujian sampel selain barang bukti tindak pidana narkotika dapat terpenuhi dengan dukungan peningkatan kompetensi dan efisiensi SDM di laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh. Koordinasi yang baik antara subkelompok substansi sertifikasi dengan kelompok substansi pengujian dan tim penerima sampel untuk penyelesaian pengujian sampel pihak ketiga juga menjadi faktor penting keberhasilan keputusan sertifikasi dapat diselesaikan tepat waktu.

Sementara itu sebanyak 86 keputusan sertifikasi lainnya yang dapat diselesaikan sesuai timeline layanan dapat tercapai dengan didukung pelaksanaan bimbingan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan tahapan registrasi; adanya *desk*-konsultasi registrasi dan *desk*-CAPA (*Corrective Action Preventive Action*) atas temuan audit yang dilakukan. Selain itu, keputusan sertifikasi dapat sesuai dengan timeline didukung oleh komitmen dan kompetensi petugas sertifikasi dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk, Evaluasi secara berjenjang dilaksanakan dengan baik.

Sebagai implementasi Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya menyebabkan adanya penyesuaian dalam penerbitan proses perizinan yaitu proses perizinan awal dimulai dari aplikasi OSS (*Online Sinle Submision*). Oleh karena itu, Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan SKPD terkait lainnya agar terdapat kesamaan persepsi antar petugas sehingga mampu memberikan informasi yang tepat dalam setiap tahapan perizinan.

Meskipun sudah mencapai target, masih diperlukan upaya untuk mempertahankan kinerja agar tetap mencapai target yang ditetapkan secara maksimal, antara lain dengan:

1. Koordinasi dengan lintas sektor dan Inkubator Bisnis di Perguruan Tinggi untuk pengembangan serta memberikan stimulus kepada UMKM agar target UMKM mendapatkan manfaat seperti pengembangan jaringan distribusi dan permodalan.
2. Melakukan program desk CAPA secara berkesinambungan dan terprogram secara onsite maupun daring. termsuk yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA.
3. Meningkatkan kompetensi dan penyamaan presepsi serta *sharing knowledge* antara petugas di SubKelompok Substansi Sertifikasi dan Kelompok Subtansi Infokom.
4. Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara *online* dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Koorporasi melalui Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM.
6. Memperkuat layanan prima dalam pendampingan e-sertifikasi untuk produk pangan, kosmetika dan Obat Tradisional.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 28.*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	284.290.000	284.145.203	99.95 %	120%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya target jumlah keputusan sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan kompetensi petugas layanan Sertifikasi secara daring untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaku usaha. Pelatihan yang diikuti oleh petugas yaitu pelatihan fasilitator pangan, kosmetik dan OTSK, pelatihan inspektur kosmetik, sosialisasi dan bimtek terkait registrasi pangan olahan berbasis risiko, sosialisasi dan bimtek tentang penerapan SMKPO, dan pelatihan lainnya yang terkait dengan perizinan pangan dan OTSK.
2. Penambahan alat laboratorium, peningkatan kompetensi personil, dan penambahan ruang lingkup pengujian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian pihak ketiga.
3. Pelaksanaan program “KORPORASI” (Kolaborasi Fasilitasi UMK dalam Sertifikasi dan Izin Edar) Balai Besar POM di Banda Aceh bersama OPD terkait untuk berkolaborasi memfasilitasi UMK dalam proses sertifikasi sarana dan registrasi izin edar obat tradisional, kosmetika dan pangan di Aceh guna meningkatkan pemenuhan mutu dan standar produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kepercayaan publik terhadap produk UMK lokal di Aceh. Kegiatan Koorporasi meliputi:
    a. Pembentukan fasilitator sehingga dapat mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi karena dapat memberikan layanan konsultasi secara langsung kepada pelaku usaha. Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan rekruitmen dan melatih 1 (satu) tenaga profesional dari luar,

ditugaskan melakukan pendampingan secara intesif pada pelaku usaha yang mengajukan permohonan izin penerapan CPPOB dan registrasi izin edar.

b. Pelatihan Fasilitator Layanan Sertifikasi dan Izin Edar. Pelatihan Fasilitator telah dilaksanakan pada bulan April tahun 2024.

c. Pendampingan yang intensif terkait denah dan sertifikasi sarana produksi. Pendampingan dilakukan secara langsung ke sarana produksi melalui kegiatan asistensi dan kepada beberapa pelaku usaha secara *on the spot* pada saat kegiatan bimbingan teknis cara produksi yang baik dengan metode *desk-consultation*

d. Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembinaan kepada pelaku usaha yang akan mengajukan layanan sertifikasi baik secara daring maupun luring. Salah satunya yaitu akan dilaksanakan pelaksanaan Bimtek e-Reg Pangan pada bulan Juli tahun 2024.

4. Pelayanan prima di Mall Pelayanan Publik Provinsi Aceh, Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Masyarakat bisa datang ke *booth* Balai Besar POM di Banda Aceh yang berada di Mall Pelayanan Publik untuk mendapatkan informasi terkait pendaftaran obat dan makanan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 dan laporan interim tahun 2024, pencapaian indikator ini telah tercapai seluruhnya sesuai target untuk tahun 2024, Rekomendasi pada laporan interim telah dilaksanakan sehingga capaian tetap dapat dipertahankan. penyumbang terbesar capaian ini adalah terkait penerbitan sertifikat layanan pengujian sampel pihak ke 3 yang diselesaikan tepat waktu dan dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 target untuk indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah 100% dan selalu tercapai 100% setiap tahunnya.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian pada indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menandakan bahwa berbagai risiko yang mungkin timbul untuk menghambat capaian ini telah dimitigasi dan dikendalikan dengan baik sehingga memberikan dampak yang efektif terhadap capaian. Komitmen dari seluruh unit terkait dalam pemenuhan indikator ini sangat berperan penting sehingga capaian pada indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu selalu dapat dicapai 100%.

9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 29.*Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,7	82,28	114,76	**Sangat Baik**

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

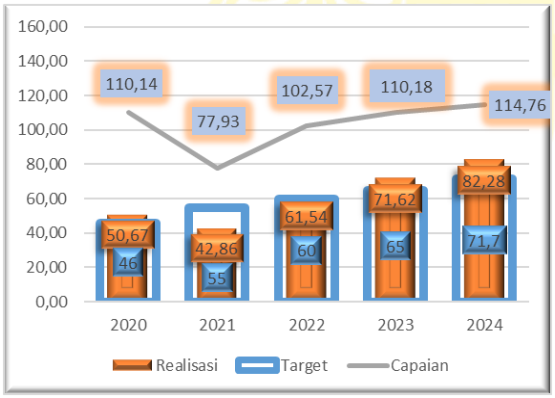
$$\frac{Jumlah\ sarana\ produksi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ produksi\ obat\ dan\ makanan\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

Sarana Produksi obat dan makanan yang diperiksa Balai Besar POM di Banda Aceh meliputi sarana produksi obat tradisional UKOT dan UMOT, sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan MD dan IRTP, sarana produksi obat dan makanan. Memenuhi ketentuan yang dimaksud yaitu tidak adanya temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau hasil Pemeriksaan dengan rating A dan B untuk produksi pangan MD dan hasil rating Level I dan II untuk produksi pangan IRTP pada saat dilakukan Pemeriksaan dan tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan dan perintah perbaikan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada Per BPOM No. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM No. 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro. Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan cara produksi obat dan makanan yang baik konsisten dilakukan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sebanyak 79 sarana yang ditetapkan berdasarkan analisis kajian risiko dengan hasil pemeriksaan sebanyak 65 sarana Memenuhi Ketentuan dan sebanyak 14 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan sehingga persentase sarana yang diperiksa yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 82,28%. Dengan demikian capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target yaitu 114,76 dengan kriteria Sangat baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 18. ***Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga tahun 2024.***

Untuk tahun 2024, terdapat kenaikan capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tercapainya indikator ini dikarenakan adanya komitmen dan upaya yang lebih aktif dari petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dalam membina sarana produksi obat dan makanan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

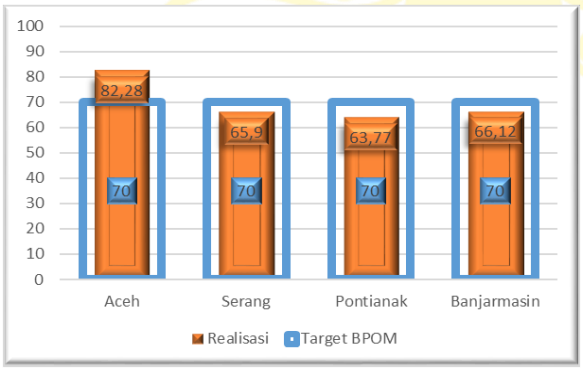
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 2024

Table 30.*Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dengan target Renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	71,7	82,28	115,59	**Tercapai / Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	71,7	82,28	114,76	**Tercapai / Melampaui**

Realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 sudah mencapai target renstra tahun 2024 dengan kriteria tercapai/melampaui. Reviu target tahun 2024 sudah dilakukan pada Bulan Desember 2023 oleh Biro Perencanaan untuk indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan menjadi 71,7. Penetapan target disesuaikan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 71,62%. Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan upaya peningkatan dan perbaikan untuk sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sehingga target tahun 2024 tercapai/melampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara, dengan target nasional



Grafik 19. ***Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dengan balai setara dan target nasional***

Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Banda Aceh dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Pontianak. Dari 4 balai yang diperbandingkan, hanya Balai Besar POM di Banda Aceh yang telah mencapai target nasional, sedangkan Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Pontianak dan

Balai Besar POM di Banjarmasin belum mencapai target nasional tahun 2024 yang ditetapkan yaitu sebesar 70%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria sangat baik. Pemilihan sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis risiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat / *track record* tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan / laporan dari pihak luar, sarana produksi yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah diperiksa. Pemeriksaan sarana produksi yang paling banyak dilakukan pemeriksaan didominasi oleh sarana produksi industri pangan, dari sebanyak 57 sarana industri pangan olahan yang diperiksa, sebanyak 44 sarana yang memenuhi ketentuan namun sebanyak 13 sarana tidak memenuhi ketentuan dan untuk sarana produksi industri rumah tangga pangan 3 sarana dan sebanyak 3 sarana yang diperiksa sudah memenuhi ketentuan. Terdapat penurunan sarana industri pangan yang MK pada sarana sertifikasi dalam rangka audit pemenuhan CPPOB, dimana sarana yang telah melakukan penilaian mandiri pemenuhan CPPOB saat dilakukan pemeriksaan tidak menerapkan CPPOB tersebut secara konsisten. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan terutama pada sarana industri pangan olahan Air Minum Dalam Kemasan yang tidak memenuhi CPPOB terkait higiene sanitasi dan hasil uji laboratorium. Walaupun demikian juga terdapat peningkatan capaian rating hasil pemeriksaan sarana industri pangan (kepatuhan pelaku usaha meningkat) dari pemeriksaan sebelumnya yang mana sarana tersebut TMK menjadi MK saat pemeriksaan kembali. Pemilihan target sarana inspeksi berdasarkan riwayat hasil pemeriksaan sarana sebelumnya. Pembinaan yang berkesinambungan yang dilakukan petugas juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan komitmen dalam penerapan cara

produksi pangan olahan yang baik agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas terutama terkait *hygiene* dan sanitasi produksi makanan. Koordinasi dengan lintas sektor Dinas Kesehatan juga dilakukan untuk melakukan pembinaan baik berupa bimtek CPPIRT kepada pelaku usaha IRTP di wilayah Kabupaten/Kota.

Untuk sarana produksi usaha kecil obat tradisional sebanyak 1 sarana tidak memenuhi ketentuan dari 7 sarana UKOT yang diperiksa. Sarana UKOT yang tidak memenuhi ketentuan tersebut disebabkan belum lengkapnya dokumen dan prosedur tertulis dalam proses produksi sesuai persyaratan terhadap UKOT 2.

Sarana produksi UMOT yang diperiksa sebanyak 6 sarana dan industri kosmetik sebanyak 6 sarana sudah memenuhi ketentuan untuk semua sarana yang diperiksa.

Selama tahun 2024, peningkatan kompetensi petugas dan sharing ilmu juga dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memperkecil gap kompetensi antar petugas. Peningkatan kompetensi yang telah dilakukan yaitu Inspektur CPOTB tingkat dasar, Inpektur kosmetik Junior, Inspektur pangan tingkat Madya, pelatihan DIP produk kosmetik, dan Bimtek Fortifikasi dan berbagai forum komunikasi dan sosialisasi maupun webinar bersifat teknis. Pelatihan berjenjang pada petugas juga dilakukan melalui pelatihan internal yang sesuai dengan kurikulum PPSDM atau dengan pelatihan melalui IDEAS sehingga gap kompetensi dapat semakin diperkecil.

Penyumbang TMK sarana produksi terbesar adalah sarana produksi pangan. Berbagai upaya telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh berupa pembinaan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar melaksanakan proses produksi sesuai ketentuan dan cara produksi obat dan makanan yang baik, pemberian sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serta peningkatan koordinasi dan pengawalan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Obat dan Makanan dengan lintas sektor. Upaya-upaya ini perlu dilakukan terus menerus supaya pelaku usaha lebih peduli terhadap keamanan produk obat dan makanan yang diproduksi dan senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 31.*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	278.859.500	278.759.948	99,96	114,76	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator ini adalah berupa bimbingan teknis Cara Produksi Obat dan Makanan yang Baik bagi pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk obat dan makanan yang aman dan bermutu. Peningkatan kompetensi petugas pengawas baik secara daring maupun luring guna pemerataan dan penyamaan persepsi terkait pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan, serta membuka layanan konsultasi dengan petugas yang kompeten untuk pendampingan bagi pelaku usahah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Pada tahun 2024 telah dilakukan peningkatan kompetensi petugas dalam pelatihan terkait KItchen Inspection, khususnya pengawasan yang akan dilakukan pada sarana-sarana yang menyediakan pangan untuk VVIP ataupun tamu negara. Pelatihan ini juga dapat diterapkan dalam pemeriksaan CPPOB pemastian terkait higiene sanitasi yang telah diterapkan oleh sarana industri pangan olahan terutama pada sarana UMK.

h. Formasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 dan laporan interim triwulanan tahun 2024, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target untuk capaian tahunan dan juga lebih baik dari tahun 2023. berbagai upaya telah dilakukan oleh petugas seperti pemberian bimbingan kepada pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan sehingga pada pemeriksaan selanjutnya tidak menjadi temuan berulang di sarana produksi, sarana - sarana baru yang telah mendapat sertifikat CPPOB juga berkomitmen dalam penerapan CPPOB sehingga kepatuhan pelaku usaha sarana produksi obat dan makanan juga meningkat. Selain itu, seluruh rekomendasi pada laporan interim juga telah dilaksanakan sehingga capaian tetap dapat dipertahankan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian pada indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan mencapai target dengan kategori sangat baik. berbagai risiko yang muncul baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Walaupun demikian, tantang untuk tahun kedepannya terkait sarana produksi obat dan makanan akan semakin menantang, pelaku usaha UMK semakin banyak yang memproduksi produk risiko rendah dengan kemudahan pengurusan izin edar OSS RBA berupa evaluasi dokumen dan audit lapangan dilakukan satu tahun setelah izin terbit akan menjadi tantangan kembali untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi obat dan makanan yang baik sesuai ketentuan. risiko terkait adanya fraud/penyalahgunaan wewenang dan adanya gratifikasi juga telah dikendalikan secara efektif. risiko-risiko lain yang muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 32.*Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85,5	90,16	105,45	**Sangat Baik**

Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ sarana\ distribusi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ distribusi\ obat\ dan\ makanan\ yang\ diperiksa}\ x\ 100\%$$

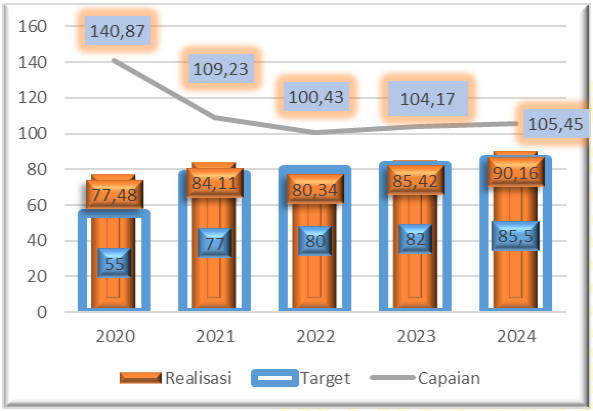
Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa ditetapkan berdasarkan kajian analisis risiko dan penetapan kesimpulan sarana apakah Memenuhi Ketentuan atau Tidak memenuhi ketentuan mengacu pada:

1. Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat.
2. Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika.
3. Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan
4. Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pemilihan sarana yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis risiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat / track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa. Pada tahun 2024, telah dilakukan Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 965 sarana diperiksa dari target 947 sarana dengan hasil sebanyak 870

sarana Memenuhi Ketentuan dan 95 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, sehingga persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu sebesar 90,16%. Dengan demikian capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 105,45% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 20. *Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2020 hingga 2024*

Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa capaian tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun 2022 dan 2023 tetapi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 walaupun masih dalam kategori sangat baik. Realisasi tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2021 dilakukan penyesuaian target dikarenakan capaian tahun 2020 tidak dapat disimpulkan. capaian indikator ini dapat ditingkatkan dikarenakan adanya peningkatan sarana Memenuhi Ketentuan pada sarana distribusi obat, pelayanan kefarmasian Puskesmas, sarana obat tradisional dan sarana pangan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 2024

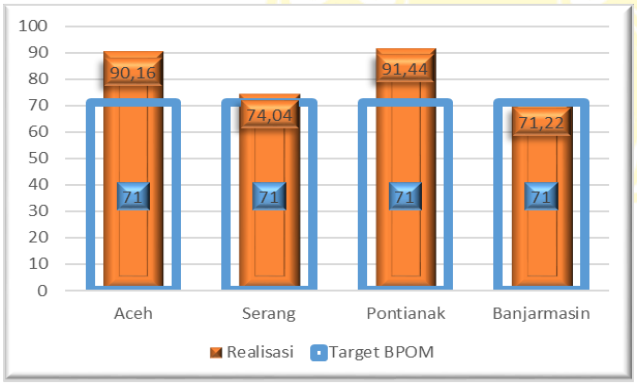
Table 33.*Perbandingan realisasi kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang	85,5	90,16	105,45 ▲	**Tercapai / Melampaui**

memenuhi ketentuan	Target PK 2024	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
	85,5	90,16	105,45 ▲	**Tercapai / Melampaui**

Realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 sudah mencapai target renstra 2024 yaitu dengan kategori tercapai/melampaui. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan menjadi 85,5%. Penetapan target disesuaikan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 85,42%. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif untuk pembinaan sarana distribusi obat dan makanan sehingga target tahun 2024 tercapai/melampaui dengan nilai 90,16%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai Lain yang sejenis / setara, dengan target nasional



Grafik 21. ***Perbandingan realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional***

Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan untuk tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Pontianak, dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Banjarmasin. Seluruh balai-balai yang diperbandingkan sudah mencapai target nasional tahun 2024 yang ditetapkan yaitu 71%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi

perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat dan saryanfar telah dilakukan sebanyak 328 sarana dari target 322 sarana dengan hasil sebanyak 279 sarana Memenuhi ketentuan (85,06%) dan 49 sarana Tidak memenuhi ketentuan (14,94%). Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian terdiri atas pemeriksaan pada PBF sebanyak 19 sarana dengan hasil 12 sarana memenuhi ketentuan dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada apotek sebanyak 81 sarana dengan hasil 63 sarana memenuhi ketentuan dan 18 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada toko obat sebanyak 33 sarana dengan hasil 28 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 14 sarana dengan hasil 12 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada rumah sakit sebanyak 41 sarana dengan hasil 38 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada puskesmas sebanyak 59 sarana dengan hasil 57 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan dan pemeriksaan pada klinik sebanyak 81 sarana dengan hasil 69 sarana memenuhi ketentuan dan 12 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sarana pelayanan kefarmasian yang paling banyak memenuhi ketentuan yaitu puskesmas, dimana puskesmas di wilayah Aceh sudah banyak yang memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab farmasi di Puskesmas dan telah melakukan pengelolaan obat dengan baik. Berkurangnya ketidaksesuaian dengan kategori kritis maupun bersifat mayor sistemik terhadap pengelolaan obat sehingga hasil pemeriksaan bersifat pembinaan teknis maupun surat tindak lanjut administratif berupa peringatan menjadikan hasil pemeriksaan sarana Memenuhi Ketentuan. Sarana distribusi obat dan saryanfar yang tidak memenuhi ketentuan terutama didominasi oleh sarana apotek dan klinik, masih terdapat apotek maupun klinik yang belum memiliki izin operasional dan penanggung jawab seorang apoteker, melakukan pengelolaan obat tidak sesuai ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan obat narkotika dan psikotropika yang tidak baik, penyaluran yang tidak tertelusur, pengelolaan produk CCP yang tidak baik dan faktor mayor dan kritis yang

dapat menurunkan mutu produk. PBF yang tidak memenuhi ketentuan dikarenakan mendapat rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK) karena melakukakan pelanggaran bersifat kritikal terhadap CDOB.

Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan telah dilakukan terhadap 637 sarana dari target sebanyak 625 sarana dengan hasil 591 sarana Memenuhi Ketentuan (92,78%) dan 46 sarana Tidak memenuhi ketentuan (7,22%). Pemeriksaan pada sarana obat tradisional sebanyak 63 sarana dengan hasil 60 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada sarana suplemen kesehatan sebanyak 14 sarana dengan hasil seluruhnya memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada sarana distribusi kosmetik sebanyak 400 sarana dengan 366 sarana memenuhi ketentuan dan 34 sarana tidak memenuhi ketentuan, pemeriksaan pada sarana distribusi pangan sebanyak 160 sarana dengan hasil 151 sarana memenuhi ketentuan dan 9 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sarana distribusi yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi kosmetik disebabkan masih banyaknya produk - produk tanpa izin edar karena tren kosmetik kekinian dan produk tanpa izin edar dari luar negeri, dan juga bertambahnya sarana-sarana distribusi baru yang belum pernah mendapat pembinaan dari Balai Besar POM di Banda Aceh.

Pada sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan, jumlah sarana yang memenuhi ketentuan meningkat dikarenakan semakin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha yang telah dibina sebelumnya untuk tidak mengulangi kesalahan pada pengawasan selanjutnya terutama terkait produk ilegal dan kedaluwarsa.

Capaian indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan kepatuhan pelaku usaha terutama pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian meningkat dibandingkan tahun 2023. Walaupun demikian masih terdapat kelalaian pelaku usaha di sarana distribusi obat seperti PBF yang tidak konsisten dalam menerapkan CDOB serta apotek - apotek yang menyalurkan obat keras tidak sesuai ketentuan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian persentase

sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha dapat berupa bimbingan teknis seperti Bimtek CDOB, sosialisasi peraturan terbaru maupun pembinaan langsung saat pemeriksaan sarana untuk selalu memenuhi ketentuan terkait cara distribusi obat dan makanan yang baik serta penerapan sanksi yang sesuai ketentuan.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 34*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	877,236,500	876,129,649	99,87	105,45	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja indikator ini antara lain:

- Bimtek distribusi dan pelayanan kefarmasian petugas Balai Besar POM di Banda Aceh.
- Bimtek SMKPO bagi petugas dan sarana distribusi pangan olahan.
- Pembinaan teknis secara intensif kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku terkait distribusi obat dan makanan.
- Pembinaan berkelanjutan pada sarana pelayanan kefarmasian yang TMK pada tahun sebelumnya telah melaksanakan cara pengelolaan obat sesuai ketentuan

disertai komitmen dari APJ dan pemilik sarana seperti penyerahan obat yang sering disalahgunakan serta antibiotik harus dengan resep dokter.

- Pemeriksaan bersama dengan tim pusat terkait sarana SMKPO dan distribusi pangan olahan.
- Pemeriksaan bersama dengan lintas sektor pada kegiatan intensifikasi pangan Ramadhan, Aksi kosmetik ilegal, aksi obat tradisional ilegal, Natal dan Tahun Baru dan pemeriksaan bersama di sarana pelayanan kefarmasian dan pemeriksaan bersama penggunaan antibiotik pada pakan hewan.
- Pemberian sanksi administratif sesuai Pedoman kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan tahun 2024, pencapaian indikator ini telah pernah tidak tercapai berdasarkan laporan interim I yaitu 94,91%, tetapi meningkat pada Interim II tercapai 102,96%, pada interim III tercapai 104,02%, dan dicapai sebesar 105,45% pada akhir tahun 2024. Informasi dari laporan dimanfaatkan dengan menindaklanjuti rekomendasi dengan melakukan bimtek kepada petugas untuk meningkatkan kompetensi sehingga menjadi petugas yang kompeten dalam melakukan pengawasan dan memiliki persepsi yang sama dalam penetapan sanksi kepada pelaku usaha. pemberian sosialisasi terkait larangan penyaluran antibiotik tanpa resep dokter serta kehatian-hatian penyaluran obat yang sering disalahgunakan kepada pelaku usaha sarana pelayanan kefarmasian juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha. Balai Besar POM di Banda Aceh juga dilibatkan dalam kegiatan yang diinisiasi oleh IAI Aceh dalam pemberian materi terkait Cara Distribusi Obat yang baik kepada para APJ PBF. Dengan demikian diharapkan para pelaku usaha khususnya dibidang distribusi obat dapat meningkat. Selain itu capaian ini juga ditingkatkan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi dan penetapan sarana berdasarkan analisis risiko dan penambahan sarana - sarana baru.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian pada indikator Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan telah tercapai untuk target tahun 2024 dengan kategori sangat baik dan juga lebih baik dari tahun 2023. Berbagai risiko yang mungkin muncul dan risiko yang juga telah terjadi dapat dikendalikan dengan efektif. Seperti adanya penolakan oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pemeriksaan telah dikendalikan dengan melakukan komunikasi persuasif kepada pelaku usaha, peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek teknis untuk meminimalisir risiko terkait operasional. Pemberian tindak lanjut yang lebih tegas juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha yang merupakan faktor eksternal penyebab risiko. Risiko - risiko yang menghambat pencapaian indikator ini telah dimitigasi dan akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih sesuai dan relevan untuk kondisi yang akan datang.

11. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 35. *Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4.45	4.90	110.11 %	**Sangat Baik**

Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik yaitu:

1. Kebijakan pelayanan (Standar Pelayanan, FKP).
2. Profesionalisme SDM (waktu pelayanan, kode etik, motivasi, penghargaan, budaya pelayanan).
3. Sarana prasarana (parkir, ruang tunggu, toilet, sarpras disabilitas, front office).
4. Sistem informasi pelayanan publik (SIPP penunjang, kualitas, pemutakhiran

data).

5. Konsultasi dan pengaduan (sarana prasarana, media, akuntabilitas dan tindaklanjut).
6. Inovasi pelayanan (penciptaan, sumber daya).

Pengolahan data dilakukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu penentuan bobot pada setiap indikator aspek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Pembobotan dari penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan.

Pengolahan data dilakukan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu penentuan bobot pada setiap indikator aspek penilaian dalam Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik. Pembobotan dari hasil analisis dengan metode AHP dapat digunakan untuk menentukan bobot aspek dan indikator instrumen yang digunakan dalam evaluasi kinerja pelayanan publik dikarenakan telah memenuhi kriteria yaitu nilai *Consistency Ratio* (CR) di bawah 10% dan memiliki nilai konsensus lebih dari 65%: Untuk penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik itu sendiri dilakukan melalui desk evaluation, pengisian kuesioner, observasi, dan wawancara. Pengisian kuesioner menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner yang akan divalidasi menggunakan teknik observasi dan wawancara, diantaranya:

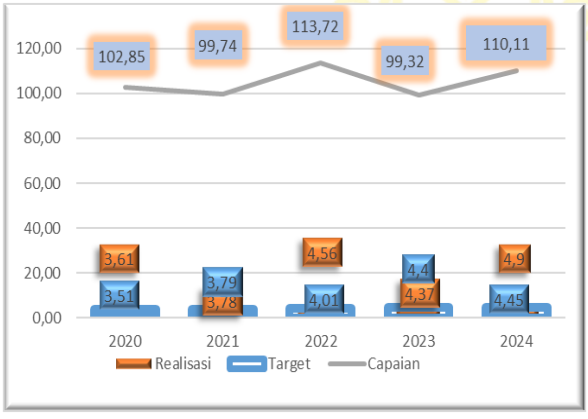
1. Formulir F-01 diisi oleh unit pelayanan publik,
2. Formulir F-02 diisi oleh evaluator,
3. Formulir F-03 diisi oleh pengguna layanan.

Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 2 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai hasil pembobotan formulir F02 dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori yaitu:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan unit kerja sehingga dapat melihat mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Nilai Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh telah diperoleh sebesar 4,90 dari target 4,45 dengan capaian sebesar 110.11% dan dengan kategori Nilai IPP "Pelayanan Prima".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 22. ***Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 hingga tahun 2024***

Target tahunan Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh adalah target yang diperoleh pada TW III 2024. Berdasarkan grafik di atas terdapat peningkatan realisasi dan capaian indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2020, 2021,2022, dan 2023 (4.37) dimana nilai

Indeks tahun 2024 (4.90) meningkat sebesar 0.53 poin sehingga Balai besar POM di Banda Aceh memperoleh predikat pelayanan Prima. Indeks Pelayanan Publik (IPP) menjadi salah satu indikator prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan 6 Aspek yaitu:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%).
2. Profesionalitas SDM (25%).
3. Sarana Prasarana (18%).
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%)
5. Konsultasi dan Pengaduan (10%).
6. Inovasi (12%).

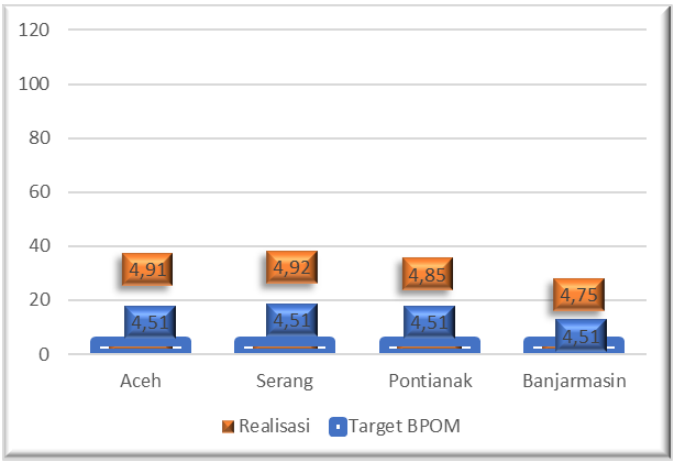
a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2024

Table 36.*Perbandingan Realisasi Indeks pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banda Aceh	4,45	4,90	110.11 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Pada perbandingan indeks pelayanan publik antara target renstra 2024 dengan realisasi target tahun 2024 telah memenuhi target hingga tahun 2024 dengan capaian sebesar 110.11 % dengan kategori “Tercapai/Melampaui”. Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan selalu mengupdate data dukung yang diperlukan sesuai 6 aspek penilaian pada UPP dan melakukan pemutakhiran data dan informasi di SIPP.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Grafik 23. ***Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional***

Berdasarkan gambar di atas, realisasi nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 yang tertinggi diperoleh Balai Besar POM di Serang 4,92 (Pelayanan Prima) diikuti oleh Balai Besar POM di Banda Aceh 4,90 (Pelayanan Prima), Balai Besar POM di Pontianak 4,85 (Pelayanan Prima) dan Balai Besar POM di Banjarmasin 4,75 (Pelayanan Prima). Dari keempat balai yang dibandingkan seluruhnya telah melebihi target nasional (4,51). Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus berupaya dan meningkatkan pelayanan untuk dapat mempertahankan predikat pelayanan prima di tahun selanjutnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2024 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,90 bagi Balai Besar POM di Banda Aceh menunjukan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 sebesar 4,37 yang naik signifikan dari predikat Pelayanan Sangat Baik menjadi Pelayanan Prima, naik 0,53 poin. Kerjasama dan komitmen tim antar fungsi dalam menyampaikan data dukung evaluasi kinerja pelayanan publik ini sangat berdampak pada penilaian, tentunya ini akan menjadi tantangan untuk mempertahan hasil baik yang telah diperoleh kedepannya. Hasil penilaian IPP tahun 2024 terdapat 3 aspek penilaian yang nilainya perlu ditingkatkan yaitu Aspek Kebijakan Pelayanan, Sarana Prasarana, dan Inovasi, dapat dilihat dari sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelayanan: nilai indeks peraspek 4.86
2. Profesionalitas SDM: nilai indeks peraspek 5
3. Sarana Prasarana: nilai indeks peraspek 4.8
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP): nilai indeks peraspek 5
5. Konsultasi dan Pengaduan: nilai indeks peraspek 5
6. Inovasi: nilai indeks peraspek 4.5

Kurang maksimalnya nilai pada ketiga aspek penilaian tersebut berdampak pada rendahnya nilai pada F02 yang mempunyai bobot 75% dari total perhitungan Indeks Pelayanan Publik. Tim Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus berupaya dan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga di tahun mendatang Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mempertahankan predikat Pelayanan Prima.

Faktor penyebab keberhasilan capaian Indeks Pelayanan Publik yaitu:

Memenuhi semua indikator Indeks Pelayanan Publik pada 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik yaitu:

1. Kebijakan pelayanan (Standar Pelayanan, FKP).
2. Profesionalisme SDM (waktu pelayanan, kode etik, motivasi, penghargaan, budaya pelayanan).
3. Sarana prasarana (parkir, ruang tunggu, toilet, sarpras disabilitas, front office).
4. Sistem informasi pelayanan publik (SIPP penunjang, kualitas, pemutakhiran data).
5. Konsultasi dan pengaduan (sarana prasarana, media, akuntabilitas dan tindak lanjut).
6. Inovasi pelayanan (penciptaan, sumber daya).

d. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 37.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pelayanan publik*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efesiensi
Indeks pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banda Aceh	24.621.250	23.522.000	95.54 %	110.11	**Efisien**

Penggunaan anggaran pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) efisien. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Alokasi anggaran pada IPP yaitu sarana prasarana ruang pelayanan publik, publikasi di media cetak, elektronik dan media sosial balai serta penyelenggaraan forum konsultasi publik terkait produk layanan Balai Besar POM di Banda Aceh.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Pelayanan Publik di Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024, diantaranya dengan cara:

1. Reviu Standar Pelayanan dan merumuskan maklumat pelayanan.
2. Menetapkan Surat Keputusan Tim Pelayanan Publik, Kode Etik yang mengakomodir Layanan kelompok rentas serta Reward dan Punishment.
3. Melengkapi sarana dan prasarana layanan publik, dimana mulai tahun 2024 sudah fokus pemenuhan bagi pengguna layanan disabilitas.
4. Melakukan pemutahiran data di website dan subsite.
5. Menjalankan program inovasi pelayanan publik.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, maka rencana aksi yang dilakukan yaitu:

1. Melengkapi Rekomendasi penilaian IPP tahun 2024 yaitu,

a. Tindaklanjut Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan lebih baik dengan memperhatikan 3 (tiga) nilai terendah.
b. Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.
c. Penciptaan Inovasi & Pelayanan Publik.

2. Sarana prasarana akan dilengkapi pemandu untuk layanan prioritas dan bahasa isyarat.
3. Inovasi pelayanan publik diupayakan masuk kompetisi internal maupun nasional (KOIN BPOM).

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan informasi saran perbaikan laporan kinerja maka untuk mencapai target renstra telah dilakukan upaya sebagai berikut:

- Penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan berbagai unsur dan profesi seperti Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Mahasiswa dan lapisan Masyarakat serta melaksanakan monitoring evaluasi secara berkelanjutan.
- Mendokumentasikan dan mempublikasikan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Nilai SKM di area ruang pelayananan (brosur, poster/banner, katalog, dan media informasi (baliho), media cetak, dan website/media social.
- Hasil SKM berupa saran dan kritik di tindaklanjuti dan dibuatkan laporan hasil tindaklanjut SKM.
- Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana ruang layananan sehingga memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan.
- Pengembangan Kompetensi dan Profesionalisme petugas layanan.
- Pemutakhiran informasi pelayanan publik dilakukan secara rutin dan terus menerus.

Inovasi telah dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan memberi manfaat pada masyarakat, dan berkelanjutan serta mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu pemecatan petugas pelayanan publik. Penyebab resikonya adalah Petugas pelayanan melanggar aturan/kriteria yang

ditetapkan pada kontrak sehingga berdampak Pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh terganggu dengan level resiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membuat kontrak kerja yang berisi syarat dan aturan yang jelas. Atribut Pengendalian berupa Dokumen Kontrak kerja.

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

12. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 38.*Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100	**Baik**

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} x100\%$$

$$B = \frac{Jumlah\ UMKM\ OT\ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ OT\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} x100\%$$

$$C = \frac{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ memenuhi\ standar}{Jumlah\ UMKM\ Kosmetik\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} x100\%$$

Ruang Lingkup UMKM : UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB

Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B. UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan 121 Bab 3 – Akuntabilitas Kinerja Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik. Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki esertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

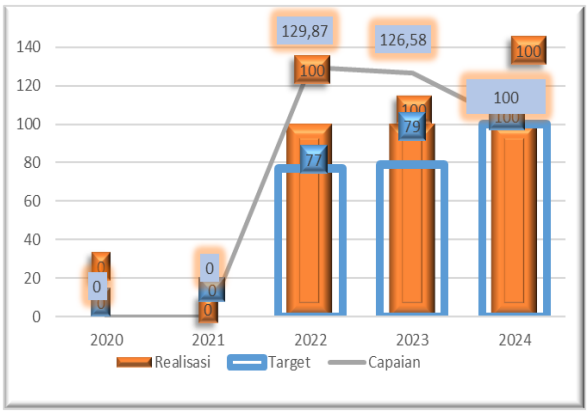
Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik dihitung sebagai rata rata

bobot kumulatif masing masing tahapan progres pelaksanaan pendampingan pada ketiga komoditi sebagai berikut:

a. Komoditi Obat Bahan Alam terdiri dari tahapan Penetapan target UMKM obat bahan alam (10%); Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional (20%); Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan) (40%); Sertifikasi (20%); Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (10%).
b. Kosmetik terdiri dari tahapan Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT (10%), Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) (40%), Pelaksanaan Pendampingan dan Sertifikasi (40%), Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu (10%).
c. Pangan terdiri dari tahapan Seleksi UMKM (10%), Bimtek CPPOB (20%), Fasilitasi Pendampingan (40%), PSB/Sertifikasi CPPOB (20%), Pelaporan ke Badan POM (10%).

Pada Tahun 2024, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan layanan pendampingan terhadap 19 UMKM yang menjadi target dalam aspek pemenuhan standar dan semua target tersebut telah memenuhi tahapan progres yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sudah sesuai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan kategori baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 24 *Perbandingan realisasi dan capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.*

Berdasarkan gambar, capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan

dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik menurun dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Indikator Kinerja ini baru ada pada tahun 2022, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2020 maupun 2021. Terdapat kenaikan target sehingga capaian tahun 2023 dan 2024 menurun, namun realisasi pada indikator kinerja ini sudah tercapai sepenuhnya 100% pada tahun 2022 maupun 2023.

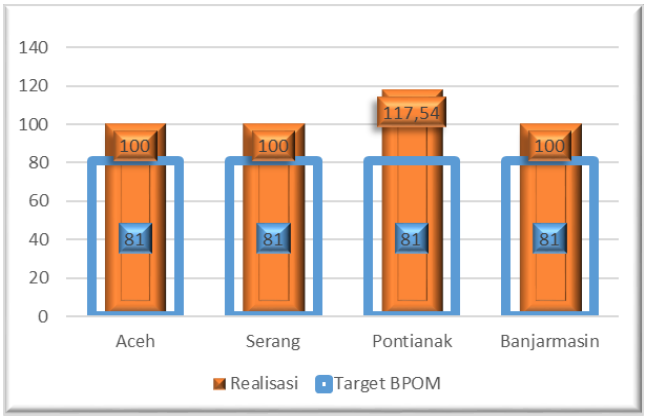
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 2024

Table 39 ***Perbandingan realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2024 dengan target renstra 2024***

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100	**Tercapai / Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	100	100	100	**Tercapai / Melampaui**

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dibandingkan dengan target renstra 2024 sudah melampaui target yang ditetapkan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik menjadi 100. Penetapan target disesuaikan dengan realisasi tahun 2023 yaitu 100%. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan pendampingan UMKM secara optimal untuk sehingga dapat mempertahankan realisasi yang telah dicapai yaitu 100% dengan kategori tercapai/melampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai Lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Grafik 25. ***Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik dan target nasional dengan realisasi kinerja Balai Lain.***

Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan / atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang baik untuk tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Pontianak yaitu 117,54%, dan tiga balai lainnya sudah mencapai 100%. Balai-balai yang diperbandingkan semuanya sudah mencapai target nasional yang ditetapkan sebesar 81%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program pendampingan UMKM bertujuan untuk menjadikan UMKM mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya sertifikat atau rekomendasi. Pada tahun 2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 19 UMKM, yang terdiri dari 12 UMKM pangan olahan dan telah diterbitkan sertifikat Izin Penerapan CPPOB yang didampingi sesuai dengan tahapan mekanisme. Terdapat 24 UMKM yang di dampingi di luar mekanisme melalui inovasi Korporasi. Penerbitan sertifikat ini dapat dilakukan monitoring melalui esertifikasi.pom.go.id setelah diterapkannya Peraturan Badan POM No. 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan cara produksi Pangan Olahan yang Baik. Pelaku usaha mendapat pendampingan dari petugas balai dari pembuatan denah *lay out* sarana produksi, pembuatan dokumen mutu dan pendaftaran izin edar di aplikasi. Untuk kemudahan pelaku usaha telah disediakan format dokumen mutu serta fasilitasi dan bimbingan teknis cara pembuatan dokumen, sehingga terjadi percepatan pembuatan dokumen oleh pelaku usaha. Tetapi kendala tetap ditemukan disebabkan rendahnya

kemampuan pelaku usaha dalam penggunaan teknologi sehingga beberapa pelaku usaha mendapat pendampingan intensif dari petugas balai.

Pendampingan terhadap pelaku usaha obat tradisional (UMOT) telah dilakukan dan diterbitkan 2 sertifikat pemenuhan aspek CPOTB tahap 1, terdiri dari 2 UMK Obat Tradisional target yang didampingi sesuai dengan tahapan mekanisme. Proses pendampingan dilakukan oleh fasilitator UMKM OT yang telah dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan terkini terkait persyaratan dan aplikasi yang digunakan dalam mendapatkan SPA CPOTB bertahap. Pendampingan terhadap pelaku usaha kosmetik sesuai target yaitu 5 UMKM yang telah di telah didampingi berhasil terbit izin edar notifikasinya.

Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik sudah tercapai seluruhnya untuk tiap tahapan progres pelaksanaan. Hal ini disebabkan oleh ketepatan petugas dalam melaporkan setiap tahapan pendampingan sesuai timeline, mulai dari laporan penetapan UMKM yang didampingi, laporan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek CPKB, bimtek CPOTB, dan bimtek izin penerapan CPPOB), laporan pelaksanaan pendampingan (termasuk fasilitasi pendampingan dan PSB pangan), serta monitoring dan evaluasi. Selain itu keberhasilan pelaksanaan pendampingan juga disebabkan oleh kompetensi petugas dan efisiensi SDM di subkelompok substansi sertifikasi dengan bantuan fasilitator.

Untuk dapat terus meningkatkan dan mempertahankan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh terkait DIP, Pelatihan Pangan Steril Komersial dan lainnya.
b. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) secara intensif terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan Obat Tradisional).
c. Desk CAPA (*corrective action preventive action*) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk lebih cepat memenuhi perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

d. Bimbingan Teknis terkait Sistem Tata Udara untuk Industri Obat Bahan Alam dan Meet Market antara UMK OBA dan Vendor STU.
e. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pemerintah Aceh dalam mendukung percepatan proses registrasi pada sistem terintegrasi.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 40.*Efisiensi anggaran pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70.586.000	70.583.972	100	100%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator telah mencapai target 100% dan realisasi anggaran 100%. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan /atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program-program yang telah dilakukan selama tahun 2024 untuk mencapai realisasi maksimal pada indikator kinerja ini antara lain:

a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan aspek aspek CPOB, pelatihan pangan steril dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
b. Kolaborasi dengan SKPD pemerintah Aceh terkait agar terdapat persamaan persepsi petugas. Selain itu dukungan yang diperoleh akan sangat membantu

mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi melalui oss.rba yang mengharuskan peran aktif dari SKPD sesuai tupoksinya masing masing.

c. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*) secara intensif (termasuk melakukan bimtek dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan Obat Tradisional).
d. Desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk lebih cepat memenuhi perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.
e. Bimbingan Teknis terkait Sistem Tata Udara untuk Industri Obat Bahan Alam dan Meet Market antara UMK OBA dan Vendor STU.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 dan laporan interim I sampai dengan III tahun 2024, pencapaian indikator telah tercapai seluruhnya sesuai target untuk tahun 2024. Rekomendasi pada laporan interim telah dilaksanakan sehingga capaian tetap dapat dipertahankan. Pada tahun 2024 dilakukan rekrutmen fasilitator untuk membantu pelaku usaha dalam pengurusan dokumen untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha mengenai IP CPPOB dan e-reg dengan DPMPTSP sebagai narasumber juga telah dilakukan sehingga pelaku usaha lebih memahami terkait IP CPPOB dan mekanisme pendaftaran produk melalui e-reg.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja indikator ini tercapai 100% sesuai target yang mana risiko terkait indikator ini telah dimitigasi dengan dengan efektif baik yang bersifat operasional, fraud dan sumber daya. Risiko - risiko yang muncul dalam upaya pencapaian indikator ini akan selalu dimonitoring dan dipantau keefektifannya apakah masih sesuai dengan kondisi terkini.

13. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman

serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 41. *Realisasi Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab/Kota	95.0	97.71	102.85	**Sangat Baik**

Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kab/ Kota pada tahun 2024 diukur melalui keterlibatan pada:

a. Keterlibatan SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan).
b. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota.
c. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

Kegiatan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja, dapat berupa advokasi, pertemuan, rapat, operasi terpadu, monev berkala, tindak lanjut dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan terpadu, kegiatan pro PN yang mendukung stunting dan lain-lain. Perhitungan keterlibatan UPT Provinsi/ Kab/ Kota (terdapat DAK) yaitu TKKPOM (30%), TPPS (10%), DAK (60%). Capaian 130.0 dengan kategori ***tidak dapat disimpulkan*** disebabkan penetapan target triwulan yang kecil (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM No 311 Tahun 2023 untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian dapat dikonversi menjadi 120).

Penetapan target kecil disebabkan kegiatan keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat bidang

kesehatan di Provinsi/Kab/Kota kegiatan yang baru dan tahun ini merupakan tahun ke -2.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 26. ***Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2024 terhadap tahun sebelumnya***

Indikator ini baru ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2024. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024

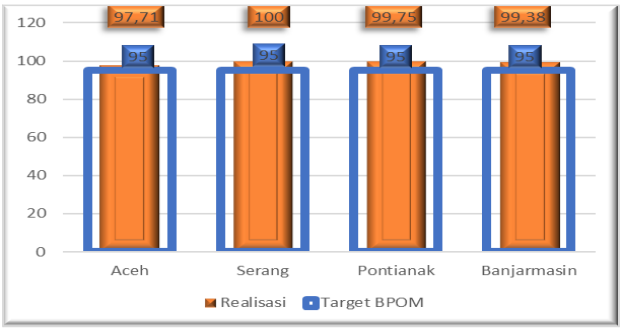
Table 42.***Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024***

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab/Kota	95.00	97.71	102.85 ▲	**Tercapai/ Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	95.00	97.71	102.85 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Capaian kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab/Kota di tahun 2024 terhadap Renstra 2020-2024 sudah Tercapai/Melampaui.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang

sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Grafik 27. ***Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional***

Realisasi kinerja Balai Besar POM Banda Aceh di tahun 2024 berada di angka 89.17% yang telah melampaui target nasional 84.2%. Realisasi kinerja yang paling tinggi adalah Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu sebesar 93.96%, diikuti Balai Besar POM di Banda Aceh, yang paling rendah adalah Balai Besar POM di Serang dengan realisasi 82.26% dan merupakan satu-satunya balai yang belum mencapai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Analisa keberhasilan terhadap peningkatan kinerja adalah adanya hubungan, komunikasi dan kerjasama yang baik, serta meningkatkan kesadaran Dinkes Kab/ kota akan pentingnya pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dilaksanakan dalam bentuk:

1. Terbitnya SK TKPPOM di Kabupaten Pidie.
2. Sosialisasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. (TKPPOM) di Kabupaten Pidie kepada instansi terkait.
3. Narasumber pada kegiatan Bimtek PKP DAK NF POM.
4. Pengawasan sarana produksi fortifikasi/garam.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 43.***Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja***

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab/Kota	18.496.000	18.495.918	100	102.85	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran **efisien** di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi di bandingkan dengan realisasi anggaran. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi anggaran yang tinggi adalah perbaikan terhadap perencanaan reagen, perbaikan peralatan dan suku cadang. Dengan demikian anggaran tahun 2024 sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat karena penggunaan anggaran dapat dioptimalkan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang dilakukan berupa peningkatan komunikasi yang lebih baik dengan Dinkes Kab/kota, pendampingan yang lebih intensif terhadap penerima Dana DAK NF POM TA 2024 antara lain dengan pendampingan kegiatan DAK agar berjalan sesuai dengan JUKOP. Serapan anggaran dan capaian output sesuai target. Komunikasi yang baik juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Dinas kesehatan kab /kota akan pentingnya terbentuk SK TKPPOM di daerah dan terlaksananya pengawasan sesuai kewenangan Dinkes/Kab/kota sesuai ketentuan. Komunikasi juga diintensifkan terhadap penurunan Stunting di Aceh, Kontribusi Balai Besar POM di Banda Aceh penurunan Stunting adalah pengujian pangan Fortifikasi, perlu adanya komunikasi terkait ke dinas/instansi terkait terhadap hasil uji garam di Aceh untuk ditindaklanjuti,

pembinaan UMKM garam serta KIE kepada masyarakat terkait penggunaan pangan Fortifikasi.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Realisasi pada triwulan III sudah tercapai dan memenuhi target tahun 2024 sebesar 97,50 (target 95). Namun, tetap diperlukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah yang telah memiliki SK TKPPOM untuk memudahkan terlaksananya kegiatan dan menumbuhkan sinergi antar lintas sektor.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Identifikasi Risiko yang mempengaruhi kinerja diantaranya pemanfaatan alokasi DAK POM oleh Dinas Kesehatan yang tidak efektif dan kolaborasi dalam pengawasan Obat dan Makanan belum efektif telah dilakukan pengendalian dengan melakukan monev secara rutin sehingga meningkatkan kinerja realisasi DAK di sektor pemerintah daerah.

Sasaran Kegiatan 3
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan 3 dicapai dengan NSS 100,57. Kinerja IKU 17 hingga IKU 20 diperoleh hasil capaian yang sangat baik. Salah satu strategi pencapaian yang dilakukan diantaranya Pemilihan sekolah berdasarkan usulan dari pemerintah daerah setempat saat pelaksanaan advokasi lintas sektor yang kemudian diseleksi kembali oleh Tim Pro PN Keamanan Pangan Balai Besar POM di Banda Aceh, mampu mendapatkan 4 (empat) sekolah intervensi A untuk tiap kabupaten/kota pada tahun 2024 sehingga Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dapat tercapai sesuai target.

Indikator Kinerja

14. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 44.*Target dan Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.9	96.15	101.32%	**Sangat Baik**

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (1) KIE melalui media cetak dan elektronik; (2) KIE langsung ke masyarakat; dan (3) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
4. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

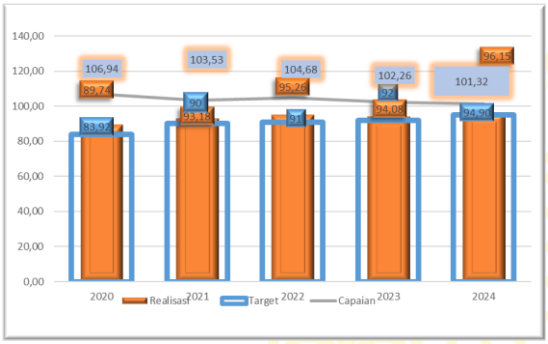
Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Balai Besar POM di Banda Aceh. Teknik survei berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*. Pada tahun 2024, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Adapun kategori hasil tingkat efektifitas KIE sebagai berikut:

Table 45.*Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE*

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan survei Efektifitas KIE tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 510 orang responden. Realisasi tingkat efektifitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan tahun 2024 di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebesar 96.15 dan capaian tingkat efektifitas KIE sudah mencapai target yaitu 101.32 % dengan kategori "Sangat Baik".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 28. ***Perbandingan Realisasi dan capaian Tingkat efektifitas KIE tahun 2020 hingga tahun 2024***

Berdasarkan grafik di atas terdapat peningkatan realisasi Tingkat Efektifitas KIE di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 (94.08) dimana nilai Efektivitas tahun 2024 (96.15) meningkat sebesar 2.07 poin. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman yang dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh melalui berbagai program KIE.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2024

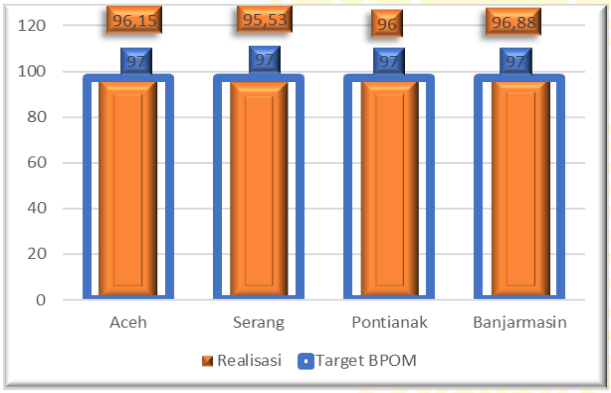
Table 46. ***Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Renstra Tingkat Efektifitas KIE di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh***

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.90	96.15	101.32 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2024 telah mencapai target Renstra tahun 2024 (95.6) dengan target indeks 94.9 dan capaian sebesar 101.32 dengan kategori "Tercapai/ Melampaui". Hal ini

menunjukkan masyarakat semakin mengetahui kegiatan KIE BPOM maka memiliki pemahaman yang lebih baik. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Banda Aceh perlu meningkatkan promosi dan sosialisasi kegiatan KIE, misalnya melalui kampanye digital, kolaborasi dengan influencer, dan program edukasi berbasis masyarakat. Bertambahnya jumlah media sosial BPOM yang diketahui masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan indeks KIE. Oleh karena itu, perlu ada strategi digital marketing yang lebih agresif, seperti meningkatkan interaksi di berbagai platform, mengoptimalkan penggunaan konten visual, serta memperbanyak fitur edukatif interaktif.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Grafik 29. ***Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional***

Berdasarkan gambar, dapat disimpulkan bahwa realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Banjarmasin dengan nilai 96,88 dikuti Balai Besar POM di Banda Aceh (96.15) dan Balai Besar POM di Pontianak (96.0) dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Serang (95.53). Dari keempat Balai Besar POM tersebut, Balai Besar POM di Serang yang belum melampaui target IKU Nasional (95.6).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target pada tahun 2024, hal ini disebabkan kerena telah melaksanakan kegiatan KIE Obat dan Makanan sebagai berikut:

- Talkshow/Dialog Interaktif bersama RRI Banda Aceh.
- Penyebaran informasi tentang: Keamanan Pangan, Obat dan Obat Tradisional, Cerdas Memilih dan menggunakan Kosmetika Aman serta Pengenalan Aplikasi BPOM Mobile, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Cerdaskan Masyarakat hingga ke pelosok desa, KIE Keamanan Pangan; Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Ramadhan, Natal dan Tahun Baru; Antimicrobial Resistance (AMR) dan Bahaya Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO).
- Kegiatan Sosialisasi/Bimtek, Penyuluhan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) tentang Keamanan Pangan, Cegah Stunting, Gizi Seimbang, Informasi Nilai Gizi, dan BPOM Mobile.
- Kegiatan Inovasi Sanger Ureung Aceh bersama SAKA POM tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Pengujian Sederhana Obat dan Makanan, KIE Obat dan Makanan.
- Penyebaran informasi melalui subsite Balai Besar POM di Banda Aceh (aceh.pom.go.id).
- Penyebaran informasi melalui media sosial antara lain facebook, instagram, X, Youtube, whatapps dan tiktok.

  Keberhasilan dalam capaian nilai Indeks Efektifitas KIE dikarenakan tema yang diangkat merupakan hal yang sangat ingin diketahui masyarakat serta keragaman materi yang disampaikan mampu menarik minat dari masyarakat. Dengan adanya konten yang dibuat sangat membantu dalam meningkatkan *follower dan engagement* media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh. Balai Besar POM di Banda Aceh terus senantiasa bekerja demi mewujudkan keamanan Obat dan Makanan di seluruh lapisan masyarakat melalui informasi yang diberikan dari berbagai media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh.

Faktor penyebab keberhasilan capaian Tingkat Efektifitas KIE yaitu:

Konsisten memberikan link survei untuk diisi juga menyiapkan blanko/Form Survei manual sebagai backup data jika ada yang memberikan nilai kurang pantas dapat langsung klarifikasi dan dilakukan tindakan cleansing data sebagai data yang tidak valid.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 47.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat Efektifitas KIE*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat Efektifitas KIE	198.103.500	197.651.370	99.77	101.32	**100 % (Efisien)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks Tingkat Efektifitas KIE.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indeks Tingkat Efektifitas KIE di Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024, diantaranya dengan cara: Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi meliputi:

(1) KIE melalui media cetak dan elektronik berupa infografis, video edukasi yang menarik dan kekinian, cakupan KIE dan Publikasi Pengawasan Obat dan Makanan di Situs pelayanan publik nasional (SIPPN) dan Subsite Balai Besar POM di Banda Aceh (https://aceh.pom.go.id/)

(2) KIE langsung ke masyarakat yaitu layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui tatap langsung dan media daring.

(3) KIE melalui media sosial melalui Inovasi JANET (Jawab Netizen) yang merupakan Inovasi dalam menjawab pertanyaan yang masuk ke media sosial Balai Besar POM

di Banda Aceh kemudian di jawab berupa infografis, video offline maupun secara online.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan tidak dapat dilakukan secara instan, sehingga diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu pemberitaan terkait Kinerja KIE Obat dan makanan di berbagai media cetak/online, elektronik dan media sosial berkonotasi negatif. Penyebab resikonya adalah media tidak mendapatkan sumber informasi yang valid sehingga berdampak kepercayaan publik terhadap Balai Besar POM di Banda Aceh menurun dengan level resiko inheren 10. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah:

1. Menyebarluaskan informasi strategis BPOM kepada media dan masyarakat serta lebih terbuka.
2. Ragam Media KIE yang disampaikan dalam tools penilaian terlalu banyak.

Atribut Pengendalian berupa Laporan Tingkat Efektifitas KIE per triwulan. Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan

efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 7. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

15. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 48.*Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	88	100	**Baik**

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memliki kriteria memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Program PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi kemanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Tahapan Intervensi Keamanan PJAS yang dilakukan meliputi tahapan Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS, Sosialisasi Keamanan PJAS, Bimbingan teknis keamanan pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian paket edukasi berupa produk informasi kemanan pangan, Monitoring pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, sampling dan pengujian sampel PJAS di kantin sekolah dan lingkungan sekitar sekolah serta pembinaan terhadap petugas kantin dan pedagang di sekitar sekolah, tahapan selanjutnya adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman, serta tahapan Pengawalan Sekolah tahun sebelumnya. Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 49.*Bobot Progres Tahapan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah*

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2024	% Capaian
Advokasi lintas sektor	20 %	Jan - Mei	100 %	**20 %**
Sosialisasi Keamanan Pangan	10 %	Maret - Mei	100 %	**10 %**
Bimbingan Teknis kader Keamanan Pangan Sekolah	15 %	April - Juli	100 %	**15 %**
Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10 %	April - Nov	100 %	**10 %**
Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah PJAS	15 %	Juli - Nov	100 %	**15 %**
Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20 %	Agust - Des	100 %	**20 %**
Pengawalan	10 %	April - Des	100 %	**10 %**
Total Skor	**100 %**			**100 %**

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah, dan menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

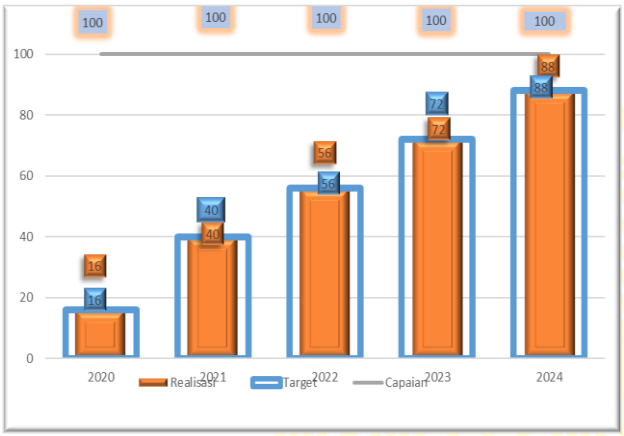
Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS dan SMA di 4 (empat) Kabupaten/Kota yaitu Kota Subulusalam, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Selatan dan Kab. Simeulue. Target tahun 2024 berjumlah 16 sekolah intervensi 2024 dan 88 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024. Semua tahapan intervensi program PJAS telah dilaksanakan dan persiapan mengikuti Lomba Nasional Sekolah dengan PJAS aman. Salah satu tahapan PJAS yang dilaksanakan adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman. Yang mana kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

1. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,

2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah tercapai yaitu 100% atau 88 sekolah yang menjadi target intervensi telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 30. ***Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 hingga tahun 2024 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh***

Terdapat kenaikan realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian sekolah dengan Sertifikat PJAS Aman dapat terealisasikan dengan capaian 100 %. Hal ini dapat tercapai karena adanya komitmen yang tinggi dari sekolah-sekolah intervensi untuk melaksanakan semua tahapan program dan merealisasikan rencana aksi yang telah di tetapkan di sekolah. Target indikator sekolah dengan PJAS Aman telah ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2024

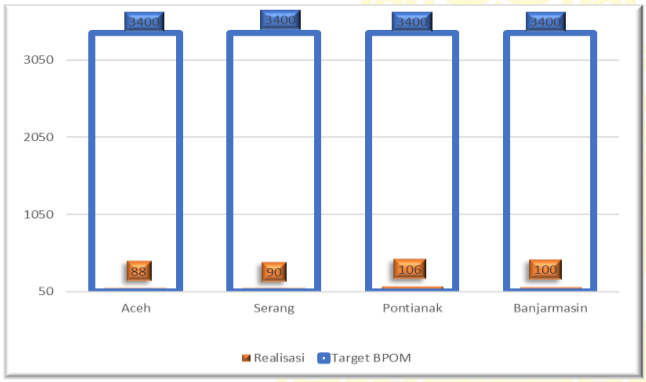
Table 50.*Target dan Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88	88	100 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi jumlah sekolah program PJAS Aman tahun 2024 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dimana target indikator ini bersifat jumlah kumulatif. Target

renstra tahun 2024 sebanyak 88 sekolah dicapai dengan pelaksanaan secara bertahap dmulai tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Ada 16 sekolah yang harus dicapai setiap tahunnya yang menjadi target intervensi A, sehingga nanti di tahun 2024 tercapai target Renstra. Pencapaian target ini akan tercapai dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, terkait anggaran dan sarana prasarana dalam mendukung program PJAS aman.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Grafik 31 . *Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional*

Berdasarkan grafik di samping, bahwa realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) tahun 2024 Balai Besar POM Serang, Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Banjarmasin sama dengan pencapaian Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu 100%.

Realisasi nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya antara Balai-balai yang melaksanakan program terkait.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) memiliki target tahun 2024 berjumlah 88 Sekolah terdiri dari 16 Sekolah intervensi tahun 2024 di 4 kabupaten/kota intervensi dari sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA /SMK/MA dan 72 sekolah pengawalan yang diintervensi tahun 2020, 2021,2022, dan 2023

serta untuk sekolah perluasan cakupan sebanyak 80 sekolah. Pemilihan sekolah berdasarkan usulan dari pemerintah daerah setempat saat pelaksanaan advokasi lintas sektor yang kemudian diseleksi kembali oleh Tim Pro PN Keamanan Pangan Balai Besar POM di Banda Aceh, sehingga didapat 4 (empat) sekolah intervensi A untuk tiap kabupaten/kota pada tahun 2024.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi dengan pemerintah daerah selanjutnya mengsurvey sekolah yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tahapan progress program PJAS adalah Advokasi terpadu keamanan pangan kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Pangan, Kementrian Agama, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada saat advokasi ditentukan lokus sekolah yang akan diintervensi keamanan pangannya. Tahapan selanjutnya adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah dengan target 4 Kabupaten/kota intervensi yaitu Kota Subulusalam, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Selatan dan Kab. Simeulue, sedangkan 5 kabupaten/kota perluasan yaitu Kab. Pidie, Kota Subulusalam, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Selatan dan Kab. Simeulue. Dengan jumlah target sekolah yaitu sebanyak 16 sekolah kategori intervensi A dan sebanyak 80 sekolah perluasan. Peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini adalah kepala sekolah/guru dan siswa. Selanjutnya dilaksanakan juga tahapan Program PN PJAS yaitu Bimtek Kader Keamanan Pangan yang dihadiri sebanyak 16 sekolah yang diintervensi tahun 2024, pada saat bimtek kader dipaparkan materi tentang cara memilih dan mengolah pangan aman, Pengenalan bahan berbahaya pada pangan, Gizi seimbang SDM Unggul serta Pengenalan Aplikasi BPOM Mobile. Pada tahapan bimtek ini dilakukan juga tahapan pemberian produk informasi keamanan pangan kepada seluruh sekolah yang mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Keamanan Pangan. Produk Informasi yang diberikan diantaranya Roll Banner Keamanan Pangan, Poster-poster Keamanan Pangan (6 macam Informasi terkait keamanan panagn), Celemek

Keamanan Pangan, Buku terkait Keamanan Pangan (3 Macam Buku), Goodybag Keamanan Pangan dan Rompi Kader Keamanan Pangan Sekolah.

Tahapan selanjutnya Monitoring pemberdayaan Kader Keamanan Pangan, sampling dan pengujian sampel PJAS di kantin sekolah dan lingkungan sekitar sekolah serta pembinaan terhadap petugas kantin dan pedagang disekitar sekolah, Balai Besar POM di Banda Aceh memastikan sekolah telah melakukan pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah melalui penerbitan SK Tim Keamanan Pangan Sekolah dan memastikan Kader Keamanan Pangan Sekolah melakukan intervensi keamanan pangan sekolah melalui komitmen kepala sekolah, rencana aksi sekolah (Sosialisasi, Rekap Nilai pre post, Kuesioner, Dokumentasi sosialisasi keamanan pangan yang dilakukan oleh Kader, dll). Pada tahapan kegiatan monitoring kader sekolah, Balai Besar POM di Banda Aceh juga melakukan Sampling dan Pengujian terhadap sampel PJAS di masing-masing sekolah intervensi A dengan parameter uji kimia (Formalin, Boraks, Methanyl Yellow dan Rhodamin B), dan uji mikrobiologi (uji E.coli dan uji Salmonella) dengan menggunakan rapid tes kit. Kegiatan sampling dan pengujian PJAS ini dilakukan untuk memotret kondisi keamanan PJAS di kabupaten/kota yang diintervensi. Sampel merupakan dari kategori PJAS yang diambil di kantin sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Jumlah sampel yang di sampling dan diuji yaitu sebanyak 192 Sampel.

Tahapan kegiatan PJAS yang dilaksanakan selanjutnya adalah sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman kepada 16 sekolah yang diintervensi tahun 2024, yang mana tujuan pelaksanaan sertifikasi sekolah PJAS Aman untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dimana hasil verifikasi menunjukan bahwa ke 16 sekolah yang diintervensi dapat memperoleh sertifikat PJAS Aman dengan nilai >90, bahwa sekolah yang diintervensi semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat sekolah dengan PJAS Aman. Dengan harapan sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkelanjutan. Balai Besar POM di Banda Aceh juga melaksanakan monitoring dan evaluasi serta capaian program PJAS tahun 2024

untuk mendapatkan masukan dan kendala kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS, serta memberikan apresiasi kepada sekolah yang memiliki komitmen tertinggi dalam menjalankan program PJAS.

Pada tahap akhir Program PJAS dilaksanakan Kegiatan Pengawalan Sekolah yang sudah diintervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) tahun sebelumnya yaitu sekolah yang diintervensi tahun 2020, 2021, 2022, 2024 serta sekolah yang telah meraih predikat sekolah Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) tahun 2018. Kegiatan Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Sekolah yang diintervensi telah melaksanakan program keamanan PJAS secara berkelanjutan dan untuk mengetahui tindak lanjut dari rencana program keamanan pangan yang disusun oleh tim keamanan pangan sekolah. Serta menjaga kompetensi Kader Keamanan Pangan Sekolah yang telah dilatih dengan penyampaian materi Lima Kunci Keamanan Pangan memilih Pangan Aman, Lima Kunci Mengolah Pangan, Gizi Seimbang, Stunting, Implementasi Keamanan Pangan di Kantin Sekolah, BPOM Mobile, Pelaksanaan program Keamanan Pangan secara Mandiri di Sekolah. Sekolah berkomitmen akan selalu melaksanakan program PJAS secara mandiri di sekolah dan membuat rencana aksi terkait program PJAS tahun 2024.

Faktor penyebab keberhasilan capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yaitu:

1. Perencanaan dan pelaksanaan setiap tahapan program PJAS diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
2. Berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan PJAS tahunan.
3. Komitmen yang tinggi dari Kepala sekolah dan komunitas sekolah untuk menjalankan program PJAS secara mandiri dan berkesinambungan di sekolah.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 51.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Sekolah dengan (PJAS) Aman	642.619.000	642.572.571	99,99	100	**100 % (Efisien)**

Kegiatan program PJAS ini sudah efisien atas penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Kegiatan ini disinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Program Prioritas Nasional lainnya, yaitu Desa Pangan Aman dan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang menunjang keberhasilan Program Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) di Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024, diantaranya dengan cara: Monitoring dan evaluasi tahapan pelaksanaan Program PJAS dengan memastikan rencana aksi kader sekolah disampaikan tepat waktu.

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Diharapkan program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah dapat bergulir dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih cepat tercapai.

j. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu sekolah yang diintervensi tidak komitmen dalam pelaksanaan program PJAS. Penyebab resikonya adalah pergantian atau

mutasi kepala sekolah dan guru sebagai penanggungjawab kegiatan sehingga berdampak Program Prioritas Nasional PJAS tidak berjalan dengan level resiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah.

Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Tim Keamanan Sekolah
2. Laporan monitoring sekolah

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

16. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 52.*Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian %	Kategori
Jumlah desa pangan aman	32	32	100	**Baik**

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) dengan tahapan berupa Advokasi Kelembagaan Desa, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas, Fasilitas Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), Lomba Desa Pangan Aman dan pengawalan desa sebelumnya. Kegiatan intervensi desa dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan intervensi pada pasar dan sekolah. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi

dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas kelembagaan Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

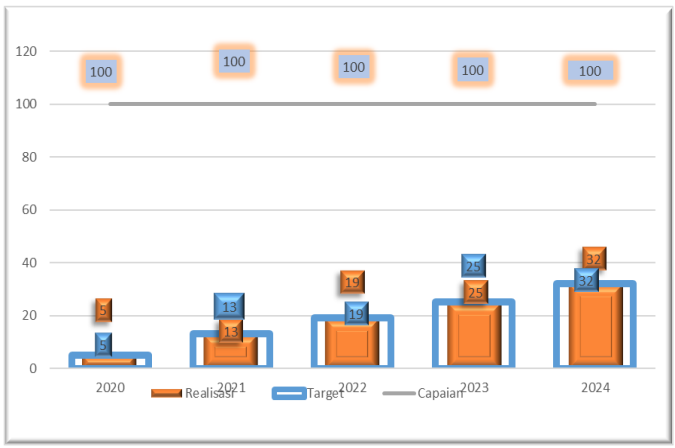
1. Kader keamanan pangan desa yang aktif.
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrase dengan program lain).

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tidak dihitung sebagai jumlah desa tetapi berdasarkan progress tahapan program. Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 program intervensi Desa Pangan aman di 7 (tujuh) desa intervensi pada 4 kabupaten/kota di Kota Subulussalam, Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Selatan dan Kab. Simeulue. Secara progress tahapan program capaian 100% dengan kategori “Baik”. Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 53.*Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman*

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal Pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2024	% Capaian
Advokasi kelembagaan desa	20 %	Jan - Mei	100 %	**20 %**
Pengadaan gimmick, rapid test	5 %	Jan - Juni	100 %	**5 %**
Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15 %	Mei - Agustus	100 %	**15 %**
Bimtek Komunitas Desa	15 %	Juni - Okt	100 %	**15 %**
Fasilitasi Keamanan Pangan Desa	10 %	Juni - Okt	100 %	**10 %**
Intensifikasi Keamanan Pangan	10 %	Juni - Nov	100 %	**10 %**
Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10 %	Nov- Des	100 %	**10 %**
Lomba Desa Pangan Aman	5 %	Des	100 %	**5 %**
Pengawalan	10 %	Juni-Des	100 %	**10 %**
Total Skor	**100 %**			**100 %**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 32. ***Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 hingga tahun 2024 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh***

Pencapaian hasil kegiatan intervensi Desa pangan aman tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat tercapai sesuai target 100%. Tahapan program kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan dengan dukungan dan komitmen lintas sektor terkait.

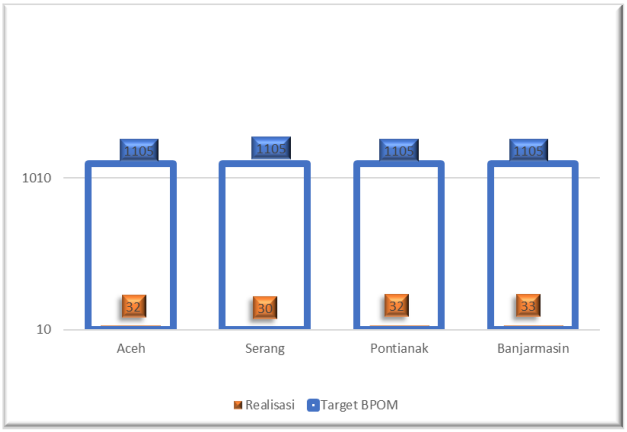
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2024

Table 54.*Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman	32	32	100 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi jumlah Desa Pangan Aman tahun 2024 telah mencapai target Renstra tahun 2024, karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode Renstra tahun 2024. Target Renstra di 2024 sebanyak 32 desa dicapai dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap di tahun berjalan. Pencapaian target ini tercapai dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, terkait anggaran dan sarana prasarana dalam mendukung program Desa Pangan Aman.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Grafik 33. ***Jumlah Desa Pangan Aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional***

Berdasarkan grafik di atas, bahwa realisasi Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2024 dengan nilai tertinggi yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin (103.13), diikuti Balai Besar POM di Banda Aceh (100), Balai Besar POM di Pontianak (100) dan Balai Besar POM di Serang (100). Realisasi nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya antara Balai-balai yang melaksanakan program terkait.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan Desa Pangan Aman tahun 2024 disesuaikan dengan kebijakan pemerintah saat ini dengan bertujuan untuk mendukung pencapaian target pemerintah salah satunya program percepatan penurunan stunting. Kebijakan pemerintah lainnya yang perlu didukung adalah pemulihan ekonomi nasional karena dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2024 Target Jumlah Desa Pangan Aman Balai Besar POM di Banda Aceh adalah 32 Desa, Terdiri dari 25 Desa pengawalan yang telah intervensi tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dan 7 desa baru intervensi keamanan pangan tahun 2024 yang merupakan desa stunting yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota yang diintervensi diantaranya:

- Kabupaten Aceh Selatan yaitu desa Buket gaden.
- Kabupaten Aceh Selatan yaitu desa Batee Tunggai.
- Kota Subulussalam yaitu desa Subulussalam Selatan.
- Kota Subulussalam yaitu desa Penuntungan.

- Kabupaten Singkil yaitu desa Bulusema.
- Kabupaten Singkil yaitu desa Blok VI Baru.
- Kabupaten Simeulue yaitu desa Lauke.

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. Desa yang menjadi target intervensi merupakan desa stunting, desa dengan kader desa yang aktif, desa destinasi wisata dan desa yang memiliki usaha pangan desa yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah setempat. Tahapan Desa pangan aman berupa Advokasi Kelembagaan Desa, Pengadaan gimmick dan rapid tes kit, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek Komunitas, Fasilitas Keamanan Pangan, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), Lomba Desa Pangan Aman dan pengawalan desa sebelumnya. Kegiatan ini perlu koordinasi yang intens dengan desa-desa intervensi untuk dapat melaksanakan rencana aksi kegiatan yang telah ditetapkan di awal program.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi yang selanjutnya dilakukan tahapan program Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi ditentukan lokus desa yang telah didahului dengan survey desa pada saat audiensi yang dilakukan bersamaan dengan survey pasar dan sekolah. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Desa. Pada kegiatan Advokasi telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama Balai Besar POM di Banda Aceh dengan Pemerintah Daerah yang diintervensi Keamanan Pangannya.

Untuk tahapan Bimtek Kader dan Komunitas Desa dan pengawalan diberikan materi tentang Keamanan Pangan, Stunting, Gizi Seimbang (Informasi Nilai Gizi, Baca Label dan Gula, Garam, Lemak), 5 kunci Keamanan Pangan (Keluarga, Retail, Siap Saji, dan Sekolah) serta materi tentang keracunan alergi dan Intoleransi pangan. Balai Besar

POM di Banda Aceh pada tahun 2024 telah melatih dan membentuk sejumlah 102 orang kader keamanan pangan desa yang terdiri dari kader masyarakat, kader keluarga dan kader sekolah. Kader yang telah dilantik ini secara aktif melaksanakan sosialisasi kepada komunitas masing-masing desa, dan melaksanakan fasilitasi keamanan pangan di ritel tradisional, dapur keluarga dan warung pangan siap saji serta mengedukasi keamanan pangan kepada pedagang kaki lima (PKL) di sekitar desa serta melaksanakan tahapan intensifikasi keamanan pangan desa. Setiap desa yang diintervensi diberikan satu paket rapid tes kit dan produk edukasi berupa Poster tentang Cek KLIK, Ayo Cegah Stunting dan permainan ular tangga keamanan pangan.

Program desa pangan aman selanjutnya adalah Monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Desa yang diintervensi Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan seluruh tahapan program desa pangan aman secara baik dan telah merencanakan alokasi anggaran desa untuk pelaksanaan program desa pangan pangan aman secara mandiri di tahun berikutnya. Balai Besar POM di Banda Aceh telah menunjuk satu desa yang diintervensi pada tahun 2024 yaitu desa Matang seulimeng Kota Langsa untuk menjadi nominasi desa pangan aman tingkat nasional.

Faktor penyebab keberhasilan capaian Jumlah Desa Pangan Aman yaitu:

1. Perencanaan dan pelaksanaan setiap tahapan program Desa aman diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
2. Berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti Dinas DP3AKB, Dinas Pangan, BKKBN dan Dinas Kesehatan sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan timeline.
3. Komitmen dan Rencana Aksi dari Perangkat Desa dalam menjalankan program. Semua tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tenggat waktu yang mengacu pada petunjuk teknis maupun KAK per tahapan program.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 55.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	1.107.412.000	1.104.342.490	99.72	100	**100 % (Efisien)**

Kegiatan program Desa Pangan Aman ini sudah efisien penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Kegiatan ini disinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Program Prioritas Nasional lainnya, yaitu Program Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan Program Desa Pangan Aman di Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024, diantaranya dengan cara Sinergi dengan program mandiri desa terutama program percepatan penurunan stunting.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2024 maka untuk desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program Desa Pangan Aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu Desa yang diintervensi tidak komitmen dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman. Penyebab resikonya adalah Desa tidak menjalankan Rencana aksi dan program berkelanjutan yang telah disusun bersama saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi sehingga berdampak Program

Prioritas Nasional Desa Pangan Aman tidak berjalan dengan level resiko inheren 11.

Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah:

1. Membentuk Tim Keamanan Pangan Desa
2. Membentuk Kader Keamanan Pangan Desa

Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Tim Keamanan Pangan Desa
2. SK Kader Keamanan Pangan Desa
3. Laporan Program Desa Pangan Aman

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 56.*Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24	24	100	**Baik**

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply dan demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas

pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Realisasi dan capaian tahapan program jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai target tahun 2024 mencapai target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan secara terpadu dalam kabupaten/kota yang sama berdampak positif terhadap pencapaian kabupaten/kota intervensi. Adanya dukungan dan komitmen dari pihak terkait sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Adapun tahapan, persentase progress, Realisasi dan % capaian untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 57.***Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman***

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi 2024	% Capaian
Advokasi lintas sektor	20 %	Jan - Mei	100 %	**20 %**
Survey Pasar	5 %	Jan - Mei	100 %	**5 %**
Bimbingan Teknis Petugas Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15 %	April - Juni	100 %	**15 %**
Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1	15 %	April - Juni	100 %	**15 %**
Penyuluhan	10 %	Juni - Agustus	100 %	**10 %**

Kampanye	10 %	Juni - Agustus	100 %	**10 %**
Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 2	15 %	Sept - Nov	100 %	**15 %**
Pengawalan	10 %	Jan - Nov	100 %	**10 %**
Total Skor	**100 %**			**100 %**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 34. ***Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas Tahun 2020 hingga tahun 2024 di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh***

Terdapat kenaikan realisasi jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Capaian Pasar Pangan Aman dapat terealisasikan dengan capaian 100%. Hal ini dapat tercapai karena adanya dukungan dan komitmen lintas sektor terkait dan tidak ada kendala kegiatan karena kerja sama tim dalam pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. Target indikator jumlah PPABK telah ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2024

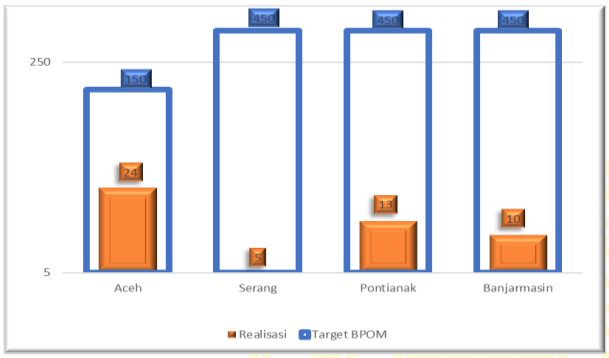
Table 58.*Target dan Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	24	24	100 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi jumlah Pasar Aman tahun 2024 telah mencapai target Renstra tahun 2024, karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif, sehingga baru dapat tercapai di akhir periode Renstra tahun 2024. Target Renstra di 2024 sebanyak 24 pasar dicapai dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap di tahun berjalan.

Pencapaian target ini tercapai dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, terkait anggaran dan sarana prasarana dalam mendukung program Pasar Aman Berbasis Komunitas.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Grafik 35.***Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional***

Berdasarkan grafik di atas, bahwa realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman tahun 2024 Balai Besar POM Serang, Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Banjarmasin sama dengan pencapaian Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu 100%. Realisasi nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya antara Balai-balai yang melaksanakan program terkait.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024 Target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebanyak 24 Pasar, terdiri dari 19 Pasar pengawalan yang telah intervensi tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dan 5 Pasar baru intervensi keamanan pangan tahun 2024 yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota intervensi diantaranya:

- Kabupaten Aceh Selatan yaitu Pasar Inpres Tapak Tuan.
- Kabupaten Aceh Singkil yaitu Pasar Lae Butar dan Pasar Siti Ambia.
- Kota Subulussalam yaitu Pasar Rakyat Simpang Kiri Subulussalam.
- Kabupaten Simeulue yaitu Pasar Rakyat Simeulue Timur.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari

beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi dengan pemerintah daerah selanjutnya melakukan survei yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Tahapan progress program PPABK adalah Survei, Advokasi terpadu keamanan pangan kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM, Dinas Pasar, Bappeda, Dinas Pangan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat advokasi ditentukan lokus pasar yang akan diintervensi keamanan pangannya. Untuk tahapan kegiatan Bimtek Petugas Pasar dan Pelatihan Fasilitator dilaksanakan secara terpadu pada satu waktu di Kota Subulussalam dimana materi yang disampaikan adalah tentang Modul 1 Pengetahuan Bahan Berbahaya, modul 2 Identifikasi Pasar untuk pengendalian Bahan Berbahaya, modul 3 Identifikasi Pedagang pasar dan Inventarisasi, modul 4 pengambilan contoh sampel, modul 5 pengujian bahan berbahaya dan modul 6 monitoring dan evaluasi pengawasan pasar dari bahan berbahaya, 5 kunci keamanan pangan di retail, dan Cek Klik serta demo penggunaan rapid tes kit. Dengan adanya pelatihan ini telah mencetak kader pasar/fasilitator pasar pangan aman berbasis komunitas yang akan menjaga keamanan pangan di pasar dan menyebarluaskan pesan keamanan pangan ke komunitas pasar maupun masyarakat luas. Kader Pasar/ Fasilitator pasar selanjutnya melaksanakan sampling dan pengujian tahap 1 dan 2 untuk pangan dan minuman yang dijual disekitar lingkungan di pasar intervensi. Hasil pengujian dilaporkan tepat waktu ke sipaman.pom.go.id

Tahapan program PPABK yang dilakukan selanjutnya yaitu kegiatan Kampanye dan Penyuluhan serta kegiatan Pengawalan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan keikutsertaan dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan, serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat. Indikator keberhasilan program juga didasari oleh penurunan peredaran bahan

berbahaya yang disalahgunakan pada pangan dan pangan mengandung bahan berbahaya selama satu tahun berjalan yang selanjutnya akan mendapatkan program pengawalan pada tahun berikutnya. Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 mengikutsertakan salah satu pasar yang diintervensi untuk menjadi nominator Lomba Pasar Aman yaitu Pasar Rakyat Simeulue Timur Kabupaten Simeulue.

Faktor penyebab keberhasilan capaian Jumlah Pasar Aman yaitu:

1. Perencanaan dan pelaksanaan setiap tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
2. Berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti Dinas Perdagangan dan Paguyuban pasar sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan timeline.
3. Komitmen dalam replikasi pasar oleh Pemda dituangkan dalam rencana aksi.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 59.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis komunitas	525.600.000	520.709.158	99.07	100 %	**100 % (Efisien)**

Kegiatan program Pasar Aman ini sudah efisien penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Kegiatan ini disinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Program Prioritas Nasional lainnya, yaitu Desa Pangan Aman dan Program sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang menunjang keberhasilan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

(PPABK) di Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024, diantaranya dengan cara:

1. Pelaksanaan tahapan Penyuluhan dan kampanye pasar aman untuk 2 pasar digabung dilakukan pada hari yang sama.
2. Dilakukan bersama dengan Program Prioritas Nasional lainnya, yaitu Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dan Program Desa Pangan Aman.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah. Diharapkan para pedagang pada pasar yang intervensi akan terus menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, dan menjaga Pangan terbebas dari Bahan Berbahaya yang dilarang pada pangan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu masih ditemukan bahan berbahaya pada pangan yang dijual pada pasar yang diintervensi. Penyebab resikonya adalah tindak lanjut temuan dari Balai Besar POM di Banda Aceh kepada Pemerintah Daerah/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setempat belum optimal sehingga berdampak Program Prioritas Nasional PPABK tidak berjalan dengan level resiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membentuk Tim Fasilitator Pasar Aman.

Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Fasilitator Pasar Aman.
2. Laporan Monev Tindak lanjut hasil sampling dan pengujian.

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi

5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

Sasaran kegiatan 4
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan 4 dicapai dengan NPS 120 dengan kategori sangat baik. Target Kinerja IKU 21 dan 22 telah berhasil dicapai. Pengujian Sampel Obat dan Makanan berhasil diselesaikan di tahun 2024 dan tidak ada yang carry over.

Indikator Kinerja

18. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 60.*Target dan Realisasi Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120 (dikonversi)	**Sangat Baik**

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A + B)/ 2

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

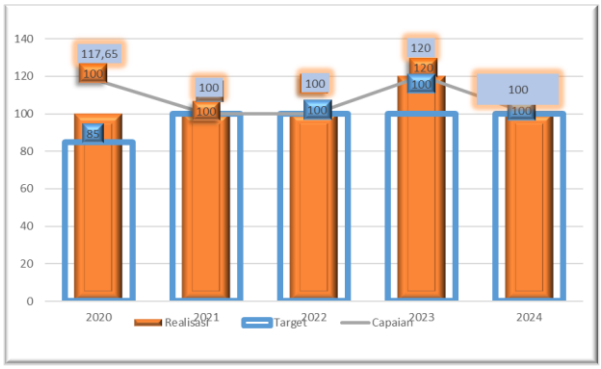
B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam

Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Balai Besar POM di Banda Aceh berasal dari balai/Loka di Region Padang yang pada tanggal 6 Juni 2024 beralih menjadi regional Medan yang beranggotakan: Balai Besar POM di Banda Aceh, Loka POM di Aceh Selatan, Loka POM di Aceh Tengah, Balai Besar POM di Padang, Loka POM di Payakumbuh, Loka POM di Dharmasraya, Balai Besar POM di Medan, Loka POM di Tanjung Balai dan Loka POM di Toba, Balai POM di Batam, Loka POM di Tanjung Pinang, Balai POM di Bengkulu, Loka POM di Rejang Lebong. Sampel yang diperiksa sebanyak 1334 sampel. Sampel yang diterima di laboratorium sebanyak 2197 baik dari Balai POM di Banda Aceh maupun dari regional. Perbedaan dengan jumlah sampel yang diperiksa dengan sampel yang diuji adalah pada sampel regional yang didominasi sampel obat. Sampel yang diuji sesuai standar sebanyak 2197. Realisasi indikator Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah memenuhi target pada tahun 2024 sebesar 100% dan dikonversi menjadi 120 % dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Gambar 48. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Target 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi kinerja di tahun 2020. Demikian juga halnya target tahun berikutnya. Balai Besar POM di Banda Aceh secara konsisten mempertahankan realisasi kinerja pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian 100% dari tahun 2021 hingga

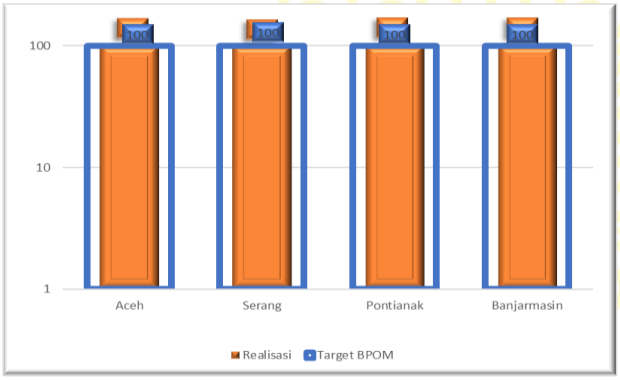
2024 dengan kategori Baik. Pada tahun 2021 - 2024 target indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100%.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024(%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120 ▲	**Tercapai / Melampaui**

Indikator kinerja ini dapat diselesaikan sesuai target 100% dan dikonversi menjadi 120 %. Capaian ini dapat dipertahankan mulai tahun 2021 hingga saat ini. Hal ini dapat diwujudkan dengan perencanaan yang baik terkait sampling dan pengujian. Pengadaan reagensia dan sarana prasarana lainnya dilakukan dengan matang.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



UPT Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Banjarmasin, dan Balai Besar POM di Serang sama-sama telah memenuhi target Realisasi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yakni 100% dan memenuhi target nasional sebesar 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan

Capaian indikator kinerja sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **Tercapai/Melampaui** disebabkan oleh Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pedoman sampling, pedoman regionalisasi dan memenuhi timeline yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena komunikasi yang baik antara petugas sampling dan

pengujian di Balai Besar POM di Banda Aceh dan laboratorium lain di wilayah regionalisasi Medan. Aplikasi APRESIASI yang merupakan inovasi Balai Besar POM di Banda Aceh sangat membantu dalam kegiatan pengujian terkait ketersediaan reagen di anggota Regional Medan. Aplikasi ini memudahkan permintaan/peminjaman reagensia sehingga sampel tidak menumpuk terlalu lama. Berikutnya APRESIASI akan menyediakan fitur Baku Pembanding sehingga jika terjadi kekurangan Baku dalam waktu berjalan akan lebih mudah dikomunikasikan dengan Balai pemilik Baku Pembanding tersebut. Sistem pemerintahan berbasis Elektronik mendapat perhatian utama di tahun 2024 yang telah berjalan secara optimal.

Laporan dan catatan pengujian sudah menggunakan teknik *paperless,* sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Perencanaan reagensia, suku cadang dan sarana prasarana pengujian lain sudah direncanakan di akhir tahun 2023 sehingga pada awal tahun pengadaan sudah berjalan. Hal ini sangat membantu pengujian yang sesuai standar. Perbaikan alat juga sudah direncanakan di awal tahun sehingga kerusakan alat dapat diminimalisir.

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 61.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84.143.600	84.058.884	99.90	120	**Efisien**

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Hal ini dipengaruhi karena regionalisasi lab. Pada regionalisasi laboratorium, masalah kekurangan reagen, suku cadang dapat diatasi karena sebagian balai masih mempunyai stok reagen, suku cadang tertentu serta alat yang tidak dibutuhkan lagi karena pembagian tugas regionalisasi. Dikarenakan mereka sudah tidak menguji parameter tertentu akibatnya reagen, alat suku cadang dapat dipindahkan ke balai lain yang membutuhkan. Anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung

pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk memenuhi target capaian kinerja sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai Besar POM di Banda Aceh sudah melakukan kegiatan bertujuan mencegah dan mengatasi kendala terkait indikator kinerja ini. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain:

1. Pada tahun 2024 SIPT sudah berjalan di awal tahun sehingga SPBE pengujian dapat dioptimalkan sejak awal tahun.
2. Arsip laporan uji sudah menggunakan mekanisme *paperless* di tahun 2024 sehingga mempercepat penyelesaian sampel dan efisiensi biaya.
3. Awal tahun 2024 sudah dilakukan perbaikan di ruangan laboratorium obat sehingga ruangan menjadi lebih efektif dengan penyusunan ulang ruangan preparasi dan ruangan khusus disolusi.
4. Mengadakan rapat internal dengan ketua tim dan anggota tim pemeriksaan dan pengujian terkait kendala laboratorium dan sampling produk Obat.
5. Memfasilitasi tim pengujian untuk meningkatkan kompetensinya terkait pengujian Obat
6. Membuka komunikasi dengan balai-balai regional terkait masalah laboratorium seperti ketersediaan reagen, suku cadang, peralatan, SIPT dan masalah teknis lain terkait pengujian.
7. Aplikasi APRESIASI sangat memudahkan dalam hal ketersediaan reagen sehingga kekurangan reagen bisa diatasi dengan melakukan koordinasi melalui aplikasi tersebut.
8. Komunikasi yang baik antara tim penguji dengan tim inspeksi di Balai Besar POM di Banda Aceh maupun balai regional lain terkait sampling dan kemampuan uji laboratorium sehingga dapat dipastikan sampel yang masuk ke Balai Besar POM di Banda Aceh dapat diuji.

9. Secara konsisten menerapkan ISO 17025:2017 dan ISO 9001: 2015.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja tahun 2024 digunakan sebagai dasar untuk melihat capaian indikator serta kendala yang dialami baik sampling maupun pengujian. Melalui laporan internal ini dapat diketahui penyebab yang dapat menimbulkan kendala dalam penyelesaian target sehingga dapat direncanakan kegiatan yang mampu mencegah kejadian berulang.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Pengelolaan risiko dapat digunakan untuk merencanakan strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Melalui daftar risiko dan atribut pengendaliannya masalah dapat dicegah sehingga sumber daya yang digunakan menjadi lebih efisien.

19. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 62.*Target dan Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji sesuai Standar*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120 (dikonversi)	**Sangat Baik**

Realisasi Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

A = **Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar/Jumlah target sampel Makanan** x 100%

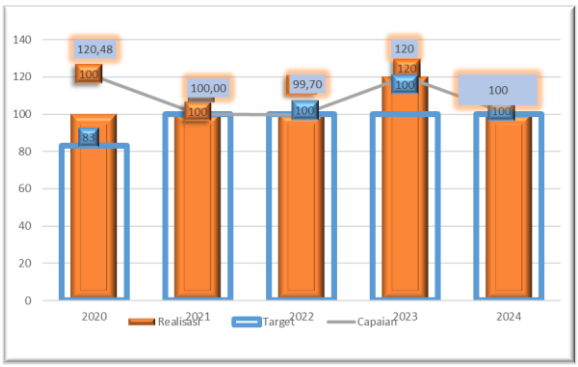
B = **Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar/Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium** x 100%

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan

yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Balai Besar POM di Banda Aceh sebanyak 448 sampel dari target 448 sampel. Sampel yang masuk ke Laboratorium sebanyak 1309 sampel yang berasal dari Balai Besar POM di Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Aceh Selatan dan sampel dari Balai Besar POM/BPOM/Loka lain yang berada di wilayah regional.

Dari 1309 sampel, sebanyak 1309 yang dapat diuji sesuai timeline pengujian yang disepakati yaitu 30 hari dengan memperhatikan clock off dan clock off akibat ketidaktersediaan reagen, kerusakan alat dan masalah teknis lainnya. Realisasi indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah memenuhi target pada tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Baik. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 36. ***Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya***

Target kinerja tahun 2021 ditetapkan berdasarkan realisasi pada tahun 2020. Realisasi kinerja dari tahun 2020-2024 rata-rata 100% hanya di tahun 2022 yang mengalami penurunan menjadi 99.73% sehingga menyebabkan hasil kinerja menjadi Belum Memenuhi ekspektasi/Kurang efektif.

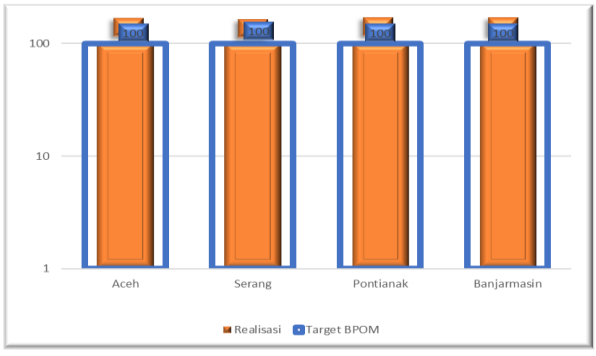
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target RENSTRA 2020-2024

Table 63.***Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target RENSTRA 2020-2024***

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024(%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	120	120 ▲	**Tercapai / Melampaui**

Realisasi tahun 2024 yaitu 100% dan dikonversi menjadi 120 % telah mengalami peningkatan. Dengan perencanaan yang baik di tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh mampu mencapai realisasi yang optimal.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Grafik 37. ***Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional***

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Banjarmasin dan Balai Besar POM di Serang memperoleh realisasi 100%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Capaian indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target dikarenakan perencanaan yang baik. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah perencanaan terhadap perawatan peralatan dan pengembangan kompetensi personel terkait pengujian, sampel sesuai pembagian tugas terhadap sampel regionalisasi dan pengerjaan sampel DAK dari dinkes Kab/Kota oleh personel pengujian.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 64.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	57.580.000	57.472.331	99.81	100 dikonversi 120	**Efisien**

Dari hasil tabel di atas penggunaan anggaran tahun 2024 **efisien** karena capaian indikator kinerja lebih tinggi dari realisasi anggaran. Hal ini disebabkan anggaran dapat digunakan semaksimal mungkin dalam pemenuhan target kinerja. Capaian ini berjalan dengan baik karena perencanaan dilakukan dengan sangat baik. Dengan begitu dapat disimpulkan anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Tercapainya target didukung oleh beberapa faktor. Peningkatan kompetensi personel pengujian yang dilakukan secara berkesinambungan, baik didapatkan dari pelatihan teknis, maupun transfer knowledge antar penguji sehingga memperlancar proses pengujian. Perencanaan kebutuhan laboratorium telah optimal dan anggaran dimanfaatkan secara efisien. Terutama untuk perbaikan dan pemeliharaan

instrument, diantaranya perbaikan dan kalibrasi alat microwave MARS dan ICP OES untuk pengujian Cemaran logam sampel regional dan perbaikan alat HPLC 20AD untuk pengujian sampel pangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerjasama yang baik antar personel penguji dan pembagian tugas yang jelas mengenai penanggung jawab alat, dapat memperlancar proses penyelesaian sampel. Kendala yang dihadapi laboratorium pangan selama 2024 diantaranya: personel pengujian Pangan juga dilibatkan dalam kegiatan lain seperti kegiatan SAKA POM, kegiatan ProPN Desa, Pasar dan Sekolah, sehingga juga mempengaruhi kondisi penyelesaian sampel tetapi dapat diatasi dengan sistem kerja yang cepat (paperless). Jumlah sampel pihak 3 dari DAK dari Dinkes Kab/Kota yang datang bersamaan dengan sampel Regional mulai dari bulan Mei s.d November 2024 sehingga menyebabkan clock on dan clock of sampel rutin untuk menyelesaikan sampel pihak ketiga terlebih dahulu.

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Interim TW III digunakan oleh pemangku kepentingan dan UMKM untuk melihat profil kemampuan pengujian di Balai Besar POM di Banda Aceh sehingga bila diperlukan, dapat menguji sampelnya ke laboratorium. Laporan ini juga digunakan sebagai dasar untuk melihat capaian indikator serta kendala yang dialami baik sampling maupun pengujian. Kendala pengujian dari eksternal terkait penginputan SIPT oleh balai regional yang tidak konsisten, sehingga perlu ditindaklanjuti sehingga sampel dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditentukan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Pengelolaan risiko yang baik dapat mengurangi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Dengan memanfaatkan daftar risiko dapat diidentifikasi celah yang dapat menghambat realisasi dan pencapaian target kinerja.

Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan 5 dicapai dengan **nilai 121,95 %** karena capaian di atas 120 tetap dibuat 120 % dengan kategori Sangat Baik.

Indikator Kinerja

20. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 65.*Target dan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan Tahun 2024*

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82	100	121.95 menjadi 120	**Sangat Baik**

Pada tahun 2024, Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh, diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Penilaian Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan perkara kejahatan

dilakukan dengan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu pembagian bobot berturut-turut:

a. SPDP sebesar 15 % - nilai A [(a + b + c + d)/jumlah perkara]
b. Tahap I sebesar 40 % - nilai B [(b + c + d)/jumlah perkara]
c. P21 sebesar 30 % - nilai C [(c + d)/jumlah perkara]
d. Tahap 2 sebesar 15 % - nilai D [(d)/jumlah perkara]

Nilai tingkat keberhasilan = [(15% x A) + (40% x B) + (30 % x C) + (15% x D)] x (jumlah capaian/target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun *n* dan perkara *carry over.* Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang

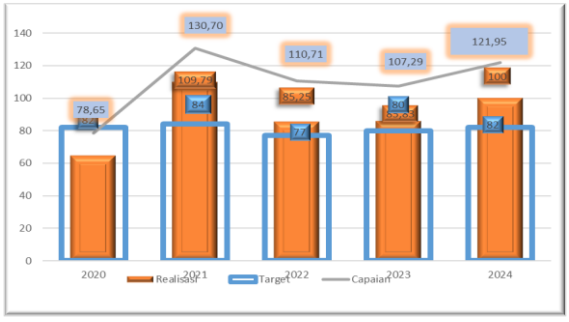
dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)).
c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum).
d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 adalah 100 % dari target 82%. Yang berarti, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menyelesaikan semua tahapan penyidikan dari semua perkara yang ditargetkan, sebanyak 6 (enam) perkara di tahun berjalan dan 1 (satu)perkara *carry ov*er. Sehingga, capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2024 sebesar 121,95 % (menjadi 120) dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan (Sangat baik),** sesuai perhitungan NPSS capaian lebih 120 % tetap dibuat 120 % untuk capaiannya.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya



Grafik 38.. Realisasi dan Capaian tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Rata-rata realisasi dan capaian selama 4 (empat) tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 87,60 % dan sebesar 106,84 %. Sedangkan realisasi dan capaian pada tahun 2024 masing-

masing sebesar 100 % dan 121,95 %. Yang berarti pada tahun 2024, baik realisasi kinerja maupun capaian kinerja Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di wilayah kerjanya, Balai Besar POM di Banda Aceh berada di atas rata-rata tahunan sebelumnya. Namun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2020-2023), maka pencapaian tersebut merupakan pencapaian tertinggi kedua setelah pencapaian tahun 2021, sebesar 130,70 %.

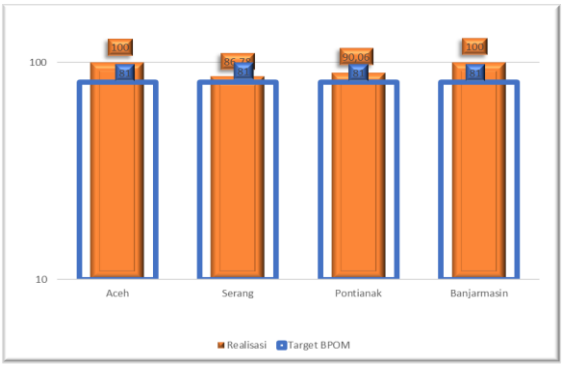
c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Renstra 2024

Table 66.*Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2024 dengan Target Renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024(%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82.00	100	121.95 (120%) ▲	**Tercapai / Melampaui**

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan tahun 2024 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan persentase capaian sebesar 121,95 % dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” dan dikonversi menjadi 120 %. Dengan tingginya pencapaian tersebut, hal ini dapat menjadi acuan untuk penetapan target pada Renstra tahun 2025 - 2030.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan target nasional



Grafik 39.Perbandingan Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan Balai Setara dan Target Nasional

Rata-rata realisasi 4 (empat) Balai Besar POM yang setara sebesar 94,21 %. Dari rata-rata tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh dan Balai Besar POM di Banjarmasin berada di atas nilai rata-rata dengan nilai realisasi yang sama,

100%. Sedangkan Balai Besar POM di Serang dan Balai Besar POM di Pontianak berada dibawah nilai rata-rata, masing-masing dengan nilai 86,98 % dan 90,06%. Namun dari 4 (empat) Balai Besar POM yang dibandingkan, nilai realisasi pada tahun 2024 keempat Balai Besar masih berada di atas 81 % yang merupakan target Nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa faktor yang mendukung terlampauinya capaian kinerja keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh, selama tahun 2024, yaitu:

1. Adanya aplikasi E-Berpadu, memudahkan petugas dalam mendapatkan persetujuan penyitaan dan penggeledahan dari Pengadilan Negeri setempat;
2. Tersangka yang berperkara cukup kooperatif saat dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
3. Koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah maupun Resort cukup baik;
4. Adanya dukungan taktis dan teknis yang diberikan oleh pihak Kepolisian dalam rangka penangkapan dan penahanan tersangka cukup baik;
5. Koordinasi dan komunikasi secara intens yang dilakukan oleh para penyidik dengan Jaksa peneliti sehingga berkas dapat cepat dilengkapi;
6. Dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelesaikan proses penyidikan dengan berkoordinasi pada level atas.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 67.*Tingkat efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	746.471.000	739.472.026	99,06	121,95 (120)	**(Efisien)**

Dari data pada tabel, dapat diperoleh nilai Indeks Efisiensi (IE) sebagai berikut:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ output}{\%\ Capaian\ input} = \frac{121{,}95}{99.06} = 1{,}23$$

Sehingga nilai Tingkat Efisiensinya (TE) adalah sebagai berikut:

$$TE = \frac{Indeks\ Efisiensi - Standar\ Efisiensi}{Standar\ Efisiensi} = \frac{1{,}23\ -\ 1}{1} = 0{,}23$$

Dengan nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,23, maka capaian efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai keberhasilan kinerja penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah **95 % (efisien).**

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan penyusunan rencana kegiatan sehingga fokus kegiatan menjadi lebih tepat;
2. Adanya kegiatan penggalangan berupa FGD yang melibatkan para pimpinan perusahaan ekspedisi sangat membantu dalam membangun jaringan informasi. Dengan terbangunnya jaringan informasi tersebut, petugas lebih mudah berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan ekspedisi terkait penindakan penelusuran dan pengamanan barang bukti, serta penangkapan para tersangka;
3. Dukungan informasi dari Intelijen Badan POM RI ketika ada produk Obat dan Makanan yang akan masuk ke wilayah Aceh. Pada triwulan 3, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mendapatkan 2 informasi tentang pengiriman Obat-obat Tertentu (Tramadol) dan Psikotropika dari Direktorat Intelijen Badan POM yang langsung ditindaklanjuti dengan penindakan tanpa perlu didahului investigasi, sehingga target perkara dapat tercapai lebih cepat dari perkiraan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dari capaian kinerja yang sangat tinggi pada keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh, maka laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan dalam rangka Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, terutama pada pertimbangan atas penetapan target pada tahun-tahun berikutnya.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator kinerja

Salah satu risiko dalam proses penyidikan adalah tersangka melarikan diri, terutama tersangka dalam perkara peredaran obat-obat tertentu. Guna meminimalisir risiko tersebut, pada tahun 2024, dimana Balai Besar POM di Banda Aceh untuk pertama kalinya menangani 2 (dua) perkara terkait hal tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Banda Aceh bekerjasama dengan pihak Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang berperkara dalam kasus peredaran obat-obat tertentu.

Sasaran Kegiatan 6
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan 6 dicapai dengan NPS 110.43% (Kategori Sangat Baik). Sasaran Kegiatan 6 tercapai karena didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Indeks Pemenuhan Laboratorium Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal. Kontribusi tercapainya Sasaran 6 dapat dilihat dari realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang melebihi target tahun 2024 yang melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Untuk Indikator Pengelolaan data dan informasi mengalami konversi capaiannya menjadi 120 (dengan realisasi sebesar 3,6).

Indikator Kinerja

21. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 68.*Indeks Pemenuhan Laboratorium Obat dan Makanan sesuai standar GLP*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pemenuhan Laboratorium Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87.0	87.75	100.86	**Sangat Baik**

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK. 02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM. Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

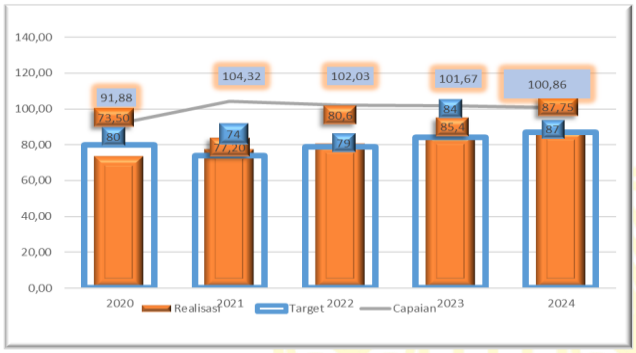
Table 69.*Tabel Parameter Penilaian GLP*

Parameter GLP	Target 2024 (%)
Standar Ruang Lingkup GLP	> 65
Standar Kompetensi personel laboratorium	>75
Standar Alat Laboratorium	>70

Pada tiap triwulan dilakukan monev pemenuhan GLP oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), pada Triwulan IV telah dilakukan penilaian secara kumulatif terhadap capaian Standar Kemampuan Laboratorium dan Balai Besar POM di Banda Aceh mendapat nilai Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sebesar 92.02%, pemenuhan Standar Kompetensi personel

laboratorium sebesar 93,91% dan Standar Alat Laboratorium sebesar 77.32%, sehingga total pemenuhan GLP sampai dengan triwulan IV sebesar 87.75%. Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 sudah berhasil mencapai target yaitu 100.86% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Gambar 59. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 terhadap kinerja tahun sebelumnya

Terdapat peningkatan realisasi dan capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 sebagai hasil dari upaya Balai Besar POM di Banda Aceh dengan melakukan monev rutin terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium; melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melakukan sebanyak 43 verifikasi metode analisis, dan penambahan ruang lingkup sebanyak 31 jenis zat aktif pada tahun 2024; pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan meningkatkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan online; dan pemenuhan Standar Alat laboratorium dengan memprioritaskan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024

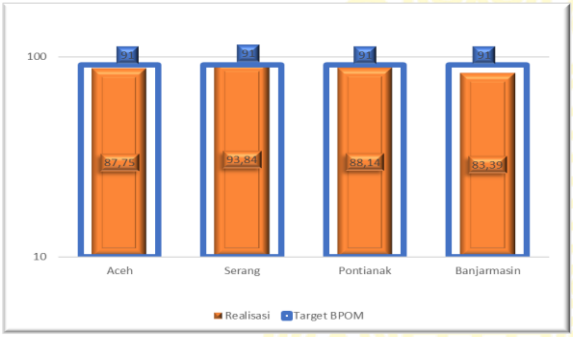
Table 70.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian	87	87,75	100.86 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

	Target PK 2024	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87	87.75	100.86	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori **Sangat Baik**.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Grafik 40. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Serang (93.84%) , Balai Besar POM di Banda Aceh (87.75%), Balai Besar POM di Pontianak (88.14%) dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Banjarmasin (83.39%), dari ketiga balai yang diperbandingkan, hanya Balai Besar POM di Banda Aceh, Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Serang yang mencapai target nasional (86).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Balai Besar POM di Banda Aceh berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan, capaian target tahunan sebesar 87.75 % dari target 87 % tahun 2024. Dalam pelaksanaan terdapat kendala dalam pencapaian nilai SKL tahun 2024 antara lain: Pemenuhan SRL sampel Obat terkendala karena sampel tidak masuk laboratorium dan tidak ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh, tidak tersedianya baku pembanding.

Solusi alternatif yang telah dilakukan untuk menaikan nilai SKL antara lain sebagai berikut:

a. Perencanaan reagen dan baku pembanding dan berkoordinasi ke P3OMN; Pengadaan suku cadang berupa kolom C8 dan guard kolom.
b. Koordinasi dengan P3OMN untuk sampling di wilayah Jakarta dan koordinasi dengan Balai Lain untuk sampling dan Koordinasi dengan dinkes Kab / Kota, IFK dan RS Kab/Kota.
c. Melakukan monev terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium.
d. Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melakukan verifikasi metode, Sampai dengan triwulan IV verifikasi metode analisis yang telah terlaksana adalah sebanyak 43 metode analisis pada tahun 2024.
e. Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan meningkatkan pengembangan kompetensi melalui pelatihan online yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN terutama untuk penguji yang belum memiliki sertifikat untuk kompetensi - kompetensi yang dipersyaratkan.

Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan memprioritaskan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 71.*Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	1.135.344.000	1.133.433.680	99.83	100.86	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sudah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada %

realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya sudah mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP. Hal ini disebabkan fokus anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang mendesak diadakan dan diperbaiki, kedepannya akan direncanakan untuk pemeliharaan alat yang lebih baik.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah:

Dalam rangka pemenuhan SRL telah dilakukan verifikasi terhadap 44 metode analisis pada tahun 2024. Verifikasi Metoda Analisa dilakukan di awal tahun dalam upaya pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien. Peningkatan SRL obat juga dioptimalkan dengan berkoordinasi dengan PPPOM, RSU Abbiya dan Apotek Kimia Farma di Banda Aceh. Pelatihan internal bagi personel laboratorium yang dilakukan di Balai sehingga pelatihan dapat diikuti oleh semua personel laboratorium. Pemenuhan alat laboratorium pada tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu. Perencanaan yang baik dan tepat waktu untuk pengadaan reagensia, suku cadang, baku pembanding dan bahan penunjang pengujian. Koordinasi yang baik dan intensif dengan Pusat, antar anggota di region Medan dan dengan lintas sektor dalam upaya pemenuhan ruang lingkup pengujian untuk sampel yang tidak beredar di Wilayah UPT.

Regionalisasi laboratorium Badan POM sudah dilaksanakan mulai tahun 2022, dengan program ini diharapkan peningkatan efisiensi baik waktu, reagen, maupun efisiensi terhadap alat-alat laboratorium dapat dicapai. Perbedaan pola pengujian terkait regionalisasi tentunya akan berpengaruh terhadap pemenuhan standar GLP, diharapkan P3OMN dapat membuat tools penilaian pemenuhan standar GLP yang disesuaikan dengan kondisi regionalisasi laboratorium.

Perencanaan yang baik terhadap kebutuhan reagensia, suku cadang, dan baku pembanding untuk mengantisipasi kekurangan dan kehabisan reagensia untuk pengujian rutin maupun pengujian regional.

Penggunaan Aplikasi Apresiasi yang lebih intensif untuk mendukung pengujian terhadap kekurangan dan kehabisan stock reagensia, baku pembanding dan suku cadang antar region Medan. Peningkatan koordinasi internal antara lain dengan tim inspeksi agar melakukan sampling obat-obat yang sulit di pasaran pada awal tahun terkait sampel yang harganya mahal atau keterbatasan ketersediaan di pasaran. Meningkatkan kompetensi penguji melalui OJT (On Job training).

h. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Interim TW III digunakan sebagai dasar untuk melihat capaian indikator serta kendala yang dialami baik dalam peningkatan standar ruang lingkup agar memudahkan monitoring dan evaluasi sehingga capaian dapat ditingkatkan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Pengelolaan risiko terkait pemenuhan GLP sudah dilakukan beberapa tindakan atribut pengendalian sudah dilakukan dan bisa dibilang cukup efektif untuk mendukung pencapaian target kinerja.

22. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 72.*Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	3	3 (dikonversi menjadi 3.6)	120.00	**Sangat Baik**

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

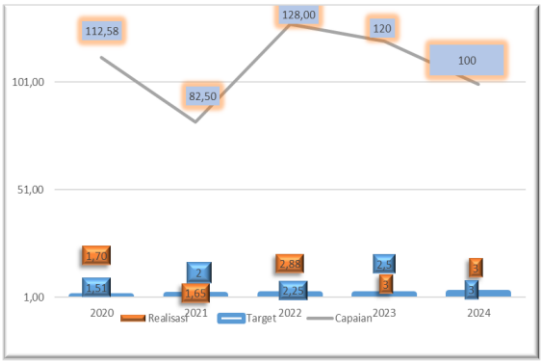
0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada tahun 2024 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 100%, namun indikator ini mengalami konversi untuk penilaian NPSS menjadi 3.6 untuk realisasi dan capaian sebesar 120% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 41. ***Realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.***

Realisasi dan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan 2021, namun terjadi penurunan realisasi dan capaian di tahun 2024 sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi secara ketat setiap bulan terhadap semua komponen.

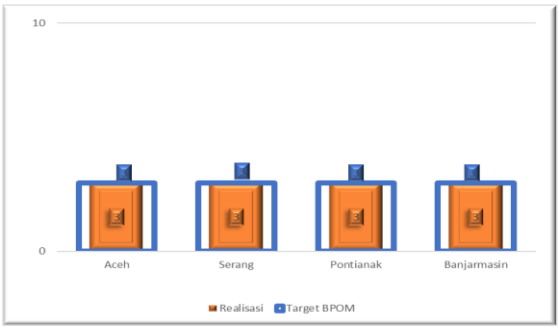
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra 2021-2024

Table 73.*Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target Renstra 2021-2024*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	3	3.00 dikonversi menjadi 3.6	120.00 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh sudah mencapai target Renstra 2024 sebesar 120.00% dengan kategori tercapai/melampaui, dengan terpenuhinya semua nilai perkomponennya.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian



Grafik 42. ***realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain.***

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai memiliki realisasi indeks pengelolaan data dan informasi yang sama dan sudah mencapai target nasional (3.00).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator hingga tahun 2024 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Pemutakhiran SPIMKER	Pemutakhiran SIPT	Pemanfaatan Berita aktual	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BOC	Pemanfaatan Email	Realisasi Indeks
0.6	2.4	3	3	3	3	3

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain: meningkatkan akses email oleh pegawai, dengan cara melakukan monev dalam penarikan data setiap bulan untuk pengecekan aktivasi email setiap pegawai.

a. Tetap rutin melakukan upload berita aktual oleh petugas balai dengan target yang ditetapkan.
b. Meningkatkan akses sharing folder dalam waktu 1 bulan.

Nilai indeks pemutakhiran SPIMKER dan SIPT masih rendah karena masih terdapat beberapa kendala dalam aplikasi diantaranya:

a. Penginputan data kasus keracunan yang dilakukan tidak tepat waktu.
b. Verifikasi data kasus keracunan yang diverifikasi tidak maksimal 30 hari kerja.
c. SIPT tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, hal ini diperlukan agar proses kerja sistem tersebut lebih maksimal.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 74.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024 (%)	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	145.950.000	145.950.000	100	**120**	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator senilai 120 %, lebih besar dari realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Indeks pengelolaan data dan informasi pada Balai Besar POM di Banda Aceh di setiap fungsi telah sesuai target, sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi secara berkala. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks salah satunya dengan pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh seperti pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pemeliharaan peralatan kantor. Pada tahun 2024, telah diadakan 8 (delapan) unit alat pengolah data seperti 1 (satu) laptop multimedia, 4 (empat) laptop administrasi dan 4 (empat) printer. Dengan dipenuhinya sarana prasarana tersebut, diharapkan semua kegiatan dapat berjalan lancar dan target indikator dapat tercapai.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan TW IV, diperoleh informasi bahwa nilai indeks pemutakhiran seluruh komponen sudah memenuhi target sehingga capaian indikator kinerja sudah mencapai 120%. Hal ini dikarenakan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh komponen sehingga proses kerja sistem lebih maksimal.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Risiko yang dapat terjadi pada indikator pengelolaan data dan informasi di Balai Besar POM Banda Aceh berhubungan dengan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas dan keamanan data yang dikelola. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah kebocoran atau penyalahgunaan data sensitif, baik oleh pihak internal

maupun eksternal. Data terkait informasi obat, perizinan, dan pengawasan yang dikelola oleh instansi ini sangat rentan terhadap potensi peretasan atau kesalahan dalam mengelola akses ke data tersebut. Tanpa kontrol yang ketat, informasi yang sangat bernilai ini bisa jatuh ke tangan yang salah.

Risiko lainnya adalah kegagalan dalam menjaga integritas data. Terjadinya kesalahan pencatatan atau ketidaksesuaian data akibat faktor manusia, sistem yang tidak terintegrasi dengan baik, atau kesalahan dalam proses input data dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat atau bahkan hilangnya data yang sangat penting. Hal ini bisa berdampak pada pengambilan keputusan yang salah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Selain itu, adanya ancaman dari gangguan teknis, seperti kerusakan perangkat keras atau perangkat lunak, yang dapat mempengaruhi akses atau ketersediaan data, juga menjadi risiko signifikan. Jika sistem cadangan data tidak cukup memadai atau tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan kehilangan data yang tak tergantikan dalam situasi darurat.

Ketergantungan pada sistem manual atau kurangnya pelatihan bagi staf dalam hal pengelolaan data dan informasi juga menjadi faktor risiko. Tanpa keterampilan yang memadai, risiko human error, seperti kesalahan input atau pengelolaan informasi yang tidak sesuai, bisa meningkatkan potensi ancaman terhadap integritas data yang dikelola.

Sasaran Kegiatan 7
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan 7 dicapai dengan NSS 100,54 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 101,99.

Indikator Kinerja

23. Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman

dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BALAI BESAR POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 75.*Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu Tahun 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	84	84.45	100.54	**Sangat Baik**

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Responden dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM yang berusia 17-65 tahun serta sehat jasmani dan rohani. Pengembangan metode dan desain sampel dilakukan bersama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara tatap muka dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yang berbasis *offline* dan *online* yang dapat dimonitor secara *real-time melalui dashboard monitoring* pada: https://surveiskkm.pom.go.id

Indeks Kesadaran Masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu:

1. **Pengetahuan (Knowledge)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. **Sikap (Attitude)** untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih,

menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.

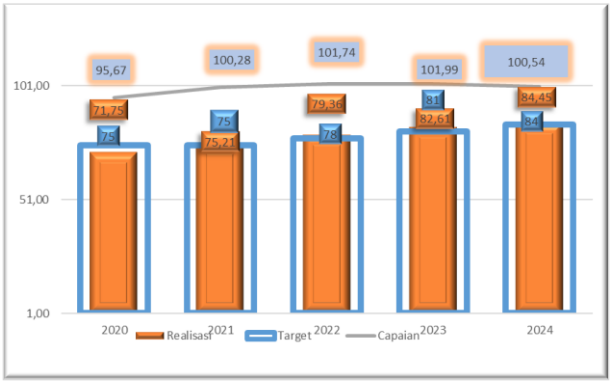
3. **Perilaku (Practices)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Indeks Kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, yaitu jaminan keamanan, upaya pengawasan, upaya perlindungan dan pemberian informasi, serta tindakan BPOM. Indeks Kesadaran dan Kepuasan yang digunakan yaitu skala 0 - 100 dengan kategori sebagai berikut:

Kategori	Skala
Tidak Baik / Tidak Puas	≤ 45,00
Kurang Baik / Kurang Puas	45,01 – 60,00
Cukup Baik / Cukup Puas	60,01 – 75,00
Baik / Puas	75,01 – 90,00
Sangat Baik / Sangat Puas	≥ 90,01

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 diperoleh sebesar 84.45 dan persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar **100.54 %** dengan kategori "**Sangat Baik".**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 43. ***Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness Indeks) terhadap Obat dan Makanan aman dan Bermutu Tahun 2024***

Berdasarkan grafik di atas terdapat peningkatan realisasi indikator Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2020, 2021,2022, dan 2023 dimana nilai Indeks tahun 2024 meningkat sebesar 1.84 poin. Hal ini merupakan hasil dari upaya Balai Besar POM di Banda Aceh untuk memberikan layanan publik sampai ke pelosok negeri bahkan kecamatan terpencil, Edukasi secara langsung misalnya melalui Inovasi Sanger Ureueng Aceh SAKA POM dan JANET (Jawab Netizen), serta penyebaran informasi melalui media sosial/ media komunikasi. Layanan langsung kepada masyarakat ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

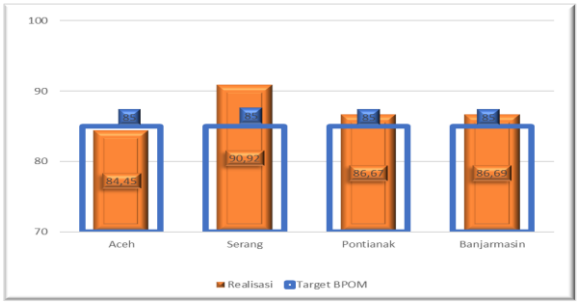
c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2024

.Table 76*Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024 dengan target renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar POM di Banda Aceh	84	84.45	100.54 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 sebesar 84.45 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dimana capaian sebesar 100.54% dengan kategori" Tercapai/Melampaui".

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Grafik 44. ***Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024 dengan Balai setara dan Capaian Nasional***

Berdasarkan grafik di atas, bahwa realisasi Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024 dengan nilai tertinggi yaitu Balai Besar POM di Serang (90,92), diikuti Balai Besar POM di Banjarmasin (86.69) dan Balai Besar POM di Pontianak (86.67) dan yang terendah yaitu Balai Besar POM di Banda Aceh (84.45). Namun, bila dibandingkan dengan target nasional (85), Balai Besar POM Aceh memiliki realisasi nilai indeks di bawah target nasional, sedangkan ketiga Balai Besar POM lainnya memiliki realisasi nilai indeks di atas target. Hal ini disebabkan karena target 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh memang dibawah target nasional (84).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Jumlah responden pada survei pengukuran tingkat kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan tahun 2024 adalah sebanyak 510 responden. Aspek pembentuk Indeks Kesadaraan Masyarakat yang diperoleh dari ketiga aspek berada pada kategori Baik. Indikator yang tertinggi adalah sikap masyarakat yaitu 88.03 (Kategori Baik) dan pengetahuan masyarakat 86.96 (Kategori Baik). Sementara itu, perilaku merupakan indikator kesadaran dengan nilai yang terendah yaitu sebesar 78.37 (Kategori Baik). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun perlu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Table 77.*Indeks Kesadaran Masyarakat*

Indeks Kesadaran Masyarakat						
Aspek	**Obat**	**Obat Tradisional**	**Suplemen Kesehatan**	**Kosmetik**	**Pangan Olahan**	**Indeks**
Pengetahuan	88,43	82,13	82,14	83,87	86,36	84,96
Sikap	88,57	88,03	87,64	87,5	88,02	88,08
Perilaku	78,34	73,59	71,9	75,58	73,49	74,79
Indeks	85,11	81,25	80,56	82,32	82,63	82,61

Hasil survei Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu tahun 2024 per komoditi seluruhnya berada pada kategori Baik, dengan rincian sebagai berikut:

- Obat : 85.94 (Baik/Puas)
- Obat Tradisional : 83.02 (Baik/Puas)
- Suplemen Kesehatan : 83.06 (Baik/Puas)
- Kosmetik : 84.64 (Baik/Puas)
- Pangan Olahan :: 84.68 (Baik/Puas)

Berdasarkan pesan kunci KLIK dapat disimpulkan bahwa variable pada aspek sikap dan pengetahuan, variable tertinggi yakni terkait kadaluwarsa dan yang terendah adalah nomor izin edar. Sementara untuk aspek perilaku, variable tertinggi adalah memilih produk dengan kemasan yang baik dan yang terendah adalah membaca informasi pada label.

Faktor penyebab keberhasilan capaian Indeks kesadaran masyarakat yaitu:

1. Sinergi dengan OPD terutama di daerah rural, seperti camat dan perangkat desa.
2. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan, lebih menyasar ke Sekolah/Madrasah/Pesantren/Perguruan tinggi.
3. Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural dan perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online.
4. Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Table 78.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu tahun 2024*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai Besar POM di Banda Aceh	16.826.100	16.166.551	96.08	100.54	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas, bahwa anggaran yang dialokasikan untuk indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 telah digunakan secara efisien.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024, diantaranya dengan cara membuat konten/materi informasi dan edukasi yang disusun sesuai pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat, terutama konten di media sosial dengan update berita terkini seputar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dan interim memberikan manfaat baik internal maupun eksternal. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak antara lain pemerintah daerah, perguruan tinggi, media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi mereka. Selama ini kerjasama Balai Besar POM di Banda Aceh dengan berbagai lintas sektor telah berjalan dengan harmonis dan dinamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian pada indikator ini tercapai dengan sangat baik dimana berbagai risiko yang mungkin menghambat pencapaian pada indikator ini telah dimitigasi dengan baik. Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah diinformasikan ke masyarakat secara aktif, berbagai kegiatan pengawasan obat dan makanan juga dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat yang diberdayakan. Risiko - risiko yang mungkin muncul dan menghambat pencapaian indikator ini baik dari sisi operasional, sumber daya, teknologi informasi dan faktor risiko lainnya akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan untuk tantangan yang akan datang.

Sasaran Kegiatan 8
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Sasaran Kegiatan 8 dicapai dengan NSS 102,92 dengan kategori sangat baik. Capaian Kinerja 3 (tiga) IKU yang dikelola dalam Sasaran Kegiatan 8 berhasil melampaui target. Realisasi yang telah melampaui target menunjukkan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh telah dirasakan langsung manfaatnya.

Indikator Kinerja

24. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 79. *Target dan Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,2	99,49	103,42	**Sangat Baik**

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara daring dan luring dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$$Indeks\ Nasional = \sum (\sum(\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

ÊJk adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi.

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17).
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110).
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230).

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pelaku usaha yang mendapat

bimbingan dan pembinaan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya.

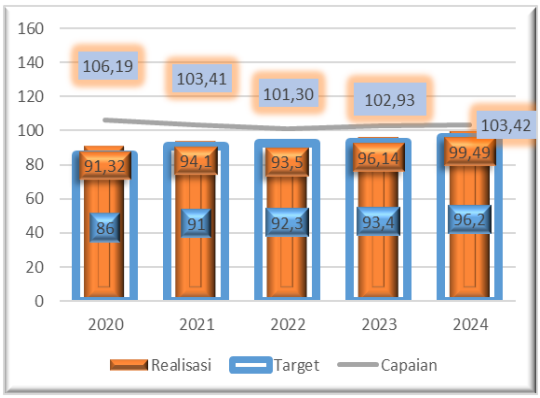
Aspek pengukuran dalam survey ini adalah:

- Aspek bimbingan dan pembinaan.
- Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan.
- Aspek penanganan saran dan masukan.
- Aspek manfaat.
- Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan empathy, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Pada tahun 2024, dari survei yang disampaikan kepada pelaku usaha diperoleh hasil Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan sebesar 99,49%. Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan telah berhasil memenuhi target yang ditetapkan yaitu 103,42% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 45. ***Perbandingan realisasi dan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 sampai tahun 2024***

Berdasarkan gambar, diketahui bahwa terdapat kenaikan pencapaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 namun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020, tetapi masih dalam kategori sangat baik. Untuk tetap dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian perlu adanya komitmen serta dukungan dari setiap unit terkait untuk meningkatkan pelayanan publik termasuk pendampingan terhadap pelaku usaha obat dan makanan terutama UMKM.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra 2024

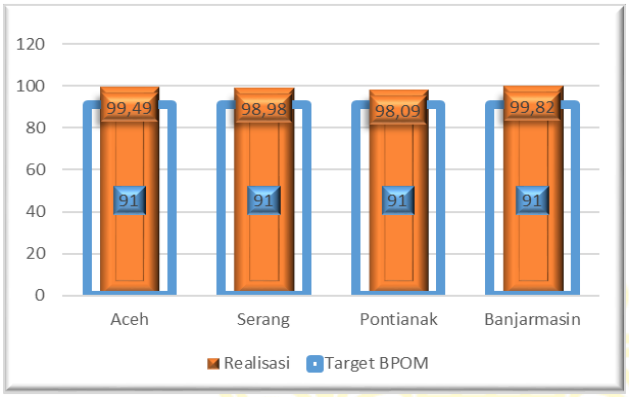
Table 80.*Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dengan. Target renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	96,2	99,49	103,42	**Tercapai / Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	96,2	99,49	103,42	**Tercapai / Melampaui**

Realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 sudah mencapai target renstra 2024 dengan kategori tercapai/melampaui. Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan menjadi 96.2. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan,

capaian kinerja tahun 2024 tercapai disertai dengan upaya strategi peningkatan pelayanan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan target nasional



Grafik 46. ***Perbandingan realisasi Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2024 dengan Balai setara dan target nasional***

Berdasarkan gambar disamping, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Banjarmasin dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Pontianak. Realisasi keempat balai yang diperbandingkan sudah mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu 91%.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan dilakukan terhadap 76 responden dengan 8 kegiatan bimbingan dan pendampingan sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian indeks kepuasan pelaku usaha ini diperoleh dari 8 (delapan) Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP). Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) terhadap pelaku usaha yang dilakukan yaitu: Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Pelaku Usaha Kosmetika Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2024, Bimtek kepada pelaku usaha Obat Tradisional, Bimtek CPPOB kepada pelaku usaha pangan, Desk registrasi dan jemput bola pangan olahan, desk/pendampingan CDOB Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2024.

Realisasi yang telah melampaui target menunjukkan bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh telah dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku usaha baik pada saat bimbingan teknis ataupun desk registrasi. Bimbingan teknis yang diberikan terkait CPPOB, CPKB, CPOTB, dan desk pendampingan CDOB. Hal tersebut dapat mengurangi kemungkinan permintaan perbaikan akibat tidak sesuai dengan persyaratan dan agar lebih cepat mendapatkan persetujuan dari UPT Pusat Badan POM.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi UMK Pangan Olahan tahun 2024 mendapat nilai yang paling tinggi yaitu 100. Kegiatan yang dilakukan secara luring menjadi salah satu penyebab tingginya kepuasan pelaku usaha terhadap KBP ini. Pelaksanaan KBP secara luring memperoleh hasil maksimal karena adanya interaksi aktif antara peserta dengan narasumber sehingga meningkatkan pemahaman peserta.

Untuk dapat lebih meningkatkan capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Banda Aceh perlu memperbaiki komunikasi dengan pelaku usaha agar tidak terjadi kesalahpahaman karena terdapat pelaku usaha yang memberikan saran yaitu untuk mempermudah dokumen persyaratan pada registrasi CPOTB.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 81.*Efisiensi anggaran pada indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	5,255,000	5,254,500	99.99 %	103,42%	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada %

realisasi anggaran tahun 2024. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

g. Analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Hasil survei pada masing-masing kegiatan bimbingan dan pembinaan memiliki sebaran hasil yang variatif. Nilai tertinggi diperoleh pada kegiatan yang dilakukan secara tatap muka, sedangkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan dengan metode daring memberikan nilai yang lebih rendah. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan secara tatap muka memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih baik antara pelaku usaha dengan narasumber. Demikian pula untuk kegiatan bimbingan dan pembinaan dalam bentuk desk dimana pelaku usaha akan menerima secara langsung hasil desk saat itu. Kegiatan pembinaan dan pendampingan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk memahami proses bisnis di Badan POM terkait penerbitan izin edar obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan. Masih perlu dilakukan komunikasi aktif berkesinambungan dengan pelaku usaha untuk meminimalisir kesalahpahaman antara petugas dengan pelaku usaha.

Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan didukung oleh adanya program/kegiatan sebagai berikut:

Table 82.*Hasil Survei Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) Tahun 2024*

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Metode	Nilai
1	Bimtek Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam	Mandiri	Daring	96,36
2	Bimtek Pendampingan UMKM kosmetik	Mandiri	Daring	100,00
3	BImtek CPPOB UMKM Pangan Olahan	Mandiri	Tatap Muka	100,00
4	Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam rangka jemput bola pangan olahan	Kerjasama Unit Lain	Tatap Muka	99,85

Seluruh rekomendasi untuk pencapaian indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sudah dilaksanakan seluruhnya sehingga indikator ini dapat tercapai dengan kategori sangat puas/baik.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target dan bahkan sudah mencapai target renstra awal 2024 sebelum dilakukan penyesuaian target dengan *baseline* realisasi 2023. Untuk tahun 2024 capaian meningkat dan mencapai target yang ditetapkan. Berbagai upaya dilakukan dengan melakukan bimtek dan pendampingan kepada pelaku usaha dan selalu terbuka membantu terkait konsultasi registrasi obat dan makanan serta bimbingan penyelesaian CAPA. Layanan yang mengalami perubahan dari manual menjadi digital merupakan tantangan tersendiri yang terutama bagi pelaku usaha dengan kemampuan literasi digital yang terbatas, sehingga peran petugas Balai Besar POM di Banda Aceh sangat dirasakan oleh para pelaku usaha. Petugas Balai Besar POM di Banda Aceh juga selalu rutin melakukan monitoring hasil survei dengan tetap menindaklanjuti rekomendasi pada triwulan sebelumnya.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan yaitu sangat baik dimana berbagai risiko yang memungkinkan indikator ini tidak tercapai telah dikendalikan dengan efektif. kesigapan petugas dalam mendampingi pelaku usaha dan selalu terbuka dalam melayani konsultasi terkait obat dan makanan menjadi faktor positif peningkatan capaian ini. Peningkatan kompetensi petugas dan melatih fasilitator juga diupayakan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha. Monitoring hasil survei juga terus dilakukan untuk menjaga capaian indikator agar tercapai sesuai target yang ditetapkan. Mitigasi risiko akan selalu dilakukan pembaharuan untuk

melihat keefektifan risiko dimasa yang akan datang.

25. Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 83.*Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2024*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,6	80,37	104,92	**Sangat baik**

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles, reliability, responsiveness, assurance* dan *empathy*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
2. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*empathy*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

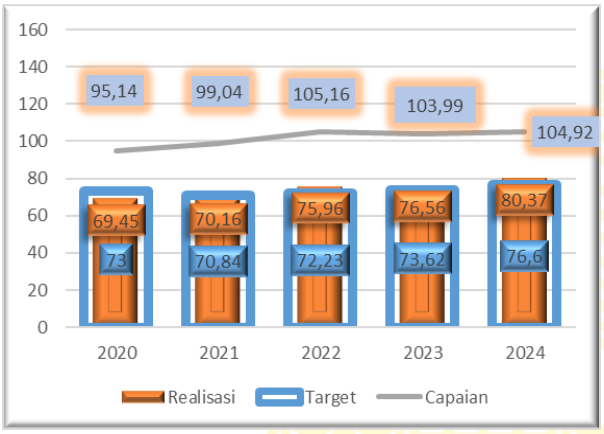
Pada tahun 2024 telah diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan nilai 80,37. Survei dilakukan terhadap 5 komoditi yang diawasi BPOM dengan hasil survei sebagai berikut:

- Obat : 77.44 (Baik/Puas)

- Obat Tradisional : 76.76 (Baik/Puas)
- Suplemen Kesehatan : 75.92 (Baik/Puas)
- Kosmetik : 75.90 (Baik/Puas)
- Pangan Olahan : 76.18 (Baik/Puas)

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kategori "baik/puas".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 47. ***Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2020 hingga 2024***

Berdasarkan grafik, diketahui bahwa terdapat peningkatan realisasi pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2024 dibandingkan tahun - tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya dukungan dan kerjasama serta komitmen dari setiap unit terkait untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat terkait pengawasan, penindakan, pemberian informasi serta jaminan keamanan obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra 2024

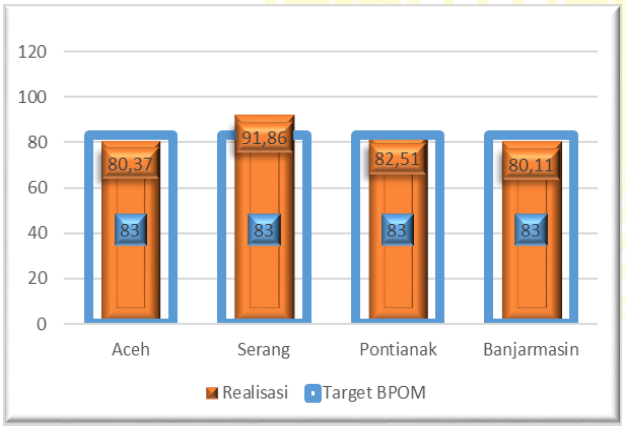
Realisasi indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2024 sudah mencapai target renstra 2024 dengan kategori "tercapai/ melampaui". Pada Bulan Desember 2023 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator indeks indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan menjadi 76.6. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target tahun 2024

yang telah ditetapkan dengan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Table 84.*Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks Kepuasan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan dengan Target renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2024 (%)	% Capaian	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan	76,6	80,37	104,92 ▲	**Tercapai/ Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	76,6	80,37	104,92 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai lain yang Sejenis/Setara dengan Target Nasional



Grafik 48.*Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 dengan Balai setara dan Capaian Nasional*

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Serang (91,86), diikuti Balai Besar POM di Pontianak lalu Balai Besar POM di Banda Aceh dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Banjarmasin (80,11). Dari keempat balai yang diperbandingkan, hanya Balai Besar POM di Serang yang sudah mencapai target nasional yaitu 83.

e. Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Indeks kepuasan masyarakat diukur melalui kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang diinformasikan melalui fasilitas website yang *terupdate*, media social (WhatsApp, website, Instagram, X, Facebook, Youtube dan WA blast), media cetak (media koran lokal) dan media elektronik (televisi and radio). Balai Besar POM di Banda Aceh juga melakukan pemberian informasi sesuai permintaan *stakeholder*, seperti topik terkait Keamanan pangan, Tata Cara Registrasi Pangan Olahan yang Baik, Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, Iklan Kosmetik yang baik dan lainnya.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama terkait isu–isu terkini yang terjadi di masyarakat seperti aksi kosmetik ilegal, kegiatan intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024, Intensifikasi Pengawasan Natal dan Tahun Baru, Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), Kosmetik mengandung merkuri, Bahan Berbahaya pada pangan, P4GN, Stunting, aksi pembersihan obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat dan ilegal di sarana gerobak/depot jamu, pengawasan pangan olahan dari bahan berbahaya boraks dan pemusnahan bahan berbahaya boraks. Adanya Tim KIE Balai Besar POM di Banda Aceh yang mampu membuat desain serta tampilan informasi di media sosial yang menarik, informatif, Kekinian dan mudah dimengerti oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan *follower* dan *engagement* media sosial BPOM Aceh. Layanan email maupun WhatsApp juga dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Meningkatkan intensifikasi KIE kepada masyarakat serta penyediaan layanan dengan pemanfaatan media sosial secara maksimal seperti tagline CEK KLIK, BPOM Mobile, Kata BPOM, Halo BPOM, website, dan alamat media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 85.*Efisiensi anggaran pada indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	22.474.450	21.157.477	94.13	104.92%	100 % (Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Dengan demikian anKearsipanggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan agar menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan antara lain:

1. Aksi pembersihan pasar dari produk obat tradisional dan kosmetik ilegal.
2. Aksi pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia obat dan ilegal pada gerobak jamu dan depot jamu.
3. Pengawasan pangan olahan dari bahan tambahan pangan berbahaya boraks.
4. Aksi berantas kosmetik ilegal pada klinik kecantikan dan sarana - sarana distribusi kosmetik terhadap produk tanpa izin edar maupun mengandung bahan berbahaya.
5. Intensifikasi Pengawasan pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru yang melibatkan Lintas Sektor terkait Dinas Kesehatan, dan Disperindagkop dalam pengawasan obat.
6. Sosialisasi tentang AMR kepada penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian dan pelaku usaha peternakan dan perikanan, serta gerakan Ayo Buang Sampah Obat (ABSO) dengan cermat.

7. Melibatkan Saka POM dalam kegiatan Inovasi Sanger Ureung Aceh dan Pengujian Takjil Ramadhan.
8. Melibatkan media cetak dan televisi untuk membantu menyebarkan informasi hasil pengawasan seperti aksi pemberantasan kosmetik ilegal, kegiatan intensifikasi pangan hari besar keagamaan.
9. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) yang terdiri dari Pemda dan Balai Besar POM di Banda Aceh untuk peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan telah mencapai target dan untuk tahun 2024 target juga tercapai dengan sangat baik. Berbagai upaya telah dilakukan seperti bimtek dan pendampingan pelaku usaha, pengawasan obat dan makanan seperti intensifikasi produk kosmetik etiket biru, intensifikasi obat bahan alam tanpa izin dan mengandung bahan kimia obat, serta intensifikasi Ramadhan, NAtal dan Tahun Baru juga rutin dilakukan dengan melibatkan lintas sektor terkait. Balai Besar POM di Banda Aceh juga aktif dalam menindaklanjuti isu - isu terkini di masyarakat terkait obat dan makanan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian pada indikator ini tercapai dengan sangat baik dimana berbagai risiko yang mungkin menghambat pencapaian pada indikator ini telah dimitigasi dengan baik. Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah diinformasikan ke masyarakat secara aktif, berbagai kegiatan pengawasan obat dan makanan juga dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat yang diberdayakan. Risiko - risiko yang mungkin muncul dan menghambat pencapaian indikator ini baik dari sisi operasional, sumber daya, teknologi informasi dan faktor risiko lainnya akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan untuk tantangan yang akan datang.

26. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 86.*Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik*

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	98.25	98.65	100.41	**Sangat Baik**

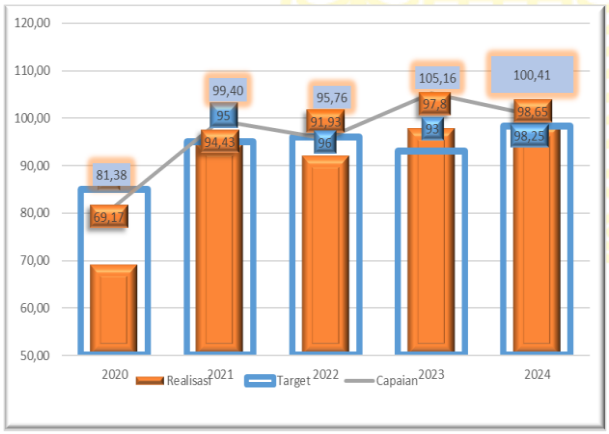
Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kategori	Skala
Tidak Baik/Tidak Puas	≤ 45,00
Kurang Baik / Kurang Puas	45,01 – 60,00
Cukup Baik / Cukup Puas	60,01 – 75,00
Baik / Puas	75,01 – 90,00
Sangat Baik / Sangat Puas	≥ 90,01

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM melalui aplikasi SAPA APIP (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), target dinyatakan dalam angka. Semua indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh ini diukur pada akhir tahun 2024.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui Aplikasi SapaAPIP dengan link https://tinyurl.com/YanblikBALAI_BESAR_POM__BandaAceh pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan setelah layanan 100% selesai. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh terhadap penerima layanan Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik; Sertifikasi cara distribusi obat yang baik; sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B; pengujian Obat dan Makanan; Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan; dan Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap. Pelaksanaan layanan publik di Balai Besar POM di Banda Aceh, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang "**sangat Baik**", dengan nilai SKM **98.65**, menunjukan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 yang mencapai nilai 97.80 %.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Grafik 49. ***Perbandingan Realisasi dan capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2020 hingga 2024***

Berdasarkan grafik di samping, realisasi dan capaian nilai Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2024 yaitu 98.65 dimana terjadi peningkatan capaian bila dibandingkan dengan tahun tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebanyak 0.85 point peningkatan. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dengan penetapan kebijakan pelayanan publik sesuai ketentuan, percepatan timeline hasil uji, penyelesaian pelayanan publik, peningkatan sarana prasarana dan kompetensi petugas layanan publik.

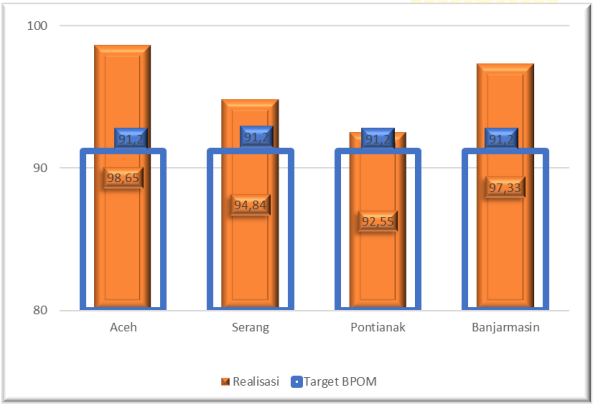
c. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Target Renstra 2024

Table 87.*Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2024 dengan target renstra 2024*

INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	98.25	98.65	100.41	**Tercapai/ Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	98.25	98.65	100.41	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2024 sebesar 98.65 telah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori " Tercapai/Melampaui". Pada Bulan Desember 2024 sudah dilakukan reviu target tahun 2024 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM menjadi 98.25. Penetapan target 2024 berdasarkan realisasi tahun 2024. Dengan dilakukannya reviu target oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target renstra tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional, serta Standar Eksternal



Grafik 50*Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarkat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2024 dengan Balai setara dan Capaian Nasional*

Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai tertinggi adalah Balai Besar POM di Banda Aceh (98.65), dibandingkan dengan realisasi indeks oleh Balai Besar POM di Banjarmasin (97.33), Balai Besar POM di Serang (94.84) dan Balai Besar POM di

Pontianak (92.55). Bila dibandingkan dengan target nasional sebesar 91.29, maka capaian dari keempat balai telah melampaui nilai target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor penyebab keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM yaitu:

1. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM melalui aplikasi SAPA APIP (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).
2. Diberikan kepada penerima layanan baik di UPP maupun di MPP yang telah menerima pelayanan secara tuntas (100%).
3. Responden diberikan informasi awal terkait Standar pelayanan yang ada dan mekanisme persyaratan pelayanan sehingga tidak salah tafsir terhadap isi pertanyaan dalam survei.

Berdasarkan hasil SKM tahun 2024, telah dilakukan analisis penyebab permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dan disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama perwakilan pengguna layanan pada tanggal 30 April 2024 dengan keluaran Standar Pelayanan Balai Besar POM di Banda Aceh.

Pada tahun 2024 Jumlah responden penerima layanan diperoleh sebanyak 31 orang responden. Pengolahan data SKM menggunakan Aplikasi sapaapip.pom.go.id dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai SKM per Jenis Layanan

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Jenis Layanan
1. Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	100.00	91.67	100.00	100.00	91.67	100.00	91.67	91.67	100.00	**96.30**
2. Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	100.00	100.00	94.44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	**99.38**
3.Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00	**98.15**
4.Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	**100.00**
5.Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	94.44	98.15	96.30	98.15	96.30	94.44	98.15	96.30	96.30	**96.50**
6.Pengujian Obat dan Makanan	100.00	100.00	99.38	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	**99.93**
7.Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	**100.00**
8.Surat Keterangan Ekspor				**N**	**I**	**H**	**I**	**L**		
9.Surat Keterangan Impor				**N**	**I**	**H**	**I**	**L**		

2. Nilai SKM per unsur dan unit Layanan

Unsur Pelayanan		2023	2024	Naik
U1	Persyaratan	98.32	98.39	0.07
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	97.98	97,98	0,94
U3	Waktu Penyelesaian	97.19	98.57	1,38
U4	Biaya/Tarif	97.47	99.46	1,99
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	97.47	97.85	0,38
U6	Kompetensi Pelaksana	98.48	98,39	0,09
U7	Perilaku Pelaksana	98.32	98,92	0,6
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	97.81	98.39	0,58
U9	Sarana dan Prasarana	97.14	98.92	1,78
	Nilai SKM Unit Layanan	**97.80**	**98.65**	**0,85**

Keterangan:

: Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)

: Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)

: Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)

: Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

Dari Sembilan Jenis layanan yang tertuang pada Standar Pelayanan Balai Besar POM di Banda Aceh, hanya tujuh Jenis layanan yang tersedia pada menu pengukuran di aplikasi sapaapip.pom.go.id, sehingga dua Jenis Layanan yaitu SKI/SKE tidak tergambarkan dalam pengukuran kepuasan masyarakat pada Tahun 2024 ini. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa:

1. Nilai SKM per layanan yang memperoleh nilai terendah adalah Layanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik yaitu **96,30**, selanjutnya Penerbitan Izin Penerapan CPPOB dengan nilai **96,50**, serta Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPKB dengan nilai **98,15.** Nilai SKM per layanan yang memperoleh nilai tertinggi adalah Rekomendasi Pemenuhan Notifikasi Kosmetik dan Layanan Pengaduan Informasi Masyarakat dengan nilai **100** disusul Layanan Pengujian Obat dan Makanan dengan nilai **99,93**
2. Penilaian tiga unsur layanan terendah secara keseluruhan layanan publik dijumpai pada Produk Spesifikasi Jenis Layanan (U5) mendapatkan nilai terendah yaitu **97,85**. Selanjutnya Persyaratan Layanan (U1) yang mendapatkan

nilai **98,39** adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Kompetensi Pelaksana (U6) termasuk tiga unsur terendah dengan nilai **98,39**.

3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif (U4) mendapatkan nilai **99,46**, Sistem Mekanisme dan Prosedur serta Perilaku Petugas mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu **98,92**.

Peningkatan capaian pada tahun 2024 diperoleh dari berbagai faktor diantaranya yaitu meningkatnya kompetensi petugas layanan dan petugas layanan publik yang selalu menerapkan budaya pelayanan 5S dalam melayani responden, mulai dari satpam, petugas layanan sampai dengan petugas pendamping registrasi, baik di MPP dan UPP Balai Besar POM di Banda Aceh dan peningkatan kompetensi petugas layanan melalui pelatihan pelayanan publik tingkat dasar dan lanjutan, Fasilitas pelayanan yang sudah memenuhi sarana dan prasarana serta mekanisme dan prosedur pelayanan yang sudah baku sesuai dengan SOP dan Standar Pelayanan mencakup seluruh aspek termasuk pengaduan. Produk layanan yag dihasilkan sudah sesuai dengan ketentuan serta tarif dan biaya yang diproses setelah mendapatkan persetujuan dan tanpa paksaan, pemberian pelayanan tanpa adanya membeda-bedakan karena seluruh pelanggan merupakan prioritas sehingga waktu proses disesuaikan dan diselesaikan secepat mungkin sesuai dengan peraturan, selanjutnya pemilihan responden yang benar benar telah mendapati layanan sampai selesai (100%).

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Table 88.*Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efesiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	26.504.700	25.185.642	95.02	100.41	(Efisien)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian pada indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Dengan demikian anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Tingkat efisiensi yang diperoleh juga didukung oleh sumber daya lainnya seperti peningkatan sarana prasarana dalam pelaksanaan layanan publik dan peningkatan kompetensi pelaksanaan layanan publik dalam rangka pencapaian output indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh yang meningkat sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator tahun 2024 yaitu pendampingan UMKM melalui inovasi e-learning korporasi, program spesifik daerah seperti inovasi Sanger Ureueng Aceh dan publikasi terkait PNBP, hasil pengawasan yang update pada media social maupun SIPPN, Timeline pengujian yang semakin cepat, dan selalu mengupdate kompetensi petugas layanan serta pemenuhan sarana prasarana.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, Balai Besar POM di Banda Aceh akan terus berupaya untuk memperbaiki kinerja kedepannya sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Capaian pada indikator ini tercapai dengan sangat baik dimana berbagai risiko yang mungkin menghambat pencapaian pada indikator ini telah dimitigasi dengan baik. Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah diinformasikan ke masyarakat secara aktif, berbagai kegiatan pengawasan obat dan makanan juga dilakukan dengan melibatkan lintas sektor dan masyarakat yang diberdayakan. Risiko - risiko yang mungkin muncul dan menghambat pencapaian indikator ini baik dari sisi operasional, sumber daya, teknologi informasi dan faktor risiko lainnya akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan untuk tantangan yang akan datang.

Sasaran Kegiatan 9
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal

Sasaran Kegiatan 9 dicapai dengan NPS 99.65 dengan kategori baik. Sasaran Kegiatan 9 didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Indeks RB dan Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh. Pada tahun 2024 2 (dua) Indikator kinerja ini tidak memenuhi target, namun kategori Nilai AKIP meningkat menjadi memuaskan (A).

Indikator Kinerja

27. Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 89.*Target dan Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	88.64	87.49	98.70	**Cukup**

Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024. Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Banda Aceh.

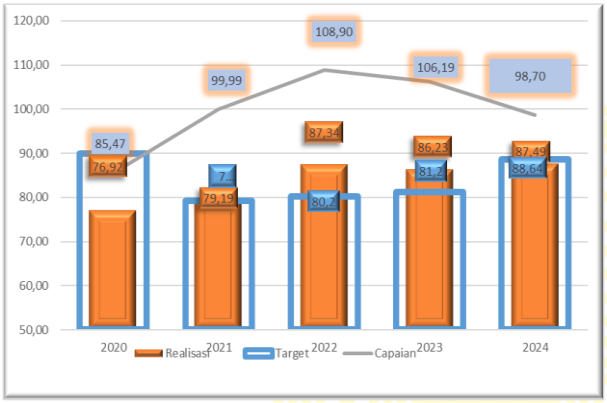
Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar 87.49 dengan rincian sebagai berikut:

Table 90.*Komponen Penilaian RB*

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Ket
A.	**Komponen Pengungkit**		**60,00**				
	I.	**Manajemen Perubahan**	8,00	3,18	3,67	6,85	**MS**
	II.	**Penataan Tatalaksana**	7,00	2,71	2,34	5,05	**MS**
	III.	**Penataan Sistem Manajemen SDM**	10,00	4,25	4,25	8,50	**MS**
	IV.	**Penguatan Akuntabilitas**	10,00	4,57	4,32	8,89	**MS**
	V.	**Penguatan Pengawasan**	15,00	6,00	6,88	12,88	**MS**
	VI.	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**	10,00	3,50	2,51	6,01	**MS**
TOTAL PENGUNGKIT						**48,18**	
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	**22,50**				
		1. Nilai Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,33	**MS**
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			5,00	**MS**
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	**17,50**				
		1. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,98	**MS**
TOTAL HASIL						**39,31**	
		NILAI PMPZI				**87,49**	

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan: bobot 8%; Penataan Tatalaksana: bobot 7%; Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; Penguatan Pengawasan: bobot 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%; Birokrasi Bersih dan Akuntabel: bobot 22,5%; Pelayanan Publik yang Prima: bobot 17,5%.

b. Perbandingan realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya



.Grafik 51*Perbandingan realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya*

Berdasarkan data, terdapat fluktuasi pada realisasi dan capaian Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan, namun tahun 2023 menurun meskipun pada tahun itu Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tahun 2024 mengalami peningkatan tetapi belum memenuhi target.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024

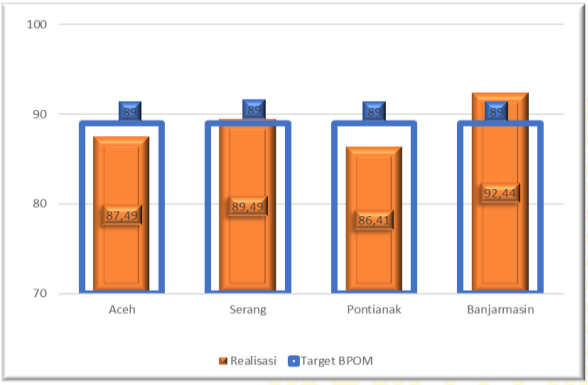
Table 91.*Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	88.64	87.49	98.70	**Akan Tercapai**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	88.64	87.49	98.70	**Akan Tercapai**

Realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 belum mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori **Akan tercapai.** Untuk tahun 2024, terjadi

review target pada indeks RB oleh Unit Pengampu di BPOM menjadi 88.64 yang didapat dari perhitungan perkalian rata-rata perbandingan realisasi seluruh unit kerja tahun 2024 dengan 2022. Pada tahun 2024, indikator kinerja RB belum memenuhi target, namun Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan upaya peningkatan dan perbaikan kinerja.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional, serta standar eksternal



Grafik 52. *Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain*

Berdasarkan grafik, realisasi indeks RB tertinggi adalah Balai Besar POM di Banjarmasin dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Pontianak. Dari ketiga Balai yang diperbandingkan, Balai Besar POM di Banda Aceh dan Balai Besar POM di Pontianak yang belum mencapai target nasional (89).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian nilai RB Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan. Nilai yang diperoleh untuk masing-masing pokja mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Pokja Pelayanan Publik mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan, karena inovasi dijalankan tanpa ada nilai pembaharuan yang lebih berdampak pada masyarakat. Balai Besar POM di Banda Aceh hanya menjalankan inovasi/kegiatan yang sama dari tahun sebelumnya dan monev inovasi tidak disusun dengan jelas serta tidak ada tindak lanjut. Pada tahun 2025, akan dilakukan perubahan tim kerja dan juga dilakukan penguatan inovasi yang lebih berdampak serta monev inovasi dengan ketat. Konsistensi pelaksanaan RB akan terus dipertahankan guna menjaga keberlangsungan predikat

WBK yang telah diraih serta penerapan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh. Penyebab keberhasilan dalam peningkatan kinerja:

1. Telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2023.
2. Pimpinan terlibat aktif dan berperan sebagai role model dalam penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja serta memantau pencapaian kinerja secara berkala. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja.
3. Inovasi pada area Penguatan Pengawasan yaitu Siap Melayani Laporan Anda (SIMELAN) merupakan kanal pengaduan yang memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui adanya praktik gratifikasi, suap, dan/atau benturan kepentingan. Inovasi ini telah didukung dengan SOP Mikro serta kebijakan formal.
4. Memiliki inovasi dalam area pelayanan publik sebagai berikut:
    a. KORPORASI

       Berkolaborasi dengan OPD untuk memfasilitasi UMK dalam percepatan sertifikasi sarana produksi dan registrasi izin edar produk Obat Tradisional, Kosmetika dan Pangan Olahan di Aceh agar dapat memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk, sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan kepercayaan publik dalam satu aksi.
    b. Sanger Ureung Aceh

       Inovasi yang menyatukan layanan pemberian KIE, pemeriksaan sarana, dan pengujian sampel produk makanan yang ada di warung kopi. Inovasi ini berkolaborasi dengan SAKA POM sehingga sangat memungkinkan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh.
    c. Si JANET

       Informasi yang disampaikan dalam bentuk video yang berisi jawaban atas pertanyaan oleh masyarakat/netizen melalui media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh (instagram, facebook, whatsapp, twitter). Saat ini telah dilakukan improvement dengan livestreaming instagram dengan tema yang

inovatif dan informatif. Inovasi ini telah dilakukan secara berkelanjutan dan didukung publikasi pada media sosial.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan menurut saran APIP terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Rencana kerja pembangunan ZI belum komprehensif dan sebatas pemenuhan atas pertanyaan pada LKE, sehingga belum menggambarkan tujuan akhir dari pembangunan ZI pada unit kerja. Pemantauan dan evaluasi atas rencana kerja juga belum dilakukan secara memadai.
2. Kampanye pembangunan ZI kepada unit kerja sekitar/stakeholder belum dilakukan secara aktif dan masif, upaya pembangunan budaya kerja belum mampu mengurangi resistensi pegawai atas perubahan, dan Budaya kerja core value ASN BerAKHLAK belum dituangkan ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.
3. Inovasi yang dikembangkan belum seluruhnya didukung dengan bukti sosialisasi, latar belakang, target dan pengukuran atas dampak serta pemantauan dan evaluasi dari penerapan inovasi tersebut.
4. Penempatan pegawai baru dan/atau pegawai hasil mutasi internal belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dikaitkan dengan perbaikan kinerja unit kerja serta rencana pengembangan kompetensi belum dapat menunjukkan pemberian kesempatan yang sama kepada semua pegawai.
5. Pemanfaatan IT dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan publik serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum dilakukan pemantauan dan evaluasi secara memadai dan berkala.
6. Sistem pengendalian internal yang dibangun belum memadai dibuktikan dengan adanya pelanggaran kode etik yang terbukti melalui Whistleblowing System (WBS) tahun 2023.
7. Perbaikan standar layanan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil forum komunikasi publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta Publikasi atas seluruh layanan belum dilakukan dengan jelas dan lengkap melalui media sosial.

8. Pemberian reward and punishment bagi petugas pemberi layanan belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang memadai dan berkala.
9. Terdapat rekomendasi BPK yang masih dalam proses tindak lanjut.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 92.*Efisiensi anggaran pada Indikator Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	208.706.000	208.164.527	99.74	98.70	Efisien

Penggunaan sumber daya/anggaran efisien, meskipun capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran namun, perhitungan untuk tingkat efisiensi masih di level 0,00% sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2024 sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Rencana Aksi yang sudah dilakukan pada tahun 2024 untuk mencapai target dan mempertahankan WBK antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terkait budaya kerja dan pola pikir melalui:
    a. Inovasi KURSI (Kuis Reformasi Birokrasi) yang dilakukan setiap hari senin secara daring setelah Apel Nasional Badan POM.
    b. Parrkir (Pantun hari krida olahraga), dilakukan setiap hari kamis untuk mengingatkan dan mengajak pegawai untuk berolahraga pada hari Jumat.
2. Sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik di Balai Besar POM di Banda Aceh (melalui media sosial Balai), melalui inovasi:
    a. Rasa dari Hati, pengisian data sampel untuk komoditi pangan, kosmetik dan obat oleh Fungsi Pengujian dan Pemeriksaan.
    b. SPRINT, pembuatan surat tugas melalui aplikasi.

3. Pengembangan kompetensi pegawai melalui inovasi REPOST (Reward and Punishment) dengan menentukan pegawai teladan dan telatan setiap bulan yang dinilai dari SKP dan Perilaku 360.
4. Melakukan peningkatan nilai kinerja dan anggaran melalui inovasi internal Aplikasi SIGARANG (Sistem Informasi Pagu Alokasi, Realisasi dan Sisa Anggaran) yang memuat pagu alokasi, jenis kegiatan, jenis belanja, laporan FA detail, link capaian output, RHPK dan usulan revisi anggaran.
5. Melakukan pembekalan dan sosialisasi tentang gratifikasi, whistle blowing system, benturan kepentingan dan manajemen risiko terhadap seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh melalui inovasi SIMELAN (Siap Menindaklanjuti Laporan Anda).
6. Implementasi inovasi pemberian informasi dan pelayanan publik kepada masyarakat baik secara luring dan daring (media sosial Balai) melalui inovasi SANGER dan JANET (Jawab Netizen).

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2023, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh perlu meningkatkan kinerja di bidang reformasi birokrasi dengan memanfaatkan inovasi-inovasi di setiap kelompok kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi RB secara rutin. Untuk mempertahankan predikat WBK di tahun berikutnya, Balai Besar POM di Banda Aceh akan senantiasa menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam laporan kinerja periodik.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Untuk mengatasi risiko terhadap pemantauan dan evaluasi rencana kerja yang belum dilaksanakan secara konsisten, kampanye pembangunan Zona Integritas (ZI) yang belum dilakukan secara masif, dan inovasi yang dikembangkan yang belum memberikan dampak nyata kepada masyarakat, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Langkah pertama adalah memperbaiki dan memperkuat sistem pemantauan serta evaluasi yang ada, dengan memastikan

bahwa setiap rencana kerja dapat dipantau secara real-time dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua elemen instansi bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk mendukung pemantauan dan evaluasi akan sangat membantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah terkait kampanye pembangunan ZI, penting bagi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk merancang kampanye yang lebih luas dan inklusif, yang dapat menjangkau berbagai kalangan stakeholder dan masyarakat. Kampanye ini perlu melibatkan berbagai saluran komunikasi, baik itu media sosial, media massa, atau kegiatan tatap muka seperti seminar dan diskusi publik, agar informasi tentang ZI tersebar secara efektif. Agar kampanye ini sukses, perlu ada strategi yang matang untuk mengedukasi masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya ZI dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik.

Terkait dengan inovasi yang belum memberikan dampak nyata, Balai Besar POM di Banda Aceh harus memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan dapat diterima dengan baik oleh publik. Ini dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan inovasi, serta terus memantau dampak yang dihasilkan untuk memastikan bahwa inovasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, feedback dari masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap setiap inovasi yang ada.

28. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 93.*Target dan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.40	81.48	98.88	**Cukup**

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dengan rentang nilai sebagai berikut:

Table 94.*Kategori Penilaian SAKIP*

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 telah mencapai 81.48 dengan kategori **Memuaskan**. Namun demikian, realisasi tersebut belum mencapai target yaitu sebesar 81.48 dari target 82.40 dengan capaian sebesar 98.88% pada kategori **Cukup**.

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di bawah ini. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka

implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2024 mengalami peningkatan dan dapat dikategorikan A (Memuaskan), dengan nilai 81.48.

Table 95.*Bobot Penilaian SAKIP*

Komponen	PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RB No.88 Tahun 2021	BPOM
Perencanaan Kinerja	30	30	**24**
Pengukuran Kinerja	25	30	**24**
Pelaporan Kinerja	15	15	**12**
Evaluasi Internal	10	25	**20**
Capaian Kinerja	20	-	**20**

Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP disajikan pada tabel berikut:

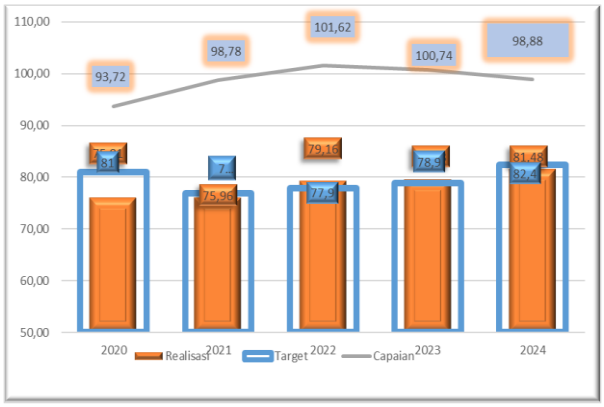
Table 96.*Hasil Evaluasi SAKIP*

No.	Komponen	Tahun 2024	
		Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	24	20.16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18.48
3.	Pelaporan Kinerja	12	9.48
4.	Evaluasi Internal	20	15.20
5.	Capaian Kinerja	20	18.16
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**81.48**
	Tingkat Akuntabilitas		**A**

Table 97.*Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024*

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan
2020	75.91	Sangat Baik (BB)
2021	75.96	Sangat Baik (BB)
2022	79.16	Sangat Baik (BB)
2023	79.48	Sangat Baik (BB)
2024	81.48	Memuaskan (A)

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Grafik 53*Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Berdasarkan data, terdapat peningkatan pada Nilai AKIP tahun 2024 sebesar 2 point dari tahun 2023, 2.32 point dari tahun 2022 dan 5.52 point dari tahun 2021. Pada tahun 2024, realisasi nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh telah ditetapkan yaitu 81.48 dan meraih Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan kategori A (Memuaskan). Hal ini diperoleh dengan upaya-upaya terus menindaklanjuti rekomendasi dari APIP dengan tepat waktu. Namun demikian, capaian tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan target dari tahun 2023 ke tahun 2024, yaitu dari 78.90 menjadi 82.40.

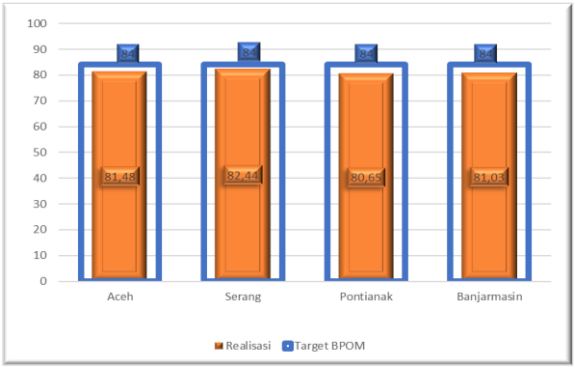
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024

Table 98.*Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target Renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.40	81.48	98.88	**Akan Tercapai**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	82.40	81.48	98.88	**Akan Tercapai**

Nilai AKIP tahun 2024 belum mencapai target Renstra tahun 2024. Pada tahun 2024 dilakukan review target oleh Unit Pengampu untuk nilai AKIP tahun 2024 menjadi 82.40. Realisasi 2024 dibandingkan dengan target 2024 hasil reviu mendapat kategori **Akan Tercapai** sehingga diperlukan perbaikan dan komitmen untuk meningkatkan nilai AKIP serta menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian AKIP secara tepat waktu.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional, serta standar eksternal



Grafik 54*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain*

Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai AKIP tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Serang dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Pontianak. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh berada pada peringkat kedua jika dibandingkan 3 Balai setara/sejenis. Keempat Balai setara/sejenis masih di bawah target nasional (84).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Banda Aceh telah berhasil menaikkan nilai AKIP menjadi 81.48 (A) dibandingkan nilai tahun 2023. Peningkatan nilai AKIP antara lain disebabkan karena meningkatnya hasil penilaian pada komponen pengukuran kinerja dan capaian kinerja. Namun diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja agar nilai seluruh komponen indikator kinerja dapat meningkat sehingga nilai AKIP dapat meningkat di masa yang akan datang. Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menindaklanjuti semua rekomendasi APIP di tahun 2023 dengan tepat waktu sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja pada Balai Besar POM di Banda Aceh telah memiliki dokumen perencanaan kinerja, antara lain Renstra, Reviu Renstra dan Matriks evaluasi akhir Renstra, Kertas kerja dan matriks reviu target indikator kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Cascading indikator kinerja di setiap level.
2. Pengukuran kinerja telah memenuhi kriteria komponen pengukuran kinerja berupa Penyusunan SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, Pimpinan Satuan Kerja terlibat dalam pembahasan capaian kinerja, Dokumentasi kertas kerja

penghitungan capaian kinerja indikator, dan Penginputan data kinerja pada aplikasi SIMETRIS setiap bulan dan triwulan.

3. Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan untuk memastikan validitas data capaian kinerja serta keselarasan capaian kinerja pada laporan kinerja tahunan, interim dan laporan evaluasi internal dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan dan tahunan, dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Satker yang sejenis.
4. Hasil Evaluasi Internal telah menyusun laporan evaluasi internal setiap triwulan dengan menyajikan Berita Acara Evaluasi Internal, Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan, Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), dan Notulen Rapat.

Realisasi nilai AKIP tahun 2024 belum mencapai target karena target yang ditetapkan tahun 2024 meningkat dari tahun 2023. Namun telah dilakukan beberapa upaya untuk mencapai target tersebut dengan mempersiapkan Tim AKIP yang lebih kuat, Pimpinan turut terlibat dalam pembahasan, pengawalan bersama dalam mencapai target kinerja UPT, dan benchmarking pada laporan UPT dengan Nilai AKIP terbaik. Komponen Evaluasi Internal pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena terdapat beberapa kelemahan pada Laporan Evaluasi Internal seperti belum menyajikan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjutnya. Seluruh komponen indikator kinerja perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan berkelanjutan dengan melakukan rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024. Rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil audit SAKIP tahun 2024 antara lain:

1. Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.
2. Menyempurnakan SOP Mikro Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada prosedur pengumpulan data dan perbaikan data.

3. Mendokumentasikan dengan baik arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian pada notulen rapat internal.
4. Mendokumentasikan dokumen monev secara baik sebagai sumber data dalam perhitungan capaian kinerja.
5. Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja dan rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim.
6. Menyusun Laporan Kinerja Interim yang menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja, rekomendasi/rencana aksi dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi, perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya.
7. Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan:
    a. Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan dan rencana tindak lanjutnya.
    b. Kendala dan rekomendasi/rencana aksi yang memadai dalam rangka perbaikan kinerja.
    c. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 99.*Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai AKIP*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.031.000	81.857.818	99.79	98.88	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2024 telah

sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh dengan penyesuaian kegiatan melalui mekanisme revisi POK.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain melakukan rapat koordinasi antar bidang di Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan serta kegiatan pertemuan penyusunan laporan kinerja, Melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Inspektorat Utama pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penilaian SAKIP tahun 2023, dan meningkatkan/memperkuat pelaksanaan evaluasi internal dengan melakukan monev kinerja berkala yang dilaksanakan setiap bulannya.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Nilai AKIP tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, namun masih belum memenuhi target. Berdasarkan Nilai AKIP yang diperoleh tahun 2024, diperlukan perbaikan kinerja terhadap komponen evaluasi internal yang mengalami penurunan dari tahun 2023. Pada komponen evaluasi internal diperlukan konsistensi dan kesesuaian rekomendasi dalam pencapaian target kinerja yang dilakukan setiap triwulan. Terhadap komponen lainnya diperlukan juga perbaikan agar dapat meningkatkan nilai AKIP tahun berikutnya.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam penyelenggaraan AKIP yang maksimal diperlukan komitmen seluruh ketua tim kerja dan anggota tim. Namun, terdapat risiko yang dihadapi seperti ketua tim kerja dan anggota tim yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya menindaklanjuti rekomendasi sehingga rekomendasi perbaikan kinerja per triwulan tidak ditindaklanjuti. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan ketua tim kerja terkait agar masalah tidak kembali terulang dan menghambat kinerja

organisasi.

Selain itu, data kinerja dari tim terkait tidak lengkap atau tidak akurat sehingga terlambat mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja dan dapat mengakibatkan pelaporan evaluasi kinerja tidak dilaporkan tepat waktu. Untuk mengatasi risiko ini, diberikan batas waktu pengumpulan data kepada penanggung jawab data untuk selanjutnya disusun dalam bentuk laporan.

Metode pengumpulan data tidak konsisten juga dapat menjadi risiko yang mengakibatkan data realisasi kinerja yang ditampilkan berubah-ubah (tidak valid). Untuk itu, diperlukan membuat media pengumpulan data yang dapat diakses secara online seperti google worksheet untuk menghindari keputusan rekomendasi tindak lanjut menjadi keliru.

Table 100*. Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023*

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	**Perencanaan Kinerja**					
a.	Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya	Triwulan I			a. Belum dilakukan penyusunan kertas kerja.	a. Sudah dilakukan penyusunan kertas kerja perubahan/ penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya.
b.	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan penyajian informasi pada dokumen perencanaan kinerja antara publikasi pada subsite maupun pada esr.menpan.go.id serta memastikan	Triwulan I			b. Belum dilakukan penyelarasan dokumen perencanaan dan penyajian informasi pada dokumen perencanaan kinerja antara publikasi pada subsite serta	b. Sudah dilakukan penyelarasan dokumen perencanaan dan penyajian informasi pada dokumen perencanaan kinerja antara publikasi pada subsite serta

	penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan target kinerja				perubahan target indikator kinerja indeks pelayanan publik tahun 2023	perubahan target indikator kinerja indeks pelayanan publik tahun 2023 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama BPOM Nomor B-PR.04.01.2.21.01.23.05 tentang Penyampaian Revisi Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023-2024 di Lingkungan BPOM tanggal 02 Januari 2023
c.	Menyusun indikator pada Perjanjian Kinerja yang belum diturunkan sampai ke level individu/anggota tim pada MPH unit kerja.	Triwulan I			c. Masih terdapat MPH yang belum sampai ke level individu.	c. Sudah dilakukan penyusunan indikator pada Perjanjian Kinerja sampai ke level individu/ anggota tim pada MPH unit kerja.
2.	**Pengukuran Kinerja**					
a.	Menyusun notulen rapat monitoring dan evaluasi yang menunjukkan dengan jelas keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja serta timeline rencana aksi.	Triwulan I			a. Belum dibuatnya dilakukan pembuatan notulen rapat dengan menunjukkan keterlibatan pimpinan dan timeline rencana aksi.	a. Sudah dilakukan pembuatan notulen rapat dengan menunjukkan keterlibatan pimpinan dan timeline rencana aksi.
b.	Mendokumentasikan dan memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan sehingga data realisasi kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.	Triwulan I			b. Masih terdapat perbedaan data capaian kinerja pada laporan kinerja dan evaluasi internal.	b. Membuat link RAPK internal untuk memastikan sumber data kinerja dapat tertelusur dengan baik dan diandalkan sehingga data realisasi kinerja selaras antara dokumen Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja

						Tahunan.
c.	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja terkait mekanisme yang lebih komprehensif dalam menangani perubahan/ perbedaan data.	Triwulan I			c. Belum dilakukan pembuatan SOP pengumpulan data kinerja secara komprehensif.	c. Sudah dilakukan pembuatan SOP pengumpulan data kinerja secara komprehensif.
3.	**Pelaporan Kinerja**					
a.	Menyusun laporan kinerja dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis dan menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber dayamengungkapkan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Triwulan I			a. Belum dilakukan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi.	a. Sudah dilakukan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan menjelaskan efisiensi penggunaan sumber daya dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi.
b.	Menyajikan informasi pada laporan kinerja dalam hal terdapat adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan.	Triwulan I			b. Belum dilakukan penyampaian informasi pada laporan kinerja dalam hal terdapat adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan.	b. Sudah dilakukan penyampaian informasi pada laporan kinerja dalam hal terdapat adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan.
c.	Memastikan pengisian capaian kinerja, hambatan, rencana tindak lanjut atas realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS secara tertib dan lengkap.	Triwulan I			c. Belum dilakukan pengisian capaian kinerja, hambatan, rencana tindak lanjut atas realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS secara tertib dan lengkap.	c. Sudah dilakukan pengisian capaian kinerja, hambatan, rencana tindak lanjut atas realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS secara tertib dan lengkap.
4.	**Evaluasi Internal**					
a.	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis permasalahan kendala dalam pelaksanaan kinerja secara memadai dan komprehensif.	Tahun 2024 (TW I s/d IV)			a. Belum tertib menyajikan analisis permasalahan kendala dalam pelaksanaan kinerja.	a. Sudah dilakukan penyusunan laporan evaluasi internal dengan menyajikan analisis permasalahan kendala dalam pelaksanaan kinerja

						secara memadai dan komprehensif.
b.	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan rekomendasi/ rencana aksi yang berkesinambungan antar periodenya.	Tahun 2024 (TW I s/d IV)			b. Belum tertib menyajikan rekomendasi/rencana aksi yang berkesinambungan antar periodenya.	b. Sudah dilakukan penyusunan laporan evaluasi internal dengan menyajikan rekomendasi/ rencana aksi yang berkesinambungan antar periodenya.
c.	Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode Sebelumnya.	Tahun 2024 (TW I s/d IV)			c. Belum tertib menyajikan data tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya.	c. Sudah dilakukan penyusunan laporan evaluasi internal dengan menyajikan data tindak lanjut atas rekomendasi/ rencana aksi pada periode sebelumnya.
5.	**Capaian Kinerja**					
a.	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.	Tahun 2024 (TW I s/d IV)			a. Belum memnafaatkan evaluasi internal sebagai early warning system.	a. Sudah memanfaatkan evaluasi internal dan laporan kinerja periodik untuk pencapaian kinerja. Rekomendasi yang diberikan dalam evaluasi internal dan lakin periodik ditindaklanjuti sesuai periode kinerja terkait. Dilakukan rapat evaluasi secara periodik.

29. Nilai Pengelolaan Kearsipan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 101. *Nilai Pengelolaan Kearsipan*

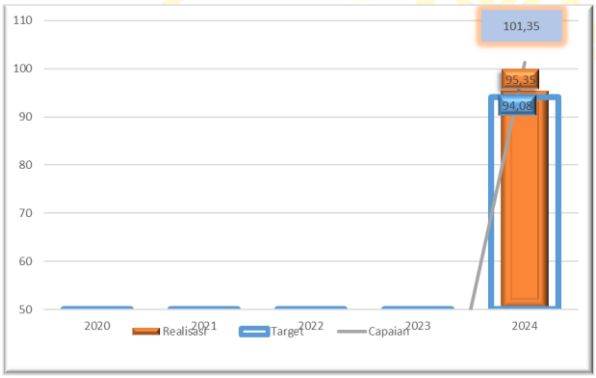
Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,08	95.35	101.35	**Sangat Baik**

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan).
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan.
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis).
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen.
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran.

Pada tahun 2024, nilai kearsipan sebesar 95.35 (capaian 101.35) dengan kategori **sangat baik** dan meningkat dari tahun sebelumnya.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Grafik 55*Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Nilai pengelolaan kearsipan baru ada di Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2024. Tahun-tahun sebelumnya masih bersifat direktif, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama yang targetnya ada pada Perjanjian Kinerja (PK). Meskipun begitu, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi pengelolaan kearsipan tahun 2023 sebesar 85.02 (target 94.08) dengan capaian 90.37.

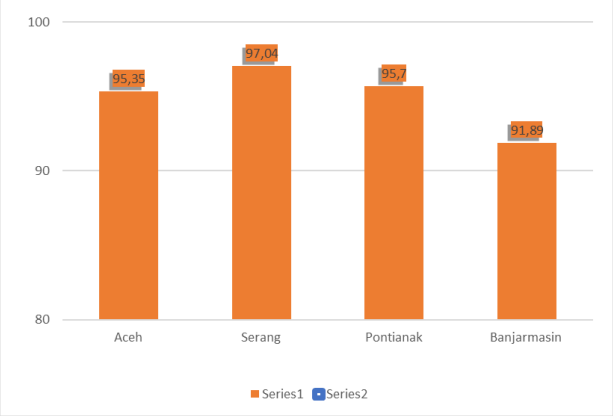
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra 2024

Table 102.*Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target Renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.08	95.35	101.35 ▲	**Tercapai/ Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	94.08	95.35	101.35 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Nilai pengelolaan kearsipan Balai Besar POM di Banda Aceh sudah mencapai target Renstra tahun 2024, dengan kategori AA (sangat memuaskan).

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dan dengan target nasional



Grafik 56*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai*

Nilai pengelolaan kearsipan Balai Besar POM di Banda Aceh berada pada peringkat ketiga dibandingkan tiga Balai sejenis/setara. Balai Besar POM di Serang berada di peringkat tertinggi dan Balai Besar POM di Banjarmasin yang paling rendah namun semua Balai sudah mencapai target nasional (86).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian Nilai Pengelolaan kearsipan dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni:

- *Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);*

- *Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;*
- *Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);*
- *Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;*
- *Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.*

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 103.*Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai AKIP*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Pengelolaan Arsip Balai Besar POM di Banda Aceh	14.762.000	14.760.560	99.99	101.35	**Efisien**

Penggunaan sumber daya/anggaran efisien, karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh, dengan melakukan penyesuaian kegiatan melalui mekanisme revisi POK.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang yang dapat menunjang nilai pengelolaan Kearsipan adalah:

- Memonitoring proses penatausahaan kearsipan termasuk dalam bidang penciptaan kearsipan, Penggunaan Kearsipan, Pemeliharaan kearsipan, dan Penyusutan Kearsipan.
- Terus melakukan pengembangan kompetensi terkait Sumber Daya Manusia khususnya pada pengelola kearsipan.
- Koordinasi yang baik antara arsiparis dan pengelola arsip di masing-masing fungsi.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada tahun 2024 dalam mendukung nilai pengelolaan kearsipan, sudah dilakukan perbaikan terhadap kendala dalam pendataan kearsipan dengan melakukan monitoring terhadap data yang diupdate secara rutin. Upaya perbaikan ini sudah membuat nilai kearsipan meningkat, namun tetap diperlukan perbaikan dan monitoring secara berkelanjutan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Untuk mengatasi risiko terhadap pengelolaan kearsipan terkait dengan naskah dinas yang tidak autentik dan penumpukan arsip yang tidak bernilai guna atau telah habis retensinya, perlu dilakukan upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan arsip secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memperkuat sistem otentikasi naskah dinas dengan penggunaan tanda tangan elektronik atau sistem verifikasi lainnya yang memastikan keaslian dokumen. Hal ini dapat mencegah pemalsuan atau kesalahan dalam pencatatan naskah dinas.

Selain itu, perlu diterapkan sistem pengelolaan arsip yang lebih terorganisir dan efisien, dengan melakukan pemindaian arsip secara berkala untuk memudahkan pengelolaan dan pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna atau yang masa retensinya telah habis. Pendekatan berbasis teknologi juga sangat membantu untuk memonitor status arsip dan memudahkan penghapusan atau pemindahan arsip yang tidak lagi relevan.

Penting untuk melakukan pelatihan kepada semua staf terkait pengelolaan arsip agar mereka lebih memahami pentingnya mengelola arsip dengan benar dan menjaga keautentikan dokumen. Keterlibatan pihak berwenang dalam melakukan audit atau evaluasi berkala terhadap pengelolaan arsip juga sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan tetap efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sasaran kegiatan 10

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 10 tidak termasuk perhitungan NPSS tahun 2024. Hal ini dikarenakan ada perubahan standar penilaian oleh BKN pada tahun berjalan di 2 (dua) indikator, yaitu kualifikasi dan kompetensi. Sehingga menyebabkan realisasi tidak memenuhi target yang ditetapkan berdasarkan standar yang lama.

Indikator Kinerja

30. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 104.*Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	90.52	87.14	96.27	**Cukup**

Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas: kualifikasi memiliki bobot 25 %; kompetensi memiliki bobot 40 %; kinerja memiliki bobot 30 %; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;

b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;

c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang;

d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesional ASN adalah Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN

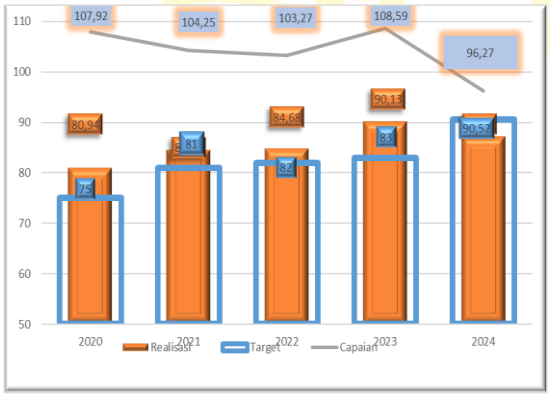
berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesional ASN diukur dengan menggunakan 4 (dimensi), yaitu:

a. Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai.
b. Dimensi Kompetensi di konversi data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja dengan data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
c. Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.
d. Dimensi Disiplin mengambil data disiplin dari SIASN BKN.

Pada tahun 2024 telah diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BALAI BESAR POM di Banda Aceh sesuai aplikasi SIASN sebesar 87.14. Capaian indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh belum berhasil mencapai target yaitu 90.52 dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Gambar 57 Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada tahun 2020 sampai dengan 2023 indikator IP ASN mengalami peningkatan, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ada adanya perubahan tata cara penilaian Tahun 2024.

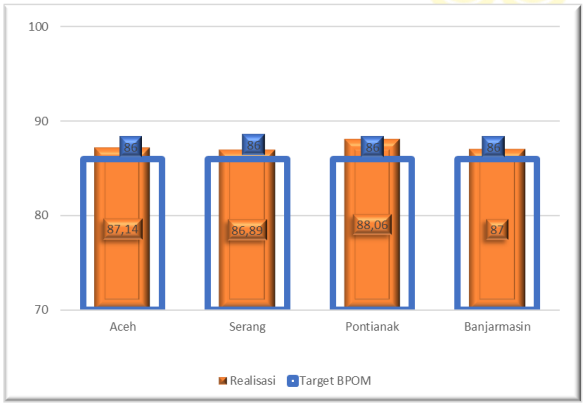
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra 2024

Table 105.*Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target Renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	90.52	87.14	96.27	**Akan Tercapai**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	90.52	87.14	96.27	**Akan Tercapai**

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh belum mencapai target Renstra tahun 2024 dan diprediksi akan meningkat sampai tahun 2024. Mengingat adanya pegawai yang melanjutkan pendidikan dan adanya pengembangan kompetensi setiap tahun yang harus diikuti oleh pegawai. Jika dilihat dari tren realisasi indeks profesionalitas ASN setiap tahun dari 2020-2022, indeks IP ASN mengalami peningkatan sehingga dilakukan review target oleh unit pengampu tahun 2024 menjadi 90.52%. Namun dikarenakan ada perubahan tata cara penilaian sesuai surat Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 realisasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh tidak mencapai target yang ditetapkan Unit Pengampu, sehingga capaian indikator IP ASN tidak dimasukkan dalam perhitungan NPSS.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dan dengan target nasional



Gambar 58 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai

Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh berada pada peringkat Ketiga dibandingkan tiga Balai sejenis/setara. Balai Besar POM di Serang berada di peringkat tertinggi dan Balai Besar POM di Banjarmasin yang paling rendah namun semua Balai sudah mencapai target nasional (86).

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan pendidikan lanjutan dari beberapa pegawai yaitu jumlah pegawai dengan 70.23% berpendidikan S1 dan 13.09 % berpendidikan S2. Untuk dimensi Kualifikasi terjadi penyesuaian Bobot penilaian. Pada tahun 2024, ada beberapa pegawai yang masih dalam proses melanjutkan pendidikan dan diharapkan akan menambah realisasi nilai indeks profesionalitas ASN.

Dimensi kompetensi juga mengalami penyesuaian bobot penilaian. Nilai didapat berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja Diklat kepemimpinan Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, serta pengembangan kompetensi. hal ini berlaku untuk ASN dan PPPK. Untuk meningkatkan nilai IP ASN perlu dilakukan Penyesuaian Strategi dan terus melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian dimensi ini. Di sini terdapat penambahan bobot penilaian baru yakni kinerja pegawai yang didapat dari hasil kinerja pegawai (Nilai SKP) yang sebelumnya hanya ada di Dimensi Kinerja. Jadi perlu dilakukan penyesuaian agar dapat mencapai target di tahun berikutnya.

Dimensi kinerja telah memperoleh poin maksimal (25) didukung dengan nilai SKP kriteria baik di seluruh pegawai.

Dimensi disiplin juga telah memperoleh nilai maksimal (data menyusul) karena telah dilakukan upaya peningkatan disiplin pegawai dengan cara penerapan inovasi Repost “Reward dan Punishment”. Inovasi ini dilakukan setiap triwulan (pemberian sertifikat kepada 3 orang pegawai dengan jumlah kinerja terbaik) untuk memacu pegawai tersebut meningkatkan kinerjanya. Sedangkan pegawai yang mendapatkan punishment yaitu pegawai yang kedisiplinan rendah, diberikan punishment. Hal tersebut dilakukan dalam pemenuhan kedisiplinan pegawai agar lebih baik.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan indeks profesionalitas ASN dilakukan pemantauan terhadap nilai yang dicapai atas 4 dimensi dan peningkatan kualifikasi pendidikan juga berpengaruh untuk memaksimalkan IP ASN Balai Besar POM di

Banda Aceh. Telah dilakukan upaya meningkatkan nilai indeks dengan menghimbau pegawai untuk mengikuti pelatihan teknis yang tersedia di aplikasi IDEAS BPOM sehingga capaian Target Jam Pelajaran ASN di atas 100%. Pada tahun ini akan terjadi kenaikan, karena adanya kenaikan penilaian kinerja untuk SKP 2024, Dengan penilaian TW IV sementara 1 orang Pegawai mendapat nilai sangat baik yang nantinya akan berpengaruh pada indeks kinerja tahun 2024.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 106.*Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	93,402,000	93.306.565	99.90	96.27	Tidak Efisien

Penggunaan sumber daya/anggaran efisien, karena capaian indikator lebih rendah daripada % realisasi anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banda Aceh, hal ini dikarenakan adanya perubahan perhitungan kualifikasi dan kompetensi.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dengan adanya target 20 JP dalam waktu satu tahun, maka setiap pegawai berusaha untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti sosialisasi/seminar/ workshop/diklat/bimtek yang diselenggarakan oleh PPSDM dan juga mengikuti pelatihan secara mandiri (peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara internal dan eksternal). Dilakukan Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi peningkatan kompetensi pegawai akan terus dilakukan. Untuk meningkatkan kompetensi mansoskul, Balai Besar POM di Banda Aceh telah menugaskan ASN

untuk mengikuti Pelatihan Manajemen dan SDM dengan penyedia dari Swasta Profesional.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Lakin Interim tahun 2024, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait capaian jam pelajaran secara berkala serta ada beberapa pegawai yang sudah mengikuti diklat jabatan, sehingga target indeks profesionalitas ASN dapat tercapai. Pada triwulan IV terdapat perubahan dimensi penilaian yang disesuaikan dengan jenjang jabatan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Pengelolaan sumber daya manusia yang optimal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Namun, salah satu risiko yang dihadapi adalah pengembangan kompetensi pegawai yang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan jenis dan levelnya. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya perencanaan strategis dalam program pelatihan, atau keterbatasan kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat). Jika tidak ditangani, risiko ini dapat berdampak pada penurunan kualitas pelayanan, rendahnya efektivitas kerja, serta kesenjangan kompetensi di antara pegawai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian target organisasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih terstruktur dalam pengembangan kompetensi pegawai, termasuk pemetaan kebutuhan pelatihan, alokasi anggaran yang memadai, serta kerja sama dengan lembaga pelatihan yang relevan.

Selain itu, risiko integritas juga menjadi perhatian, terutama dalam proses penerimaan tenaga outsourcing dan ASN. Praktik pemberian imbalan kepada petugas dalam proses rekrutmen dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak profesional serta berpotensi menurunkan kualitas tenaga kerja yang direkrut. Risiko ini dapat terjadi akibat kurangnya pengawasan dalam proses seleksi, lemahnya sistem pengendalian internal, atau kurangnya transparansi dalam mekanisme

penerimaan tenaga kerja. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik, merusak citra instansi, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat. Untuk memitigasi risiko ini, diperlukan penerapan sistem seleksi yang lebih transparan, penguatan regulasi terkait rekrutmen, serta peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin bagi petugas yang terlibat dalam proses seleksi tenaga kerja.

Sasaran Kegiatan 11
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan 11 dicapai dengan NPS 112.13% (Kategori Sangat Baik). Sasaran Kegiatan 11 didukung oleh 4 (empat) Indikator Kinerja dan keempat indikator sudah memenuhi target tahun 2024.

Indikator Kinerja

31. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 107.*Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	89.87	95.36	106.11	**Sangat baik**

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus: (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50 %)

Realisasi berasal dari nilai EKA sebesar 92,31 dari aplikasi Smart dan Nilai IKPA 98,40 dengan perhitungan **(92.31 x 50%) + (98,40 x 50%) sehingga diperoleh realisasi nilai kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2024 adalah 95.35 dengan kategori sangat baik.**

Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 melebihi target, dikarenakan nilai 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan Evaluasi kinerja anggaran tinggi.

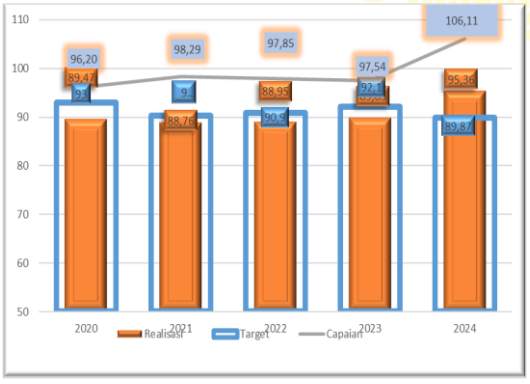
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 8 indikator kinerja, meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan penyampaian capaian output.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Berdasarkan data, diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan capaian nilai kinerja anggaran tahun 2024 dibandingkan tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan realisasi melebihi target Hal ini disebabkan indikator yang menjadi faktor penilaian IKPA dan EKA bernilai baik sehingga nilai yang didapat maksimal 100.

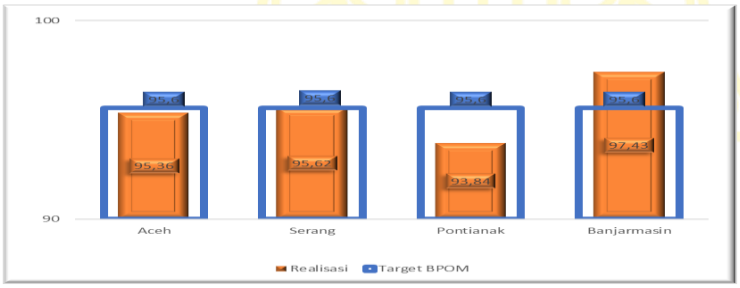
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra tahun 2024

Table 108.*Realisasi NKA Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	89.87	95.36	106.11 ▲	**Tercapai/ Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	89.87	95.36	106.11 ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 lebih besar dari target Renstra tahun 2024 dengan kriteria tercapai/melampaui. Pada Bulan Desember tahun 2024, dilakukan reviu target nilai kinerja anggaran tahun 2024 oleh unit pengampu menjadi 89.87. Target NKA Balai Besar POM di Banda Aceh mengalami penurunan dari sebelumnya dikarenakan perhitungan target disesuaikan dengan realisasi NKA pada triwulan III tahun 2024.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional, serta standar eksternal



Grafik 57.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasikinerja Balai lain*

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 berada pada peringkat kedua dengan peringkat tertinggi adalah Balai Besar POM di Banjarmasin. Realisasi ketiga Balai yang diperbandingkan berada diatas target nasional (95.6).

Nilai Kinerja Anggaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Balai Besar POM di Banda Aceh	89.87	95.36	106.11	**Sangat Baik**
Balai Besar POM di Serang	90.5	95.62	105.65	**Sangat Baik**

Balai Besar POM di Pontianak	90.11	93.84	104.14	**Sangat Baik**
Balai Besar POM di Banjarmasin	91.06	97.43	107.00	**Sangat Baik**

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2024 melebihi target, dipengaruhi oleh:

1. Revisi DIPA

   Indikator revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran satuan kerja. Tahun 2024 revisi DIPA Balai Besar POM di Banda Aceh bernilai 100, dikarenakan revisi DIPA yang dilakukan tidak mengakibatkan perubahan pagu satker.

2. Belanja Kontraktual

   Belanja kontraktual tahun 2024 adalah 100 karena Indikator kinerja belanja kontraktual dihitung berdasarkan perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya selesai tahun anggaran berjalan dan kontraknya telah didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani

   Nilai maksimal dengan poin 100 didapatkan jika penyelesaian pembayaran perjanjian/kontrak belanja modal dilakukan pada triwulan I. Tahun 2024 nilai Belanja kontraktual mencapai target, karena penyelesaian pembayaran perjanjian/kontrak belanja modal dibayarkan pada triwulan I sehingga mendapatkan poin 100.

3. Penyelesaian Tagihan

   Tahun 2024 nilai penyelesaian tagihan mencapai target karena indikator kinerja penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal berita acara serah terima (BAST) atau berita acara pembayaran

pekerjaan (BAPP) sehingga mendapat nilai 100.

4. Capaian Output

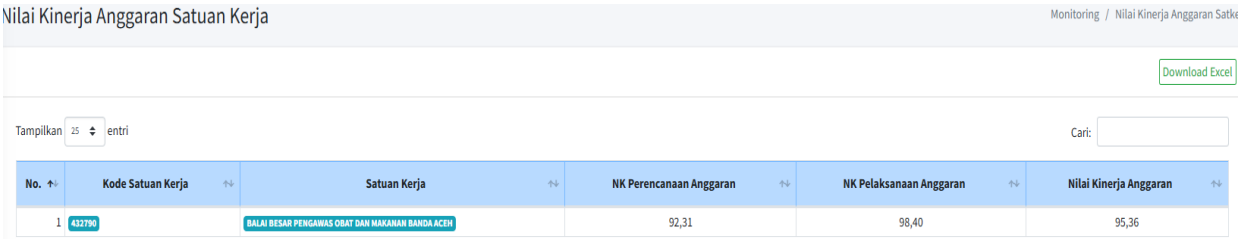
   Indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya dan nilai kinerja capaian RO sehingga Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh bobot 25% dengan nilai maksimal 100.

5. Nilai Efisiensi pada EKA yang rendah

   Komponen penilaian pada Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dimana salah satu komponen yang dinilai adalah Efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran akan bernilai tinggi apabila anggaran yang direalisasikan rendah dan capaian output yang dihasilkan tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh target yang harus dicapai oleh satuan kerja yaitu di atas 99%, dengan demikian apabila capaian output mencapai 100% maka nilai efisiensi hanya tercapai mendekati angka normal yaitu 0, sehingga nilai efiseiensi tidak bisa mencapai nilai efisiensi tertinggi pada aplikasi yaitu -20. Untuk mencapai nilai efisiensi maksimal maka diperlukan realisasi capaian output kegiatan yang jauh melebihi target yang ditetapkan, sehingga dengan capaian anggaran di atas 99% dapat mendongkrak nilai efisiensi anggaran dimaksud sehingga nilai EKA dapat meningkat dan selanjutnya mempengaruhi peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.

Gambar 8. ***Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran***

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	001	063	432790	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	Nilai	100.00	93.51	97.89	100.00	100.00	97.91	100.00	98.40	100%	0.00	98.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.03	19.58	10.00	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	96.76		98.95				100.00				



f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 109.*Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	17.723.107.000	17.609.585.541	99.36	106.11	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas penggunaan sumber daya/anggaran efisien, karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024 sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala

  Monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan pencairan anggaran melalui mekanisme GUP, LS dan TUP. Selama tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan 30 kali GUP dan 4 kali TUP serta mekanisme pembayaran langsung (LS) untuk perjalanan dinas dan pengadaan barang dan Jasa.

- Peningkatan kompetensi pengelola keuangan

  Tahun 2024 pengelola keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh mengikuti

bimtek terkait IKPA yang diselenggarakan oleh direktorat perbendaharaan setiap triwulan.

- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran

  Selama Tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan 10 (sepuluh) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA dan 35 (tiga puluh lima) kali revisi POK. Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 99,49 persen.

  1.Pengelolaan keuangan mengacu pada pedoman dan peraturan yang terupdate.

  2. Komunikasi yang baik antara tim keuangan dan pengelola kegiatan.

  3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.

  4. Kecepatan penyelesaian masalah melalui komunikasi dengan KPPN dan DJPb baik secara langsung maupun melalui aplikasi yang tersedia.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Jika dilihat dari capaian tahun 2021-2023, nilai kinerja anggaran selalu di bawah target. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi dan terdapat 2 komponen penilaian yang berlawanan. Dimana jika penyerapan anggaran tinggi maka nilai IKPA akan tinggi, sedangkan bila penyerapan anggaran tinggi nilai efisiensi pada EKA pasti rendah. Oleh karena itu, tahun 2024 dilakukan review target untuk nilai NKA yang disesuaikan dari realisasi pada triwulan III tahun 2024 yaitu 89.87.

Realisasi Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No. SP DIPA-063.01.2.432790/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 2023 dengan anggaran awal sebesar Rp29.029.899.000- (Dua puluh sembilan milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Pada tanggal 24 Desember 2024 telah dilakukan revisi pemotongan

anggaran berupa belanja barang sebesar Rp765.190.000.- (Tujuh ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pengadaan alat laboratorium sebesar Rp1.026.104.000.- (Satu milyar dua puluh enam juta seratus empat ribu rupiah) sehingga total anggaran menjadi Rp 27.238.605.000.- (Dua puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima ribu rupiah), Realisasi anggaran akhir tahun 2024 sebesar **Rp. 27.099.746.842,- atau 99.49 persen.**

JENIS BELANJA	TARGET PAGU AWAL (Rp)	TARGET PAGU SETELAH REVISI	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	12.699.412.000	12.699.412.000	12.607.884.631	99.28
Belanja Barang	12.100.336.000	13.335.146.000	13.287.983.420	99.65
Belanja Modal	2.230.151.000	1.204.047.000	1.203.878.791	99.99
Jumlah	**29.029.899.000**	27.238.605.000	27.099.746.842	**99.49**

Realisasi PNBP Tahun 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh

JENIS BELANJA	TARGET PAGU AWAL (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	13.825.600	0
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	0	3.885.000	0
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	181.375.000	197.510.000	108.90
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	**0**	1.759.826	**0**
Penerimaan Kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu	**0**	3.326.964	**0**
Jumlah	**181.375.000**	220.307.390	**121.47**

Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar

efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus:

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan:

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam

satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka, bukan realisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

0 - 0,2 : 100% (Efisien)

0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)

0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)

0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)

0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)

1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)

1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)

1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)

1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)

> 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Manajemen risiko terkait nilai kinerja anggaran adalah upaya untuk mengelola risiko yang dapat berdampak pada kinerja anggaran. Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan RPD Halaman III DIPA merupakan salah satu faktor risiko yang disebabkan oleh jadwal pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan dikarenakan kondisi internal dan eksternal sehingga berakibat terjadi deviasi pada halaman III dIPA +/- 5% dan mempengaruhi nilai IKPA satker.

Pertanggungjawaban UP dan TUP tidak tepat waktu juga berakibat terhadap target nilai kinerja anggaran menjadi rendah karena disebabkan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai perencanaan dan penyelesaian pekerjaan oleh pihak ke III tidak sesuai waktu kontrak

Selain itu capaian output triwulan tidak sesuai target juga menjadi ancaman yang dapat mengurangi nilai IKPA dan kualitas kinerja anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk itu diperlukan upaya melakukan monev anggaran triwulan serta

komitmen pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai perencanaan guna menjaga nilai kinerja anggaran sesuai target.

32. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 110. *Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Banda Aceh	83.33	100.00	120.00	**Sangat Baik**

Perhitungan:

Total Nilai dari Persentase RUP (20%) + Persentase Penerapan E-Tendering (20%) + Persentase E-Purchasing (20%) + Persentase Non Tendering dan Non e-Purchasing (20%) + Persentase e-Kontrak (20%).

Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi.

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%).
    a. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [90% < nilai RUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus);
    b. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
    c. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh);

d. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol).

(untuk Satuan Kerja yang persentase >100% dilakukan klarifikasi)

2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%).
   a. Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).
   b. Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%).
   a. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus);
   b. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 80% s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
   c. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 60% s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh);
   d. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.

4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).
   a. Satuan Kerja sudah menerapkan >60% Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);

b. Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

c. Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh);

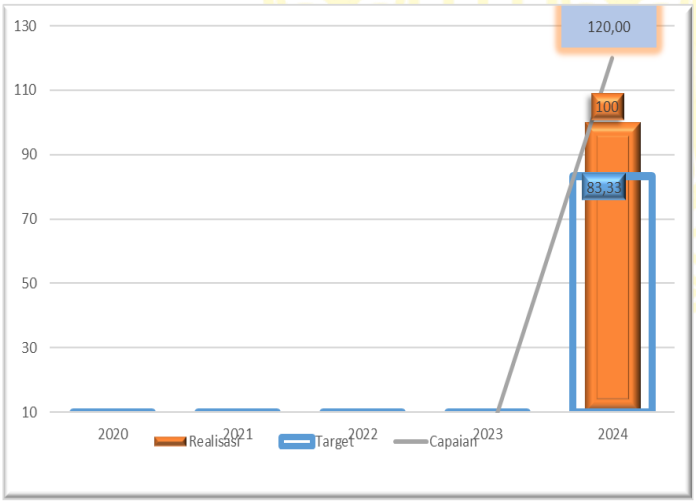
d. Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.

5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).

a. Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).

b. Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya



Grafik 58*Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya*

Nilai Kualitas Pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Banda Aceh secara total mencapai target yaitu dengan realisasi 100.00 % dan nilai kualitas pengelola barang dan jasa merupakan indikator baru di tahun 2024, meskipun begitu tahun 2023 indikator ini merupakan indikator direktif dan memiliki realisasi sebesar 95,04 (capaian 111.81 %) dengan target 85.

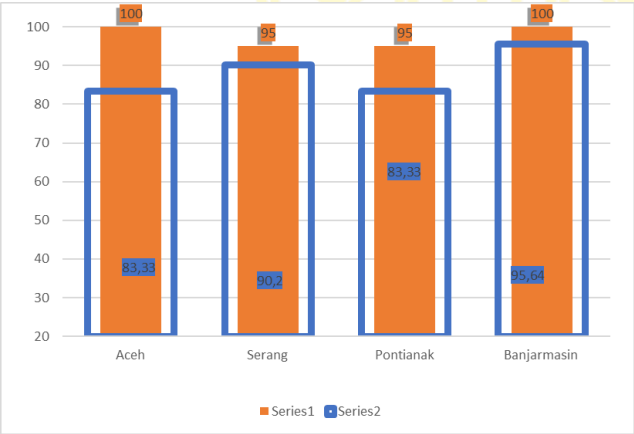
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra 2024

Table 111.*Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan target Renstra 2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Banda Aceh	83.33	100.00	120.00	**Tercapai/ Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	83.33	100.00	120.00	**Tercapai/ Melampaui**

Nilai Kualitas Pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Banda Aceh sudah mencapai target Renstra tahun 2024. Meskipun tercapai, tetap dilakukan peningkatan kinerja untuk mempertahankan kualitas pengelolaan barang dan jasa.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dan dengan target nasional



Grafik 59*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai*

Nilai Kualitas Pengelolaan barang dan jasa Balai Besar POM di Banda Aceh berada pada peringkat pertama dibandingkan tiga Balai sejenis/setara.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa tahun 2024 pada tahun 2024 sudah mencapai target yaitu 100% yang dipengaruhi beberapa indikator dari pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa:

1. Indeks SIRUP (20%)

RUP telah disusun dan diumumkan 100% pada triwulan-I sehingga capaian untuk indikator ini telah maksimum.

2. Indeks Tender (20%)

Pada Tahun anggaran 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh tidak memiliki paket pengadaan tender pada perencanaan sehingga mendapat nilai maksimum pada indikator ini.

3. Indeks Purchasing (20%)

Tahun 2024 capaian pada indikator purchasing sudah mencapai target, persentase penyelesaian paket pengadaan yang dilaksanakan secara e-*purchasing* sudah 100% yang diperoleh dari perhitungan (Total Paket Purchasing/Total Paket Purchasing Status Selesai) * 100%.

Indeks non tender (20%)

Pada indikator non tender semua paket pengadaan tahun 2024 sudah selesai pelaksanaannya dan telah dilaporkan pada aplikasi SPSE.

5. Indeks Kontrak (20%)

Pada Tahun anggaran 2024 Balai Besar POM di Banda Aceh tidak memiliki paket pengadaan yang menggunakan e-kontrak pada perencanaan sehingga mendapat nilai maksimum pada indikator ini.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 112.*Efisiensi anggaran pada Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Banda Aceh*

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Banda Aceh	155,010,600	155,008,825	99.99	120.00	Efisien

Penggunaan sumber daya/anggaran efisien, karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran tahun 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai Besar POM di Banda Aceh, dengan melakukan penyesuaian kegiatan melalui mekanisme rencana.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam peningkatan kualitas pengelolaan barang dan jasa adalah:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan paket pengadaan barang dan jasa secara berkala. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan yang masih berproses dengan melakukan pengendalian kontrak sesuai ketentuan.
2. Melakukan percepatan pengadaan paket barang dan jasa, Paket Pengadaan yang telah direncanakan dan diumumkan dilakukan percepatan proses pelaksanaan dengan melakukan identifikasi awal terkait ketersediaan produk barang dan jasa di pasar.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Indikator kinerja Nilai pengelolaan barang dan jasa pada tahun sebelumnya belum masuk menjadi indikator kinerja utama Balai Besar POM di Banda Aceh. Namun, pada tahun 2024 sudah menjadi Indikator Kinerja Utama dan diharapkan dapat tercapainya target seperti tahun sebelumnya.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Manajemen risiko terkait nilai pengelolaan barang dan jasa, dilakukan monitoring proses pengadaan barang jasa agar setiap proses tepat waktu, serta spesifikasi Barang/jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di surat pesanan atau kontrak dan tidak tidak merugikan negara.

Adanya Komitmen dan profesional pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga proses dalam pengadaan berjalan sesuai aturan yang sudah ditetapkan dan tidak melanggar hukum. dalam perikatan pengadaan barang jasa syarat-syarat sah kontrak yang harus terpenuhi sesuai aturan, kedua pihak memiliki legalitas yang sah. sehingga kontrak berjalan dengan baik dan semestinya.

33. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

a. Perbandingan realisasi target dan realisasi tahun 2024

Table 113.*Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara*

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89	91.14	102.40	**Sangat Baik**

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus: Penjumlahan nilai dari masing-masing aspek penilaian: Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%), Persentase Penghapusan (20%), Persentase Pemusnahan (20%), Penatausahaan yang Baik (30%), Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%).

Untuk tahun 2024, Indikator pengelolaan Brang Milik Negara sudah memenuhi target sebesar 91,14 % dengan capaian 102,40 dan kategori **Sangat Baik.**

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Untuk Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

1. **Penatausahaan BMN** adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah pelaporan yang baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. **(Bobot 30%)**
   - Kualitas pelaporan (Bobot 75%).
   - Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian.

Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

Tanggal penerimaan > H+3: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)

H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3: Tidak tepat waktu (Skor 25)

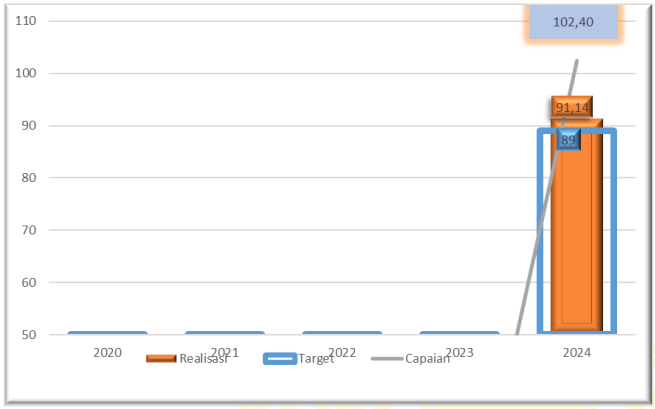
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0: Tepat waktu (Skor 75)

tanggal Penerimaan ≤ H-3: Sangat tepat waktu (Skor 100)

2. **Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%)** Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:
   - Tanggal penerimaan > H+3: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
   - H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3: Tidak tepat waktu (Skor 25)
   - H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0: Tepat waktu (Skor 75)
   - Tanggal Penerimaan ≤ H-3: Sangat tepat waktu (Skor 100)
3. **Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%)** adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)/ Total Aset) x 100%.
4. **Penghapusan (Bobot 20%)** adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total barang rusak berat yang diusulkan penghapusan/ total barang rusak berat x 100%.
5. **Pemusnahan (Bobot 20%)** adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai

total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan/total barang using/rusak x 100 %.

b. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 terhadap kinerja tahun sebelumnya



Grafik 60. *Perbandingan realisasi kinerja serta capaian tahun 2024 terhadap kinerja tahun sebelumnya*

Pada tahun 2024 Nilai Pengelolaan BMN masuk ke dalam IKU Balai Besar POM di Banda Aceh dengan memperoleh nilai 91.14 dari target 89 dengan persentase realisasi 102.40%. Pada tahun 2023, indikator ini masih direktif dengan realisasi sebesar 90.28 % dari target 88.

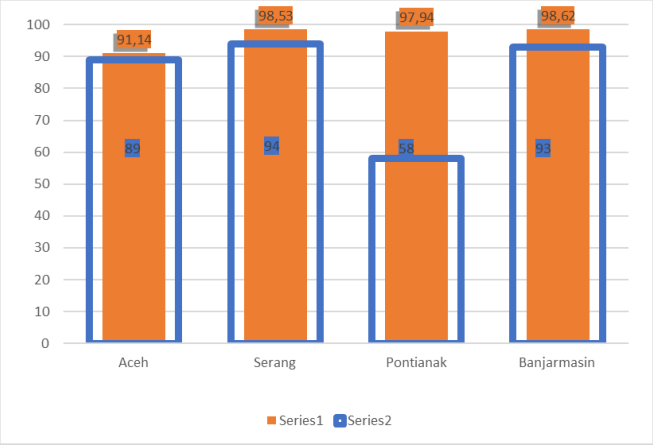
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024

Table 114.*Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target RENSTRA 2020-2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89	91.14	102.40	**Tercapai/ Melampaui**
	Target PK 2024	**Realisasi 2024 (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	89	91.14	102.40	**Tercapai/ Melampaui**

Realisasi Nilai pengelolaan BMN tahun 2024 Sudah mencapai target Renstra tahun 2024 dengan kategori **Tercapai**.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional



Grafik 61. ***Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dan target nasional***

Berdasarkan grafik disamping, dapat disimpulkan bahwa Nilai Pengelolaan BMN tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai Besar POM di Pontianak (168,86 %) dan yang terendah adalah Balai Besar POM di Banda Aceh (102,40 %), dari ketiga balai semua balai mencapai target.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dipengaruhi oleh:

1. Keterlambatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara akan mengurangi nilai Pengelolaan BMN.
2. Keterlambatan Penyampaian Laporan RKBMN juga akan mengurangi nilai Pengelolaan BMN.
3. Barang Milik Negara yang masih belum dilaporkan Penetapan Status Penggunaannya (PSP).
4. Tidak melakukan pemusnahan untuk persediaan usang dan rusak.
5. Tidak Melakukan Penghapusan Untuk Barang Milik Negara yang sudah diidentifikasi Rusak Berat.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 115.***Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja***

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	112.800.000	112.765.593	99.97	102.40	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran sudah efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya sudah mendukung pencapaian indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam Pengelolaan Barang Milik Negara adalah:

- Monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Melaksanakan pengerjaan laporan BMN Tepat Waktu.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi terkait Kualitas Laporan BMN.
- Menetapkan status penggunaan BMN (PSP) maksimal maksimal 6 Bulan setelah dilakukan pencatatan Aset Tetap.
- Mengirimkan laporan RKBMN dan WASDAL Tepat waktu.
- Melaksanakan pemusnahan dan penghapusan sesuai timeline.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada triwulan IV sudah dilakukan perbaikan dalam tata cara pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN pada tahun ini diharapkan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat kendala dalam rangka pendataan barang. Pada tahun ini juga dibentuk Tim yang bertugas dalam pendataan barang inventaris kantor agar lebih tertib dan mampu ditelusuri terhadap keberadaan aset yang menjadi tanggung jawabnya.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang efektif memerlukan ketepatan dalam pelaporan serta pengelolaan aset yang tidak lagi layak pakai. Keterlambatan

pelaporan BMN dapat berdampak pada ketidaksesuaian data aset dalam sistem serta menghambat proses evaluasi dan perencanaan anggaran. Untuk mengatasi risiko ini, perlu diterapkan sistem monitoring dan pengingat jadwal pelaporan, memastikan SDM yang bertanggung jawab memiliki pemahaman yang baik terkait tata kelola BMN, serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar data yang dilaporkan selalu tepat waktu dan akurat. Selain itu, pemusnahan dan penghapusan persediaan serta aset yang sudah rusak dan usang harus dilakukan sesuai ketentuan agar tidak membebani laporan keuangan dan operasional. Proses ini dapat dioptimalkan melalui perencanaan rutin, penilaian berkala, serta kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur tata cara penghapusan aset negara.

Selain pengelolaan dan pelaporan, kehilangan BMN juga menjadi ancaman yang dapat mengurangi nilai aset instansi. Untuk memitigasi risiko ini, perlu diterapkan sistem pencatatan dan pengawasan yang lebih ketat, termasuk pelabelan aset, pencatatan dalam sistem informasi BMN, serta pelaksanaan stock opname secara berkala. Pengamanan fisik juga harus diperkuat, misalnya dengan pemasangan CCTV, pengawasan petugas keamanan, dan pembatasan akses terhadap BMN yang memiliki nilai tinggi. Selain itu, pemberian tanggung jawab yang jelas kepada pegawai dalam penggunaan BMN dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah potensi kehilangan akibat kelalaian. Jika terjadi kehilangan, mekanisme pelaporan dan investigasi harus berjalan dengan cepat agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Melalui langkah-langkah ini, pengelolaan BMN dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola aset negara.

34. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Table 116.*Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri*

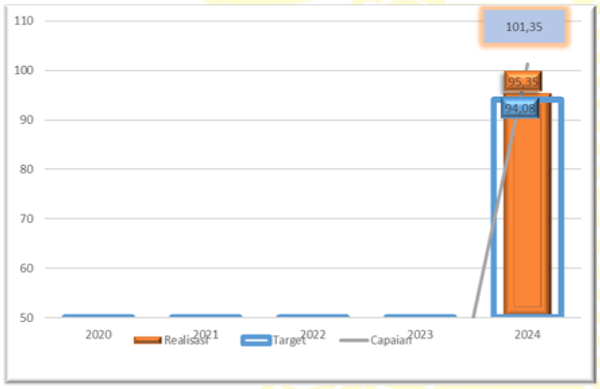
Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri	60.00	74.73	124.55 dikonversi menjadi 120	**Sangat Baik**

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP, dihitung berdasarkan Nilai paket pengadaan yang di tagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN, dihitung berdasarkan realisasi pemilihan paket pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2024 dengan capaian 120% sehingga tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya



Grafik 62. ***Realisasi dan capaian tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.***

Nilai Penggunaan Produk dalam Negeri merupakan indikator baru Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

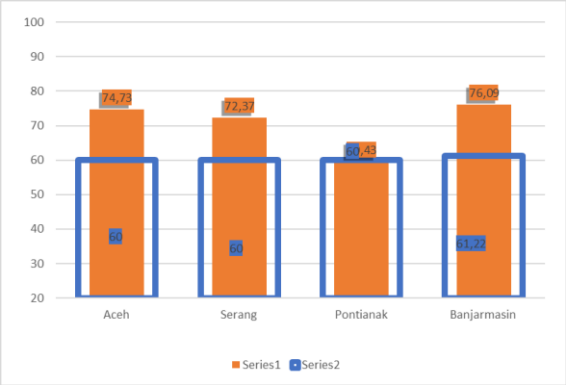
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Renstra 2021-2024

Table 117.*Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai Besar POM di Banda Aceh dengan target Renstra 2021-2024*

Indikator Kinerja	Target Renstra2024	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai Besar POM di Banda Aceh	60.00	74.73	124.55 (120) ▲	**Tercapai/ Melampaui**
	Target PK	**Realisasi (%)**	**Capaian (%)**	**Kategori**
	60.00	74.73	124.55 (konversi 120) ▲	**Tercapai/ Melampaui**

Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai Besar POM di Banda Aceh sudah mencapai target Renstra 2024 sebesar 120.00% dengan kategori tercapai/melampaui hal tersebut tidak perlu dilakukan reviu untuk menaikkan target, namun perlu upaya untuk mempertahankan capaian agar target renstra tahun 2024 tetap tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian



Grafik 63. ***realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain.***

Berdasarkan data di samping diketahui bahwa ketiga Balai memiliki Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai Besar POM dua diantaranya tidak dapat disimpulkan yaitu Balai Besar Serang dan Banjarmasin sedangkan Balai Besar POM di Pontianak mendapat capaian 99.05 dengan kategori cukup.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri, dipengaruhi oleh:

1. Jumlah Perencanaan paket pengadaan yang ditaging sebagai Produk Dalam Negeri pada RUP yang telah diumumkan.
2. Realisasi dalam pemilihan produk PDN sudah terpenuhi dikarenakan dalam proses perencanaan dan proses pemilihan produk barang dan jasa lebih memprioritaskan terhadap produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri minimal PDN.

f. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 118.*Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri*

Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal

Indikator Kinerja	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024 (%)	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	117.250.000	117.169.717	99.93	**124.55**	**Efisien**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah efisien karena capaian indikator senilai 124.55% realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah:

- Perencanaan paket Pengadaan PDN

  Dalam melakukan perencanaan paket pengadaan barang dan jasa lebih diutamakan produk dalam negeri.
- Melakukan Monitoring secara berkala terkait ketersediaan PDN

  Monitoring dilakukan secara berkala dengan melakukan pengecekan sertifikat produk barang dan jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri pada database TKDN di kementerian perindustrian sebelum melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
- Beberapa pengadaan Persediaan yang sebelumnya memakai pengadaan Non TKDN (import) sekarang sudah diubah, yakni beberapa menggunakan Reagensia TKDN seperti *Methanol, Acetonitrile, Ethanol, Chloroform* dan beberapa reagen sehingga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Indikator Kinerja persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri baru ada pada tahun 2024. Diharapkan pada tahun 2024 indikator kinerja ini dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan.

i. Informasi Pengelolaan Risiko untuk Pencapaian Indikator Kinerja

Pengelolaan risiko pada indikator penggunaan produk dalam negeri adalah tidak tersedia Produk dalam negeri yang sesuai kebutuhan sehingga pemanfaatan Produk Dalam Negeri tidak optimal, hal tersebut dimitigasi dengan melakukan survei terhadap kesediaan produk TKDN dan meningkatkan komitmen KPA dan PPK terhadap pengadaan produk yang lebih memprioritaskan produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri minimal PDN.

3.2 Evaluasi Tahun ke-3 dan Tahun ke-5

Evaluasi tahun ketiga dan kelima diperoleh dari Evaluasi Paruh Waktu dan tahun terakhir Renstra dengan melihat perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. Matriks trend dan gap analysis dapat dilihat pada link https://bit.ly/MatriksEvaluasiAkhir_BandaAceh

1. Sasaran Kegiatan 1 (satu) “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh” dengan 5 (lima) Indikator kinerja dihitung meningkat, kelima indikator menunjukkan peningkatan capaian setiap tahunnya sampai pada triwulan III tahun 2024 (berdasarkan prognosis). Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	126.97	**Meningkat (On The Track)**
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	127.19	**Meningkat (On The Track)**

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	132.47	**Meningkat (On The Track)**
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	137.66	**Meningkat (On The Track)**
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	155.72	**Meningkat (On The Track)**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja indikator mengalami peningkatan dari tahun baseline. Namun, Indikator persentase Obat yang memenuhi syarat mengalami sedikit penurunan dari baseline (97,95) menjadi 95,69 % pada tahun 2024 namun masih memenuhi target tahun 2024. Untuk indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tidak memenuhi target tahun 2024 namun masih dalam kategori baik. Sedangkan Indikator Makanan yang memenuhi syarat dan Persentase pangan fortifikasi memenuhi target/tercapai pada akhir Renstra.

2. Sasaran Kegiatan 2 (dua) "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh" dengan 1 (satu) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, dikarenakan semakin meningkatnya sinergi dengan OPD terutama di daerah rural dan adanya kegiatan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui media social. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	114.69	**Meningkat (On The Track)**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun baseline. Hal ini

dapat dilihat pada matriks gap analysis dari baseline (69,04) menjadi 84,45 % pada tahun 2024, sehingga indikator ini tercapai pada akhir renstra dan memenuhi target tahun 2024.

3. Sasaran Kegiatan 3 (tiga) “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh” dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	132.01	**Meningkat (On The Track)**
Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	133.16	**Meningkat (On The Track)**
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	133.46	**Meningkat (On The Track)**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 3 (tiga) indikator kinerja mengalami peningkatan dari tahun baseline. Hal ini dapat dilihat pada matriks gap analysis dimana ketiga indikator mencapai target pada tahun 2024 dan realisasi di atas baseline.

4. Sasaran Kegiatan 4 (empat) “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh” dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, namun jika dilihat pada perhitungan perkembangan kinerja dan kategori, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang tidak dapat ditentukan tren perkembangan kinerjanya. Hal ini karena target dan realisasi indikator sudah maksimal sejak periode awal sampai dengan periode akhir renstra. Indikator tersebut adalah Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu selama periode 2020-2023 memiliki realisasi yang sama tiap tahunnya sebesar 100 sama dengan baseline (100) namun tahun 2023 dilakukan konversi menjadi 120. Indikator kedua yang tidak dapat menunjukkan perkembangan kinerja yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang baru ada pada tahun 2022

namun realisasi setiap tahunnya sebesar 100 % sesuai baseline tahun 2022 (100). Untuk Indikator ketiga Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan namun sampai triwulan III realisasi meningkat dari triwulan I tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	133.39	**Meningkat (On The Track)**
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	134.12	**Meningkat (On The Track)**
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Tidak ada hasil perhitungan	**Tidak ada hasil perhitungan**
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	128.43	**Meningkat (On The Track)**
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	126.08	**Meningkat (On The Track)**
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	122.47	**Meningkat (On The Track)**
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Tidak ada hasil perhitungan	**Tidak ada hasil perhitungan**
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota	Tidak ada hasil perhitungan	**Tidak ada hasil perhitungan**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 8 (delapan) indikator kinerja mengalami peningkatan dari tahun baseline. Hal ini dapat dilihat pada matriks gap analysis dimana delapan indikator mencapai target pada tahun 2024 dan realisasi sama ataupun di atas baseline.

5. Sasaran Kegiatan 5 (lima) “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh” dengan 4 (empat) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	112.74	**Meningkat (On The Track)**
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	122.50	**Meningkat (On The Track)**
Jumlah desa pangan aman	110.19	**Meningkat (On The Track)**
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	113.70	**Meningkat (On The Track)**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 4 (empat) indikator kinerja mengalami peningkatan dari tahun baseline. Hal ini dapat dilihat pada matriks gap analysis dimana keempat indikator mencapai target pada tahun 2024 dan capaian sama ataupun di atas baseline.

6. Sasaran Kegiatan 6 (enam) "Meningkatnya efektifiktas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh" dengan 2 (dua) indikator kinerja. Pada Indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar nilai perkembangan kinerja dan kategori tidak dapat ditentukan tren perkembangan kinerjanya. Hal ini karena target dan realisasi indikator sudah maksimal sejak periode awal sampai dengan periode akhir renstra. Selama periode 2020-2022 realisasi sama dengan baseline sebesar 100 %, namun tahun 2023 dilakukan konversi menjadi 120 %. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Tidak ada hasil perhitungan	**Tidak ada hasil perhitungan**
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Tidak ada hasil perhitungan	**Tidak ada hasil perhitungan**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 2 (dua) indikator kinerja sama dengan tahun baseline, namun pada tahun 2024 terdapat konversi menjadi 120. Hal ini dapat dilihat pada matriks gap analysis dimana kedua indikator mencapai target pada tahun 2024 dan capaian sama ataupun di atas baseline.

7. Sasaran Kegiatan 7 (tujuh) “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh” dengan 1 (satu) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, dikarenakan semakin meningkatnya dukungan informasi dari intelijen BPOM dan koordinasi dengan Korwas dan Polres setempat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	161.53	**Meningkat (On The Track)**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 1 (satu) indikator kinerja mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan baseline (64,49). Realisasi tahun 2024 sebesar 100 % dan dapat dilihat pada matriks gap analysis dimana indikator mencapai target pada tahun 2024.

8. Sasaran Kegiatan 8 (delapan) “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal” dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat. Untuk indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan perkembangan kinerja belum bisa dihitung karena tahun 2023 masih indikator direktif, namun tahun 2024 sudah masuk indikator Utama. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	107.56	**Meningkat (On The Track)**
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	74.10	**Meningkat (Moderat)**
Nilai Pengelolaan Kearsipan	Tidak ada hasil perhitungan	**Tidak ada hasil perhitungan**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 3 (tiga) indikator kinerja mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan baseline. Jika dilihat pada matriks gap analysis maka

ketiga indikator mengalami peningkatan dari baseline dan sudah memenuhi target 2024 (tercapai).

9. Sasaran Kegiatan 9 (sembilan) “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal” dengan 1 (satu) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, dikarenakan semakin meningkatnya pendidikan, kompetensi dan disiplin pegawai. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	128.70	**Meningkat (On The Track)**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Banda Aceh mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan baseline. Meskipun tahun 2024 tidak memenuhi target dikarenakan ada perubahan perhitungan kualifikasi dan kompetensi. Berdasarkan gap analysis, realisasi IP ASN masih di atas baselline.

10. Sasaran Kegiatan 10 (sepuluh) “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan 2 (dua) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, dikarenakan adanya regionalisasi membuat Balai melakukan monev secara rutin sehingga permasalahn dapat segera diatasi. Selain itu, pada pengelolaan data dan informasi juga dilakukan monev secara berkala sehingga pelaporan dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	119.13	**Meningkat (On The Track)**
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	136.62	**Meningkat (On The Track)**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja kedua indikator kinerja mengalami tercapai dan juga memenuhi target tahun 2024. Pada tahun 2024 untuk indikator pengelolaan data dan informasi mengalami konversi menjadi 3.6 dengan capaian 120 %.

11. Sasaran Kegiatan 11 (sebelas) “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel” dengan 5 (lima) indikator kinerja. Untuk Indikator Nilai kinerja Anggaran (NKA) perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, sedangkan Indikator Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, Nilai BMN dan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tidak dapat dihitung. Hal ini karena ketiga indikator baru masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Untuk Tingkat efisiensi penggunaan anggaran perkembangan kinerja mengalami stagnan, dikarenakan hanya ada pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	120.04	**Meningkat (On The Track)**
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Tidak ada hasil perhitungan	**Tidak ada hasil perhitungan**
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Tidak ada hasil perhitungan	**Tidak ada hasil perhitungan**
Persentase Realisasi Penggunaan Prcduk dalam Negeri	Tidak ada hasil perhitungan	**Tidak ada hasil perhitungan**
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	0.00	**Stagnan**

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran mengalami peningkatan dan tercapai. Pada tahun 2024 memenuhi target dikarenakan ada perubahan pada perhitungan NKA. Untuk Indikator Nilai pengelolaan barang dan jasa, BMN dan penggunaan dalam negeri juga memenuhi target tahun 2024. Untuk tingkat nilai efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat disimpulkan karena hanya ada pada tahun 2020 dan 2021.

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh untuk periode 2020-2024, telah ditetapkan 11 sasaran kegiatan dengan 34 indikator kinerja pada akhir periode Renstra yang dilengkapi dengan target tahunan. Matriks evaluasi ketercapaian tujuan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh dapat dilihat pada link https://bit.ly/MatriksEvaluasiAkhir_BandaAceh

1. Pada tujuan pertama **"Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan"** yang didukung 3 (tiga) Sasaran kegiatan (SK 2, SK 3 dan SK 5) dengan 7 (tujuh) indikator kinerja, penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam katergori **"Tercapai"** dengan rata-rata pencapaian sebesar 102,46. Ketercapaian ini dikarenakan:

No.	Sasaran Kegiatan	Penyebab Ketercapaian
1.	SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makananan	a. Sinergi dengan OPD terutama di daerah rural seperti camat dan perangkat desa. b. Meningkatkan strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan, lebih menyasar ke Sekolah/Madrasah/ Pesantren/Perguruan tinggi. c. Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural dan perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online. d. Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.
2.	SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	a. Melakukan monitoring pembuatan CAPA kepada setiap APJ sarana yang mendapatkan surat TL melalui WA, Telepon dan email setelah 1 minggu surat diterima sarana. b. Melakukan penyelesaian CAPA dan seluruh dokumen data dukung di sarana pada saat pemeriksaan sarana distribusi kosmetik, pangan, OT dan SK. c. Melakukan Koordinasi dan Advokasi lintas sektor, komunikasi dan kerjasama dengan dInas kesehatan Kab/Kota dan SKPA, SKPD terkait pengawasan Obat dan Makanan.
3.	SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	a. Konsisten memberikan link survei untuk diisi juga menyiapkan blanko/Form Survei manual sebagai backup data jika ada yang memberikan nilai kurang pantas dapat langsung klarifikasi dan dilakukan tindakan cleansing data sebagai data yang tidak valid. b. Monitoring dan evaluasi tahapan pelaksanaan Program PJAS dengan memastikan rencana aksi kader sekolah disampaikan tepat waktu. c. Sinergi dengan program mandiri desa terutama program percepatan penurunan stunting. d. Berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti Dinas Perdagangan dan Paguyuban pasar sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan timeline.

2. Pada tujuan kedua **"Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan"** yang didukung 2 (dua) Sasaran kegiatan (SK 9 dan SK 10) dengan 3 (tiga) indikator kinerja, penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam katergori **"Tercapai"** dengan rata-rata pencapaian sebesar 105,61. Ketercapaian ini dikarenakan:

No.	Sasaran Kegiatan	Penyebab Ketercapaian
1.	SK9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	a. Penempatan ASN dalam jabatan struktural dan fungsional yang sesuai dengan latar belakang pendidikan formal. b. Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi ASN, termasuk bagi pimpinan dan jabatan fungsional. c. Pemantauan kedisiplinan pegawai secara berkala dan penerapan sistem manajemen kinerja yang mewajibkan ASN bekerja sesuai target kinerja yang ditetapkan.
2.	SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	a. Penambahan Ruang Lingkup Pengujian Lab Obat, OTSK, Kos, pangan, Mikrobiologi, verifikasi Metoda Analisa di Obat, OTSK, Kos, Pangan dan Mikrbiologi dan penambahan pengadaan alat. b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan setiap indikator terlaksana dengan baik sesuai waktu yang ditetapkan.

3. Pada tujuan ketiga **"Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM"** yang didukung 2 (dua) Sasaran kegiatan (SK 3 dan SK 4) dengan 3 (tiga) indikator kinerja, penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam katergori **"Tercapai"** dengan rata-rata pencapaian sebesar 106,22. Ketercapaian ini dikarenakan:

No.	Sasaran Kegiatan	Penyebab Ketercapaian
1.	SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	a. Melakukan peningkatan kompetensi petugas dan melakukan pendampingan secara penuh kepada pelaku usaha. b. Melaksanakan survei sesuai dengan pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. c. Memberikan pemahaman kepada responden tentang standar pelayanan.
2.	SK4. Meningkatnya efektivitas	a. Komitmen petugas sertifikasi dalam melakukan kerjasama dengan pelaku usaha.

	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	b. Melakukan pendampingan dan komunikasi aktif dengan pelaku usaha.

4. Pada tujuan keempat **"Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu"** yang didukung 4 (empat) Sasaran kegiatan (SK 1, SK 3, SK 4 dan SK 6) dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam katergori **"Tercapai"** dengan rata-rata pencapaian sebesar 106,80. Ketercapaian ini dikarenakan:

No.	Sasaran Kegiatan	Penyebab Ketercapaian
1.	SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	a. Perencanaan sampling yang baik (tempat sampling dan jenis sampel yang dipilih acak). b. Pengujian yang dilakukan sesuai role dan timeline. c. Melakukan sosialisasi dan pengawasan secara intensif terhadap penandaan/label produk yang beredar. d. Tetap gencar melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk Obat yang TMK
2.	SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	a. Aktif dalam menginformasikan kegiatan BPOM Aceh pada berbagai Media, baik sosial, cetak dan juga elektronik. b. Menindaklanjuti berbagai isu terkini dengan melakukan pengawasan serta edukasi ke masyarakat.
3.	SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	a. Koordinasi yang baik dengan Balai lain dan lintas sektor untuk menindaklanjuti surat yang diterbitkan dan perlu ditindaklanjuti. b. Komitmen petugas dalam menyelesaikan laporan dan tindaklanjut pengawasan secara tepat waktu. c. Melakukan pembinaan dan monev kepada sarana produksi dan distribusi. d. Melaksanakan peningkatan kompetensi petugas.
4.	SK6. Meningkatnya efektifiktas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	a. Monev rutin yang diadakan di regional dapat mengatasi masalah dengan lebih cepat dan dapat mencegah masalah-masalah yang dapat diintervensi agar tidak terjadi berulang. b. Komitmen petugas sampling dan pengujian untuk tercapainya realisasi sesuai target yang telah disepakati bersama.

5. Pada tujuan kelima dan keenam "**Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat**

dan Makanan dan **Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan"** yang didukung 1 (satu) Sasaran kegiatan (SK 7) dengan 1 (satu) indikator kinerja, penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam katergori **"Tercapai"** dengan rata-rata pencapaian sebesar 109,86. Ketercapaian ini dikarenakan:

No.	Sasaran Kegiatan	Penyebab Ketercapaian
1.	SK7. Meningkatnya efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	a. Dukungan informasi dari Intelijen Badan POM ketika ada produk Obat dan Makanan yang akan masuk ke wilayah Aceh. b. Koordinasi dengan Korwas dan Polres setempat yang baik sehingga operasi penindakan dapat berjalan dengan baik. c. Koordinasi dan komunikasi secara intens yang dilakukan oleh para penyidik dengan Jaksa peneliti sehingga berkas dapat cepat dilengkapi. d. Adanya kegiatan penggalangan berupa FGD yang melibatkan para pimpinan perusahaan ekspedisi sangat membantu dalam membangun jaringan informasi.

6. Pada tujuan ketujuh **"Terwujudnya Kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima"** yang didukung 3 (tiga) Sasaran kegiatan (SK 4, SK 8 dan SK 11) dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam katergori **"Tercapai"** dengan rata-rata pencapaian sebesar 109,86. Ketercapaian ini dikarenakan:

No.	Sasaran Kegiatan	Penyebab Ketercapaian
1.	SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	a. Komitmen yang baik oleh petugas layanan sertifikasi dalam memberikan layanan kepada pelaku usaha sampai selesai. b. Membangun pendampingan dan komunikasi yang baik antara petugas dengan pelaku usaha, sehingga terbangun semangat dalam menyelesaikan sertifikasi. c. Melakukan Reviu Standar Pelayanan dan merumuskan maklumat pelayanan serta menetapkan Surat Keputusan Tim Pelayanan Publik, Kode Etik yang mengakomodir Layanan kelompok rentas serta Reward dan Punishment. d. Melengkapi sarana dan prasarana layanan publik. e. Melakukan pemutahiran data di website dan subsite serta menjalankan program inovasi pelayanan publik.

2.	SK8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	a. Pimpinan dan pegawai memiliki komitmen dalam menerapkan RB di lingkungan kerja. b. Memiliki inovasi dalam area pelayanan publik (KORPORASI, Sanger Ureung Aceh, Si JANET). c. Melakukan perbaikan terus menerus untuk meningkatkan nilai SAKIP setiap tahunnya dengan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi LHE SAKIP. d. Melakukan penataan arsip dan pengelolaan kearsipan sesuai pedoman.
3.	SK11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel	a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. b. Kecepatan penyelesaian masalah melalui komunikasi dengan KPPN dan DJPb baik secara langsung maupun melalui aplikasi yang tersedia. c. Melakukan penatausahaan BMN dan aset.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Table 119.Tindak lanjut rekomendasi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat						
1.	TW I: Senantiasa berkoordinasi dengan tim inspeksi, infokom dan penindakan agar pelanggaran terhadap mutu produk Obat dapat senantiasa terkendali	Sudah dilakukan koordinasi dengan fungsi (Tim Inspeksi, Infokom dan Penindakan)	-	-	Realisasi kinerja bulan Februari sudah tercapai	Realisasi kinerja TW I (Maret) sudah tercapai yaitu 96.20% dari target 94.9%
2.	TW II: Tetap melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini dengan tetap melakukan sosialisasi, KIE terkait penandaan terhadap pelaku usaha	Melakukan sosialisasi, KIE terkait penandaan terhadap pelaku usaha	-	-	Realisasi kinerja TW I (Maret) sudah tercapai yaitu 96.20% dari target 94.9%	Realisasi kinerja TW II bisa dipertahankan melewati target yaitu 96.06% walaupun sedikit turun dari TW I

3.	TW III: 1. Tetap gencar melakukan sosialisasi dan KIE terkait penandaan/label. 2. Tetap dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara intensif terhadap penandaan/label produk yang beredar di Banda Aceh. 3. Perlu terus dilakukan KIE kepada distributor Obat, Obat tradisional/suplemen dan Kosmetik agar mendistribusikan produk Obat yang sesuai ketentuan baik mutu dan label/penandaan. 4. Tetap gencar melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk Obat yang TMK untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.	Semua rencana aksi sudah dilakukan	-	-	Realisasi kinerja TW II melewati target yaitu 96.06% dari target 94.9%	Realisasi kinerja TW III bisa dipertahankan melewati target yaitu 95.78% dari target 94.9%
4.	Secara konsisten melakukan evaluasi tiap bulan pada tahun-tahun berikutnya sesuai dengan indikator baru yang berkaitan dengan hal ini	-	Akan melakukan evaluasi tiap bulan pada tahun 2025 sesuai dengan indikator baru yang berkaitan dengan hal ini	April 2025	Pada TW III evaluasi belum dilakukan setiap bulan	Pada TW IV sudah dilakukan evaluasi terkait indikator kinerja ini pada bulan November dan Desember sehingga target kinerja bisa dipertahankan melewati target 94.9%. Realisasi TW TW IV 95.69%
2. <u>Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat</u>						
1.	TW I: - Terus melakukan pembinaan dan sosialisasi pada distributor pangan mengenai label yang memenuhi ketentuan untuk mengurangi produk beredar yang TMK Penandaan - Agar Melakukan tindak lanjut terhadap sampel yang TMS pengujian		Pembinaan dan sosialisasi pada distributor pangan mengenai label yang memenuhi ketentuan untuk mengurangi produk beredar yang TMK Penandaan sudah dilakukan - Tindak lanjut terhadap sampel yang TMS pengujian sudah dilakukan		Masih dalam proses pemeriksaan dan pengujian sampel	Target kinerja dapat tercapai (94.74%) dari target 89.2%

2.	TW II: Tetap melakukan kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja ini dengan tetap melakukan perencanaan sampling dengan baik serta menyusun strategi kerja agar timeline pengujian memenuhi TW III: 1. Petugas inspeksi harus lebih memperhatikan lagi penilaian label pada kemasan sampel agar tidak terjadi kesalahan penilaian label yang menyebabkan perubahan hasil akhir. 2. Tetap melakukan edukasi tentang penyimpanan produk pangan yang baik agar mengurangi dampak berupa hasil uji TMS cemaran proses, khususnya untuk sampel madu. 3. Untuk sampel pangan AMDK dengan hasil uji TMS mikro agar ditindaklanjuti sesuai petunjuk teknis yang telah ditentukan.		udah melakukan perencanaan sampling dengan baik serta menyusun strategi kerja agar timeline pengujian memenuhi		Target kinerja 97.42%	Target kinerja dapat ditingkatkan yaitu 97.42%
3	TW III: 1. Petugas inspeksi harus lebih memperhatikan lagi penilaian label pada kemasan sampel agar tidak terjadi kesalahan penilaian label yang menyebabkan perubahan hasil akhir. 2. Tetap melakukan edukasi tentang penyimpanan produk pangan yang baik agar mengurangi dampak berupa hasil uji TMS cemaran proses, khususnya untuk sampel madu. 3. Untuk sampel pangan AMDK dengan hasil uji TMS mikro agar ditindaklanjuti sesuai petunjuk teknis yang telah ditentukan.		1. Petugas inspeksi sudah memaksimalkan penilaian label pada kemasan sampel sehingga tidak ada kesalahan penilaian label 2. Melakukan edukasi tentang penyimpanan produk pangan yang baik agar mengurangi dampak berupa hasil uji TMS cemaran proses, khususnya untuk sampel madu. 3. Untuk sampel pangan AMDK dengan hasil uji		Target kinerja (94.74%)	Penurunan target kinerja menjadi 94.03% tetapi masih melampaui target

			TMS mikro sudah ditindaklanjuti			
4.	TW IV: 1. Petugas inspeksi sudah memperhatikan penilaian label pada kemasan sampel sehingga tidak terjadi kesalahan penilaian label yang menyebabkan perubahan hasil akhir. 2. Tetap melakukan edukasi tentang penyimpanan produk pangan yang baik agar mengurangi dampak berupa hasil uji TMS cemaran proses, khususnya untuk sampel madu. 3. Tetap melakukan KIE tentang pentingnya Higiene dan Sanitasi dalam proses produksi dan distribusi untuk menghindari hasil uji Mikrobiologi.		1. Petugas inspeksi sudah memaksimalkan penilaian label pada kemasan sampel sehingga tidak ada kesalahan penilaian label 2. Melakukan edukasi tentang penyimpanan produk pangan yang baik agar mengurangi dampak berupa hasil uji TMS cemaran proses, khususnya untuk sampel madu. 3. Untuk sampel pangan AMDK dengan hasil uji TMS mikro sudah ditindaklanjuti		Target kinerja 94.03%	Target kinerja mengalami peningkatan sedikit yaitu 94.07%
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan						
1.	TW I: Senantiasa berkoordinasi dengan tim inspeksi, infokom dan penindakan agar pelanggaran terhadap mutu produk Obat dapat senantiasa terkendali	Sudah dikoordinasikan kepada tim inspeksi, infokom dan penindakan agar pelanggaran terhadap mutu produk Obat			Masih ada pelanggaran mutu produk Obat	Realisasi kinerja 100% , tidak ada sampel yang TMS/TMK dengan capaian 106.04%
2.	TW II: 1. Dilakukan penguatan pengawasan, sosialisasi dan KIE secara kontinyu mengenai penandaan/labeling pada produk kosmetik dan OT/SK dan Kuasi khususnya untuk produk yang beredar di Banda Aceh. 2. Intensif melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai CPKB dan CPOTB agar mutu produk kosmetik dan OT/SK dan Kuasi senantiasa terjaga.	Rekomendasi sudah dilaksanakan: sosialisasi dan KIE mengenai label/penandaan, sosialisasi CPKB, CPOTB kepada pelaku usaha serta memberikan sanksi keras terhadap pelanggaran d produk Obat			Realisasi kinerja 100% dengan capaian 106.04%	Realisasi kinerja menurun menjadi 92.86%

	3. Melakukan pemberian sanksi pada pelaku usaha dengan produk kosmetik dan OT/SK dan Kuasi yang TMK penandaan untuk memberikan efek jera.					
3.	TW III: Masih merencakan rencana aksi di TW II karena penurunan realisasi dan capaian kinerja serta menegaskan kembali 1 poin yang mirip yaitu: tetap gencar melakukan sosialisasi dan KIE terkait penandaan/label karena hal ini yang mempengaruhicapaian kinerja menjadi menurun.	Sudah dilakukan			Realisasi kinerja 92.86% (target tidak tercapai)	Realisasi kinerja mengalami kenaikan menjadi 94.68%
4.	TW IV: 1. Perlu dibuat rencana peningkatan kompetensi personel terkait pemeriksaan label/penandaan kosmetik 2. Perlu diusulkan review kembali terhadap aturan label/penandaan kosmetik sehingga lebih mudah dipahami baik oleh personel yang berkaitan maupun oleh pelaku usaha.		Akan direncanakan peningkatan kompetensi personel terkait label/penandaan. Untuk produk OT/SK, kuasi dan kosmetik , tahun 2025 penandaan akan diserahkan ke Balai sehingga sangat penting untuk meningkatkan kompetensi personel terkait label/penandaan	TW II 2025	Realisasi kinerja 94.68%	Realisasi kinerja turun menjadi 93.04%
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan						
1.	TW I: Perlu dilakukan KIE kepada produsen mengenai sanitasi dan higienitas dalam proses produksi	Sudah dilakukan oleh tim inspeksi dan infokom			Sampel Makanan yang banyak TMS uji Mikro	Realisasi Kinerja 75%

2.	TW II: Tetap melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap UMKM dan perodusen pangan yang tergolong sampel targetted, melakukan KIE terhadap cara produksi makanan yang sesuai ketentuan	Sudah dilakukan			Realisasi Kinerja 75%	Realisasi Kinerja meningkat menjadi 97.5%
3.	TW III: 1. Untuk produk UMKM yang masih TMS pada BTP agar tetap dilakukan pendampingan 2. Masih perlu dilakukan KIE terhadap produsen maupun penjual sampel PJAS terhadap Higienitas dan Sanitasi terkait hasil Uji TMS Mikrobiologi 3. Untuk produsen yang masih dinilai TMK label maka perlu tetap dilakukan sosialisasi pelabelan agar produk mereka tidak lagi ditemukan TMK label.	Kegiatan masih terus dilakukan			Realisasi Kinerja 97.5%	Realisasi menurun menjadi 93.41% tetapi masih melampaui target
4.	TW IV: 1. Untuk produk UMKM yang masih TMS pengujian pada tetap dilakukan pendampingan 2. Masih perlu dilakukan KIE terhadap produsen maupun penjual sampel PJAS terhadap Higienitas dan Sanitasi terkait hasil Uji TMS Mikrobiologi 3. Untuk produsen yang masih dinilai TMK label maka perlu tetap dilakukan sosialisasi pelabelan agar produk mereka tidak lagi ditemukan TMK label.	Sudah dilaksanakan oleh tim terkait			Realisasi kinerja 93.41%	Realisasi Kinerja 89.15% Terjadi penurunan realisasi diakibatkan kasus lathio yang viral di Indonesia mengakibatkan kinerja menurun
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat						
1.	TW I: Perlu dilakukan pembinaan pada produsen mengenai penambahan Fortifikan KIO3 pada garam curah	Kegiatan masih terus dilakukan	-	-	Masih terdapat sampel TMS KIO3 pada garam curah	Realisasi Kinerja 93.57 %

2.	TW II: Tetap konsisten melakukan KIE dan sosialisasi tentang pentingnya fortifikasi Pangan dan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan agar produk pangan terfortifikasi semakin baik	Kegiatan masih terus dilakukan	-	-	Realisasi Kinerja 93.57 %	Realisasi Kinerja 92.11%
3.	TW III: Berdasarkan surat dari Direktur Ditwas Peredaran Pangan Olahan No. T-PW.04.03.53.10.24.1806, terkait isu sulitnya mendapatkan KIO3 sejak bulan Juni 2024 sebagai fortifikan pada garam, maka akan dilakukan sampling dan pengujian pada bulan oktober, dan dilaporkan paling lambat tanggal 22 Oktober 2024	Kegiatan masih terus dilakukan	-	-	Realisasi Kinerja 92.11%	Realisasi meningkat menjadi 96.00 %
4.	TW IV: Tetap melakukan KIE dan pengawasan terhadap sampel fortifikasi yang TMS	Sudah dilaksanakan oleh tim terkait			Hasil Uji sampel TMS tidak bertambah	Realisasi Kinerja 96.10% Terjadi kenaikan dengan adanya permintaan sampling garam lokal pada bulan Oktober dengan hasil MS sehingga meningkatkan realisasi
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan						
1	Meningkatkan monev rekomendasi yang belum dilaksanakan	Ketua tim melakukan monev aktif terhadap rekomendasi yang diterima untuk dilaksanakan	-	-	Terdapat beberapa rekomendasi pusat yang terlambat ditindaklanjuti	Semua rekomendasi yang diterima telah ditindaklanjuti
2	Penetapan timeline membuat surat tindak lanjut 7 hari kerja	Tindak lanjut telah dilaksanakan sesuai time line di bawah 7 hari kerja	-	-	Terdapat rekomendasi yang dilaksanakan lebih dari 7 hari kerja	Semua rekomendasi yang diterima telah ditindaklanjuti sesuai timeline
3	Komunikasi dan koordinasi aktif dengan Balai Besar POM di Medan	Ketua Tim aktif berkoordinasi dan komunikasi aktif dengan Petugas dari Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	Setelah 1 bulan surat diterbitkan belum ada surat tindak lanjut	Surat Terkait Hasil Pengawasan Boraks sudah ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Medan

4	Komunikasi dan koordinasi aktif dengan Lintas Sektor	Tim KLB berkoordinasi dengan Linsek terkait kelengkapan administrasi penetapan KLB	-	-	Sampel KLB sudah diterima Balai tetapi administrasi tidak lengkap	Surat Penetapan KLB sudah dilengkapi
7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan						
1.	Sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha	Petugas menyampaikan pada pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan	-	-	Pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban menindaklanjuti rekomendasi	Peningkatan pelaku usaha yang menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan
2.	Meningkatkan monev surat tindak lanjut yang belum direspon pelaku usaha dan lintas sektor.	Monev aktif ketua tim dan petugas terhadap surat tindak lanjut yang belum direspon pelaku usaha dan lintas sektor pada buku control dan WA inspeksi	-	-	Kurangnya monev ketua tim beserta petugas terhadap surat tindak lanjut yang belum direspon	Ketua tim dan petugas telah melakukan monev terhadap surat yang belum ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor
3.	Pendampingan Pembuatan CAPA pelaku usaha Saryanfar	Pendampingan pembuatan CAPA kepada pelaku usaha saat pemeriksaan/ melalui WA setelah pemeriksaan	-	-	Pelaku usaha tidak begitu paham terkait pembuatan CAPA	Pelaku usaha sudah memahami cara pembuatan CAPA
4.	Koordinasi dan komunikasi aktif dengan lintas sektor	Koordinasi dan komunikasi aktif formal maupun non formal dengan lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan	-	-	Rekomendasi lama ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Rekomendasi yang diterbitkan danI telah ditindaklanjuti oleh lintas sektor
8. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu						
1	Aktif melakukan program desk CAPA bagi Pelaku Usaha berkelanjutan secara daring maupun luring bagi pelaku usaha yang memiliki kendala.	Desk CAPA telah dilaksanakan pada TW I, II, III dan IV	-	-	Pelaku usaha mengalamikesulitan dalam memahami dan menyelesaian CAPA	Pelaku usaha memahami CAPA yang diminta dan dapat menyelesaikan CAPA

2	Memperkuat sosialisasi tentang tata cara pendaftaran produk berkelanjutan	Petugas sertifikasi telah berkontribusi dalam memberikan layanan kepada konsumen melalui Standar Pelayanan yang telah disosialisasikan melalui media cetak dan medsos	-	-	Belum tersedia konten di media sosial	Sudah tersedia konten di media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat
3	Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM (monitoring dan evaluasi pelaksanaan Koorporasi)	Telah dilakukan pendampingan denah, pendampingan pemenuhan persyaratan izin penerapan CPPOB, pendampingan SPA SCPK dan CPOTB bertahap	-	-	Pelaku usaha ada yang belum memahami proses dan tatacara registrasi	Pelaku usaha memahami proses dan tatacara registrasi
4	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai cara produksi pangan olahan yang baik	Telah dilakukan desk registrasi pangan olahan secara luring dengan tim pusat	-	-	Masih banyak terkendala di pelaku usaha terkait pengurusan ijin edar produk	Sudah banyak terbit izin edar produk saat dilakukan desk registrasi dengan pusat
5	Merekrut dan melatih tenaga fasilisator eksternal untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi	Telah dilakukan rekruitmen dan pelatihan fasilitator eksternal pada bulan April 2024	-	-	Belum ada fasilisator eksternal	Sudah ada fasilisator eksternal yang terlatih
9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan						
1	Penyusunan target pemeriksaan sarana berdasarkan *track record* dengan mengikutkan sarana baru	Inspeksi sarana riwayat TMK pada pemeriksaan sebelum nya dan sarana baru	-	-	Penetapan target berdasarkan analisis risiko sarana	Penetapan target berdasar *track record* dan sarana baru
2	Meningkatkan monev terhadap penyusunan sarana produksi yang diawasi	Monev penyusunan target pemeriksaan	-	-	Kurangnya monev terhadap target pemeriksaan sarana	Meningkatkan monev penyusunan target pemeriksaan
3	Peningkatan kompetensi petugas oleh petugas yang telah mendapat pelatihan	Pelatihan Inspektur kosmetik junior, Sosialisasi DIP, Inspektur CPOTB, dan Inspektur Pangan Madya	-	-	Tidak *update* kompetensi petugas	Pembaharuan kompetensi petugas dengan *sharing* ilmu

4	Penyusunan target audit sertifikasi terkait penerapan CPPOB	Sarana sertifikasi dihitung dalam capaian indikator sesuai aplikasi Simetris	-	-	Sarana sertifikasi tidak dihitung	Sarana sertifikasi dihitung dalam capaian
5	Komunikasi aktif dan pembinaan berkelanjutan antara petugas dengan pelaku usaha	Pelaku usaha melakukan perbaikan temuan sarana	-	-	Sarana tidak melakukan perbaikan temuan	Sarana melakukan perbaikan temuan, sehingga menjadi MK pada pemeriksaan selanjutnya
10. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Provinsi Aceh						
1	Peningkatan kompetensi petugas pengawasan sarana distribusi dan saryanfar	Bimtek distribusi dan pelayanan kefarmasian petugas Balai Besar POM di Banda Aceh pada Maret 2024	-	-	Ketajaman petugas dan kompetensi belum merata	Ketajaman petugas meningkat dan memiliki persepsi yang sama
2	Pembinaan berupa penerapan sanksi yang sesuai yang lebih tegas pada sarana distribusi	Pemberian sanksi PSK pada PBF dan PK pada saryanfar	-	-	Kepatuhan sarana kurang	Kepatuhan sarana meningkat
3	Peningkatan kompetensi inspektur berjenjang dan persamaan persepsi petugas	Pelatihan terjadwal yang diikuti petugas TW III Inspektur Kosmetik Junior	-	-	Personil baru belum memahami terkait pemeriksaan distribusi	*Sharing* ilmu dan hasil Inspeksi lebih dalam dan persepsi petugas mulai sama.
4	Peningkatan kompetensi petugas pengawas sarana distribusi pangan	Bimtek SMKPO oleh tim pusat bulan April	-	-	Kurangnya kompetensi petugas terkait SMKPO	Peningkatan kompetensi petugas terkait SMKPO
5	Pembinaan sarana terkait AMR pada Apotek yang TMK	Sosialisasi AMR sarana apotek di Pidie - Pidie Jaya yang TMK 2023-2024	-	-	Apotek menjual antibiotik tanpa resep dokter	Apotek menjual antibiotik dengan resep dokter
6	Pembinaan sarana terkait produk yang sering disalahgunakan	Sosialisasi Misoprostol di saryanfar	-	-	Apotek menjual misoprostol tanpa resep / tidak ada skrining	Apotek melakukan skrining dengan kehati-hatian
7	Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan pelaku usaha distribusi obat dan makanan	Monev aktif sarana dengan riwayat TMK dan sarana baru	-	-	Sarana riwayat TMK ada yang tidak diperiksa ulang	Sarana TMK sudah diperiksa ulang dan sarana baru ditambahkan dalam prioritas

11.	**<u>Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh</u>**					
1	Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait penyusunan Standar Pelayanan yang melibatkan berbagai unsur dan profesi	-	-	Standar Pelayanan akan diupdate setelah pelaksanaan FKP berdasarkan saran dan masukan	Penetapan Standar pelayanan dan maklumat pelayanan
2	Pemberian Reward dan Punishment Petugas Pelayanan dilakukan setiap bulan	Reward dan Punishment Petugas Layanan Publik dilakukan setiap bulan dan di publish di media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	Reward dan Punishment Petugas Layanan Publik dilakukan per triwulan dan di publish di media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh	Reward dan Punishment Petugas Layanan Publik dilakukan perbulan dan di publish di media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh
3	Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana di ruang pelayanan publik	Renovasi toilet, sistem antrian, dan ruang pelayanan publik	-	-	Toilet disabilitas belum tersedia, sistem antrian masih manual dan ruang pelayanan publik masih belum lengkap	Toilet disabilitas telah tersedia, sistem antrian telah diupdate dengan sistem antrian elektronik dan ruang pelayanan publik masih belum lengkap
4	Mengikutkan inovasi pelayanan publik dalam ajang kontes inovasi KIPP	Mengajukan proposal inovasi pelayanan publik dalam ajang kontes inovasi KIPP	-	-	Inovasi tidak lolos seleksi	Inovasi terus berjalan dan akan diusulkan kembali pada tahun 2024
12.	**Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**					
1	Pendampingan ke sarana sesuai jadwal yang ditetapkan	Telah dilakukan pendampinan langsung ke sarana produksi kepada semua UMK target	-	-	Masih banyak pelaku usaha yg belum mengerti terkait CPPOB	Pelaku usaha sudah makin banyak yang memahami terkait CPPOB
2	Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai cara produksi kosmetik, OBA dan pangan olahan yang baik	Bimtek kepada pelaku usaha kosmetik, OBA dan Pangan	-	-	Masih sedikit pelaku usaha yang mendapat sertifikat CPPOB	Pelaku usaha lebih paham dengan bertambah sertifikat CPPOB yang diterbitkan
3	Merekrut dan melatih tenaga fasilitator eksternal untuk mempercepat proses penerbitan layanan sertifikasi	Telah dilakukan perekrutan tenaga fasilitator UMK pangan	-	-	Pendampingan pada pelaku usaha tidak maksimal	Meningkatkan pendampingan ke pelaku usaha secara langsung untuk lebih maksimal

13.	**Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota**					
1	Percepatan Pembentukan Tim TKPPOM terhadap 6 meliputi Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota	Melakukan perencanaan dan evaluasi pembahasan pembentukan SK TKPPOM di Daerah secara berkala	-	-	Masih ada 6 (enam) Kabupaten Kota dan Provinsi yang belum terlibat dalam SK TKPPOM	8 (delapan) tambahan Kabupaten Kota dan Provinsi yang sudah terlibat dalam SK TKPPOM
2	Meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama pembentukan tim TKPPOM	Sosialisasi surat edaran Mendagri nomor 700 / 6206/SJ tentang koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan di daerah	-	-	Masih ada 6 (enam) Kabupaten Kota dan Provinsi yang belum aktif terlibat dalam kegiatan SK TKPPOM	8 (delapan) tambahan Kabupaten Kota dan Provinsi yang sudah terlibat dalam SK TKPPOM
3	Meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama pembentukan tim TKPPOM	Peningkatan kerjasama dan sinergi antara instansi terlibat dalam SK TKKPOM untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan yang dijabarkan di SK TKPPOM termasuk melakukan penganggaran untuk kegiatan bersama	-	-	Kegiatan pengawasan selama ini masih menunggu kegiatan pengawasan dari Balai Besar POM di Banda Aceh	Pemda dapat mandiri dalam melakukan pengawasan
4	Monitoring dan Evaluasi DAK NF POM	Sudah dilakukan Peningkatan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan DAK Kab/Kota pengawasan Kab/Kota n+1 tahun 2025			Pelaksanaan kegiatan baru dilakukan pada TW3 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / kota	Capaian output dan anggaran serta pelaporan kegiatan melalui SMARTPOM dapat maksimal
14.	**Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan**					
1	Melibatkan peran SAKA POM pada kegiatan KIE di area keramaian dan sarana ritel/warung	Anggota SAKA POM dilibatkan KIE di Sekolah dan pada kegiatan Inovasi Sanger Ureung Aceh serta kegiatan penngawasan pada saat hari besar keagamaan	-	-	Belum ada pembentukan angggota SAKA POM	Pembentukan SAKA POM dan disahkannya SAKA POM pada saat MUNAS Pramuka tahun 2024

2	Peran Anggota SAKA POM khususnya Krida Informasi untuk memmbuat Konten-konten edukasi yang menarik yang dipublikasi pada media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh	Video konten edukasi terkait Obat dan Makanan dibuat secara menarik dan kekinian	-	-	Viewer dan Follower medsos Balai Besar POM di Banda Aceh masih sedikit	Viewer dan Follower medsos Balai Besar POM di Banda Aceh meningkat pesat
15.	**Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman**					
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	Telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan	-	-	Belum ada usulan rekomendasi sekolah yang akan dilntervensi Program Pro PN Desa, Pasar dan Sekolah	Lokus Desa Pasar dan Sekolah yang akan diintervensi tahun 2024
2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN	Telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)	-	-	Belum menggalang komitmen bersama dalam pelaksanaan program Pro PN Keamanan Pangan	Adanya Komitmen tertulis dari Pemerintah daerah yang di tanda tangani
16.	**<u>Jumlah Desa Pangan Aman</u>**					
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	Telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan	-	-	Belum ada usulan rekomendasi sekolah yang akan dilntervensi Program Pro PN Desa, Pasar dan Sekolah	Lokus Desa Pasar dan Sekolah yang akan diintervensi tahun 2024
2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN	telah dilakukan Penandatanganan komitemen Bersama)	-	-	Belum menggalang komitemen bersama dalam pelaksanaan program Pro PN Keamanan Pangan	Adanya Komitmen tertulis dari Pemerintah daerah yang di tanda tangani
17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas						
1	Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor BPOM Aceh dengan Pemerintah Daerah	(telah dilakukan Audiensi dan Advokasi Keamanan Pangan)	-	-	Masih kurangnya kerjasama dengan lintas sektor	Meningkatnya kerjasama dan koordinasi yang baik
2	Menggalang Komitmen Pemda dalam Program PN PPPABK	(telah dilakukan Penandatanganan komitmen Bersama)	-	-	Belum adanya komitmen dari Pemerintah Daerah	Adanya Komitmen tertulis dari Pemerintah daerah
18. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar						

1	1. Melakukan perbaikan alat-alat rusak 2. Pengadaan suku cadang di awal tahun 3. Pengadaan reagensia 4. Mengadakan rapat di awal tahun tentang perencanaan-perencanaan untuk dapat memperlancar pengujian	Sudah dikomunikasikan dengan PPK dan perencanaan sudah diberikan di bulan Desember dan awal bulan Januari 2025	-	-	Alat rusak belum ada sparepart pengganti, reagensia sudah menipis di gudang	Spare part tinggal menunggu kedatangan, reagensia menunggu pengiriman,
19. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar						
1	Tetap melakukan KIE pada pihak distributor dan produsen agar memproduksi dan mendistribusikan produk pangan sesuai ketentuan supaya pangan yang dikonsumsi aman dan bermutu., baik untuk sampel Acak maupun targeted	Melakukan KIE pada pihak distributor dan produsen pangan	-	-	Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di bulan Oktober 96.88 %	Realisasi dan capaian kinerja tercapai 100%
20. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan						
1	Melakukan kegiatan Penindakan dan penyelesaian proses penyidikannya sampai Tahap I (penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan) atau tahap lebih lanjut	Investigasi terfokus pada sarana yang menjadi target.	-	-	Hasil investigasi belum mencukupi	Hasil Investigasi sudah mencukupi
		Koordinasi dengan Kepolisian untuk kegiatan Penindakan	-	-	Belum dilakukan penindakan Telah dilakukan penindakan terhadap 2 kasus OOT	Telah dilakukan penindakan terhadap 2 kasus OOT
		Penyerahan Berkas Perkara ke Kejaksaan	-	-	Belum dilakukan penyidikan	Telah dilakukan penyidikan terhadap 2 kasus (1 kasus Psikotropika, 1 kasus OOT)
2	Penyelesaian seluruh perkara sampai pada minggu ke 2 bulan Oktober 2025	-	Melakukan kegiatan intelijen untuk pengumpulan data yang lebih lengkap untuk beberapa target yang sudah diketahui sebagai persiapan untuk perkara tahun depan	Januari - September 2025	Belum didapatkan informasi yang lengkap	

		-	Secara rutin mengumpulkan data-data kerawanan dari berbagai sumber terkait sebagai informasi awal untuk kegiatan intelijen.	Januari - Desember 2025	Data kerawanan 2025 belum ada/lengkap	
		-	Melakukan operasi siber dan profiling secara rutin yang akan digunakan sebagai informasi awal kegiatan intelijen	Januari - Desember 2025	Belum ada Laporan siber dan profiling	
21. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP						
	Rencana Penambahan RL Pengujian di Tahun 2025, pengembangan Kompetensi dan pengadaan alat baru	Sudah dibuat perencanaan untuk pengembangan RL, alat dan kompetensi 2025	-	-	Target 2024 sudah tercapai namun komponen RL masih kurang	Simulasi tahun 2025 sesuai perhitungan komponen baru target ini akan tercapai jika rencana dilaksanakan
22. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal						
1	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi	Komitmen bersama seluruh pegawai terhadap pemanfaatan data dan informasi yang optimal	-	-	Masih rendahnya nilai pemutakhiran SPIMKER dan SIPT	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
2	Melakukan monev secara berkala	Konsisten dalam komitmen terkait penginputan dan pelaporan	-	-	Masih rendahnya nilai pemutakhiran SPIMKER dan SIPT	Terpenuhinya semua target per komponen nilai indeks sampai dengan TW IV
23. Indeks kesadaran masyarakat *(awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BALAI BESAR POM di Banda Aceh						
1	Kegiatan KIE yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Telah dilaksanakan KIE tentang Obat dan Makanan Aman, P4GN dan Cek KLIK serta BPOM Mobile	-	-	Banyak yang tidak mengetahui bagaimana mengenali bahaya Obat dan Makanan Ilegal dan Bahan berbahaya yang sering ditambahkan pada pangan dan kosmetik	Tingkat Pengetahuan masyarakat terkait Obat dan Makanan serta P4GN meningkat

					Banyak yang masih belum paham keterkaitan BPOM dengan materi P4GN dan banyaknya pertanyaan terkait legalitas produk melalui Medsos	
2	Berkolaborasi dalam upaya mempublikasikan program BPOM dan mendiseminasikan materi terkait keamanan pangan	Publikasi melalui TV Radio lokal, media cetak dan infografis di media sosial	-	-	Penyebaran informasi belum menyebar secara menyeluruh di Prov. Aceh Dan informasi yang disampaikan kurang menarik	Publikasi dilakukan dengan lebih kekinian dengan melibatkan Anggota SAKA POM dalam penyebaran informasi berbasis digital
24.	**<u>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</u>**					
1	Komunikasi aktif dengan pelaku usaha terkait survey IKEPU	Pelaku usaha paham dan berkontribusi dalam memberikan survei			Pelaku kurang aktif dalam mengisi survey	Pelaku usaha aktif dalam mengirim survey
2	Monev berkala tindak lanjut atas hasil survey	Monev hasil survey TW IV telah dilakukan			Banyak pelaku usaha tidak memahami survei	Pelaku usaha telah memahami survei IKEPU
3	Menindaklanjuti saran dan masukan responden	Tidak ada saran dan masukan di TW IV			-	-
24.	**Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**					
1	Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor melalui MOU	Sudah dilakukan pembaharuan MOU MPP Banda Aceh	-	-	Belum dilakukan pembaharuan MoU	Sudah dilakukan pembaharuan MOU MPP Banda Aceh
2	Melibatkan Saka POM dalam berbagai kegiatan keamanan pangan	Sudah dilaksanakan Kegiatan pengujian Takjil Ramadhan yang melibatkan SAKA POM	-	-	Kegiatan pengujian Takjil Ramadhan di kabupaten/ Kota dilakukan mandiri oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh	Kegiatan Takjil Ramadhan di kabupaten/ Kota dilakukan dengan melibatkan SAKA POM
3	Kegiatan Sanger Ureung Aceh di Kabupaten/Kota dengan melibatkan Saka POM	Sudah melibatkan Saka POM dalam berbagai kegiatan Sanger Ureung Aceh di Kabupaten/Kota	-	-	Kegiatan Sanger Ureung Aceh dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh	Kegiatan Sanger Ureung Aceh dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dan kader Saka POM

4	Pemanfaatan media sosial yang optimal terkait isu terkini	Sudah dilakukan Pemanfaatan media sosial sesuai isu dan dengan tampilan terkini. Aktif penyampaian informasi di media sosial terkait Intensifikasi Pangan Ramadhan, perkembangan terkini Obat Tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO), Kosmetik mengandung merkuri, Bahan Berbahaya pada pangan, Stunting	-	-	Pemanfaatan media sosial belum maksimal	Pemanfaatan media sosial sesuai isu dan dengan tampilan terkini
26.	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM**					
1	Pendampingan UMKM melalui inovasi	Publikasi PNBP dan pendampingan UMK melalui inovasi *e-learning* korporasi	-	-	Proses pendampingan cenderung lambat	Proses pendampingan lebih cepat dan UMK bisa akses informasi terkait pengurusan pendaftaran produk 24 jam di aplikasi *e-learning* korporasi
2	Peningkatan kompetensi Petugas Layanan	Pelaksanaan Pelatihan untuk petugas Layanan seperti pelatihan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, pelatihan media sosial	-	-	Kompetensi petugas layanan belum terupdate	Kompetensi petugas meningkat dan memiliki pengetahuan yang terupdate
3	Pengurusan rekomendasi CPPOB	Pengurusan CPPOB bertahap dilakukan pendampingan oleh fasilitator yang telah di rekrut oleh BPOM mulai dari pembuatan SSOP, login di OSS dengan pemilihan PBUMKU sampai dengan pendampingan di web:	-	-	Pengurusan rekomendasi CPPOB membutuhkan waktu penyelesaian yang lama	Adanya petugas tambahan yaitu fasilitator UMK yang memiliki kompetensi terkait pengurusan CPPOB sehingga pengurusan CPPOB lebih cepat

		esertifikasi.pom.go.id				
4	Peningkatan Layanan Pengujian di BPOM	Percepatan penyelesaian waktu pengujian dan revisi Standar Pelayanan	-	-	Timeline hasil uji lebih lama dibandingkan dengan instansi lain di beberapa parameter uji	Sudah dilakukan revisi pada Standar Pelayanan Pengujian dengan jangka waktu pelayanan pengujian pada Uji Kimia: 1 s.d 6 HK dan Uji Mikrobiologi: 5 s.d 9 HK
5	Penyebaran informasi terkait layanan Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	Publikasi Layanan Pengaduan di berbagai media elektronik	-	-	Masyarakat tidak mengetahui mekanisme pengaduan secara online	Publikasi di media sosial terkait SP4N-LAPOR dan menu layanan pengaduan pada subsite PPID agar masyarakat bisa menggunakan akses dimaksud secara online
27. Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh						
1	a. Papan nama petugas pemberi layanan agar selalu diletakkan pada meja pelayanan. Harus selalu terdapat petugas di pelayanan publik meskipun jam istirahat. b. Agar menampilkan jenis pelayanan, informasi tarif PNBP serta informasi terkait public warning terkini. c. Agar berkoordinasi dengan Inspektorat Utama BPOM untuk mendapatkan standing banner WBS terbaru. d. Menambahkan fitur layanan atau informasi pada komputer yang digunakan penerima layanan untuk mengisi SPKP dan SPAK. e. Menambahkan petunjuk arah untuk toilet yang strategis	Sudah melakukan tindak lanjut terhadap perbaikan yang direkomendasikan Tim TPI Inspektorat II BPOM	-	-	a. Papan nama petugas pemberi layanan tidak diletakkan pada meja pelayanan. b. Terdapat layar monitor di ruangan pelayanan publik sebagai media informasi, namun jenis pelayanan, Informasi tarif PNBP dan informasi terkait public warning belum ditayangkan. c. Standing banner WBS yang ada di ruang pelayanan publik belum menggunakan informasi media yang terbaru. d. Komputer untuk penerima layanan mengisi SPKP dan	Sudah dilakukan perbaikan untuk semua rekomendasi

					SPAK agar ditambahkan kebermanfaatannya dengan menambahkan fitur layanan lainnya. e. Petunjuk arah untuk toilet belum tersedia.	
2	Melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan	Sudah melakukan kegiatan rapat monev RB	-	-	Belum dilakukannya rapat monev RB TW IV	Sudah dilakukan rapat monev RB TW IV pada Bulan Februari 2024
3	a. Melakukan review dan monev terhadap rencana kerja tahun berikutnya yang lebih berdampak untuk masing-masing area dan masyarakat. b. Melakukan kampanye pembangunan ZI. c. Melakukan dokumentasi dengan lebih tertib dan mampu telusur. d. Melakukan pemetaan kompetensi dan perbaikan kinerja pegawai. e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pemanfaatan IT. f. Membangun sistem pengendalian internal. g. Perbaikan standar layanan dengan memanfaatkan hasil forum komunikasi publik dan SKM. h. Melakukan pemantauan dan evaluasi bagi petugas layanan. i. Menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.		a. Akan dilakukan penyusunan rencana kerja. b. Akan melakukan kampanye pembangunan. c. Lebih tertib dalam melakukan dokumentasi. d. Akan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja. e. Melaksanakan monev secara berkala. f. Memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi. g. Melakukan monev terhadap penerapan perbaikan layanan. h. Melakukan sosialisasi terhadap petugas terkait reward and punishment. i. Akan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK.	2025	a. Belum dilakukannya penyusunan rencana kerja secara komprehensif (tidak hanya fokus terhadap pemenuhan LKE). b. Belum melakukan kampanye pembangunan ZI secara masif dan aktif kepada stakeholder/Unit kerja lain. c. Inovasi yang dikembangkan belum seluruhnya didukung dengan bukti sosialisasi, latar belakang, target dan pengukuran. d. Belum dilakukannya pemantauan dan evaluasi terkait peningkatan kinerja dan penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai. e. Belum melaksanakan monitoring dan	

					evaluasi secara berkala dan memadai. f. Masih adanya pelanggaran kode etik melalui WBS tahun 2023. g. Perbaikan standar layanan dan publikasi belum dilakukan dengan jelas dan lengkap melalui media sosial. h. Belum memberikan reward and punishment secara berkala terhadap petugas pemberi layanan i. Masih adanya rekomendasi BPK dalam proses tindak lanjut.	
27.	**<u>Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh</u>**					
1	Melakukan monitoring dan evaluasi internal triwulan	Melaksanakan rapat triwulan terkait evaluasi internal	-	-	Belum terpantaunya monitoring capaian kerja, justifikasi, dan tindak lanjut capaian kinerja per triwulan	Capaian kerja, justifikasi, dan tindak lanjut capaian kinerja per triwulan dapat dipantau
2	Membuat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data dan kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan.	Telah di dilakukan pembuatan dan penyempurnaan pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja.	-	-	Pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja masih belum memuat mekanisme yang jelas.	Pengumpulan data kinerja telah memuat mekanisme yang jelas dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
3	Membuat Keselarasan data capaian kinerja antara RHPK dengan laporan kinerja tahunan, laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal tahun 2022.	Telah dibuatkan link RAPK internal.	-	-	Hasil pengukuran data kinerja yang disajikan pada RHPK belum selaras dengan laporan kinerja interim dan laporan evaluasi internal tahun 2022.	Link RAPK internal dapat memastikan validitas data capaian kinerja serta keselarasan capaian kinerja pada laporan kinerja tahunan, interim dan laporan evaluasi internal.

4	Meningkatkan kualitas SDM dalam penyusunan LAKIN Tahun 2024.	Mengundang Tim SAKIP dari Balai Besar POM di Surabaya untuk pendampingan dalam penyusunan pelaporan kinerja.	-	-	Nilai perencanaan kinerja masih rendah.	Terjadi peningkatan nilai AKIP pada perencanaan kinerja.
5	Menyusun kertas kerja dan matriks reviu target dengan menyajikan penetapan target final.	-	Membuat kertas kerja dan matriks reviu target dan diformalkan oleh pimpinan.	2025	Belum menyusun kertas kerja dan matriks reviu target dengan menyajikan penetapan target final dan diformalkan oleh Pimpinan.	
6	Mendokumentasikan dengan baik arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja.	-	Membuat notulen rapat internal.	2025	Belum mendokumentasikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja secara spesifik (hanya menyajikan arahan agar melaksanakan rencana aksi).	
29.	**<u>Nilai Pengelolaan Kearsipan</u>**					
1	Meningkatkan kompetensi pegawai	-	Mengusulkan pegawai yang telah diangkat Jabatan Fungsional untuk mengikuti Diklat sesuai jabatan	2025	Kompetensi pegawai stagnan dan tidak ada perkembangan	Kompetensi pegawai meningkat dan diharapkan produktivitas pegawai pun akan meningkatkan
2	Untuk memenuhi standar kualifikasi pendidikan minimal S1.	-	Meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui Tugas Belajar bagi pegawai.	2025	Masih terdapat 15% pegawai yang masih dalam proses pendidikan untuk naik ke S-1.	Jumlah pegawai yang pendidikan- nya di bawah S1 akan berkurang dan akan meningkatkan nilai IP ASN.
30.	**<u>Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh</u>**					
1	Revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran data POK dilaksanakan sesuai jadwal	Triwulan I s/d IV			Pembayaran dilakukan tidak sesuai RPD	Pembayaran anggaran dilakukan sesuai RPD

2	Perlu peningkatan kompetensi Tim Pengelola Keuangan	Tim Pengelola Keuangan sudah mengikuti workshop IKPA setiap triwulan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan adanya pendampingan dari KPPN tentang Strategi mengelola UP/TUP			Nilai Deviasi halaman 3 DIPA dan pengelolaan UP/TUP rendah	Nilai IKPA dan EKA meningkat dari tahun 2023
3	Revisi DIPA/POK dilakukan tepat waktu	Sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024.			a. Terdapat pagu minus. b. Terdapat ketidaksesuaian akun.	a. Tidak ada pagu minus. b. Akun sudah sesuai.
32.	**<u>Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa</u>**					
1	Melakukan monev dan percepatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.	-	Melakukan pengendalian kontrak Melakukan identifikasi awal ketersediaan produk barang dan jasa.	2025	Belum seluruh indikator yang menjadi faktor penilaian telah diselesaikan dan dilaporkan dengan baik dan lengkap sehingga nilai yang belum didapat batas maksimal yaitu nilai sangat Baik "100".	Capaian telah melampaui target tahunan pada TW-IV: disebabkan Seluruh indikator yang menjadi faktor penilaian telah diselesaikan dan dilaporkan dengan baik dan lengkap sehingga nilai yang didapat adalah batas maksimal yaitu nilai sangat Baik "100".
33.	**<u>Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara</u>**					
1	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terkait tata kelola DBR	-	Melakukan Monitoring dan evaluasi serta melaksanakan Sosialisasi Bagi pengguna BMN terkait perpindahan barang	2025	Adanya BMN yang tidak bernomor dan tidak tertelusur serta barang yang berpindah tempat tanpa update DBR	BMN lebih tertib dan mudah ditelusuri
2	Menyelesaikan Laporan BMN, RK BMN Sebelum Timeline agar memperoleh nilai maksimal	-	Menyelesaikan Laporan BMN, RK BMN dan Wasdal 5 Hari sebelum Timeline	2025	Pelaporan masih tepat waktu namun dikirim sesuai batas timeline	Laporan BMN, RK BMN dan WASDAL mendapat nilai maksimal

3	Melaksanakan Pemusnahan dan Penghapusan sesuai timeline	-	Merencanakan dan melaksanakan proses pemusnahan dan Penghapusan Sebelum tahun berjalan.	2025	Masil terdapat barang rusak berat yang belum diajukan Penghapusan	Nilai BMN Penghapusan dan Pemusnahan Maksimal
34. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri						
1	Melakukan monitoring terkait ketersediaan PDN	on prosess	Melakukan pengecekan sertifikat produk barang dan jasa di database TKDN	2025		

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Setiap tahun dilaksanakan pengumpulan data kinerja dan dilakukan evaluasi yang kemudian dibukukan dalam laporan Kinerja tahunan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaji ulang pencapaiannya terhadap target dan bila dibutuhkan diberikan rekomendasi pencapaian di tahun berikutnya.

Beberapa Sasaran Kegiatan memiliki capaian yang belum memenuhi ekspektasi. Kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan untuk penyesuaian target di tahun berikutnya diperoleh dengan melihat tren pencapaian sasaran menggunakan tools SWOT dan analisa tren dengan pembanding yang setara. Data kinerja di Laporan Kinerja tahunan digunakan sebagai data primer yang valid penetapan target Sasaran Kegiatan di tahun berikutnya.

Pada tahun 2024 terdapat 5 (lima) penambahan indikator kinerja dari semula 29 (dua puluh sembilan) menjadi 34 (tiga puluh empat) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2024 juga mengalami perubahan target dari Rencana Kinerja yang telah disusun pada n-1. Seluruh perubahan target indikator kinerja sudah dilengkapi matriks dan kertas kerja perubahan target tahun 2024.

Tahun 2024 juga terjadi perubahan target bulanan RAPK pada indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dari semula dilakukan tiap bulan (kumulatif) namun karena ada perubahan cara perhitungan maka, target dilakukan tahunan dan nilai diperoleh pada akhir tahun.

3.6 Realisasi Anggaran

Table 132.Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	% Capaian Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kategori
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	99,90	102,22	**0,02**	Efisien
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	99,41	109,10	**0,10**	Efisien
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	99,64	100,33	**0,01**	Efisien
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	99,86	120,00	**0,20**	Efisien
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	99,06	120,00	**0,21**	Efisien
6.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	99,92	110,43	**0,11**	Efisien
7.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	96,08	100,54	**0,05**	Efisien
8.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	96,38	102,92	**0,07**	Efisien
9.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	99,84	99,65	**0,00**	Efisien

10.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal	99,90	96,27	**-0,04**	Tidak Efisien
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara Akuntabel	99,81	112,13	**0,12**	Efisien

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan pertama yaitu, "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 2.275.474.849,- atau 8,39% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan serta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah efisien, karena capaian sasaran (102,22%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.90%) yang dikeluarkan.
2. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedua yaitu, "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 1.738.226.168,- atau 6,41% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengaduan, pendampingan UMKM. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak bagi peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah efisien, karena capaian sasaran (109,10%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.41%) yang dikeluarkan.
3. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketiga yaitu, "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 2.465.275.589,- atau 9,09% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan

pelaksanaan KIE kepada masyarakat dan intervensi terhadap komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya semua indikator pada sasaran strategis ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah efisien, karena capaian sasaran (100,33%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99,64%) yang dikeluarkan.

4. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keempat yaitu, “Meningkatnya efektivitas produk dan pengujian obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 141.531.215,- atau 0.52% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengujian sampel obat dan makanan dan pengamanan makanan bagi tamu negara. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya semua indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keenam adalah efisien, karena capaian sasaran (120%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.86%) yang dikeluarkan.
5. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kelima yaitu, “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar Rp. 739.472.026,- atau 2,73% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan investigasi, penindakan, koordinasi, pemberkasan dan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh adalah efisien, karena capaian sasaran (120%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99,06%) yang dikeluarkan.
6. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keenam yaitu, “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan sebesar Rp. 1.279.383.680,- atau 4,72% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengadaan alat laboratorium dan alat komunikasi. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran strategis ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka

penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesepuluh adalah efisien, karena capaian sasaran (110,43%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99,92%) yang dikeluarkan.

7. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu, “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 16.166.551,- atau 0,06% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengambilan data dan survey. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah efisien, karena capaian sasaran (100,54%) yang dihasilkan melebihi anggaran (96,08%) yang dikeluarkan.
8. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu, “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar Rp. 51.597.619,- atau 0,19% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengawasan penandaan dan perilaku OMKA dan Bimtek CPPOB kepada pelaku usaha, lintas sektor dan pendamping UMK pangan. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak bagi pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah efisien, karena capaian sasaran (102,92%) yang dihasilkan melebihi anggaran (96,38%) yang dikeluarkan.
9. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu, “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal sebesar Rp. 304.782.905,- atau 1,12% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan koordinasi, Bimtek, penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan, kearsipan dan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran kegiatan ini. Karena meskipun capaian sasaran (99,65%) yang dihasilkan tidak melebihi anggaran (99.84%) yang dikeluarkan, namun sasaran kegiatan ini masih termasuk kategori efisien.

10. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kesepuluh yaitu, “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banda Aceh yang berkinerja optimal sebesar Rp. 93.306.565,- atau 0,34% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan workshop, bimtek dan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran strategis ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesepuluh adalah tidak efisien, karena capaian sasaran (96,27%) yang dihasilkan tidak melebihi anggaran (99,90%) yang dikeluarkan dan hasil dari perhitungan menunjukkan minus (-0,04). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 terjadi perubahan perhitungan pada penilaian kualifikasi dan kompetensi ASN sehingga realisasi pada sasaran kegiatan ini tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan tahun 2024.
11. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kesebelas yaitu, “Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh secara akuntabel sebesar Rp. 17.994.529.676,- atau 66,40% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini termasuk yang terbesar karena dipergunakan untuk pembelanjaan gaji, keperluan perkantoran, Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan barang dan jasa serta penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah berdampak pada terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh. Target indikator sudah tercapai pada tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesebelas adalah efisien, karena capaian sasaran (112,13%) yang dihasilkan sudah melebihi dari anggaran (99,81%) yang dikeluarkan.

Table 120.Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,9	95.69	100,83	705.777.600	705.504.991	99,96	1,01	0,01	100%
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,2	94,07	105,46	510.790.300	510.525.702	99,95	1,06	0,06	100%

3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,3	93,04	98,66	594.456.500	594.243.878	99,96	0,99	0,01	100%
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,7	89,15	99,39	419.174.400	418.977.074	99,95	0,99	0,01	100%
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90	96,10	106,78	46.368.000	46.223.204	99,69	1,07	0,07	100%
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	141.928.000	141.924.999	100,00	1,00	0,00	100%
7	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,3	82,91	119,64	44.667.000	44.664.479	99,99	1,20	0,20	100%
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0	120,0	120,0	284.290.000	284.145.203	99,95	1,20	0,20	100%
9	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	71,7	82,28	114,76	278.859.500	278.759.948	99,96	1,15	0,15	100%
10	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	85,5	90,16	105,45	877.236.500	876.129.649	99,87	1,06	0,06	100%
11	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banda Aceh	4,45	4,90	110,11	24.621.250	23.522.000	95,54	1,15	0,15	100%
12	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,0	100,0	100,0	70.586.000	70.583.972	100,0	1,00	0,00	100%

13	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kab/Kota	95,00	97,71	102,85	18.496.000	18.495.918	100,0	1,03	0,03	100%
14	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan	94,9	96,15	101,32	198.103.500	197.651.370	99,77	1,02	0,02	100%
15	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	88	88	100,0	642.619.000	642.572.571	99,99	1,00	0,00	100%
16	Jumlah desa pangan aman	32	32	100,0	1.107.412.000	1.104.342.490	99,72	1,00	0,00	100%
17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	24	24	100,0	525.600.000	520.709.158	99,07	1,01	0,01	100%
18	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0	120,0	120,0	84.143.600	84.058.884	99,90	1,20	0,20	100%
19	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,0	120,0	120,0	57.580.000	57.472.331	99,81	1,20	0,20	100%
20	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	82,00	100,0	121,95	746.471.000	739.472.026	99,06	1,23	0,23	95%
21	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	87,00	87,75	100,86	1.135.344.000	1.133.433.680	99,83	1,01	0,01	100%
22	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banda Aceh yang optimal	3	3,6	120,0	145.950.000	145.950.000	100,0	1,20	0,20	100%

23	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	84,00	84,45	100,54	16.826.100	16.166.551	96,08	1,05	0,05	100%
24.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,2	99,49	103,42	5.255.000	5.254.500	99,99	1,03	0,03	100%
25	Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,6	80,37	104,92	22.476.450	21.157.477	94,13	1,11	0,11	100%
26	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	98,25	98,65	100,41	26.504.700	25.185.642	95,02	1,06	0,06	100%
27	Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh	88,64	87,49	98,70	208.706.000	208.164.527	99,74	0.99	0,01	100%
28	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82,4	81,48	98,88	82.031.000	81.857.818	99,79	0,99	0,01	100%
29	Nilai Pengelolaan Kearsipan	94,08	95,35	101,35	14.762.000	14.760.560	99,99	1,01	0,01	100%
30	Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Banda Aceh	90,52	87,14	96,27	93.402.000	93.306.565	99,90	0,96	-0,04	Tidak Efisien
31	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	89,87	95,36	106,11	17.723.107.000	17.609.585.541	99,36	1,07	0,12	100%
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	100,0	120,0	155.010.600	155.008.825	100,0	1,20	0,20	100%
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89,00	91,14	102,40	112.800.000	112.765.593	99,97	1,02	0,02	100%
34	Persentase realisasi penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00	74,73	120,0	117.250.000	117.169.717	99,93	1,25	0,25	95%

Dari 34 (tiga puluh empat) Indikator kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh, hanya satu indikator kinerja yang tidak efisien yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perhitungan kualifikasi dan kompetensi ASN. Pada tahun 2024 ini juga indikator ini tidak dimasukkan dalam perhitungan NPSS (exclude).

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Koordinasi	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Kegiatan	97,845,000 14	97,775,588 14	99.93 100.00	100.07	1	0.001	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pelayanan Publik Lainnya	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Dokumen	207,097,000 304	206,954,003 304	99.93 100.00	100.07	1	0.001	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan Standar oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : UMKM	70,584,000 19	70,583,972 19	100.00 100.00	100.00	1	0.000	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pemantauan Produk	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Laporan	324,746,000 1	323,939,403 1.00	99.75 100.00	100.25	1	0.002	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Komunikasi Publik	3165.BMB.001	Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Jenis Layanan	131,487,000 50	127,089,420 82	96.66 164.00	169.67	1	0.70	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input : Dana Output : Paket	167,500,000 1	167,385,310 1.00	99.93 100.00	100.07	1	0.001	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Input : Dana Output : Unit	208,500,000 22	208,500,000 22	100.00 100.00	100.00	1	0.00	Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Standarisasi Lembaga	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Lembaga	1,528,784,000 1	1,526,597,887 1.00	99.86 100.00	100.14	1	0.001	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Perkara Hukum Badan Usaha	3165.QCD.U12	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Banda Aceh	Input : Dana Output : Perkara	648,626,000 6	641,696,438 6	98.93 100.00	101.08	1	0.01	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Input : Dana Output : Lembaga	642,619,000 88	642,572,571 88	99.99 100.00	100.01	1	0.00	Efisien
			3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Input : Dana Output : Lembaga	1,107,412,000 32	1,104,342,490 32	99.72 100.00	100.28	1	0.00	Efisien
			3165.QDB.003	Pasar pangan aman berbasis komunitas	Input : Dana Output : Lembaga	525,600,000 24	520,709,158 24	99.07 100.00	100.94	1	0.01	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BBPOM Banda Aceh	Input : Dana Output : Orang	157,045,000 979	156,593,620 1,546	99.71 157.92	158.37	1	0.58	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	486,955,000 448	486,547,175 560	99.92 125.00	125.10	1	0.25	Efisien
			3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	916,340,000 1,293	915,930,721 1,335	99.96 103.25	103.29	1	0.03	Efisien
			3165.QIA.008	Sampel Pangan Fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	Input : Dana Output : Produk	46,368,000 75	46,223,204 77	99.69 102.67	102.99	1	0.03	Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : Lembaga	67,520,000 65	67,447,000 79	99.89 121.54	121.67	1	0.22	Efisien
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh BB/BBPOM	Input : Dana Output : Lembaga	1,376,118,000 902	1,374,973,693 965	99.92 106.98	107.07	1	0.07	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.RAB.001	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Paket	828,047,000 1	827,993,481 1	99.99 100.00	107.07	1	0.071	Efisien
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (063.01.WA)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (6384)	Layanan Perkantoran	6384.EBA.994.001	Layanan Perkantoran	Input : Dana Output : Bulan	17,699,412,000 1	17,585,891,708 1	99.36 100.00	100.65	1	0.01	Efisien

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2024 adalah 107,22 dengan kategori Istimewa. Perspektif Internal process memiliki capaian tertinggi 112,36 disusul Perspektif Learning and Growth 107,40 dan Perspektif Stakeholder 101,89%.

a. Pada Perspektif stakeholder, 3 (tiga) Sasaran Kegiatan telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik.
b. Pada Perspektif Internal Process, 4 (empat) Sasaran Kegiatan di level ini telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik.
c. Pada Perspektif Learning and Growth, 2 (dua) Sasaran Kegiatan berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik namun Sasaran Kegiatan 9 (Sembilan) Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal tidak mencapai targetnya di tahun 2024.
d. Terdapat 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja berhasil memperoleh kinerja sangat baik, 5 (lima) IKU berkinerja baik, 5 (lima) Indikator Kinerja berkinerja cukup, dan 2 (dua) IKU berkinerja tidak dapat disimpulkan.
e. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang nilainya di atas 120 % namun dalam perhitungan NPSS menjadi 120 % yaitu, Persentase Keberhasilan Penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri sehingga capaian kinerja menjadi 24 (dua puluh empat) yang berhasil memperoleh kinerja sangat baik, 5 (lima) IKU berkinerja baik dan 5 (lima) IKU berkinerja cukup.
f. 5 (lima) Indikator Kinerja berkinerja cukup, yaitu:
    - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 98.66%.
    - Nilai Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 99.39%.
    - Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh 98.70.

- Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 98.88.
- Indeks Profesional ASN Balai Besar POM di Banda Aceh 96.27.

g. Balai Besar POM di Banda Aceh pada tahun 2024 telah merealisasikan Rp. **27.099.746.842** atau mencapai 99,49% dari anggaran DIPA Nomor SP DIPA-063.01.2.432790/2023 sebesar **Rp. 27.238.605.000**.

h. Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh telah disusun dan dievaluasi dengan kriteria adalah efektif dan efisien mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan di akhir periode Renstra dengan perolehan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 107.22 berkategori **Istimewa.**

4.2 Saran

1. Melakukan perencanaan anggaran dengan tepat agar semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Menyusun langkah-langkah untuk Indikator Kinerja yang capaiannya belum mencapai target.
3. Mengadakan pelatihan kompetensi kepada pegawai yang mendukung kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Yudi Noviandi
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Taruna Ikrar
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 12 September 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Yudi Noviandi	Taruna Ikrar

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.9 Persentase
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.2 Persentase
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.3 Persentase
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.7 Persentase
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90 Persentase
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 Persentase
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69.3 Persentase
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 Persentase
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.7 Persentase
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	85.5 Persentase
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.45 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 Persentase
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 Persentase
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.9 Nilai
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	88 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	32 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	24 Pasar
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persentase
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 Persentase
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82 Persentase
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	87 Persentase
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai

7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84 Nilai
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.2 Nilai
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76.6 Nilai
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	98.25 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	88.64 Nilai
		03 - Nilai AKIP UPT	82.4 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	94.08 Nilai
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.52 Nilai
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.87 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83.33 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	89 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 Persentase

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 29,029,899,000 (Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11,330,487,000

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	17,699,412,000

Banda Aceh, 12 September 2024

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Yudi Noviandi	Taruna Ikrar



Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh Predikat terbaik ke-1 **Kategori Implementasi KKP Terbaik Periode Semester I Tahun 2024** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh



Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh Predikat terbaik ke-II **Kategori Implementasi KKP Terbaik Periode Semester II Tahun 2024** dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh



Balai Besar POM di Banda Aceh memperoleh piagam penghargaan dengan **Kategori "The Most Engaging Instagram Account"** dari Badan POM dalam rangka HUT BPOM Tahun 2024

Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil meraih sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan Indeks Pelayanan Publik kategori **“Pelayanan Prima”**



Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil mendapat anugerah “**Keterbukaan Informasi Publik**” di Lingkungan BPOM Tahun 2024



BADAN POM

2024



BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
WBK
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
2023
ZONA INTEGRITAS

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#Kolabor Siap WBBM

@bpom.aceh

@bpom.aceh

bbpom.aceh

aceh.pom.go.id

08116853301

JL. Mohd Daud Beureuh No.110, Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh